



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **9** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2044 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
16. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III yang memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V yang memuat penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian RPJMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

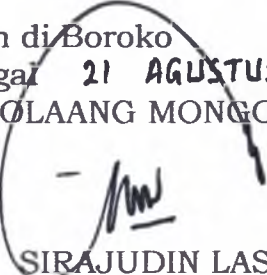
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/non alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **21 AGUSTUS 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **21 AGUSTUS 2025**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2025 NOMOR **9**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA: **(9/W.11/2025)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 149



PEMERINTAH
KABUPATEN
BOLAANG
MONGONDOW
UTARA

RANCANGAN AKHIR
RPJMD
2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GRAFIK..... vii

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1 - 1

 1.1 Latar Belakang..... 1 - 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1 - 3

 1.3 Hubungan Antar Dokumen..... 1 - 8

 1.4 Maksud dan Tujuan..... 1 - 17

 1.5 Sistematika Penulisan..... 1 - 18

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... 2 - 1

 2.1 Gambaran Umum Kondisi daerah..... 2 - 1

 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi..... 2 - 1

 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 2 - 42

 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2 - 78

 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum..... 2 - 93

 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal..... 2 - 145

 2.1.6. Kerja Sama Daerah..... 2 - 159

 2.2 Gambaran Keuangan Daerah..... 2 - 171

 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis..... 2 - 185

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 3 - 1

 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... 3 - 1

 3.1.1. Visi dan Misi..... 3 - 1

 3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029..... 3 - 3

 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 3 - 9

 3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029..... 3 - 9

 3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029..... 3 - 12

BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA	
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	4 - 1
	4.1 Program Perangkat Daerah.....	4 - 1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	4 - 5
BAB V	PENUTUP.....	5 - 1
	5.1 Pedoman Transisi.....	5 - 1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	5 - 2
	5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	5 - 3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah per Kecamatan.....	2 - 1
Tabel 2.2	Status Penyediaan Pangan Indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 8
Tabel 2.3	Status Penyediaan Air Indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 11
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 20
Tabel 2.5	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Administrasi Kecamatan.....	2 - 22
Tabel 2.6	Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 24
Tabel 2.7	Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 26
Tabel 2.8	Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 29
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 34
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 36
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 37
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Tahun 2024 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Kecamatan....	2 - 39
Tabel 2.13	Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.....	2 - 40
Tabel 2.14	Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.....	2 - 42
Tabel 2.15	Kontribusi PDRB (ADHB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.....	2 - 45
Tabel 2.16	Gambaran Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2 - 48
Tabel 2.17	Perkembangan IPM dan Selisih IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terhadap IPM Nasional Tahun 2020 -2024.....	2 - 58

Tabel 2.18	Perkembangan IPM dan Selisih IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terhadap IPM Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024.....	2 - 59
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024.....	2 - 98
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024.....	2 - 98
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024.....	2 – 100
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Bidang Trantibunlinmas Tahun 2020-2024.....	2 - 103
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2020-2024...	2 - 104
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024.....	2 - 105
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	2 - 106
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024.....	2 - 117
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.....	2 - 118
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.....	2 - 119
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	2 - 120
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022-2024.....	2 - 121
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024.....	2 - 123
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	2 - 124
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024.....	2 - 126
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	2 - 127
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024.....	2 - 128
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Bidang Pertanian Tahun 2020-2024.....	2 - 129
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Tahun 2020 - 2024.....	2 - 133
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024.....	2 - 134

Tabel 2.39	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	2 - 136
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024.....	2 - 137
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Tahun 2020-2024.....	2 - 138
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Bidang Keuangan Tahun 2020-2024.....	2 - 139
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024.....	2 - 140
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2020-2024.....	2 - 142
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2020-2024.....	2 - 143
Tabel 2.46	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024.....	2 - 146
Tabel 2.47	Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024.....	2 - 147
Tabel 2.48	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024.....	2 - 150
Tabel 2.49	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.....	2 - 152
Tabel 2.50	Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020-2024.....	2 - 154
Tabel 2.51	Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024.....	2 - 157
Tabel 2.52	Daftar Kerja Sama Daerah	2 - 161
Tabel 2.53	Realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 174
Tabel 2.54	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 178
Tabel 2.55	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2026-2030.....	2 - 181
Tabel 2.56	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029.....	2 - 184
Tabel 2.57	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029.....	2 - 184
Tabel 2.58	Perumusan Isu Strategis Daerah	2 - 209
Tabel 3.1	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 4
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Aksi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 6

Tabel 3.3	Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	3 - 8
Tabel 3.4	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 10
Tabel 3.5	Strategi RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 10
Tabel 3.6	Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 14
Tabel 4.1	Sinkronisasi Program Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	4 - 5
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	4 - 7
Tabel 4.4	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	4 - 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 14
Grafik 2.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 15
Grafik 2.3	Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 16
Grafik 2.4	Jumlah Pelanggan Listrik Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023.....	2 - 16
Grafik 2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 18
Grafik 2.6	Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Limbah Aman Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 19
Grafik 2.7	Indeks Resiko Bencana Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 30
Grafik 2.8	Indeks Ketahanan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 31
Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2 - 44
Grafik 2.10	Angka Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2 - 47
Grafik 2.11	PDRB Per Kapita (ADHB) Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2 - 53
Grafik 2.12	Rasio Gini Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2 - 55
Grafik 2.13	IPM Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2 - 57
Grafik 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2 - 60
Grafik 2.15	Usia Harapan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 62
Grafik 2.16	Prevalensi Stunting Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024 (SSGI/SKI).....	2 - 63
Grafik 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 65

Grafik 2.18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 66
Grafik 2.19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 69
Grafik 2.20	Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024..	2 - 74
Grafik 2.21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 76
Grafik 2.22	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 76
Grafik 2.23	Angka Beban Ketergantungan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 80
Grafik 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 82
Grafik 2.25	Indeks Inovasi Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 83
Grafik 2.26	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 84
Grafik 2.27	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 85
Grafik 2.28	Indeks Desa Membangun Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 92
Grafik 2.29	Indeks SPBE Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 94
Grafik 2.30	Indeks Pelayanan Publik Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 94
Grafik 2.31	Presentase Luas Areal Kawasan Kumuh Tahun 2020-2024.....	2 - 101
Grafik 2.32	Indeks Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 108
Grafik 2.33	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 109
Grafik 2.34	Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 114
Grafik 2.35	Presentase Agenda DPRD Yang Terlaksana Tepat Waktu Tahun 2020-2024.....	2 - 136
Grafik 2.36	Persentase ASN yang Berkompeten Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024.....	2 - 140
Grafik 2.37	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Tahun 2020-2024.....	2 - 141

Grafik 2.38 Indeks Inovasi Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Utara Tahun 2020-2024..... 2 - 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya.....	1 - 10
Gambar 1.2	Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	1 - 11
Gambar 1.3	Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	1 - 12
Gambar 1.4	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW.....	1 - 14
Gambar 1.5	Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029....	1 - 15
Gambar 1.6	Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	1 - 16
Gambar 2.1	Peta Morfologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2 - 2
Gambar 2.2	Peta Hidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 6
Gambar 2.3	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 10
Gambar 2.4	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 13
Gambar 2.5	Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 25
Gambar 2.6	Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2 - 27
Gambar 2.7	Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2 - 32
Gambar 2.8	Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2 - 33
Gambar 3.1	Pemetaan Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan dan Outcome RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 11
Gambar 3.2	Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029.....	3 - 12

Gambar 3.3 Rantai Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Aksi dan Program..... 3 - 13

Gambar 4.1 Integrasi Janji Politik Kedalam RPJMD 2025-2029 4 - 1

Gambar 4.2 Crosswalk Misi, Tujuan, Janji Politik dan SKPD Pengampu..... 4 - 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

URAIAN RPJMD TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang terpilih, serta sebagai respons terhadap tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi daerah dalam kurun waktu tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2025-2029 merupakan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2025-2029, Bapak Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev. dan Bapak Mohammad Aditya Pontoh, S.IP yang dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2025-2029 juga merupakan perumusan visi dan misi pembangunan menuju Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berdaya saing.

Dokumen RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan daerah baik per Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terutama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan selama lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian mengimplementasikan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

RPJMD disusun berdasarkan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan *top-down* serta *bottom up*. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapannya dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RPJMD, penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD. Penyusunan Dokumen RPJMD ini merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan bagian dari tahapan persiapan penyusunan RPJMD, dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Periode 2025-2029 diproyeksikan sebagai masa pemulihan dan transformasi pascapandemi, di mana pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan seimbang. Selain itu, perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika global menuntut daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam merancang strategi pembangunan. RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan capaian pembangunan sebelumnya, evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, serta aspirasi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara strategis, RPJMD memiliki peran fundamental dalam mengarahkan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan, serta menjadi pedoman bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, RPJMD juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Tujuan utama dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029 diarahkan untuk:

- **Mengatur arah pembangunan daerah**, yakni sebagai landasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan lima tahunan;
- **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**, melalui program dan kegiatan pembangunan yang menyasar peningkatan kualitas hidup, penurunan angka kemiskinan, serta penguatan kapasitas sosial masyarakat;
- **Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah**, dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah, pengembangan sektor-sektor produktif dan strategis, serta peningkatan daya saing daerah;
- **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan esensial masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Sebagai tindak lanjut dari amanat pembangunan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkomitmen penuh untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029 tidak hanya bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara berwawasan lingkungan, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

a. Peraturan perundangan yang berlaku:

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

b. Landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);

26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor ...);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 75); dan
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 139).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029.

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan Pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RTRW

Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2045, serta RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2033.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan dan kualitas perencanaan yang berwawasan lingkungan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029 dilakukan secara terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS RPJMD merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang harus menjadi perhatian utama dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara RPJMD dan KLHS RPJMD tercermin dalam proses penyusunan yang simultan dan saling melengkapi. Hasil analisis dari KLHS, termasuk identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko perubahan iklim, serta potensi dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan, menjadi dasar dalam penentuan arah pembangunan jangka menengah daerah yang lebih responsif terhadap keberlanjutan.

KLHS RPJMD juga berperan dalam memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan indikator kinerja yang dirumuskan dalam RPJMD selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Oleh karena itu, keterpaduan antara dokumen RPJMD dan KLHS menjadi krusial untuk menjamin kualitas pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berketahanan lingkungan.

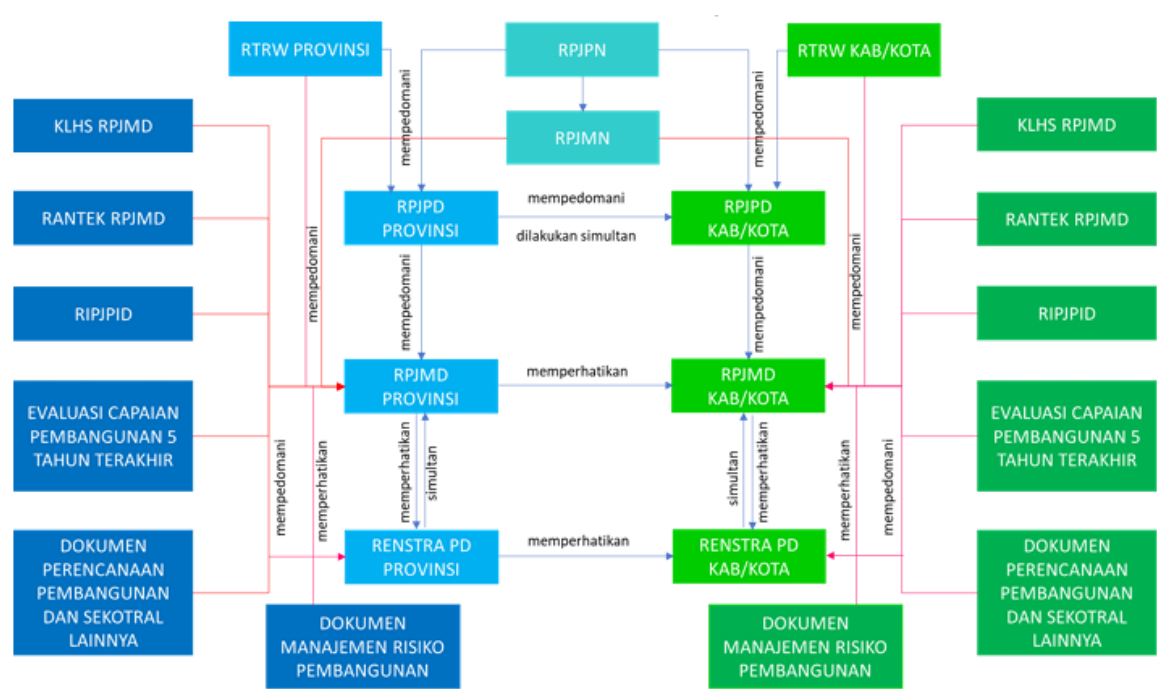
Lebih lanjut, RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam hal ini, RPJMD terhubung secara langsung dengan dokumen perencanaan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pembangunan sektoral dan pengaturan pemanfaatan ruang. Selain itu, RPJMD juga bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, termasuk:

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai dasar untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan secara utuh ke dalam setiap tahapan perencanaan;

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), guna menjamin pembangunan yang ramah lingkungan dan berdaya dukung;
- Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID), sebagai upaya mendorong inovasi, penelitian, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik di daerah.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



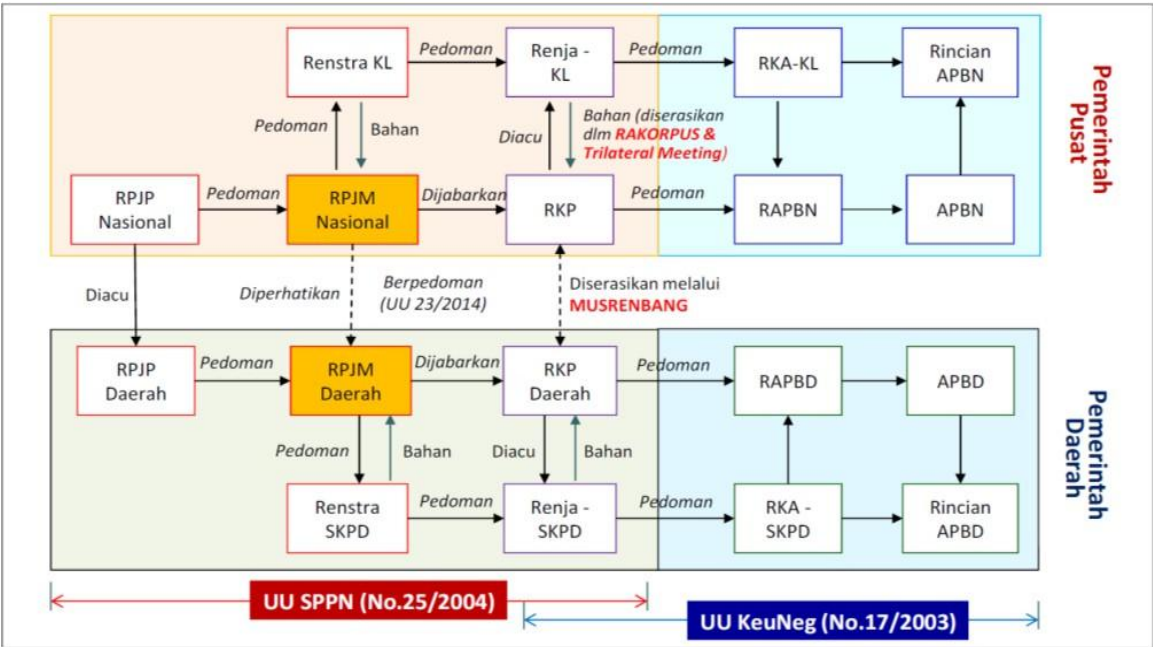
Sumber Instruksi Mendagri Nomor 2, 2025

1.3.2 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dan RPJMN

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan mengintegrasikan arah kebijakan serta sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2045.

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya dalam menjabarkan visi "Indonesia Emas 2045" ke dalam konteks daerah. Penjabaran ini mencakup sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, baik dalam aspek pembangunan manusia, penguatan perekonomian lokal, pengembangan infrastruktur wilayah, pengelolaan lingkungan hidup, maupun reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Gambar 1.2 Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Nasional



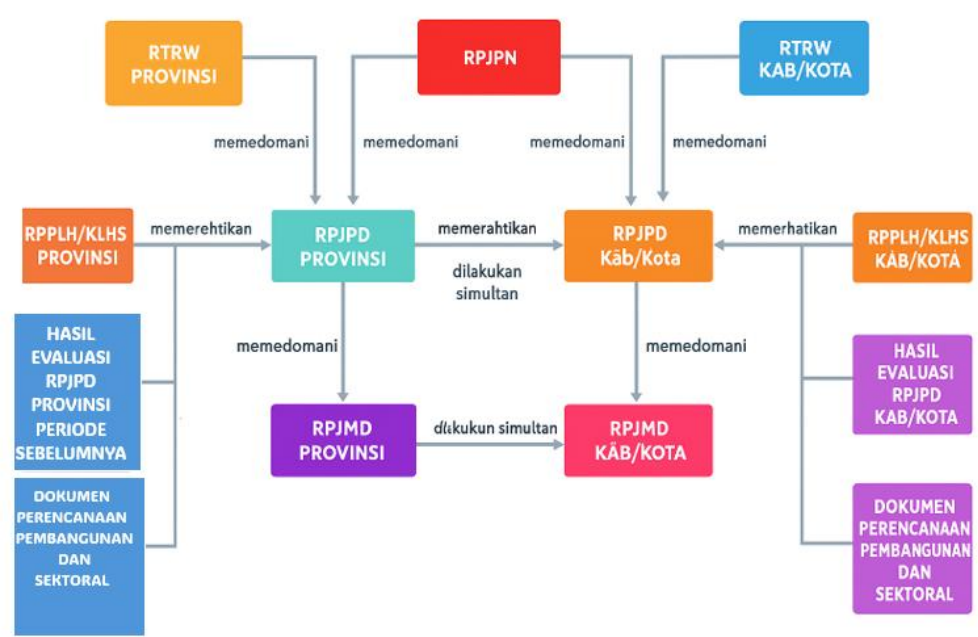
Sumber : Bappenas, 2017

1.3.3 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah yang disusun dalam rangka menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD ini mengacu dan bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan daerah jangka panjang.

RPJPD menetapkan visi pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, yang dijabarkan ke dalam misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah setiap lima tahun. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen operasional dalam tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari keseluruhan periode RPJPD. Dalam konteks ini, RPJMD 2025–2029 merupakan implementasi tahap awal atau pertama dari RPJPD 2025–2045, yang memuat prioritas pembangunan lima tahunan yang berkontribusi terhadap pencapaian visi jangka panjang daerah.

Gambar 1.3 Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



Sumber : Inmendagri 1, 2024

1.3.4 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara memuat arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan yang harus menjadi acuan dan rujukan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RPJMD kabupaten, dilakukan penelaahan terhadap dokumen RPJMD provinsi untuk memastikan bahwa sasaran dan program pembangunan daerah kabupaten tidak bertentangan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi.

Hubungan antara kedua dokumen ini tercermin dalam berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, dan reformasi tata kelola pemerintahan. Dengan menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan provinsi, diharapkan tercipta sinergi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

1.3.5 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

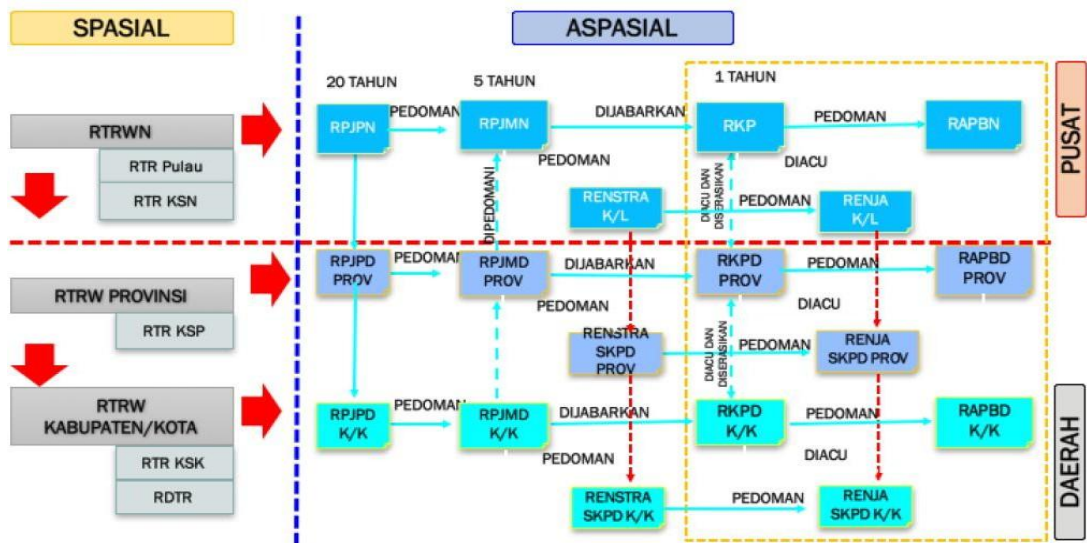
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 memperhatikan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan.

Agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD harus memperhatikan kesesuaian dengan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, mendorong pemanfaatan ruang yang efisien, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

RPJMD Tahun 2025–2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memanfaatkan arahan RTRW sebagai landasan spasial dalam penentuan lokasi dan sebaran program pembangunan, seperti pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, kawasan strategis, infrastruktur dasar, kawasan pertanian, perikanan, industri, serta pariwisata. Dengan demikian, integrasi RPJMD dan RTRW menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan daerah yang terarah, harmonis, dan berwawasan lingkungan.

Keterhubungan RPJMD dengan RTRW sebagaimana digambarkan dalam Gambar berikut:

Gambar 1.4 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW

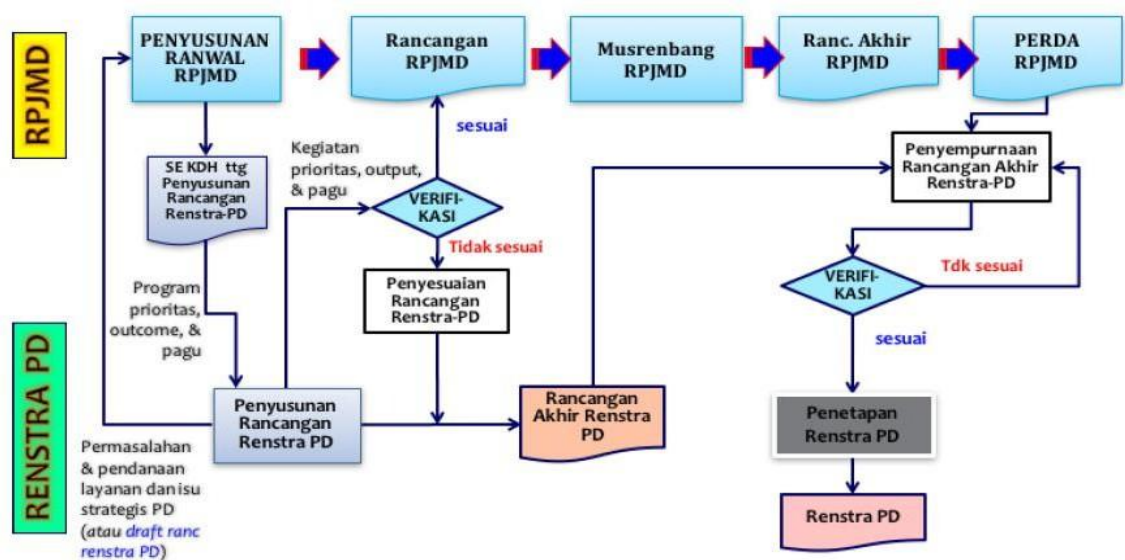


Sumber : Permendagri 86, 2017

1.3.6 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Renstra

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1.5 Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



Sumber : Permendagri 86, 2017

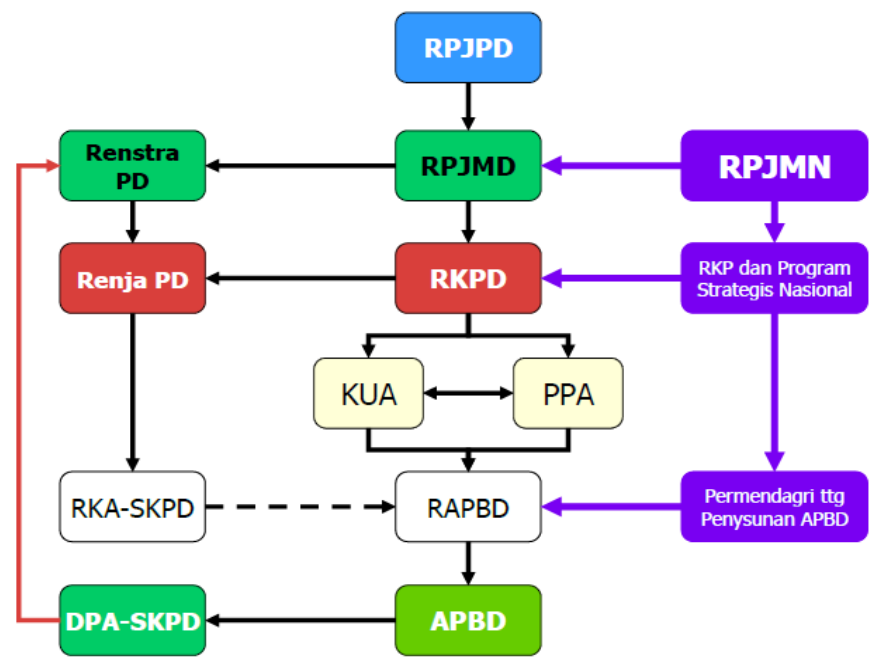
1.3.7 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk mengoperasionalkan RPJMD dalam pelaksanaan pembangunan tahunan, disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Hubungan antara RPJMD dan RKPD bersifat hierarkis dan fungsional. Secara hierarkis, RKPD tunduk pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD. Secara fungsional, RKPD bertugas memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Keterhubungan RPJMD dengan RKPD sebagaimana pada gambar berikut ini:

Gambar 1.6 Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Sumber : Permendagri 86, 2017

1.3.8 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2029, KLHS disusun secara paralel dan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah. KLHS membantu mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di daerah, seperti penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, degradasi sumber daya alam, kerentanan terhadap bencana, serta kesenjangan sosial dan ekonomi.

Melalui integrasi KLHS dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan lima tahunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, rekomendasi kebijakan dalam dokumen KLHS menjadi rujukan dalam perumusan strategi dan program prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian, keterhubungan antara RPJMD dan KLHS merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menjalankan pembangunan yang berwawasan lingkungan, adil secara sosial, dan berkelanjutan bagi generasi masa kini dan yang akan datang.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025-2029 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Termasuk juga rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode 2025-2029 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus mengacu pada Dokumen RPJMD ini.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2025 sampai tahun 2029, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
4. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Maksud dan Tujuan;
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah;
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah;
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

- 5.1. Pedoman Transisi;
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan;
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki luas wilayah 167.261 Ha (1.672,61 Km²) ±11,54 persen dari luas Sulawesi Utara dengan batas wilayah sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Secara administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 6 (enam) Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kecamatan

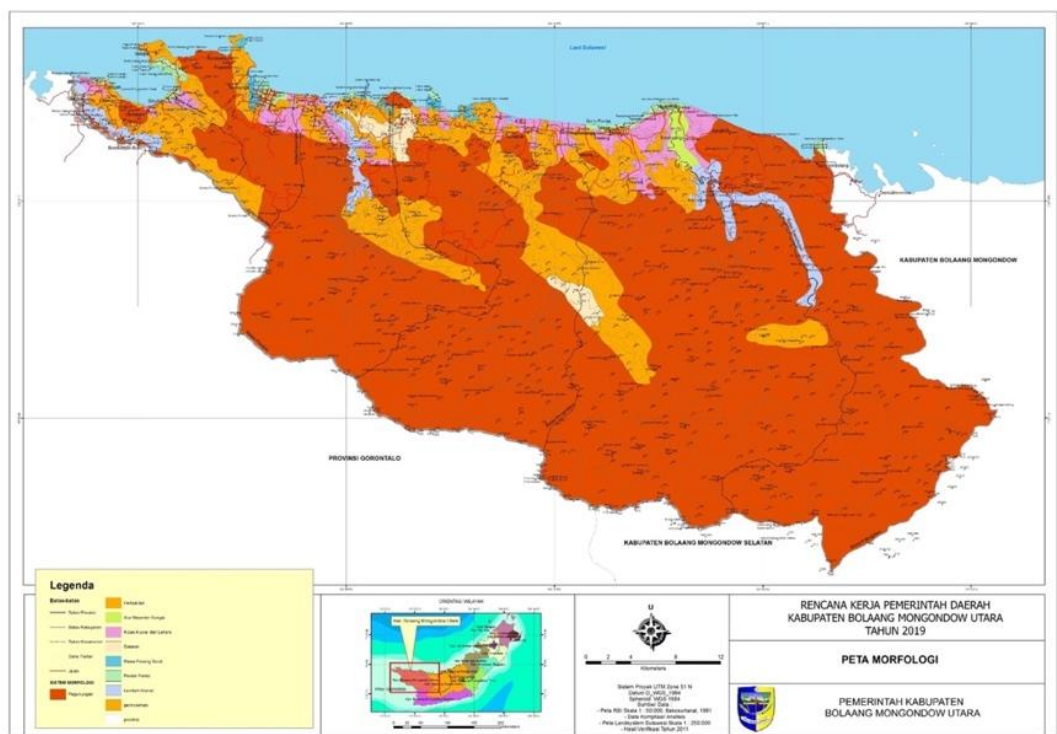
No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luasan (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sangkub	16 desa	418,40
2.	Bintauna	15 desa & 1 Kel.	348,94
3.	Bolangitang Timur	20 desa	422,96
4.	Bolangitang Barat	18 desa	312,56
5.	Kaidipang	15 desa	95,79
6.	Pinogaluman	22 desa	73,96
Bolaang Mongondow Utara		106 desa & 1 kel.	1.672,61

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Secara astronomis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak di antara 0°-30' LU dan 1°-0' LU, serta 123° 01' 26,4" BT dan 124° 01' 30,2" BT. Lokasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilihat secara posisi geostrategic mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, merupakan “pintu gerbang” Provinsi Sulawesi Utara yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Utara dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian tengah Sulawesi. Selain itu posisi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi juga dapat menghubungkan Provinsi Sulawesi Utara dengan negara tetangga yang terletak di bagian utara Indonesia seperti Filipina (Davao).

Kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara datar sampai berombak (25,03 persen), berombak sampai berbukit (40,22 persen) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi topografi tanah di kecamatan Sangkub rata dan yang berbukit di desa Sidodadi hingga 170 mdpl dan desa Pangkusa hingga 50 mdpl.

Gambar 2.1 Peta Morfologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber : Peraturan Daerah No. 3/2013 tentang RTRW, 2025

Di kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di desa Mome dan Huntuk s/d 8 mdpl. Di kecamatan Bolangitang Timur juga sebagian besar dataran kecuali desa Mokodidek berbukit $\pm$ 60 mdpl dan desa Biontong $\pm$ 18 mdpl. Wilayah berbukit juga terdapat di desa Solo dan Komus Dua kecamatan Kaidipang $\pm$ 15 mdpl, dan desa-desa Komus satu dan Batu Tajam Kecamatan Pinogaluman $\pm$ 25 mdpl. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh lima faktor yaitu: iklim, bahan induk, topografi, organisme, dan waktu. Di antara lima faktor tersebut, bahan induk dan topografi tampaknya berpengaruh lebih dominan, sehingga dijumpai sifat-sifat tanah yang bervariasi.

Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia skala 1: 250.000 lembar Kotamobagu dan Siau 2316 dan 2317 (Puslitbang Geologi, 1997) daerah penelitian terdiri dari enam formasi batuan, yaitu: aluvium dan endapan pantai (Qal) berupa pasir, lempung, lumpur, kerikil, dan kerakal. Formasi tinombofases sedimen (Tets) berupa serpih dan batupasir dengan sisipan

batugamping dan rijang. Batuan gunungapi bilungala (Tmbv) berupa breksi, tuf dan lava bersusunan andesit, dasit, dan riolit. Diorit bone (Tmb) berupa diorit kuarsa, diorit, granodiorit dan granit. Formasi tinombofasies gunungapi (Tetv) berupa lava basalt, lava andesit, selingan batupasir hijau, batulanau hijau, sedikit konglomerat, batugamping merah dan kelabu. Anggota batugamping formasi tapadaka (Tmtl) berupa Batu gamping kelabu terang pejal, mengandung pecahan batuan gunungapi hijau. dan formasi tapadak (Tmts) berupa batupasir, grewake, batupasir terkesikkan, dan serpih.

Hasil identifikasi bentuk morfologi DAS Sangkup Langi tergolong kategori DAS memanjang dengan nilai Rc 0,25. Bentuk lahan atau geomorfologi merupakan salah satu parameter dalam karakteristik morfologi DAS yang sangat mempengaruhi perilaku hidrologi DAS seperti debit puncak, besar run off yang pada akhirnya menentukan besar simpanan air tanah.

Secara hidrologis, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Utara termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Sangkub Langi. Luas SWP DAS Sangkub Langi adalah 287.019 Ha, yang terbagi dalam 7 (tujuh) SWP Sub DAS, yaitu:

- 1) SWP Sub DAS Ayong memiliki luas 32.902 Ha yaitu sekitar 11.46 % dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Ayong memiliki 8 sungai yang secara individual mengalir ke Laut Sulawesi. Di antaranya adalah sungai-sungai Ayong, Modapaan, Pangi, Sauk, Bayabuta dan Baturapa. Sungai Ayong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang di antara yang lainnya.
- 2) SWP Sub DAS Biontong SWP Sub DAS Biontong memiliki luas 21.333 Ha yaitu sekitar 7.43 % dari luas total DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biontong memiliki 6 sungai yang secara II - 9 individual mengalir ke Laut Sulawesi. Di antaranya adalah sungai-sungai Bohabak, Biontong, Mome, dan Nono. Sungai Biontong dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang di antara yang lainnya.
- 3) SWP Sub DAS Biyou SWP Sub DAS Biyou memiliki luas 42.906 Ha yaitu sebesar 14.95% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Biyou memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Biyou merupakan cabang sungai dari sungai Sangkub.
- 4) SWP Sub DAS Bolangitang SWP Sub DAS Bolangitang memiliki luas 53.691 Ha yaitu sebesar 18.71% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Bolangitang memiliki 16 sungai yang secara individual

mengalir ke Laut Sulawesi. Di antaranya adalah sungai Keakar, sungai Nunuka, sungai Saleo, dan Sungai Bolangitang. Sungai Bolangitang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.

- 5) SWP Sub DAS Gambuta SWP Sub DAS Gambuta memiliki luas 35.061 Ha yaitu sebesar 12.22% dari total luas DAS Sangkub Langi. SWP Sub DAS Gambuta memiliki outlet pada sungai Sangkub. Sungai Gambuta merupakan cabang sungai dari sungai Sangkub. a) SWP Sub DAS Lolak SWP Sub DAS Lolak memiliki luas 20.582 Ha yaitu sebesar 7.17% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 3 sungai pada SWP Sub DAS Lolak yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai Dulangon, sungai Motobang, dan sungai Lolak. Sungai Lolak dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.
- 6) SWP Sub DAS Maelang SWP Sub DAS Maelang memiliki luas 15.715 Ha yaitu sebesar 5.48% dari total luas DAS Sangkub Langi. Terdapat 22 sungai pada SWP Sub DAS Maelang yang mengalir menuju Laut Sulawesi diantaranya sungai Panggi, sungai Domisil, sungai Moilobai, sungai Posyanga, sungai Bolangat, dan sungai Maelang. Sungai Maelang dipilih menjadi sungai utama karena memiliki panjang sungai yang terpanjang diantara yang lainnya.
- 7) SWP Sub DAS Sangkub SWP Sub DAS Sangkub memiliki luas 64.830 Ha yaitu sebesar 22.59% dari total luas DAS Sangkub Langi. Hanya terdapat satu sungai pada SWP Sub DAS Sangkub yang mengalir menuju Laut Sulawesi yaitu sungai Sangkub.

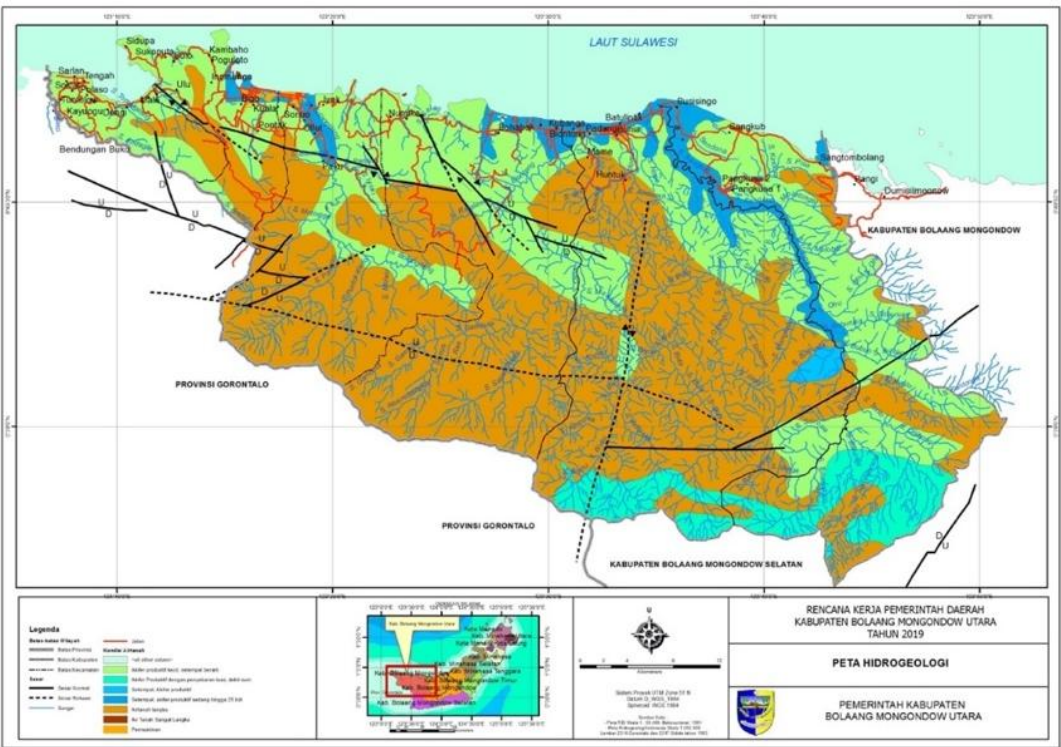
Sungai Andagile merupakan salah satu unsur jaringan sungai yang memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomi bagi wilayah perbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Gorontalo/Sulawesi Utara. Secara administratif, aliran dan zona riparian Sungai Andagile membentang melintasi beberapa kecamatan. Sungai ini menjadi elemen penting dalam sistem sumber daya air lokal yang menopang kebutuhan domestik, pertanian tradisional, serta aktivitas kebudayaan masyarakat pesisir dan dataran rendah. Keberadaan Sungai Andagile, selain bernilai ekologis, juga menuntut pengelolaan lintas wilayah mengingat dampak hidrologis dan tata ruangnya yang meluas.

Dalam konteks hidrologi, Sungai Andagile berada dalam pengaruh Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Sangkub Langi. Meskipun tidak termasuk sebagai sungai utama pada daftar sub-DAS Sangkub Langi, Sungai Andagile memiliki kontribusi signifikan di tingkat lokal, terutama pada wilayah perbatasan dan kawasan pesisir. Sungai ini menjadi sumber air untuk kebutuhan domestik, irigasi pertanian, dan perikanan darat. Selain itu, Sungai Andagile berfungsi sebagai ruang publik untuk kegiatan budaya, antara lain ritual Mandi Safar.

Kondisi fisik Sungai Andagile saat ini menunjukkan tanda-tanda degradasi, seperti sedimentasi, pendangkalan, dan penurunan kualitas air. Faktor-faktor tersebut diperburuk oleh alih fungsi lahan di wilayah hulu. Peristiwa jebolnya tanggul di Atinggola menjadi bukti bahwa infrastruktur pengendalian banjir memerlukan peningkatan dan penyesuaian terhadap dinamika hidrologi.

Pengelolaan Sungai Andagile perlu disinergikan dengan strategi pengelolaan DAS Sangkub Langi. Prioritas intervensi meliputi pemetaan sub-DAS yang menjadi hulu Andagile, rehabilitasi lahan kritis, penataan riparian, penguatan infrastruktur adaptif, serta pengembangan sistem peringatan dini. Upaya ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, mengingat keterhubungan hidrologis antar-sub-DAS dalam satu kesatuan SWP.

Gambar 2.2 Peta Hidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber : Peraturan Daerah No. 3/2013 tentang RTRW, 2025

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan dapat menjadi penggerak utama dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta pertambangan, yang apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan, dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah.

Di sektor pertanian, wilayah ini memiliki lahan yang relatif subur dan cocok untuk pengembangan komoditas strategis seperti padi, jagung, kelapa, kakao dan cengkeh. Produktivitas pertanian memiliki prospek yang baik seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar dan peluang pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal. Selain itu, pengembangan pertanian terpadu, termasuk pertanian organik dan modernisasi alat produksi, menjadi arah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sektor perikanan dan kelautan juga menyimpan potensi besar. Letak geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi memberikan akses terhadap sumber daya ikan dan biota laut lainnya. Potensi ini mencakup penangkapan ikan, budidaya laut, dan perikanan tambak (air payau dan air tawar), yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, serta pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

Di bidang kehutanan, terdapat kawasan hutan yang masih cukup luas dan memiliki nilai ekologis serta ekonomis. Hasil hutan bukan kayu seperti damar, rotan, dan madu hutan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal, sektor kehutanan berpotensi dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi hijau (*green economy*) yang berkelanjutan.

Sementara itu, sektor pertambangan menunjukkan indikasi keberadaan bahan galian seperti emas, nikel, dan batu bara di beberapa wilayah kecamatan. Potensi ini dapat dikembangkan sebagai salah satu pilar perekonomian daerah, namun pengelolaannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan lingkungan, dan aspek perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain potensi sumber daya alam, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata berbasis alam dan budaya, potensi energi baru terbarukan (EBT), serta pengembangan wilayah strategis seperti kawasan pesisir dan perbatasan. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menjadi faktor pendukung penting dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Dengan sinergi antara potensi sumber daya, kebijakan pembangunan yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemetaan potensi dan arah pengembangan daerah secara menyeluruh menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

• Status Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang cukup bagi penduduknya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam, penggunaan lahan, dan produktivitas pertanian. Analisis daya dukung pangan menjadi indikator penting dalam menilai ketahanan pangan suatu daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan alih fungsi lahan. Status daya dukung pangan tidak hanya mencerminkan potensi sumber daya wilayah, tetapi juga kemampuan sistem pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem.

Analisis daya dukung pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan. Jenis bahan pangan yang beragam disamakan dengan mengonversikan data produksi yang memiliki satuan berat (gram) menjadi satuan energi (kkal) untuk mendapatkan nilai energi bahan pangan. Status daya dukung pangan indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.2 Status Penyediaan Pangan Indikatif
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Status DDDTLH Indikatif Penyediaan Pangan				
		Ketersediaan (Supply)	Kebutuhan (Supply)	Ambang Batas	Selisih	Status
		(kkal/tahun)	(kkal/tahun)	Jiwa	Jiwa	
1	Bintauna	50.651.400.825	9.336.955.500	64.788	52.890	BM
2	Bolangitang Barat	24.533.836.437	12.586.605.250	31.372	15.333	BM
3	Bolangitang Timur	32.616.645.607	11.213.292.750	41.875	27.586	BM
4	Kaidipang	9.516.779.700	12.055.329.500	12.130	-3.232	M
5	Pinogaluman	6.508.938.884	8.235.951.250	8.264	-2.231	M
6	Sangkub	32.869.065.824	8.066.445.250	42.042	31.763	BM
Jumlah		156.696.667.277	61.494.579.500	200.471	122.109	BM

Ket.: - BM = Belum Melampaui M = Melampaui

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Tabel 2.2 menggambarkan kondisi penyediaan pangan indikatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), khususnya pada aspek ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat. Data disajikan per kecamatan, dengan indikator utama yang meliputi total ketersediaan pangan tahunan (dalam kilokalori), total kebutuhan pangan penduduk, ambang batas jumlah penduduk yang dapat ditopang oleh ketersediaan pangan tersebut, serta status keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan.

Secara umum, ketersediaan pangan diukur dari jumlah total energi (kilokalori) yang mampu disediakan oleh produksi pangan lokal dalam satu tahun, sementara kebutuhan pangan dihitung dari total energi yang dibutuhkan oleh penduduk di wilayah tersebut. Selisih antara kapasitas penyediaan dan kebutuhan dihitung dalam satuan jiwa, yang menunjukkan apakah wilayah tersebut memiliki surplus (kelebihan) atau defisit (kekurangan) dalam hal ketersediaan pangan. Ambang batas jiwa menunjukkan jumlah maksimal penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya dari ketersediaan pangan yang tersedia secara lokal.

Dari enam kecamatan yang dianalisis, empat kecamatan tercatat memiliki surplus pangan, yakni Kecamatan Bintauna, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, dan Sangkub. Kecamatan Bintauna menempati posisi tertinggi dalam hal ketersediaan pangan dengan jumlah mencapai 50,65 miliar kilokalori per tahun, sementara kebutuhan pangannya hanya sekitar 9,33 miliar kilokalori per tahun. Dengan demikian, kecamatan ini mampu menopang kebutuhan pangan hingga 64.788 jiwa, atau surplus sebesar 52.890 jiwa dari jumlah penduduk aktual. Hal serupa juga terjadi di

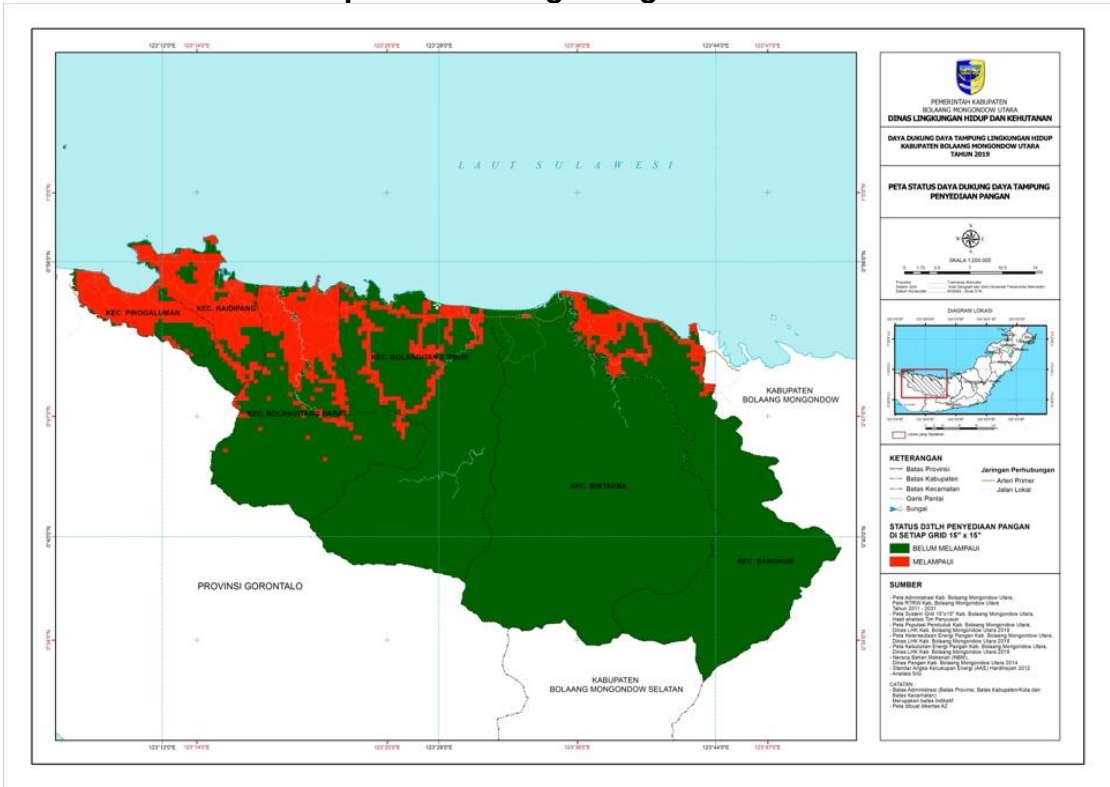
Kecamatan Bolangitang Timur dan Sangkub, yang masing-masing menunjukkan kelebihan kapasitas sebesar 27.586 jiwa dan 31.763 jiwa.

Namun demikian, terdapat dua kecamatan yang mengalami defisit pangan, yakni Kecamatan Kaidipang dan Pinogaluman. Kecamatan Kaidipang hanya memiliki ketersediaan sebesar 9,52 miliar kilokalori, sedangkan kebutuhannya mencapai 12,05 miliar kilokalori. Hal ini menyebabkan defisit sebesar 3.232 jiwa, yang mengindikasikan bahwa sebagian penduduk di wilayah ini tidak dapat terpenuhi kebutuhan pangannya dari hasil produksi lokal. Pinogaluman mengalami situasi serupa, dengan kekurangan sebesar 2.231 jiwa. Kedua wilayah ini memerlukan intervensi distribusi pangan dari kecamatan surplus atau penguatan produktivitas pangan lokal untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan luar.

Secara total, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki ketersediaan pangan sebesar 156,69 miliar kilokalori per tahun, dengan total kebutuhan sebesar 61,49 miliar kilokalori. Ambang batas daya dukung pangan terhadap penduduk mencapai 200.471 jiwa, dengan selisih surplus sebesar 122.109 jiwa. Artinya, secara agregat, kabupaten ini memiliki surplus pangan yang besar, meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah yang perlu ditangani melalui kebijakan distribusi, penguatan kelembagaan pangan lokal, dan optimalisasi produksi pangan di kecamatan defisit.

Hasil perhitungan status daya dukung pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertujuan untuk mengetahui apakah daya dukung pangan terlampaui atau belum terlampaui. Hasil perhitungan status daya dukung pangan juga bermanfaat untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan pangannya secara alamiah oleh karakteristik wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Gambar 2.3 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber : Dokumen D3TLH Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan Gambar 2.3, peta status daya dukung pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa wilayah dengan status Belum Melampaui mendominasi sebagian besar kecamatan, terutama di wilayah dengan produktivitas pertanian yang tinggi seperti Kecamatan Bintauna, Kecamatan Sangkub, dan Kecamatan Bolangitang Timur. Sebaliknya, kategori Melampaui teridentifikasi di Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Pinogalluan, yang mencerminkan tekanan pada daya dukung pangan akibat keterbatasan sumber daya alam dan tingginya kebutuhan penduduk.

• **Status Daya Dukung Air**

Daya dukung air merupakan kapasitas lingkungan untuk menyediakan kebutuhan air bagi penduduk dan ekosistem secara berkelanjutan tanpa menurunkan fungsi lingkungan. Analisis status daya dukung air menjadi penting dalam mengukur keseimbangan antara ketersediaan sumber daya air dengan kebutuhan populasi, termasuk untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan ekosistem alami. Informasi ini juga berperan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan alih fungsi lahan. Sub bab ini akan membahas kondisi status daya dukung air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi analisis ketersediaan air,

kebutuhan air, ambang batas populasi yang dapat didukung, serta wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami defisit air.

Analisis daya dukung air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk lahan dan domestik penduduk. Data ketersediaan air menggunakan potensi ketersediaan material air permukaan dan air tanah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Perhitungan daya dukung air bertujuan untuk menganalisis apakah status daya dukung daya air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara apakah terlampaui atau belum terlampaui. Kajian ini juga dapat memberikan gambaran secara spasial wilayah-wilayah yang daya dukung airnya telah melampaui. Analisis status daya dukung penyediaan air juga dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hasil analisis status daya dukung air indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada Tabel 2.3. Peta status daya dukung air indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Tabel 2.3 Status Penyediaan Air Indikatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

		Status DDDTLH Indikatif Penyediaan Air						Status
No.	Kecamatan	Ketersediaan (Supply)	Kebutuhan Lahan (Demand)	Kebutuhan Domestik (Demand)	Demand Total	Ambang Batas	Selisih	
		(m3/tahun)	(m3/tahun)	(m3/tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	Bintauna	934.522.106,5	86.055.905,9	1.027.987,2	87.083.893,1	9.819.420	9.807.522	BM
2	Bolangitang Barat	426.108.408,6	52.980.109,4	1.385.769,6	54.365.879,0	4.318.313	4.302.274	BM
3	Bolangitang Timur	629.724.763,6	75.221.100,5	1.234.569,6	76.455.670,1	6.417.514	6.403.225	BM
4	Kaidipang	169.073.568,5	43.947.916,9	1.327.276,8	45.275.193,7	1.448.200	1.432.838	BM
5	Pinogaluman	120.493.235,0	37.769.545,1	906.768,0	38.676.313,1	957.459	946.964	BM
6	Sangkub	582.804.103,0	66.882.502,6	888.105,6	67.770.608,2	5.970.813	5.960.534	BM
Total		2.862.726.185,2	362.857.080,4	6.770.476,8	369.627.557,2	28.931.719	8.853.357	BM

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Tabel 2.3 menyajikan informasi mengenai status penyediaan air indikatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sektor air. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengevaluasi keseimbangan antara ketersediaan air (*supply*) dan kebutuhan air (*demand*) di tiap kecamatan, baik untuk keperluan lahan (irigasi dan pertanian) maupun kebutuhan domestik (rumah tangga). Evaluasi ini penting dalam merumuskan arah kebijakan

pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kolom Ketersediaan (Supply) menunjukkan jumlah total air yang tersedia di tiap kecamatan dalam satu tahun, dinyatakan dalam satuan meter kubik (m^3 /tahun). Sementara itu, kebutuhan air dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kebutuhan lahan (misalnya untuk pertanian dan peternakan) dan kebutuhan domestik (konsumsi air rumah tangga dan keperluan dasar masyarakat). Kedua kebutuhan ini dijumlahkan untuk menghasilkan total kebutuhan atau total *demand*, yang kemudian dikonversi dalam satuan jiwa untuk menggambarkan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan airnya berdasarkan pasokan yang tersedia.

Secara umum, seluruh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat memiliki status BM (Belum Melampaui), yang berarti bahwa ketersediaan air di masing-masing wilayah masih mencukupi untuk memenuhi total kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan lahan maupun kebutuhan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun berjalan, kapasitas sumber daya air masih dalam kondisi aman dan belum melebihi batas daya dukung lingkungan.

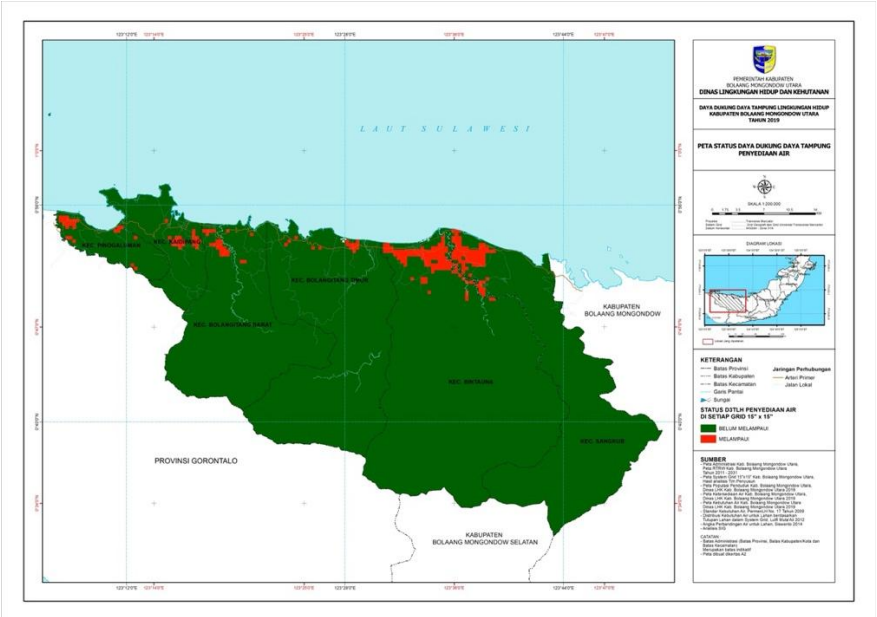
Kecamatan Bintauna memiliki ketersediaan air tertinggi, yakni sebesar 934,52 juta m^3 per tahun. Dibandingkan dengan total kebutuhan sebesar 87,08 juta jiwa ekuivalen (dalam satuan konsumsi air), kecamatan ini mampu menopang kebutuhan air hingga 9,82 juta jiwa, dengan selisih positif sebesar 9,81 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Bintauna memiliki potensi kelebihan air yang sangat besar dan dapat menjadi sumber pendistribusian air ke wilayah lain yang kekurangan, jika diperlukan.

Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Bolangitang Timur dan Sangkub, yang masing-masing mencatatkan surplus air sebesar 6,4 juta dan 5,96 juta jiwa ekuivalen. Bahkan Kecamatan Pinogaluman, yang memiliki ketersediaan air terendah sebesar 120,49 juta m^3 /tahun, tetap mencatatkan kelebihan kapasitas pemenuhan air untuk 946 ribu jiwa.

Secara kumulatif, ketersediaan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat sebesar 2,86 miliar m^3 per tahun, dengan total kebutuhan mencapai 0,77 miliar m^3 per tahun. Ini berarti bahwa daya dukung air di wilayah ini masih sangat tinggi, dengan total ambang batas 28,93 juta jiwa, sementara total kebutuhan hanya ekuivalen dengan 369.627 jiwa, menghasilkan selisih surplus sebesar 8,85 juta jiwa. Gambar 16 menunjukkan sebaran spasial wilayah-wilayah yang belum terlampaui dan

telah terlampaui daya dukung airnya. Wilayah yang belum terlampaui daya dukung airnya digambarkan dengan simbol warna hijau sedangkan wilayah yang telah terlampaui daya dukung airnya digambarkan dengan simbol warna merah.

Gambar 2.4 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber : Dokumen D3TLH Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan gambar 2.4, peta status daya dukung penyediaan air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada dalam kategori Belum Melampaui daya dukung air, yang ditandai dengan warna hijau. Wilayah ini mencakup hampir seluruh kecamatan, seperti Kecamatan Bintauna, Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bolangitang Timur, dan sebagian besar Kecamatan Bolangitang Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya air di wilayah tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan kegiatan lainnya.

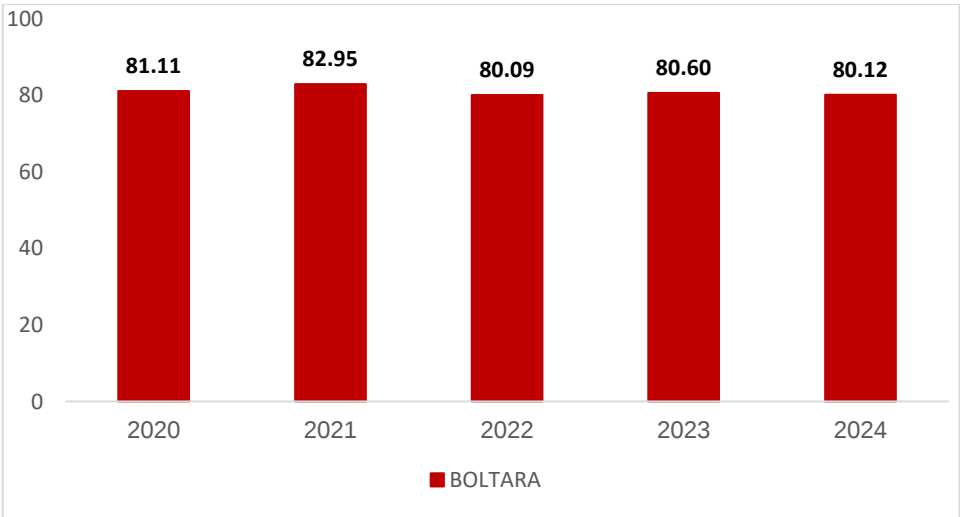
Namun, terdapat beberapa area dengan kategori Melampaui daya dukung air, yang ditandai dengan warna merah. Area ini tersebar di beberapa wilayah pesisir, terutama di Kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, dan sebagian kecil Kecamatan Bolangitang Barat. Wilayah dengan kategori Melampaui mengindikasikan adanya tekanan pada ketersediaan air akibat tingginya kebutuhan dibandingkan dengan potensi sumber daya yang ada, yang sering kali disebabkan oleh alih fungsi lahan, urbanisasi, atau peningkatan populasi.

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Utara, memiliki tantangan sekaligus peluang dalam memastikan ketahanan energi, air, dan pangan yang saling terintegrasi. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama yang harus dijaga untuk menyeimbangkan kebutuhan dasar penduduk dan kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam hal ketahanan pangan, Indeks Ketahanan Pangan di Bolaang Mongondow Utara mencerminkan stabilitas yang relatif baik dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dengan angka berkisar antara 80 hingga 83. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan di daerah ini masih terkendali. Namun, terdapat fluktuasi yang menandakan perlunya upaya lebih intensif untuk mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan tersebut.

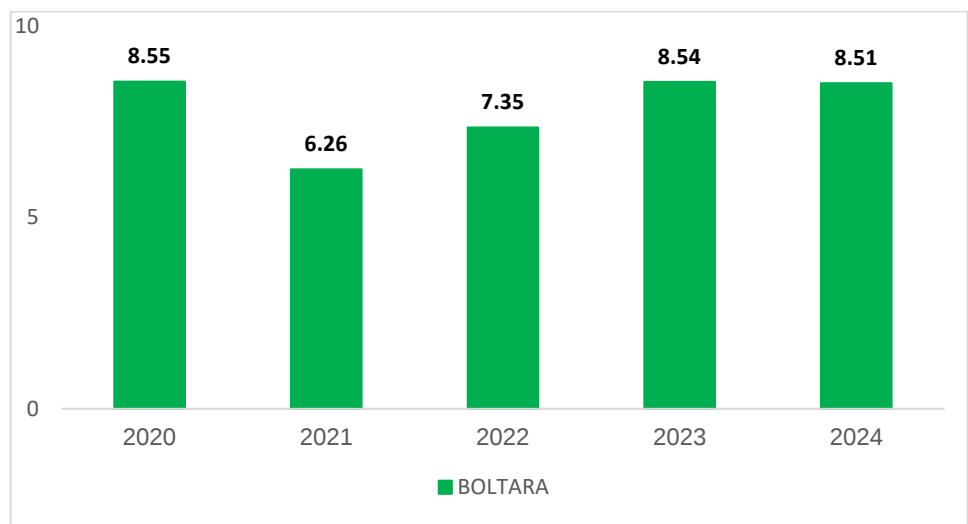
**Grafik 2.1 Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Salah satu indikasi penting adalah data Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang menunjukkan persentase sekitar 6,26% hingga 8,55% selama periode yang sama. Meskipun ada penurunan pada satu titik waktu, angka prevalensi ini kembali meningkat mendekati awal periode yang menandakan bahwa sebagian penduduk masih mengalami kesulitan memperoleh makanan yang cukup.

Grafik 2.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

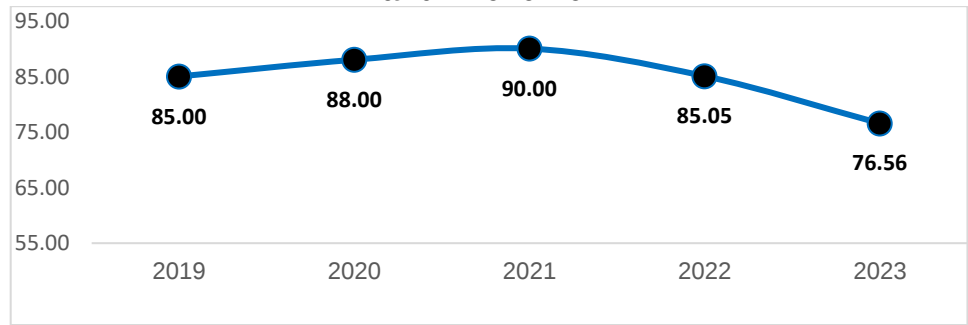


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Ketahanan pangan yang tidak solid secara langsung terkait dengan kondisi ketersediaan dan kualitas air bersih. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki akses ke air minum layak di Bolaang Mongondow Utara cenderung menurun dari puncak 90% pada tahun 2021 menjadi sekitar 76,56% pada 2023.

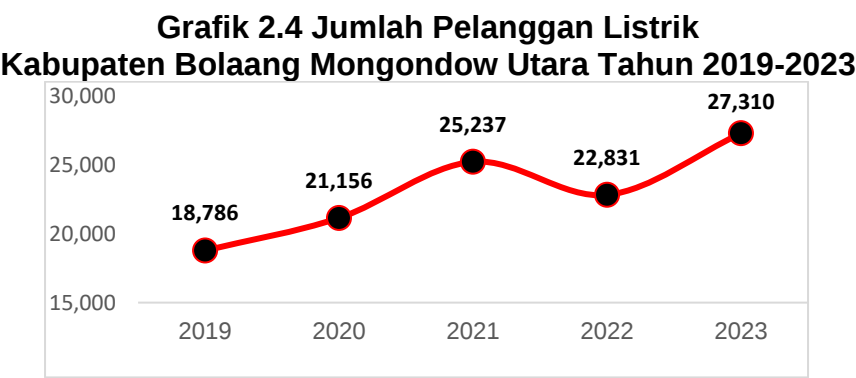
Penurunan akses air yang signifikan ini menjadi perhatian utama, karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak hanya penting untuk konsumsi langsung, tetapi juga untuk produksi pangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Keterbatasan akses air yang layak dapat memperlemah ketahanan pangan melalui dampak pada irigasi pertanian dan sanitasi kesehatan masyarakat.

Grafik 2.3 Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, aspek energi, khususnya listrik sebagai sumber energi utama untuk aktivitas rumah tangga, industri, dan layanan publik, menunjukkan tren peningkatan yang positif. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meningkat cukup signifikan dari 18.786 pelanggan pada tahun 2019 menjadi 27.310 pelanggan pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi akses energi listrik, yang sangat penting dalam mendukung pengolahan hasil pertanian, penyimpanan makanan, serta berbagai aktivitas perekonomian dan sosial. Peningkatan akses energi juga berperan dalam mendorong pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Dari keterkaitan keempat indikator ini, dapat disimpulkan bahwa ketahanan energi, air, dan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan sistem yang saling memperkuat dan menentukan mutu hidup penduduk serta keberlanjutan pembangunan daerah. Penurunan kualitas akses air dapat menghambat aktivitas pertanian dan kesehatan masyarakat yang pada gilirannya dapat melemahkan ketahanan pangan, sementara peningkatan akses listrik yang signifikan membuka peluang untuk mendorong efisiensi produksi pangan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terintegrasi dalam bidang energi, pengelolaan sumber daya air, dan ketahanan pangan menjadi kunci strategis untuk menjamin ketiga aspek tersebut mendukung satu sama lain.

Kebijakan dan program yang fokus pada peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi, diversifikasi sumber energi terbarukan, serta peningkatan produktivitas dan kualitas pangan harus diprioritaskan agar ketahanan wilayah semakin solid. Penguatan sinergi antar sektor juga diperlukan agar perubahan positif yang dicapai oleh masing-masing indikator dapat berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat di Bolaang Mongondow Utara.

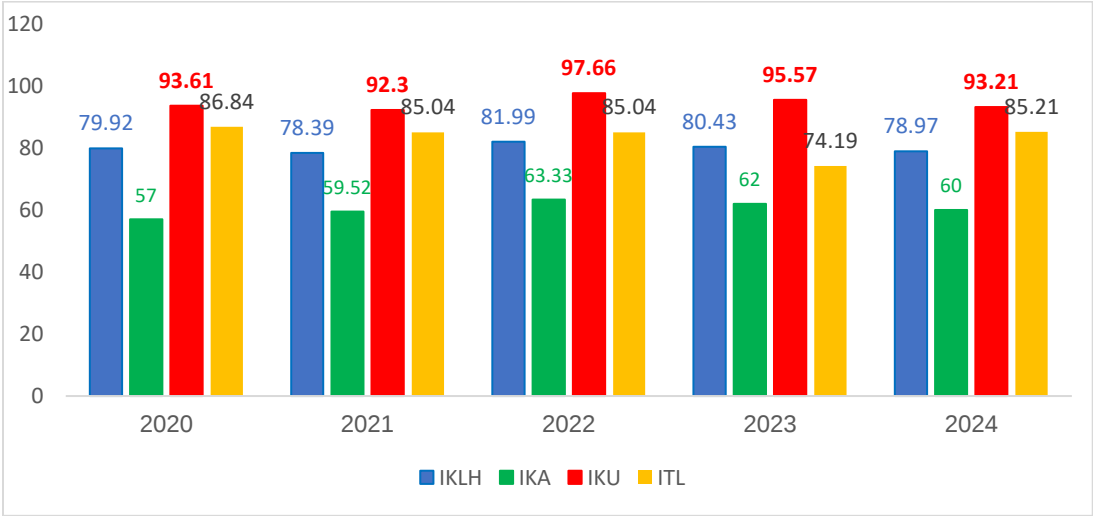
E. Lingkungan Hidup Berkualitas

• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang berkualitas merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi, mengingat dampaknya sangat luas baik bagi kesehatan manusia, kelestarian ekosistem, maupun stabilitas sosial ekonomi. Pada konteks wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, indikator-indikator kunci seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL), dan persentase akses air limbah aman menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas langkah-langkah pengendalian tersebut.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan mencerminkan kesehatan lingkungan di suatu daerah dengan rentang nilai yang mengindikasikan baik atau buruknya kondisi lingkungan. Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, IKLH menunjukkan fluktuasi nilai dengan kecenderungan stabil di angka 78-82 pada periode 2020 hingga 2024. Pencapaian angka ini mengindikasikan adanya upaya positif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang layak huni dan mendukung aktivitas ekonomi. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar target kualitas lingkungan hidup yang lebih tinggi dapat dicapai dan mempertahankan ketahanan lingkungan terhadap fenomena perubahan iklim dan tekanan antropogenik.

Grafik 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi indikator utama dalam penilaian kesehatan air yang digunakan masyarakat maupun ekosistem. Pada data yang tercatat, IKA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami kenaikan dari nilai 57 pada tahun 2020 menjadi 63,33 di tahun 2022, menunjukkan adanya perbaikan kualitas air melalui pengelolaan limbah domestik dan industri yang lebih baik. Namun, nilai IKA ini masih relatif rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, yang menunjukkan perlunya penguatan pengendalian pencemaran air, termasuk efektivitas instalasi pengolahan limbah serta pengawasan kualitas sumber air untuk memastikan air bersih dapat tersedia bagi kebutuhan kehidupan dan produksi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah parameter vital yang mencerminkan tingkat kebersihan udara dan dampaknya terhadap kesehatan pernapasan masyarakat serta ekosistem sekitar. Indeks ini tercatat sangat tinggi, yakni di atas 90 dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, dengan nilai tertinggi 97,66 pada tahun 2022. Hal ini merupakan indikasi baik bahwa udara di wilayah ini cukup bersih dan bebas dari pencemaran berat, memungkinkan aktivitas ekonomi dan sosial berjalan lancar tanpa risiko besar bagi kesehatan masyarakat. Pengelolaan kualitas udara yang baik ini terutama didukung oleh kebijakan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor, industri, serta konservasi area hijau.

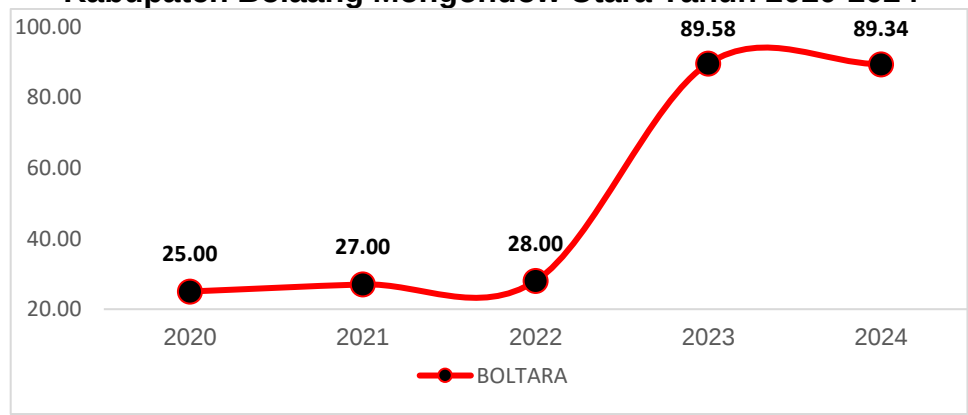
Indeks Tutupan Lahan (ITL) menunjukkan bagaimana area lahan di daerah tersebut masih tertutup oleh vegetasi dan fungsi lingkungan alami. Nilai ITL yang relatif stabil di kisaran 74 hingga 86 selama 5 tahun terakhir mencerminkan upaya yang berkesinambungan dalam menjaga area hijau dan mencegah konversi lahan secara berlebihan. Tutupan lahan yang memadai tidak hanya menjaga kestabilan ekosistem dan mencegah erosi, tetapi juga berkontribusi besar dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim lokal, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

- **Akses Air Limbah Aman**

Salah satu aspek krusial lain adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air limbah aman. Data menunjukkan kemajuan signifikan dari 25% pada 2020 menjadi hampir 90% pada 2023-2024. Kenaikan drastis ini mengindikasikan bahwa program penyediaan fasilitas sanitasi dan pengelolaan air limbah yang aman telah mulai membuahkan hasil,

memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan terutama dari limbah domestik. Hal ini memperkuat keterkaitan antara pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas hidup, di mana sanitasi yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Grafik 2.6 Persentase Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Limbah Aman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya kemajuan yang menarik dalam berbagai aspek utama lingkungan hidup. Keberhasilan dalam mempertahankan IKU dan peningkatan signifikan dalam akses air limbah aman menjadi contoh positif dari strategi pengelolaan lingkungan yang terarah. Namun, fokus perhatian perlu ditingkatkan pada peningkatan kualitas air dan pengelolaan tutupan lahan yang berkelanjutan agar kualitas lingkungan tidak hanya bertahan tetapi juga meningkat. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi pengelola lingkungan, serta edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam program lingkungan hidup akan memperkuat upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem. Dengan demikian, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat terus meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya yang akan berkontribusi secara langsung pada kualitas hidup warga, kemampuan produktivitas sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jangka panjang.

• **Persampahan**

Permasalahan persampahan merupakan salah satu isu di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Timbulan sampah diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan kawasan perkotaan, perubahan pola konsumsi, serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Distribusi prediksi timbulan sampah per kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disajikan pada Tabel 40 sebagai gambaran potensi beban pengelolaan sampah daerah di masa mendatang.

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2029 (Jiwa)	Prediksi Timbulan Sampah (Ton/Hari)
Sangkub	11669	5,89
Bintauna	16084	8,05
Bolang Itang Timur	17147	8.14
Bolang Itang Barat	17782	8,67
Kaidipang	16988	7,98
Pinogaluman	13532	6,31
Jumlah	93203	45,04

Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Mengacu Tabel 2.4, prediksi timbulan sampah tahun 2029 mencapai 45,04 ton/hari, dengan distribusi terbesar berasal dari Kecamatan Bolangitang Barat sebesar 8,67 ton/hari, diikuti Kecamatan Bolangitang Timur, dan Kecamatan Bintauna. Kondisi ini menandakan adanya beban yang signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini. Analisis kapasitas pengelolaan sampah menunjukkan adanya kesenjangan besar antara timbulan sampah dan kemampuan pengolahan. Saat ini, mengacu data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya sekitar 3,23 ton/tahun sampah yang berhasil didaur ulang, jauh di bawah timbulan harian yang diproyeksikan mencapai 45,04 ton/hari. Kondisi ini menandakan sebagian besar sampah masih berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pengolahan yang memadai. Jika tren ini berlanjut, risiko pencemaran tanah, air tanah, serta meningkatnya vektor penyakit akan semakin tinggi, terutama di sekitar lokasi TPA dan daerah hilir sungai yang menerima limpasan lindi.

Proyeksi hingga 2029 memperkirakan bahwa tanpa peningkatan signifikan kapasitas pengelolaan, tingkat akumulasi sampah di TPA dapat meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan kapasitas saat ini. Hal ini akan memperburuk kualitas lingkungan dan memerlukan biaya pengendalian yang lebih tinggi di masa depan. Sebaliknya, jika dilakukan intervensi berupa peningkatan fasilitas pengolahan (TPS 3R, bank sampah desa), program pengurangan sampah plastik sekali pakai, serta edukasi pemilahan di rumah tangga, timbunan yang masuk ke TPA dapat ditekan hingga 30–40% dari total prediksi.

- **Potensi Keanekaragaman Hayati**

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi keanekaragaman hayati yang signifikan sebagai bagian dari penopang ketahanan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Keberagaman ekosistem daratan dan perairan yang dimiliki wilayah ini menjadi habitat alami bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies endemik dan spesies yang memiliki nilai ekonomi maupun ekologis tinggi. Potensi tersebut menempatkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian strategis dalam agenda konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dalam konteks ini tidak hanya mencakup jumlah dan jenis spesies, tetapi juga mencakup variasi genetik serta keberagaman ekosistem yang mendukung proses kehidupan dan regenerasi hayati. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kapasitas ekologisnya dalam menyediakan layanan lingkungan, seperti penyediaan air bersih, pengendalian iklim lokal, serta ketahanan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan lingkungan hidup daerah.

Tabel 2.5 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan Administrasi Kecamatan

NO	KECAMATAN	RENDAH				SEDANG		TINGGI				TOTAL	
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI			
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bintauna	2615,38	1,34	8556,98	4,39	847,41	0,43	29603,88	15,19	23082,76	11,84	64528,27	33,10
2	Bolangitang Barat	2518,83	1,29	7142,22	3,66	67,45	0,03	21435,60	11,00	129,60	0,07	31161,69	15,99
3	Bolangitang Timur	2002,73	1,03	12529,57	6,43	83,95	0,04	16617,06	8,52	11549,42	5,92	42668,61	21,89
4	Kaidipang	924,78	0,47	6646,35	3,42	78,41	0,04	2573,78	1,32	569,00	0,29	10713,11	5,50
5	Pinogaluman	1452,74	0,75	3658,95	1,88	63,35	0,03	1462,49	0,75	84,95	0,04	6647,56	3,41
6	Sangkub	2055,23	1,05	5777,85	2,96	317,06	0,16	17873,73	9,17	12665,72	6,50	38549,24	19,78
	Total	11569,69	5,94	44311,92	22,73	1457,63	0,72	89566,54	45,95	48081,45	24,67	194268,48	100,00

Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Hasil analisis spasial terhadap jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada dalam kategori potensi tinggi. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.5, tercatat bahwa sekitar 70,61% dari total luas wilayah termasuk dalam kelas berpotensi tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa tutupan lahan berhutan di kabupaten ini masih relatif luas dan terjaga, terutama di wilayah selatan yang didominasi oleh hutan primer dan sekunder. Keberadaan topografi perbukitan dan pegunungan juga turut menunjang kelestarian habitat alami di wilayah ini.

Distribusi wilayah dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi paling dominan terdapat di Kecamatan Bintauna, yang menyumbang luas sebesar 27,03%, diikuti oleh Kecamatan Sangkub dengan kontribusi 15,67%. Wilayah-wilayah ini memiliki kondisi ekologis yang masih baik, dengan tekanan pembangunan yang relatif rendah serta intervensi aktivitas manusia yang terbatas.

Sementara itu, wilayah yang tergolong dalam kategori potensi rendah (sangat rendah hingga rendah) mencakup 28,67% dari total luas kabupaten. Kategori ini umumnya terdapat di wilayah yang mengalami alih fungsi lahan, aktivitas pertanian intensif, atau urbanisasi. Kecamatan Bolangitang Timur tercatat sebagai penyumbang utama kategori ini, yakni sebesar 7,46%, disusul oleh Kecamatan Bintauna sebesar 5,73%. Adapun wilayah dengan potensi sedang hanya mencakup 0,72%, yang sebagian besar juga berada di Kecamatan Bintauna.

Kondisi ini menggambarkan adanya disparitas ekologis antar kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pemerintah daerah perlu menetapkan kawasan lindung secara tegas, memperkuat regulasi pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan ekosistem lokal.

Dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan hijau (*green development*) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Potensi ini harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

- **Ekosistem Penyediaan Pangan**

Ekosistem penyediaan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat melalui penyediaan sumber daya pangan yang berasal dari ekosistem daratan dan perairan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, menyimpan kekayaan ekosistem yang mendukung produksi pangan baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Fungsi jasa lingkungan ini tidak hanya menyediakan hasil-hasil konsumsi langsung seperti padi, sayur, buah, ikan, dan produk hewani, tetapi juga menopang ketahanan pangan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Daya dukung lingkungan sebagai indikator kapasitas ekosistem dalam menyediakan pangan, sangat dipengaruhi oleh kualitas tanah, ketersediaan air, iklim, dan tekanan terhadap lahan. Kajian terhadap ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengelompokkan wilayah dalam lima kelas, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengetahui distribusi spasial kapasitas penyediaan pangan di setiap kecamatan, yang selanjutnya dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan sektor pangan yang lebih berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Tabel 2.6 Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bintanua	156,15	0,08	60,90	0,03	33.882,44	17,38	28.069,74	14,40	2.537,18	1,30	64.706,41	33,20
2	Bolangitang Barat	1,25	0,00	317,09	0,16	15.885,89	8,15	14.436,92	7,41	652,55	0,33	31.293,70	16,05
3	Bolangitang Timur	29,39	0,02	161,82	0,08	31.774,65	16,30	10.137,41	5,20	679,46	0,35	42.782,73	21,95
4	Kaidipang	137,88	0,07	44,98	0,02	6.044,40	3,10	3.437,31	1,76	1.068,08	0,55	10.732,65	5,51
5	Pinogaluman	-	-	103,87	0,05	868,87	0,45	4.872,96	2,50	876,77	0,45	6.722,47	3,45
6	Sangkub	8,35	0,00	151,93	0,08	11.586,35	5,94	24.868,42	12,76	2.074,54	1,06	38.689,59	19,85
TOTAL		333,03	0,17	840,59	0,43	100.042,60	51,32	85.822,76	44,03	7.888,57	4,05	194.927,55	100,00

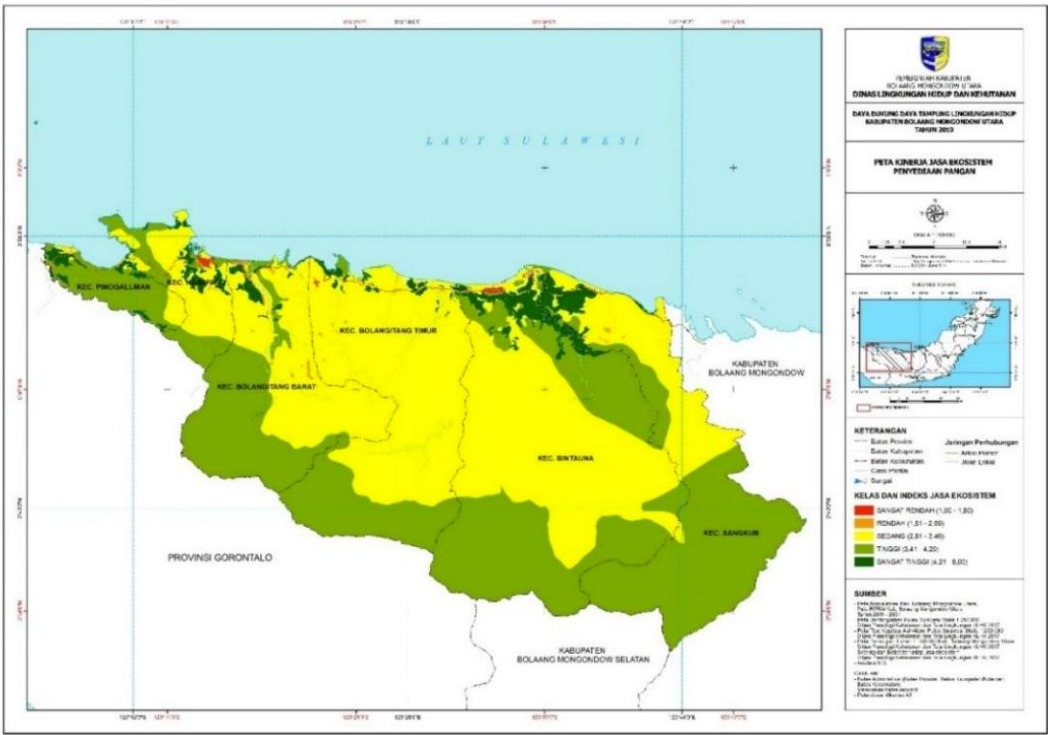
Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Data menunjukkan bahwa kelas jasa ekosistem penyediaan pangan yang paling dominan di wilayah ini adalah kategori sedang, yang mencakup luasan 100.042,60 hektar atau sekitar 51,32% dari total luas wilayah. Selanjutnya, kategori tinggi menempati posisi kedua dengan luasan 85.822,76 hektar atau 44,03%. Kategori sangat tinggi tercatat seluas 7.888,57 hektar atau 4,05%. Adapun kategori rendah dan sangat rendah masing-masing hanya mencakup 0,43% (840,59 hektar) dan 0,17% (333,03 hektar), yang berarti memiliki kontribusi sangat kecil terhadap sistem penyediaan pangan.

Secara spasial, kelas sedang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan dominasi tertinggi di Kecamatan Bintauna yang mencakup 33.882,44 hektar atau 17,38% dari wilayah kecamatan. Kategori tinggi tampak menonjol di Kecamatan Sangkub dengan luasan 24.868,42 hektar dan di Kecamatan Pinogaluman dengan 4.872,96 hektar. Sedangkan kategori sangat tinggi memiliki konsentrasi signifikan di Kecamatan Bintauna (2.537,18 hektar) dan Sangkub (2.074,54 hektar), mengindikasikan tingginya potensi ekosistem di wilayah tersebut untuk mendukung pengembangan pangan yang intensif.

Kawasan pesisir yang berbatasan dengan Laut Sulawesi umumnya tergolong dalam kategori sedang. Hal ini mencerminkan potensi moderat untuk pengembangan pertanian lahan datar serta perikanan pesisir. Namun demikian, pada beberapa titik di kawasan pesisir terdapat kategori tinggi dan sangat tinggi, yang menunjukkan potensi besar untuk pengembangan tambak, perikanan tangkap, maupun pertanian intensif.

Gambar 2.5 Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, wilayah perbukitan dan pegunungan yang tersebar di berbagai kecamatan, terutama yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagian besar masuk dalam kategori sedang, dengan beberapa area menunjukkan kategori tinggi. Fakta ini memberikan peluang strategis untuk pengembangan sistem agroforestri, pertanian lahan kering, maupun integrasi peternakan berbasis lanskap perbukitan.

Telaah terhadap ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi landasan penting dalam perumusan arah kebijakan pembangunan pangan daerah. Optimalisasi potensi berdasarkan karakteristik spasial dan ekosistem lokal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan, mendukung ketahanan pangan daerah, serta mendorong keseimbangan ekologis dalam jangka panjang.

• **Ekosistem Penyediaan Air Bersih**

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketersediaan dan keberlanjutan sumber air bersih menjadi elemen penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai salah satu wilayah yang tengah

berkembang di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan ekosistem penyediaan air bersih.

Secara ekologis, ekosistem memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi yang berimplikasi langsung terhadap ketersediaan air bersih. Faktor-faktor seperti curah hujan, jenis tanah, struktur akuifer, vegetasi penutup lahan, dan bentang alam sangat menentukan kapasitas suatu wilayah dalam menyediakan air bersih secara alami. Dalam konteks Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemetaan terhadap jasa ekosistem penyediaan air menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Jasa ekosistem penyediaan air bersih merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyimpan, mengalirkan, dan menyaring air melalui proses-proses alami yang terjadi dalam tanah, hutan, dan vegetasi lainnya. Dalam kajian spasial yang dilakukan, jasa ekosistem ini diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Masing-masing kategori merepresentasikan tingkat daya dukung lingkungan dalam menyediakan air bagi kebutuhan domestik, pertanian, industri, maupun sektor lainnya.

Tabel 2.7 Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		Total	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bintanua	256,68	0,13	13.100,13	6,74	51.158,07	26,33	29,97	0,02	161,57	0,08	64.528,27	33,22
2	Bolangitang Barat	189,31	0,10	14.992,44	7,72	15.963,30	8,22	38,03	0,02	110,63	0,06	31.161,69	16,04
3	Bolangitang Timur	67,07	0,03	5.524,72	2,84	37.076,81	19,09	2,56	0,00	111,56	0,06	42.668,61	21,96
4	Kaidipang	414,92	0,21	2.523,78	1,30	7.774,42	4,00	7,02	0,00	12,52	0,01	10.713,11	5,51
5	Pinogaluman	55,95	0,03	812,74	0,42	5.775,24	2,97	8,99	0,00	69,54	0,04	6.647,56	3,42
6	Sangkub	30,44	0,02	11.611,30	5,98	26.907,50	13,85	32,23	0,02	108,12	0,06	38.549,24	19,84
TOTAL		1.014,36	0,52	48.565,11	25,00	144.655,34	74,46	118,80	0,06	573,93	0,30	194.268,48	100,00

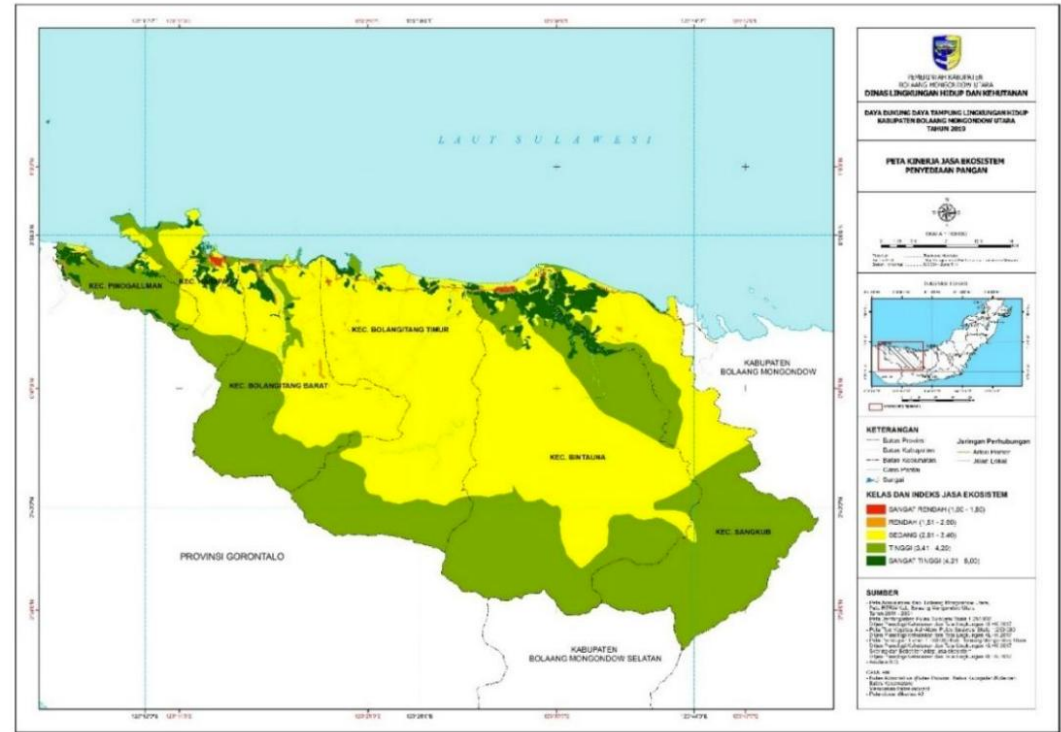
Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan analisis data yang termuat dalam Tabel 42, diketahui bahwa kategori dominan dalam jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kategori “sedang”, yang mencakup luas wilayah sebesar 144.655,34 hektar atau sekitar 74,46% dari total luas kabupaten. Kategori ini menggambarkan bahwa sebagian besar wilayah kabupaten memiliki kapasitas sedang dalam mendukung ketersediaan air bersih. Adapun kategori “rendah” menempati urutan kedua, mencakup

48.565,11 hektar atau 25,00% wilayah. Sementara kategori “sangat rendah”, “tinggi”, dan “sangat tinggi” hanya melingkupi porsi yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,52%, 0,06%, dan 0,30%.

Analisis per kecamatan menunjukkan bahwa wilayah Bintauna merupakan yang paling luas dalam kategori “sedang”, dengan cakupan 51.158,07 hektar atau 26,33% dari total wilayah kabupaten. Selanjutnya, Kecamatan Bolangitang Timur mencatatkan kontribusi luas sebesar 37.076,81 hektar (19,09%), diikuti oleh Kecamatan Sangkub seluas 26.907,50 hektar (13,85%). Kecamatan Bolangitang Barat, Kaidipang, dan Pinogaluman masing-masing memiliki cakupan kategori “sedang” sebesar 15.963,30 hektar (8,22%), 7.774,42 hektar (4,00%), dan 5.775,24 hektar (2,97%).

Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Gambaran spasial sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.6 mempertegas bahwa hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh jasa ekosistem dengan kategori “sedang”. Hal ini mencerminkan kondisi ekosistem yang masih memiliki kapasitas menengah dalam menyediakan air bersih, namun tetap memerlukan intervensi kebijakan untuk peningkatan daya dukungnya. Sementara itu, wilayah dengan kategori “rendah” cenderung tersebar di

daerah perbukitan dan pegunungan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh minimnya vegetasi penutup lahan dan karakteristik geologis yang kurang mendukung infiltrasi air ke dalam tanah.

Wilayah dengan kategori “tinggi” dan “sangat tinggi” relatif terbatas, namun sangat penting untuk dilindungi sebagai sumber utama penyediaan air bersih. Lokasi-lokasi ini umumnya berada di kawasan dengan sumber daya air alami yang melimpah, seperti mata air, daerah tangkapan hujan yang optimal, dan kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai reservoir alami. Oleh karena itu, pendekatan konservasi dan rehabilitasi hutan menjadi kunci untuk menjaga fungsi ekosistem dalam penyediaan air.

Dalam rangka memperkuat ekosistem penyediaan air bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu menyusun kebijakan berbasis spasial yang berorientasi pada pelestarian wilayah tangkapan air, peningkatan tutupan vegetasi, serta optimalisasi pemanfaatan air hujan melalui teknologi konservasi air seperti embung, sumur resapan, dan tangki penampungan air hujan. Di samping itu, perlindungan kawasan sumber air perlu diperkuat melalui kebijakan tata ruang, pengawasan kegiatan eksploitasi lahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Secara umum, ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih berada pada kapasitas menengah yang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat, namun menghadapi tantangan signifikan terkait tekanan terhadap lingkungan, perubahan iklim, dan konversi lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis lintas sektor dan lintas wilayah untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem penyediaan air bersih sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan indikator krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap risiko. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah pesisir, agraris, dan perbukitan, menghadapi kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk bencana alam serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas adaptif, mitigatif, dan responsif terhadap risiko menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi wilayah.

Perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan perubahan kondisi iklim global yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia. Perubahan ini telah mengakibatkan gangguan serius pada sistem iklim global, yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, ketidakpastian pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, serta abrasi di wilayah pesisir.

Dampak perubahan iklim telah dirasakan secara nyata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peningkatan suhu udara, perubahan musim tanam, dan menurunnya ketersediaan air bersih berdampak pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Selain itu, tingginya kerentanan wilayah juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dasar yang belum optimal serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sosial masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

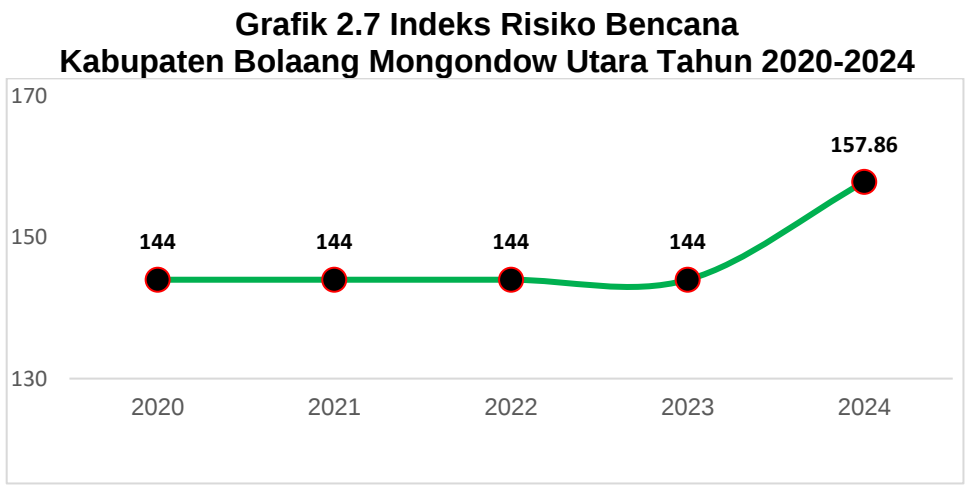
Tabel 2.8 Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Kerentanan				
		1 Sangat rendah	2 Rendah	3 Sedang	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
1	Sangkub	1	1	13	1	0
2	Bintauna	0	0	15	1	0
3	Bolangitang Timur	1	3	16	0	0
4	Bolangitang Barat	0	0	18	0	0
5	Kaidipang	0	3	10	0	2
6	Pinogaluman	3	0	19	0	0
Jumlah		5	7	91	2	2

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014)
<http://182.253.238.238/perhitungan/hasil/1310>

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014, sebagian besar desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada dalam kategori kerentanan sedang terhadap perubahan iklim. Terdapat pula beberapa desa yang termasuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi, terutama di Kecamatan Kaidipang dan Bintauna. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan adaptasi yang bersifat spasial dan kontekstual, dengan memperhatikan kondisi spesifik wilayah dan masyarakat setempat.

Sementara itu, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) mengalami tren kenaikan dari rata-rata 144 selama periode 2020–2023 menjadi 157,86 pada tahun 2024.

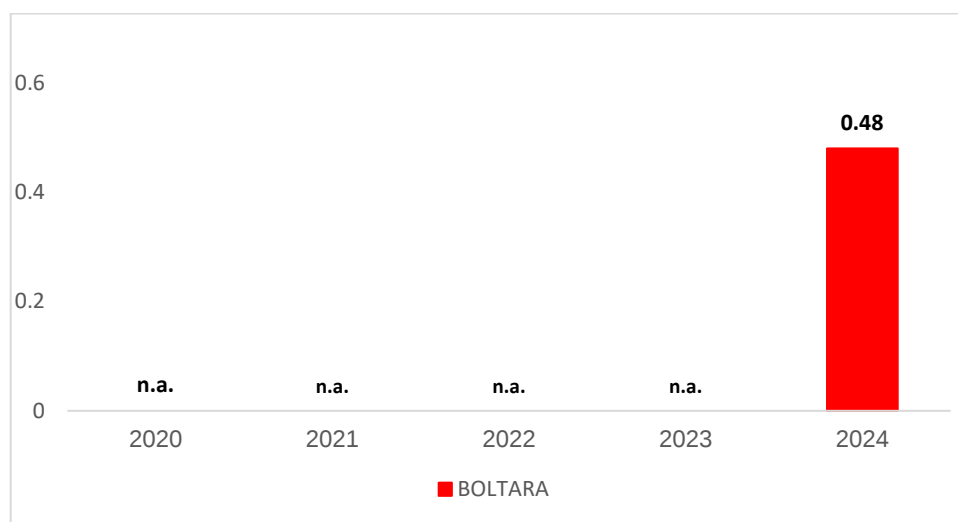


Sumber: BPBD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Peningkatan ini merefleksikan meningkatnya potensi ancaman bencana, khususnya yang bersifat hidrometeorologis seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Risiko ini semakin diperparah dengan meningkatnya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti alih fungsi lahan, deforestasi, dan pembangunan kawasan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Dalam rangka merespons tantangan tersebut, Pemerintah Daerah telah mulai menginisiasi pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2024 yang menunjukkan nilai awal sebesar 0,48. Meskipun tergolong masih rendah, pengukuran ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem ketahanan berbasis data dan bukti.

**Grafik 2.8 Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Nilai IKD ini mencerminkan keterbatasan kapasitas kesiapsiagaan, belum optimalnya infrastruktur dasar, serta lemahnya tata kelola risiko bencana. Untuk itu, diperlukan investasi yang signifikan pada infrastruktur tangguh bencana, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta penguatan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang tanggap darurat.

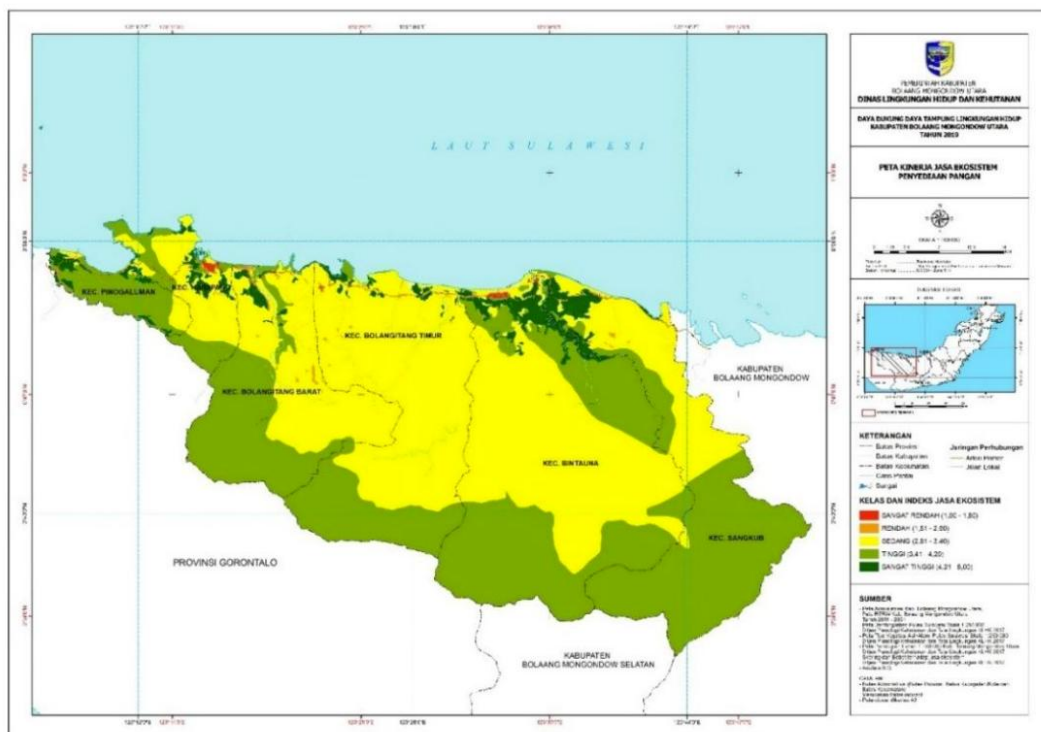
Berdasarkan hasil analisis dalam KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, beberapa strategi mitigasi yang telah dan dapat terus dikembangkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:

1. Pemetaan risiko dan kerentanan wilayah berbasis spasial, guna menentukan zona rawan bencana serta menyusun rencana kontinjensi wilayah.
2. Rehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menurunkan risiko banjir dan tanah longsor.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal melalui pelatihan, pembentukan forum siaga bencana berbasis komunitas, serta optimalisasi peran perangkat desa dalam sistem peringatan dini.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi berbasis sekolah dan masyarakat tentang perubahan iklim dan kebencanaan.

Strategi-strategi ini akan efektif apabila dijalankan secara sinergis antar sektor dan ditopang oleh pendanaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peluang pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang bencana, kerja sama antar-daerah, maupun kemitraan publik-swasta (PPP) perlu terus dioptimalkan.

Aspek penting lain dalam membangun ketahanan wilayah adalah ketahanan ekosistem. Ekosistem alami seperti hutan hujan tropis, mangrove, dan lahan gambut memiliki peran penting sebagai sistem penyangga bencana alam. Mangrove di wilayah pesisir, misalnya, dapat meredam gelombang tinggi dan melindungi pemukiman dari abrasi. Oleh karena itu, perlindungan dan rehabilitasi kawasan ekosistem kritis merupakan pilar utama dalam strategi adaptasi perubahan iklim.

Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sumber: KLHD RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Selain itu, integrasi pengetahuan lokal dan kearifan budaya dalam sistem penanggulangan bencana juga harus mendapat perhatian. Banyak masyarakat adat di wilayah perbukitan Bolaang Mongondow Utara yang memiliki sistem pengetahuan tradisional dalam membaca tanda-tanda alam dan mempersiapkan respons dini. Pendekatan ini dapat dipadukan dengan teknologi modern seperti aplikasi peringatan dini berbasis ponsel atau sistem peringatan berbasis sensor (*early warning system*) untuk meningkatkan efektivitas mitigasi.

Dalam konteks tata kelola, sinergi antar perangkat daerah menjadi penting untuk menjamin konsistensi kebijakan. Dinas terkait seperti BPBD, DLH, Dinas PUTR, Dinas Pertanian, dan Dinas Sosial harus bekerja dalam satu kerangka aksi terpadu. Perencanaan pembangunan harus dilandasi oleh hasil kajian risiko dan skenario perubahan iklim, serta dituangkan dalam dokumen RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan dokumen teknis lainnya secara terintegrasi.

Tantangan perubahan iklim dan risiko bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, dengan langkah strategis, kolaboratif, dan berbasis data, wilayah ini dapat membangun resiliensi yang kokoh dan berkelanjutan. Perencanaan yang terintegrasi, kebijakan yang adaptif, serta peran aktif

seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan masa depan yang aman, sehat, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

G. Demografi

- Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi dan dinamika demografi yang terus berkembang. Demografi merupakan ilmu yang mempelajari komposisi, distribusi, dan perubahan penduduk suatu wilayah, yang menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya daerah. Untuk memahami karakteristik demografi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu ditelaah beberapa indikator utama seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta komposisi penduduk dan keberadaan masyarakat adat yang menjadi bagian erat dari kehidupan sosial budaya warga di kawasan tersebut.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023 (ribu)	2024
1	Sangkub	10829	10946	11086	11,1	11106
2	Bintauna	14858	14971	15114	15,2	15234
3	Bolangitang Timur	15027	15132	15267	16,2	16244
4	Bolangitang Barat	16038	16114	16222	16,7	16921
5	Kaidipang	14714	14844	15005	15,7	15910
6	Pinogaluman	11646	11736	11849	12,4	12587
Kab.Bolmong Utara		83112	83743	84543	87,3	88002

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat tren pertumbuhan penduduk yang positif dan stabil sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2020, total jumlah penduduk di kabupaten ini tercatat sebanyak 83.112 jiwa, dan mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 88.002 jiwa pada tahun 2024. Hal ini berarti terjadi peningkatan sekitar 4.890 jiwa selama lima tahun, yang menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang cukup signifikan dan konsisten.

Detail pertumbuhan ini jika dilihat lebih mendalam pada tingkat kecamatan juga menunjukkan pola yang serupa, di mana semua kecamatan mencatat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kecamatan Bolangitang Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar sepanjang tahun-tahun tersebut, jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2024 mencapai 16.921 jiwa. Peningkatan terbesar juga terjadi di kecamatan ini dengan tambahan sekitar 883 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Sangkub, meskipun demikian jumlah penduduknya juga mengalami peningkatan yang stabil, yaitu dari 10.829 jiwa pada 2020 menjadi 11.106 jiwa pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya penyebaran penduduk yang relatif merata di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan variasi jumlah penduduk antara kisaran 11 ribu hingga hampir 17 ribu jiwa.

Faktor pertumbuhan penduduk yang stabil ini memberikan gambaran bahwa wilayah ini kemungkinan terus berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga menarik penduduk untuk tetap tinggal maupun bermigrasi ke daerah tersebut. Stabilitas pertumbuhan juga mengindikasikan kondisi demografis yang sehat, di mana keseimbangan antara angka kelahiran dan kematian lebih mengarah kepada peningkatan populasi secara alami. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai acuan penting bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di daerah. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus terjadi, kebutuhan akan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur juga diperkirakan akan meningkat, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan alokasi anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan data kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat gambaran penting mengenai distribusi dan konsentrasi penduduk di wilayah tersebut yang dapat dijadikan dasar analisis demografi. Kepadatan penduduk diukur dalam jiwa per kilometer persegi (Jiwa/Km^2), dan data menunjukkan tren yang bervariasi di tiap kecamatan dengan peningkatan rata-rata kepadatan penduduk secara keseluruhan di kabupaten ini.

Secara umum, luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1.672,61 km^2 , dengan kepadatan penduduk rata-rata terus meningkat dari 49,69 jiwa/ km^2 pada tahun 2020 menjadi 52,61 jiwa/ km^2 pada tahun

2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak hanya bertambah, tetapi juga mulai terdistribusi lebih padat, sehingga ada potensi peningkatan kebutuhan akan fasilitas dan layanan yang mendukung kehidupan masyarakat.

Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangkub	418,40	25,88	26,16	26,50	26,53	26,54
2	Bintauna	348,94	42,58	42,90	43,31	43,56	43,66
3	Bolangitang Timur	422,96	35,53	35,78	36,10	38,30	38,41
4	Bolangitang Barat	312,56	51,31	51,55	51,90	53,43	54,14
5	Kaidipang	95,79	153,61	154,96	156,64	163,90	166,09
6	Pinogaluman	73,96	157,46	158,68	160,21	167,66	170,19
Kab. Bolaang Mongondow Utara		1672,61	49,69	50,07	50,55	52,19	52,61

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Di antara kecamatan, terdapat perbedaan signifikan dalam kepadatan penduduk. Kecamatan Pinogaluman, yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 73,96 km², justru menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yakni 170,19 jiwa/km² pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa Pinogaluman menjadi pusat pemukiman yang cukup padat, yang mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, atau ketersediaan fasilitas umum yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Begitu pula kecamatan Kaidipang yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu 166,09 jiwa/km² pada tahun 2024 dengan luas wilayah 95,79 km². Kedua kecamatan ini menunjukkan pola urbanisasi di mana penduduk lebih terkonsentrasi di wilayah dengan fasilitas yang lebih baik dan aksesibilitas yang lebih mudah.

Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah paling luas, Bolangitang Timur (422,96 km²), memiliki kepadatan penduduk yang rendah, yaitu sekitar 38,41 jiwa/km² pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini mungkin lebih dominan oleh lingkungan alami seperti hutan atau lahan pertanian dan tidak terlalu padat penduduknya, yang juga berarti distribusi penduduk sangat tipis di wilayah yang luas tersebut.

Kepadatan di kecamatan lain seperti Bolangitang Barat, Sangkub serta Bintauna memperlihatkan nilai yang relatif, berkisar antara 26 hingga 54 jiwa/km². Ini menandakan distribusi penduduk yang relatif merata di daerah dengan tingkat kepadatan sedang, menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki karakter campuran antara kawasan pusat kegiatan dan kawasan perdesaan.

Secara keseluruhan, peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menandakan adanya tren urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang berpusat pada beberapa kecamatan tertentu. Hal ini tentunya membawa tantangan tersendiri, termasuk kebutuhan pengelolaan ruang yang baik, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta pelayanan publik yang semakin harus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut.

Tabel 2.11 menggambarkan data pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama kurun waktu lima tahun, dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini menunjukkan tren fluktuatif, dengan rerata pertumbuhan kabupaten mengalami penurunan dari 1,63% pada tahun 2020 menjadi hanya 0,80% pada tahun 2024. Hal ini memberikan indikasi bahwa dinamika demografi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti migrasi, tingkat kelahiran dan kematian, serta kondisi sosial ekonomi di masing-masing kecamatan.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangkub	1,64	1,44	1,35	0,49	0,05
2	Bintauna	1,78	1,02	0,98	1,46	0,22
3	Bolangitang Timur	1,34	0,93	0,91	1,99	0,27
4	Bolangitang Barat	1,57	0,63	0,65	0,82	1,32
5	Kaidipang	1,62	1,18	1,13	1,33	1,34
6	Pinogaluman	1,97	1,03	0,99	1,79	1,51
Kab. Bolmong Utara		1,63	1,01	0,98	1,33	0,80

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Analisis per kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Pinogaluman mencatat angka pertumbuhan tertinggi selama periode ini, khususnya pada tahun 2024 sebesar 1,51. Kenaikan ini dapat diasumsikan sebagai dampak dari meningkatnya daya tarik kawasan tersebut baik dari segi ekonomi, infrastruktur maupun sosial. Sebaliknya, Kecamatan Sangkub mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup drastis, dari 1,64% pada tahun 2020 menjadi hanya 0,05% pada tahun 2024.

Di sisi lain, Kecamatan Kaidipang sebagai pusat ibu kota kabupaten menunjukkan pertumbuhan yang cenderung stabil dan meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 1,34% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya sentralisasi pembangunan dan urbanisasi yang cenderung mengarah ke pusat administratif, sesuai dengan teori urbanisasi dan konsentrasi demografi pada wilayah pusat pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh teori tempat sentral Christaller.

Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menurun secara bertahap dalam lima tahun terakhir menandakan perlunya strategi pengendalian dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan penguatan pembangunan wilayah melalui pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan baru dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kecenderungan ini sebagai indikator penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan penyusunan strategi pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 total jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat sebanyak 88.002 jiwa. Enam kecamatan utama yakni Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang, dan Pinogaluman memiliki jumlah penduduk yang bervariasi mulai dari yang terkecil yaitu Kecamatan Sangkub dengan 11.106 jiwa hingga yang terbesar Bolangitang Barat sebanyak 16.921 jiwa.

Proyeksi penduduk untuk periode 2025 sampai 2029 menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung positif di seluruh kecamatan. Total penduduk kabupaten diperkirakan akan meningkat menjadi 89.018 jiwa pada 2025, dan terus bertambah hingga mencapai 93.203 jiwa pada 2029. Peningkatan ini merefleksikan laju pertumbuhan penduduk yang stabil, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angka kelahiran, migrasi, dan angka kematian.

Kecamatan yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan antara lain Bolangitang Timur dan Barat, yang diperkirakan jumlah penduduknya hampir mencapai 17.147 jiwa dan 17.782 jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, Kecamatan Sangkub yang memiliki jumlah penduduk terkecil juga tetap mengalami peningkatan dari 11.216 jiwa di 2025 menjadi 11.669 jiwa di 2029.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Tahun 2024 dan Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sangkub	11.106	11.216	11.328	11.440	11.554	11.669
2	Bintauna	15.234	15.400	15.569	15.739	15.910	16.084
3	Bolangitang Timur	16.244	16.421	16.599	16.780	16.963	17.147
4	Bolangitang Barat	16.921	17.090	17.260	17.433	17.607	17.782
5	Kaidipang	15.910	16.120	16.333	16.548	16.767	16.988
6	Pinogaluman	12.587	12.771	12.957	13.146	13.337	13.532
Kab. Bolaang Mongondow Utara		88.002	89.018	90.046	91.086	92.138	93.203

Sumber: Data diolah, 2025

Variasi pertumbuhan penduduk antar kecamatan mencerminkan perbedaan kondisi sosial ekonomi dan mobilitas penduduk. Kondisi ini penting untuk diperhatikan dalam penyusunan kebijakan terkait pelayanan publik, seperti kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk di tiap wilayah.

Pertumbuhan stabil jumlah dan laju penduduk di Bolaang Mongondow Utara merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor alam, sosial, dan ekonomi. Faktor-faktor ini saling berpengaruh dan berdampak terhadap kapasitas daerah untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

- a) **Sosial:** Pertumbuhan populasi yang cukup tinggi membutuhkan perhatian serius terhadap pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas perumahan. Komposisi penduduk yang heterogen dengan kehadiran masyarakat adat mengharuskan program pembangunan yang sensitif terhadap budaya agar tidak mengikis nilai-nilai lokal.
- b) **Ekonomi:** Peningkatan jumlah penduduk membutuhkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan agar tidak terjadi kemiskinan struktural. Dinamika pertumbuhan di kecamatan tertentu bisa menjadi potensi pusat-pusat ekonomi baru, yang kemudian mendorong urbanisasi dan perubahan pola hidup masyarakat.
- c) **Lingkungan:** Kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan seperti degradasi lahan, kerusakan hutan, dan pencemaran. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi perhatian utama.

- Komposisi Penduduk Menurut Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada 2024 dikelompokkan ke dalam rentang umur yang sangat rinci, mulai dari usia balita (0-4 tahun), anak-anak, usia produktif, hingga lansia (75 tahun ke atas). Data dari tabel distribusi menunjukkan bahwa kelompok usia muda hingga dewasa muda mendominasi struktur penduduk, yang secara langsung menandakan profil demografi yang relatif muda.

Tabel 2.13 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	2790	2574	5364
5-9	3830	3423	7253
10-14	3839	3520	7359
15-19	3997	3872	7869
20-24	4338	4112	8450
25-29	3766	3510	7276
30-34	3510	3324	6834
35-39	2796	2722	5518
40-44	3227	3022	6249
45-49	3075	2984	6059
50-54	2899	2742	5641
55-59	2419	2210	4629
60-64	1787	1751	3538
65-69	1299	1241	2540
70-74	835	911	1746
75+	768	909	1677
Total	45175	42827	88002

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Data menunjukkan bahwa populasi terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun (7.869 jiwa) dan 20-24 tahun (8.450 jiwa). Hal ini menunjukkan potensi "bonus demografi" yang cukup signifikan, di mana masyarakat dalam kelompok usia produktif muda memiliki peluang besar untuk mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui tenaga kerja dan inovasi.

Kelompok usia yang lebih muda seperti 0-4 tahun dan 5-9 tahun juga cukup besar, masing-masing sebanyak 5.364 dan 7.253 jiwa, menandakan adanya pertumbuhan generasi penerus yang berkelanjutan. Dengan jumlah ini, bidang pendidikan serta pelayanan kesehatan anak harus menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan daerah.

Sementara itu, kelompok usia lanjut yang berjumlah lebih kecil secara proporsional, antara lain 70-74 tahun (1.746 jiwa) dan 75 tahun ke atas (1.677 jiwa), menunjukkan struktur populasi yang masih didominasi kelompok muda, sehingga tantangan demografi seperti beban sosial lansia belum sebesar di wilayah dengan populasi yang menua. Namun demikian, dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut, pelayanan kesehatan lansia dan dukungan sosial akan menjadi kebutuhan yang wajib dipersiapkan secara bertahap.

Menganalisis data jenis kelamin dalam setiap kelompok umur, terlihat kecenderungan jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan di sebagian besar kelompok umur. Misalnya, di kelompok usia 20-24 tahun terdapat 4.338 laki-laki dan 4.112 perempuan, sedangkan di kelompok 15-19 tahun terdapat 3.997 laki-laki dan 3.872 perempuan. Fenomena ini cukup umum ditemukan dalam banyak populasi di dunia dan dapat dikaitkan dengan faktor biologis serta migrasi.

Pada kelompok lansia, di beberapa rentang usia seperti 70-74 dan 75 ke atas, jumlah perempuan mulai lebih banyak dari laki-laki. Hal ini sejalan dengan fakta demografis global bahwa rata-rata umur perempuan cenderung lebih panjang dibanding pria, sehingga populasi perempuan lansia biasanya lebih tinggi.

Rasio jenis kelamin (RJK) adalah indikator demografis yang penting untuk mengukur perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan dalam suatu populasi. Rasio ini berdampak pada berbagai aspek sosial, termasuk pernikahan, tenaga kerja, dan dinamika keluarga.

Data menunjukkan bahwa Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah 1,05, yang berarti terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di wilayah tersebut. Rasio ini menunjukkan keseimbangan yang relatif stabil antara jumlah laki-laki dan perempuan secara keseluruhan.

Tabel 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Sangkub	1,06
Bintauna	1,06
Bolang Itang Timur	1,07
Bolang Itang Barat	1,07
Kaidipang	1,05
Pinogaluman	1,03
Kab. Bolmong Utara	1,05

Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2025

Masing-masing kecamatan menunjukkan nilai RJK yang sedikit bervariasi, antara 1,03 hingga 1,07. Kecamatan dengan rasio tertinggi adalah Bolang Itang Timur dan Bolang Itang Barat, yang sama-sama pada angka 1,07, menunjukkan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan di wilayah ini. Sedangkan Pinogaluman memiliki angka terendah yaitu 1,03, yang sedikit lebih seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan.

Rasio jenis kelamin yang cenderung lebih tinggi di beberapa kecamatan ini bisa dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk, aktivitas ekonomi yang menarik tenaga kerja laki-laki, atau bisa juga karena pola mortalitas yang berbeda antara jenis kelamin.

Rasio jenis kelamin yang mendekati 1:1 menunjukkan keseimbangan populasi yang sehat, yang dapat menghindari masalah sosial yang muncul dari ketidakseimbangan gender seperti kesulitan menemukan pasangan hidup, potensi konflik sosial, atau eksodus sebagian kelompok gender tertentu.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini mencakup peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan yang tepat, seperti pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar global, masyarakat dapat menikmati peningkatan taraf hidup yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan meraih manfaat dari kemajuan ekonomi.

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan ekonomi di Bolaang Mongondow Utara menunjukkan perjalanan yang menarik dari tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana tercermin dalam grafik pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, saat sebagian besar wilayah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, Bolaang Mongondow Utara mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,71%. Angka ini menandakan bahwa meskipun menghadapi tantangan global, Bolaang Mongondow Utara memiliki ketahanan ekonomi tertentu yang mampu menjaga pertumbuhan tetap berada di kisaran positif, berbeda dengan nasional dan Sulut yang mengalami penurunan signifikan dengan angka negatif.

Memasuki tahun 2021, Bolaang Mongondow Utara menunjukkan pemulihan pesat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,46%. Lonjakan ini mencerminkan respons cepat terhadap kondisi pandemi, kemungkinan dari upaya pemulihan yang intensif pada sektor-sektor utama ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ini berlanjut dengan sangat kuat di tahun 2022, di mana Bolaang Mongondow Utara mencatat puncak pertumbuhan sebesar 5,52%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang 5,31% dan mendekati capaian Sulut sebesar 5,42%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Bolaang Mongondow Utara tidak hanya pulih, tetapi juga mampu melejit di atas rata-rata nasional, mencerminkan efektivitas kebijakan lokal, pengelolaan sumber daya, dan dukungan sektor produktif di wilayah ini.

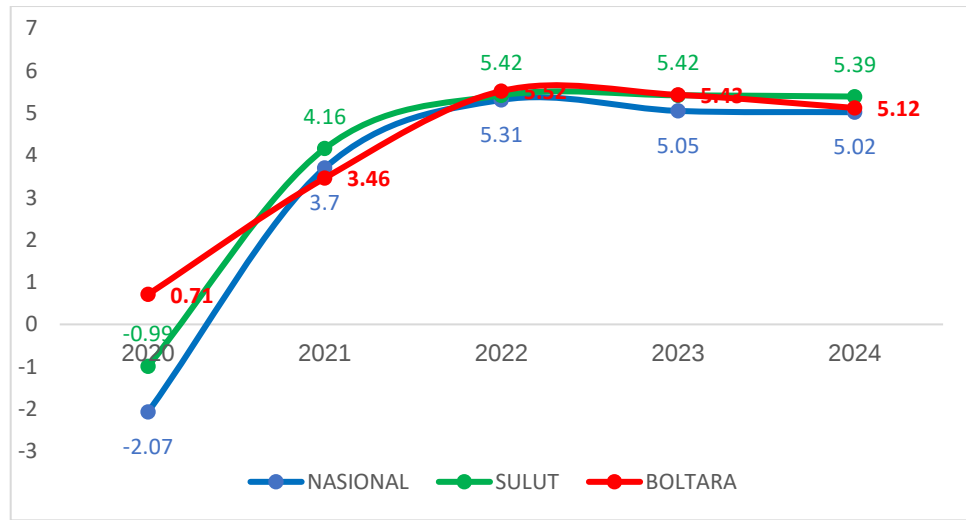
Setelah puncak pertumbuhan di 2022, grafik menunjukkan penurunan tipis di tahun 2023 dan 2024, dengan angka 5,43% dan 5,12% secara berurutan. Meskipun turun, pertumbuhan Bolaang Mongondow Utara masih relatif kuat dan stabil, tetap berada di atas tingkat nasional, yang pada saat bersamaan mengalami penurunan lebih besar. Penurunan ini bisa menjadi pertanda adanya tekanan ekonomi eksternal dan internal, seperti ketidakpastian pasar global, kenaikan harga bahan pokok, serta tantangan dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor utama. Namun, stabilitas angka pertumbuhan tersebut tetap mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik.

Perkembangan ekonomi Bolaang Mongondow Utara ini erat kaitannya dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pengelolaan yang baik terhadap sektor-sektor tersebut, dikombinasikan dengan program pemberdayaan UMKM dan dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur serta kemampuan SDM, berperan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan. Selain itu, fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing produk lokal juga menjadi faktor kunci yang membuat Bolaang Mongondow Utara mampu bertahan dan tumbuh selama periode tantangan pascapandemi.

Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Utara dari 2020 hingga 2024 menunjukkan gambaran ekonomi yang resilien dan adaptif terhadap guncangan eksternal, dengan periode pemulihan yang cepat dan berkembang menuju stabilitas yang berkelanjutan. Walaupun menghadapi tantangan penurunan pertumbuhan setelah puncak tahun 2022, Bolaang Mongondow

Utara tetap mempertahankan posisi di atas rata-rata nasional, menandakan efektivitas kebijakan dan potensi lokal yang kuat sebagai motor penggerak utama ekonomi daerah ini.

Grafik 2.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Dapat dijelaskan keterkaitan kontribusi PDRB lapangan usaha yang ada di Bolaang Mongondow Utara terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024, yang memperlihatkan struktur ekonomi daerah secara detail. Dari tabel di bawah, tampak bahwa sektor utama yang mendominasi kontribusi terhadap PDRB Bolaang Mongondow Utara adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase signifikan sebesar 44,72%. Hal ini menegaskan bahwa sektor agraris menjadi tulang punggung ekonomi Bolaang Mongondow Utara, sekaligus menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tahan banting pada masa pandemi dan pascapandemi.

Tabel 2.15 Kontribusi PDRB (ADHB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB ADHB (Persen) Tahun 2024
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	44,72
Pertambangan dan Penggalian	10,9
Industri Pengolahan	3,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23
Konstruksi	14,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,76
Transportasi dan Pergudangan	1,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26
Informasi dan Komunikasi	0,53

Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75
Real Estate	3,04
Jasa Perusahaan	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3
Jasa Pendidikan	2,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,2
Jasa Lainnya	0,83
PDRB	100

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Selain itu, sektor konstruksi yang berkontribusi sebesar 14,59% menandakan adanya aktivitas pembangunan fisik yang intensif, baik untuk infrastruktur maupun aktivitas pembangunan lainnya yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Konstruksi yang kuat ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai bagian dari strategi pemulihan dan penguatan ekonomi. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga ikut memberikan kontribusi cukup besar, yakni 12,76%, yang menggambarkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup dinamis dalam hal distribusi barang dan jasa serta sektor jasa perbaikan kendaraan yang penting untuk aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat.

Sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 10,9% juga menjadi salah satu pilar penting ekonomi Bolaang Mongondow Utara. Sektor ini biasanya membawa dampak positif terhadap pendapatan daerah secara langsung maupun tidak langsung, terutama jika diiringi oleh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti industri pengolahan (3,26%), real estate (3,04%), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (3%) menambah keragaman struktur ekonomi yang menunjang stabilitas PDRB daerah.

Dengan melihat data dari LPE Bolaang Mongondow Utara tahun 2024, jelas bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada grafik pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kekuatan sektor-sektor utama tersebut. Dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bukan hanya mendukung angka pertumbuhan yang positif, tetapi juga mencerminkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan relatif baik. Secara bersamaan, sektor konstruksi yang besar memperkuat titik tekan pada pembangunan serta perluasan kapasitas infrastruktur yang menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

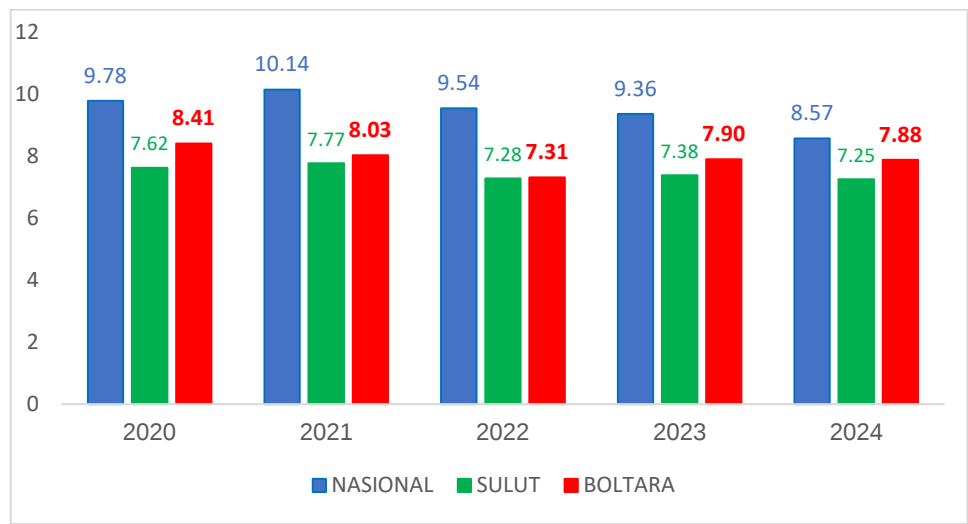
Faktor lain yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini antara lain program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil menengah yang didukung oleh perdagangan serta jasa yang mendukung sektoral. Keberadaan sektor pertambangan yang substansial juga memberi dorongan tambahan sekaligus tantangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial di daerah.

Struktur distribusi PDRB Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yang berciri agraris kuat, didukung oleh sektor konstruksi dan perdagangan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai dasar ekonomi lokal yang solid. Keterkaitan antara struktur ekonomi ini dengan grafik pertumbuhan ekonomi yang stabil menegaskan bahwa Bolaang Mongondow Utara memiliki fondasi ekonomi yang cukup kokoh dengan sumber daya utama dan sektor-sektor pendukung yang aktif, sehingga mampu menanggulangi tekanan eksternal dan menjaga pertumbuhan positif di tengah tantangan global dan nasional.

- **Tingkat Kemiskinan**

Salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar dapat hidup secara layak. Dari perspektif ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Standar pengeluaran per kapita untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar disebut Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan itu sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Grafik 2.10 Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, dan tingkat nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, angka kemiskinan nasional dan Sulut menunjukkan tren penurunan yang konsisten sepanjang lima tahun terakhir. Angka kemiskinan nasional turun dari 9,78% pada 2020 menjadi 8,57% pada 2024, sementara Sulut mengalami penurunan dari 7,62% menjadi 7,25% dalam periode yang sama. Namun, kondisi di Bolaang Mongondow Utara berbeda. Meskipun sempat menurun drastis dari 8,41% pada 2020 menjadi 7,31% pada 2022, angka kemiskinan di Bolaang Mongondow Utara kembali meningkat pada tahun berikutnya menjadi 7,90% pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 7,88% pada 2024. Situasi ini menjadikan Bolaang Mongondow Utara sebagai beban bagi Sulut dalam hal pengendalian angka kemiskinan, karena peningkatan kemiskinan di wilayah ini menghambat upaya penurunan angka kemiskinan Sulut secara keseluruhan. Kenaikan kembali angka kemiskinan di Bolaang Mongondow Utara setelah penurunan awal menunjukkan perlunya intervensi yang lebih fokus dan tepat sasaran pada daerah ini, agar dapat mengatasi penyebab kemiskinan yang masih tinggi dan berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial ekonomi Sulut secara umum.

Tabel 2.16 Gambaran Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

INDIKATOR KEMISKINAN	CAPAIAN/REALISASI TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	6,82	6,53	6,01	6,55	6,6
Persentase Kemiskinan (Persen)	8,41	8,03	7,31	7,90	7,88
Garis Kemiskinan (Rupiah)	264.227,00	275.369,00	283.627,00	316.327,00	334.448,00
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,18	0,90	0,81	0,99
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14	0,26	0,17	0,14	0,22

Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Tabel 2.16 menunjukkan data penting terkait kondisi kemiskinan di Bolaang Mongondow Utara selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut mengandung berbagai indikator yang mencerminkan gambaran menyeluruh mengenai kemiskinan, di antaranya adalah jumlah penduduk miskin dalam ribuan orang, persentase kemiskinan dibandingkan total populasi, garis kemiskinan yang diukur berdasarkan rupiah, serta dua indeks penting, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Keberadaan indikator-indikator ini menjadi sangat krusial untuk memahami tidak hanya berapa banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa dalam dan seberapa berat tingkat kemiskinan yang dialami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga bisa menjadi acuan untuk kebijakan dan intervensi pemerintah setempat.

Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, data menunjukkan fluktuasi dalam jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 6,82 ribu orang, kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 6,01 ribu orang pada tahun 2022. Namun, setelah itu terjadi peningkatan kembali yang berkelanjutan hingga mencapai 6,6 ribu orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin selama dua tahun awal ini bisa jadi merupakan hasil dari upaya pemerintah atau faktor ekonomi tertentu yang mampu mengangkat sebagian warga dari kemiskinan. Namun, peningkatan lagi yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih intensif. Hal ini juga dapat menunjukkan adanya faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, atau perubahan ekonomi

yang menyebabkan lebih banyak keluarga kembali jatuh ke dalam kategori miskin atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Mengamati persentase kemiskinan sebagai indikator lain, terlihat tren yang cukup konsisten selama lima tahun tersebut, meskipun tetap ada fluktuasi minor. Persentase kemiskinan turun dari 8,41% pada tahun 2020 menjadi titik terendah di tahun 2022 sebesar 7,31%, sebelum kembali naik sedikit dan bertahan di kisaran 7,9% pada tahun 2023 dan 7,88% pada tahun 2024. Penurunan persentase kemiskinan sampai tahun 2022 menegaskan bahwa secara proporsional, jumlah warga miskin relatif berkurang terhadap total populasi, yang mungkin mencerminkan peningkatan kesejahteraan umum atau pertumbuhan ekonomi yang membaik di daerah ini. Namun, kenaikan persentase tersebut pada tahun 2023 dan 2024 meskipun tipis, mengindikasikan adanya tekanan kembali pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mungkin menyebabkan lebih banyak penduduk menjadi rentan terhadap kemiskinan.

Salah satu indikator yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang diukur dalam rupiah ini mengindikasikan batas minimum pengeluaran yang diperlukan oleh penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar. Data menunjukkan bahwa garis kemiskinan mengalami peningkatan signifikan dari Rp264.227 pada tahun 2020 menjadi Rp334.448 pada tahun 2024. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sehingga biaya hidup minimum pun ikut naik. Hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk dan persentase kemiskinan stabil, urbanisasi, kenaikan harga, dan faktor ekonomi makro lainnya menyebabkan masyarakat miskin harus mengeluarkan lebih banyak biaya agar bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, yang dapat memperberat beban kemiskinan.

Selain itu, dua indeks kemiskinan yang diukur, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), memberikan gambaran mendalam mengenai kualitas kemiskinan yang dialami masyarakat. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mencerminkan seberapa jauh rata-rata pendapatan penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan kemiskinan antara penduduk miskin. Dari data terlampir, kedua indeks ini mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,18,

kemudian menurun dan naik kembali menjadi 0,99 pada tahun 2024. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan pola serupa, dengan puncak di tahun 2021 sebesar 0,26 dan naik lagi menjadi 0,22 pada tahun 2024 setelah sempat turun ke level lebih rendah. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Bolaang Mongondow Utara tidak hanya soal jumlah orang miskin, tetapi juga kualitas hidup mereka yang cenderung memburuk pada beberapa tahun tertentu dan membaik pada tahun lain, namun belum stabil secara konsisten.

Pada tahun 2024 menampilkan gambaran yang cukup kompleks. Pada tahun itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan menjadi 6,6 ribu orang, naik dari 6,55 ribu pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan tantangan serius dalam menurunkan jumlah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, menariknya adalah persentase kemiskinan justru sedikit menurun dari 7,90% menjadi 7,88%. Hal ini bisa diartikan bahwa walaupun jumlah absolut penduduk miskin bertambah, proporsi penduduk miskin terhadap total populasi relatif stabil atau bahkan sedikit membaik. Situasi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi yang cukup besar atau perubahan demografi sehingga presentase secara keseluruhan tidak meningkat signifikan meskipun jumlah orang miskin bertambah.

Selain itu, garis kemiskinan pada tahun 2024 juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi Rp334.448 dibandingkan tahun sebelumnya Rp316.327. Peningkatan garis kemiskinan ini memperlihatkan kebutuhan minimum hidup yang harus dipenuhi menjadi lebih tinggi, sehingga memperberat beban warga miskin yang sudah ada dan menambah kemungkinan penduduk untuk masuk kategori miskin baru. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2024 juga menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2023, dengan nilai 0,99 untuk P1 dan 0,22 untuk P2. Kenaikan kedua indeks ini mengartikan bahwa tidak hanya jumlah warga miskin yang bertambah, tetapi pendalaman kemiskinan juga terjadi, di mana warga miskin mengalami kondisi ekonomi yang semakin parah dan jarak antara pendapatan mereka dengan garis kemiskinan semakin lebar. Demikian juga ketimpangan di antara warga miskin meningkat, menandakan ada kelompok yang sangat miskin yang terperangkap dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem.

Dari keseluruhan analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat periode penurunan kemiskinan di tahun-tahun awal, tantangan

untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih besar, terutama melihat tren kenaikan di tahun-tahun terakhir yang memperlihatkan ketidakstabilan kondisi ekonomi masyarakat miskin. Kenaikan garis kemiskinan menyebabkan kebutuhan hidup minimum semakin mahal, sehingga perlu keberpihakan kebijakan yang tepat supaya bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan bisa efektif meringankan beban warga terdampak. Selain itu, perhatian lebih pada kedalaman dan keparahan kemiskinan harus menjadi fokus dalam strategi pembangunan daerah agar tidak hanya sekadar mengurangi jumlah orang miskin, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas hidup mereka secara signifikan.

Secara umum, data ini memberikan gambaran penting bagi pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas bahwa kemiskinan di Bolaang Mongondow Utara masih menjadi isu yang harus diatasi secara menyeluruh dengan pendekatan yang holistik, mulai dari pemantauan inflasi kebutuhan dasar, distribusi pendapatan, hingga upaya pemberdayaan ekonomi agar ketimpangan dan kedalaman kemiskinan bisa ditekan. Penanganan kemiskinan yang tepat dan berkelanjutan dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas dan menciptakan daerah yang lebih makmur dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus berupaya mengentaskan kemiskinan melalui beberapa program dan inisiatif. Beberapa Langkah yang diambil dalam Upaya pengentasan kemiskinan tersebut meliputi:

1. Penguatan Program Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial

Mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan sosial yang sudah berjalan dengan memperluas cakupan dan efektivitasnya, di antaranya:

- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Non Tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
- Program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya yang terkoordinasi agar memberikan perlindungan yang menyeluruh.
- Perlindungan sosial melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai jaring pengaman bagi masyarakat tidak mampu, khususnya yang rentan terhadap masalah kesehatan.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

- Pengembangan dan perbaikan fasilitas kesehatan serta penyuluhan edukasi kesehatan, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui.
- Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan yang terjangkau untuk mengurangi beban biaya pendidikan, sehingga bisa mengurangi kemiskinan jangka panjang.

3. Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur Pendukung

- Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang meliputi renovasi dan pembangunan rumah agar memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.
- Penyediaan sarana prasarana pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Kewirausahaan

- Program pelatihan keterampilan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat kurang mampu agar bisa mandiri secara ekonomi.
- Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi daerah untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan

- Fokus pada penduduk miskin dengan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan tinggi melalui intervensi khusus seperti pelatihan intensif, pemberian modal, dan pendampingan sosial.

6. Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Inflasi

- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholders lokal untuk mengontrol harga bahan pokok agar tidak memberatkan masyarakat miskin.
- Monitoring dan pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok secara efisien melalui pasar tradisional dan modern.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Partisipasi Masyarakat

- Optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan dengan data real-time yang akurat agar kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat.

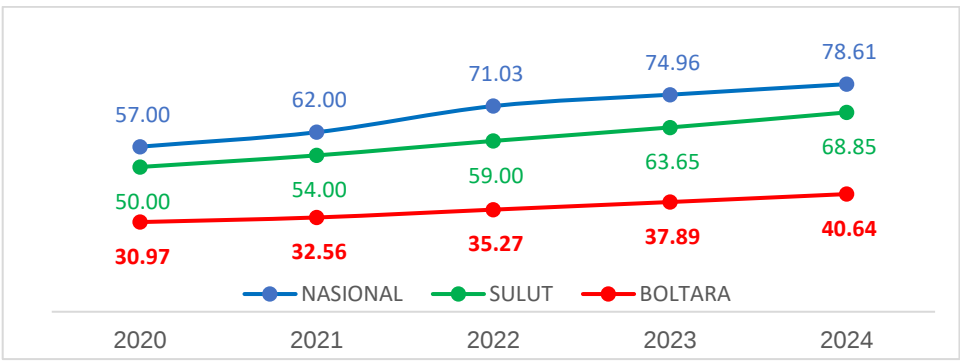
- Mendorong peran aktif masyarakat dan sektor swasta dalam program pengentasan kemiskinan melalui CSR dan kemitraan pembangunan berkelanjutan.

• **PDRB Per Kapita**

Pertumbuhan ekonomi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita merupakan kinerja suatu wilayah yang menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk, sehingga besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Semakin besar pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin makmur daerah tersebut.

Grafik 2.11 PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Perkembangan PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara selama periode waktu 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Walaupun begitu, PDRB per kapita terus

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 40,64 juta rupiah pada tahun 2024. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara masih termasuk dalam kategori kabupaten berpendapatan menengah bawah. Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 4 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu hanya sebesar 5-6 persen dan di 2020 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,71 persen juga di 2021 mulai mengalami peningkatan kembali di angka 3,46 persen kemudian di 2022 tumbuh 5,52 persen serta tumbuh melambat sebesar 5,43 persen di 2023.

- **Indeks Gini**

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah salah satu alat ukur yang paling umum digunakan untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Dikenalkan oleh statistikawan Italia, Corrado Gini, pada tahun 1912, rasio ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa merata atau tidak meratanya pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu negara. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna merata (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem (satu orang memiliki semua pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa).

Dengan menggunakan data yang tepat, kita dapat menggambarkan ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Rasio Gini memberikan wawasan yang berharga, ia tidak memberikan informasi tentang kemiskinan absolut atau kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan analisis Rasio Gini dengan indikator lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi ekonomi dan sosial.

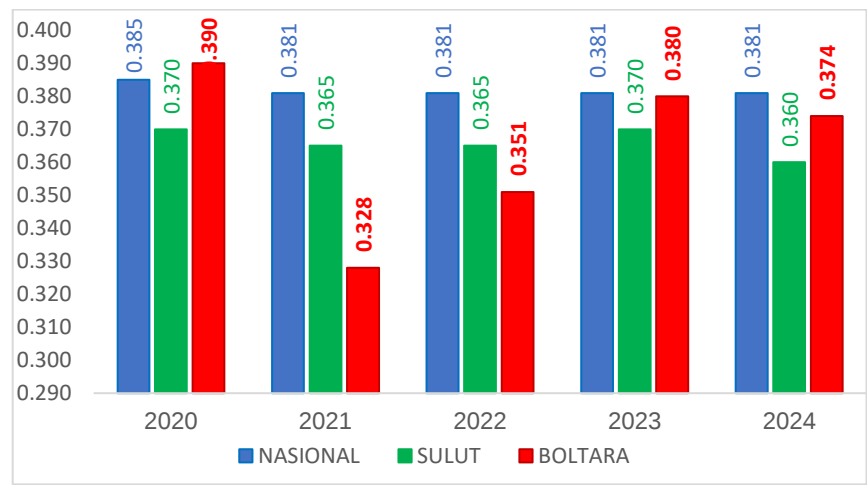
Ketimpangan pendapatan yang tinggi, seperti yang diukur oleh Rasio Gini, dapat memiliki berbagai implikasi sosial yang signifikan. Salah satu dampak paling langsung adalah meningkatnya ketegangan sosial. Ketika sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan, hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang lebih luas. Ketidakpuasan ini dapat memicu protes, kerusuhan, dan bahkan konflik sosial. Selain itu, ketimpangan yang tinggi sering kali

berhubungan dengan rendahnya mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi yang rendah memiliki peluang yang lebih sedikit untuk meningkatkan status ekonomi mereka.

Ketimpangan pendapatan juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih buruk, termasuk angka kematian yang lebih tinggi dan prevalensi penyakit yang lebih besar. Hal ini dapat disebabkan oleh akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan juga dapat mengarah pada ketidakadilan dalam akses terhadap peluang pendidikan, yang pada gilirannya dapat memperpetuasi siklus kemiskinan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, daya beli masyarakat secara keseluruhan dapat menurun, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan agregat. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, karena bisnis mungkin tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dan memperluas operasi mereka.

Grafik 2.12 Rasio Gini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Namun, hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sederhana. Dalam beberapa kasus, ketimpangan dapat mendorong pertumbuhan dengan memberikan insentif bagi individu untuk berinovasi dan berinvestasi. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan ini, seperti kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, dan akses terhadap

sumber daya. Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam konteks yang lebih luas.

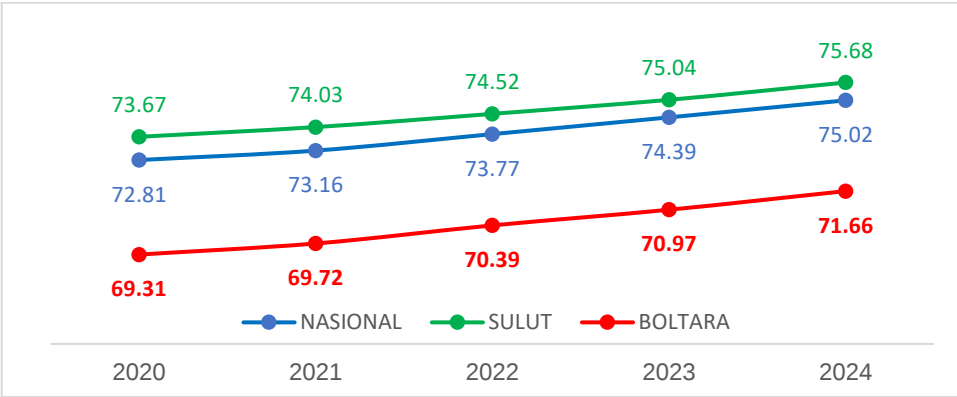
Nilai Gini Rasio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Dari grafik perbandingan Gini Rasio, terlihat bahwa Bolaang Mongondow Utara secara konsisten memiliki nilai ketimpangan lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Utara (Sulut) dan bahkan sering kali mendekati atau melebihi nilai rata-rata nasional. Pada tahun 2020, Gini Rasio Bolaang Mongondow Utara mencapai puncaknya di angka 0,390, nilai tertinggi di antara Sulut (0,370) dan nasional (0,385), yang mengindikasikan ketimpangan sosial dan ekonomi penduduk di daerah ini masih cukup tinggi. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis ke angka 0,328 yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan secara mendalam dan signifikan.

Penurunan tersebut, walaupun cukup menggembirakan, tidak bertahan lama. Data tahun 2022 dan 2023 memperlihatkan peningkatan kembali nilai Gini Rasio ke angka 0,351 dan 0,380, masing-masing, menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi pada 2021 kurang berkelanjutan dan ketimpangan mulai meningkat kembali ke level yang mendekati kondisi awal tahun 2020. Pada tahun 2024, tercatat sedikit penurunan ke angka 0,374, namun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Sulut yang 0,360 dan relatif dekat dengan angka nasional yakni 0,381. Trend ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan di Bolaang Mongondow Utara masih menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

- **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan kualitas hidup manusia. IPM mengukur tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini, IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat dibandingkan dengan hanya menggunakan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB).

Grafik 2.13 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam periode ini, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam nilai IPM, yang mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 66,99, yang menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pembangunan, ada fondasi yang cukup baik untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, pada tahun 2021, IPM mengalami sedikit penurunan menjadi 67,39. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor kesehatan dan pendidikan, serta ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat kemajuan pembangunan. Memasuki tahun 2022, IPM kembali menunjukkan tren positif dengan nilai 68,06. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan mulai membuahkan hasil. Program-program yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, seperti pelatihan bagi tenaga kesehatan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, mungkin berkontribusi pada perbaikan ini. Selanjutnya, pada tahun 2023, IPM meningkat lagi menjadi 70,97, yang merupakan lompatan signifikan. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai hasil dari kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan terintegrasi, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam program-program pembangunan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berhasil mengimplementasikan strategi pembangunan yang lebih efektif, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2024, IPM mencapai 71,66, menandakan bahwa tren positif ini terus

berlanjut. Peningkatan yang konsisten dalam IPM selama periode ini mencerminkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan yang lebih baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Tabel 2.17 Perkembangan IPM dan Selisih IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terhadap IPM Nasional Tahun 2020 - 2024

URAIAN IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
Bolaang Mongondow Utara	69,31	69,72	70,39	70,97	71,66
Gap	3,50	3,44	3,38	3,42	3,36

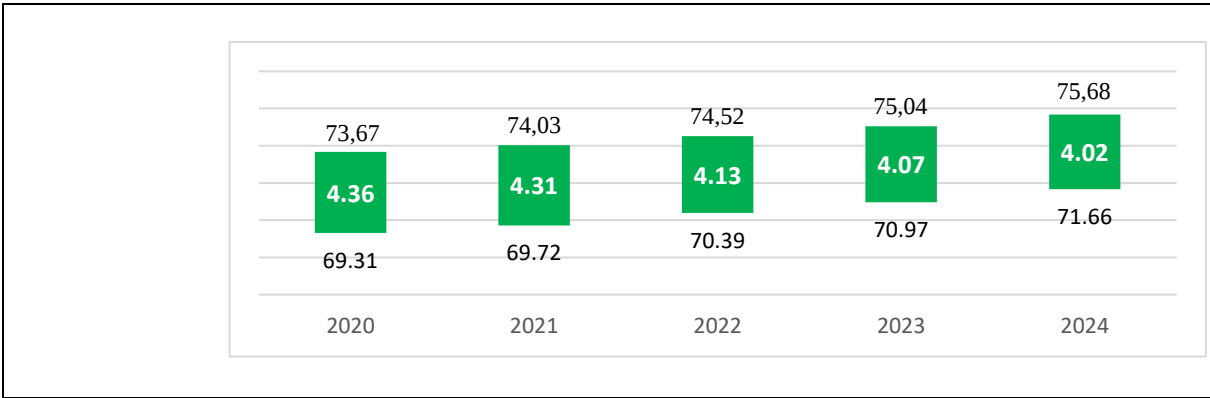
Tahun	Nasional	Bolaang Mongondow Utara	Gap
2020	72,81	69,31	3,50
2021	73,16	69,72	3,44
2022	73,77	70,39	3,38
2023	74,39	70,97	3,42
2024	75,02	71,66	3,36

Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan pengolahan data di atas, dapat dilihat bahwa gap IPM antara Bolaang Mongondow Utara dan Nasional mulai berkurang sejak tahun 2020. Artinya, pertumbuhan IPM Bolaang Mongondow Utara menjadi lebih cepat dibandingkan dengan IPM Nasional sejak tahun 2020. Di tahun 2020, selisih IPM Bolaang Mongondow Utara terhadap IPM Nasional adalah 3,50 poin. Di tahun 2022, selisih berkurang menjadi 3,38 poin dan secara konsisten terus berkurang hingga terakhir di tahun 2024 menjadi 3,38 poin.

Tabel 2.18 Perkembangan IPM dan Selisih IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terhadap IPM Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024

URAIAN IPM	2020	2021	2022	2023	2024
Sulut	73,67	74,03	74,52	75,04	75,68
Bolaang Mongondow Utara	69,31	69,72	70,39	70,97	71,66
Gap	4,36	4,31	4,13	4,07	4,02



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

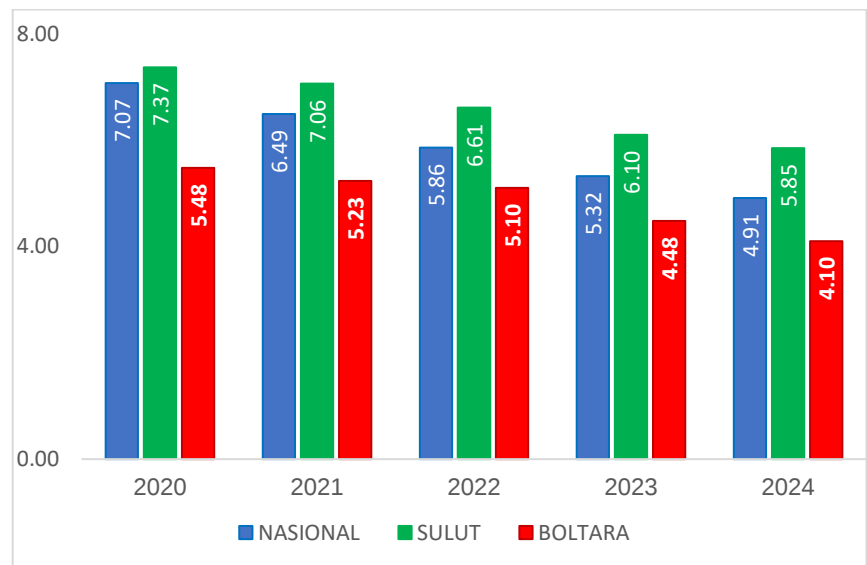
Dapat dilihat bahwa gap IPM antara Bolaang Mongondow Utara terhadap Sulut juga mulai berkurang sejak tahun 2020. Pertumbuhan IPM Bolaang Mongondow Utara menjadi lebih cepat dibandingkan dengan IPM Sulut sejak tahun 2020. Di tahun 2020, selisih terhadap IPM Sulut adalah 4,36 poin. Di tahun 2022, selisih berkurang menjadi 4,13 poin dan terus berkurang hingga terakhir di tahun 2024 menjadi 4,02 poin.

• **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, TPT menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, TPT menunjukkan fluktuasi penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 5,48%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 5,23%, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 5,10%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 dapat diindikasikan sebagai dampak dari program-program pemerintah yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja.

Grafik 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya TPT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain adalah masih minimnya lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan, dan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Banyak lulusan pendidikan yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan industri yang ada, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang ada.

Dampak dari pengangguran tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Pengangguran dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, ketidakpuasan sosial, dan bahkan kriminalitas. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung mengalami penurunan kualitas hidup, yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental dan fisik. Selain itu, tingginya angka pengangguran juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, karena berkurangnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penanganan pengangguran tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan TPT. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga

kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemerintah juga berupaya menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kerja sama dengan sektor swasta juga menjadi salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran, dengan menciptakan program magang dan kerja sama dalam pelatihan.

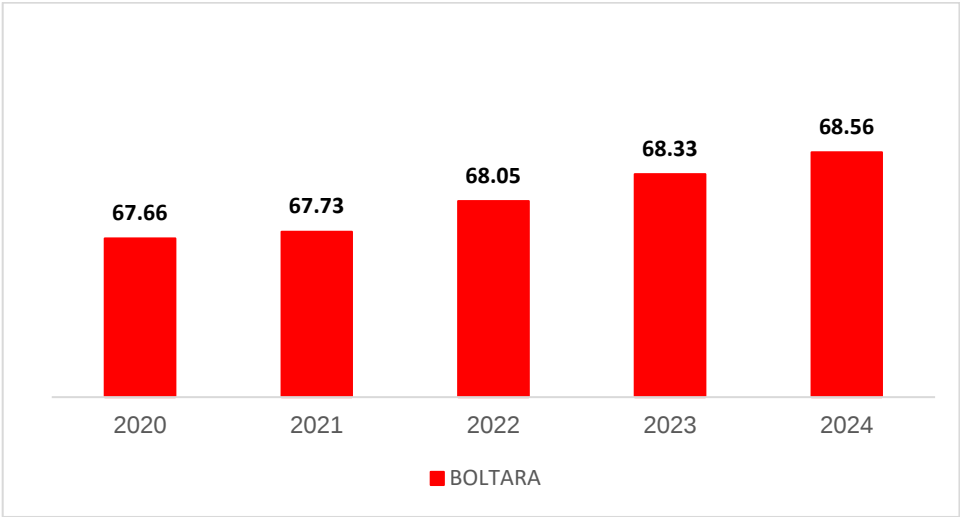
Grafik yang menunjukkan TPT di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika pasar tenaga kerja di daerah tersebut. Penurunan TPT dari tahun 2020 ke 2021 menunjukkan adanya respons positif terhadap kebijakan yang diterapkan, namun fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa tantangan masih ada. Sebagai seorang perencana, penting untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi TPT dan merumuskan strategi yang lebih efektif. Hal ini termasuk pengembangan program yang lebih terintegrasi antara pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan TPT dapat terus menurun dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

B. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Konsep *Kesehatan untuk Semua* menekankan akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk tanpa diskriminasi usia, jenis kelamin, status sosial, maupun lokasi geografis. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kondisi kesehatan warganya melalui berbagai program dan kebijakan. Dua indikator utama yang mencerminkan capaian ini adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan Prevalensi Stunting.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan umum masyarakat, termasuk efektivitas pelayanan kesehatan, gizi, pola hidup, serta kondisi lingkungan. Berdasarkan data BPS Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025, terjadi peningkatan konsisten UHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 67,66 tahun, mengalami sedikit kenaikan menjadi 67,73 tahun pada tahun 2021. Pada tahun 2022, lonjakan lebih signifikan terjadi dengan angka mencapai 68,05 tahun. Tahun 2023 memperlihatkan peningkatan lebih lanjut ke 68,33 tahun, dan pada tahun 2024, UHH mencapai 68,56 tahun.

Grafik 2.15 Usia Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

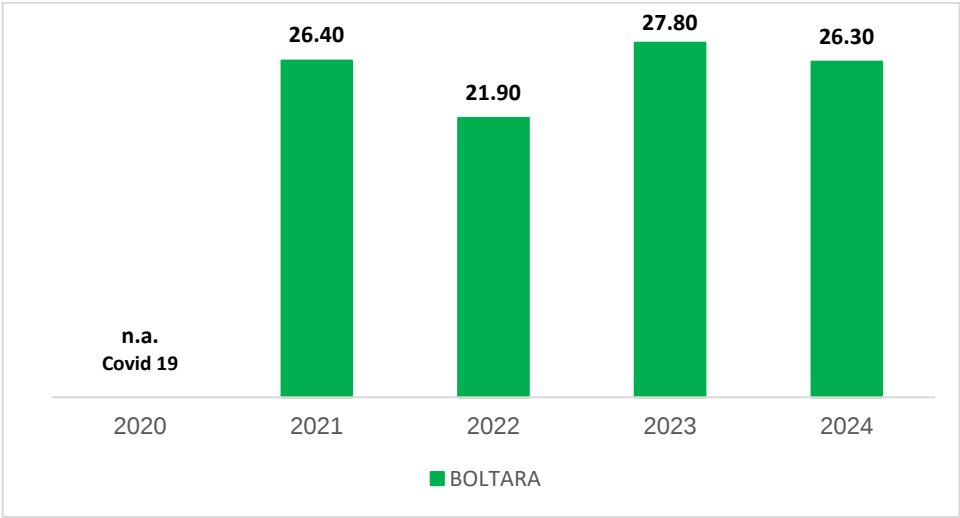


Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, penyuluhan gizi, promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta intervensi kebijakan melalui program jaminan sosial kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

Meski kenaikan setiap tahun relatif kecil (antara 0,07 sampai 0,28 tahun), tren yang stabil menunjukkan bahwa arah pembangunan kesehatan berada pada jalur yang positif. Ini juga menjadi sinyal bahwa kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak mulai mendapatkan perhatian yang lebih baik dalam sistem pelayanan publik.

Grafik 2.16 Prevalensi Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024 (SSGI/SKI)



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesehatan adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Indikator ini sangat penting karena stunting tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga pada perkembangan otak dan produktivitas masa depan.

Sesuai data yang di rilis oleh SSGI/SKI bahwa Tahun 2020 tidak tersedia data tentang capaian prevalensi stunting karena kondisi darurat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, prevalensi stunting berada pada angka 26,40%, cukup tinggi dibandingkan standar nasional yang ditetapkan. Menariknya, tahun 2022 mencatat penurunan signifikan menjadi 21,90%, yang menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak. Namun, tahun 2023 terjadi lonjakan kembali menjadi 27,80%, mengindikasikan potensi lemahnya keberlanjutan program atau adanya faktor eksternal seperti dampak sosial ekonomi pasca-pandemi. Tahun 2024 memperlihatkan penurunan kembali ke 26,30%, namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian 2022.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting belum sepenuhnya teratasi dan membutuhkan intervensi yang lebih sistematis serta lintas sektor. Indikasi penyebab naik-turunnya prevalensi ini bisa berasal dari keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, sanitasi buruk, rendahnya edukasi gizi di tingkat rumah tangga, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pendekatan pembangunan kesehatan berbasis siklus hidup menjadi krusial dalam memastikan bahwa semua kelompok umur mendapatkan intervensi yang sesuai. Untuk anak-anak, fokus harus pada pemenuhan gizi dan imunisasi. Untuk remaja, promosi kesehatan reproduksi dan pendidikan gizi menjadi penting. Sedangkan bagi kelompok dewasa dan lansia, penekanan dapat diberikan pada deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, serta penyediaan layanan rawat jalan yang ramah lansia.

Peningkatan UHH yang konsisten menggambarkan keberhasilan sebagian dari pendekatan ini, namun tingginya angka stunting menandakan masih adanya gap dalam pelayanan gizi pada fase awal kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem monitoring dan evaluasi program, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala dengan melibatkan kader kesehatan di desa.

Aspek kesetaraan gender juga harus diperhatikan. Data tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun penting dipastikan bahwa perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui, mendapatkan akses layanan kesehatan yang sama dan berkualitas. Kesadaran ini harus ditanamkan dalam setiap program kesehatan masyarakat agar tidak ada kelompok yang tertinggal.

Khususnya pada isu stunting, peran perempuan sangat sentral sebagai pengasuh utama anak. Maka program pemberdayaan perempuan, edukasi gizi ibu hamil, serta peningkatan keterampilan keluarga dalam pengelolaan gizi rumah tangga harus ditingkatkan.

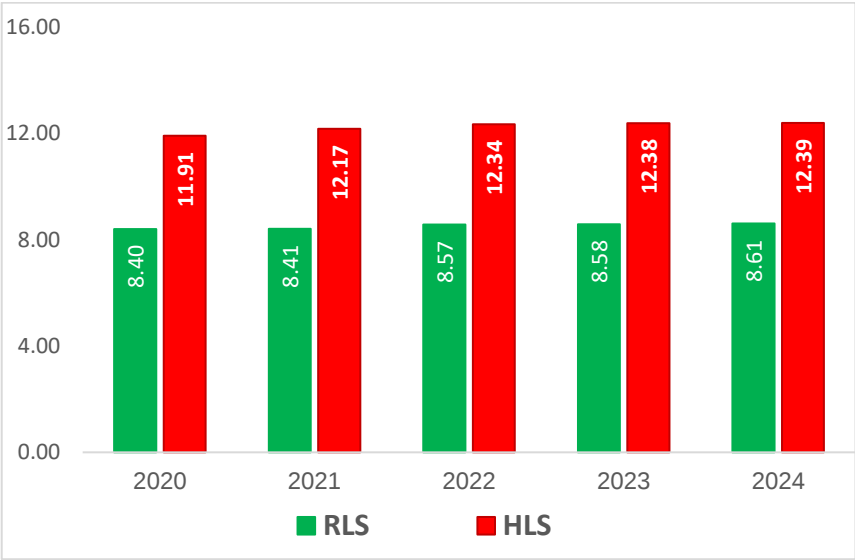
C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan merata membuka peluang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta hidup secara bermartabat. Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan yang inklusif dan merata tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga negara, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pembangunan pendidikan menjadi bagian integral dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana tergambar dalam indikator-indikator utama seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan formal, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan perkiraan jumlah tahun sekolah yang dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke depan berdasarkan kondisi saat ini. Kedua indikator ini menunjukkan sejauh mana akses dan keberlangsungan pendidikan dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdapat tren positif dalam pertumbuhan RLS dan HLS sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,40 tahun, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 8,61 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan akses pendidikan serta keberhasilan masyarakat menyelesaikan jenjang pendidikan minimal hingga SMP atau awal jenjang SMA.

Grafik 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, HLS juga mengalami peningkatan signifikan dari 11,91 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,39 tahun di tahun 2024. Artinya, anak-anak usia sekolah di Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2024 diperkirakan akan mampu mengenyam pendidikan hingga setingkat pendidikan tinggi diploma. Kenaikan HLS menunjukkan adanya optimisme dan peluang yang terbuka lebar bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, yang tentunya juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, membangun infrastruktur pendidikan, serta penyediaan tenaga pendidik.

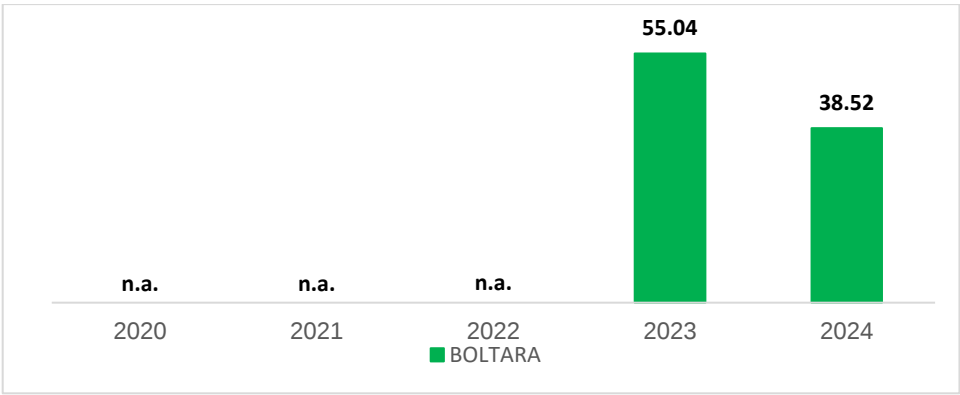
Kenaikan baik pada RLS maupun HLS menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan geografis dan ekonomi di wilayah Bolaang Mongondow Utara, komitmen dan strategi pembangunan pendidikan sudah berada pada arah yang tepat. Namun, perlu dicermati bahwa kesenjangan antara HLS dan RLS masih cukup tinggi, yakni sekitar 3,78 tahun pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan terutama pada jenjang menengah dan tinggi.

Selain indikator pendidikan formal seperti RLS dan HLS, dimensi penting lain dalam menilai kualitas pendidikan dan pembangunan manusia adalah tingkat literasi masyarakat. Literasi merupakan kemampuan dasar yang memungkinkan individu memahami informasi, berkomunikasi secara efektif, serta membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi

indikator penting dalam menilai kemampuan literasi fungsional masyarakat secara menyeluruh.

Menurut data BPS, nilai IPLM untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 55,04 persen, namun mengalami penurunan menjadi 38,52 persen pada tahun 2024. Tidak tersedia data IPLM untuk tahun 2020 hingga 2022 (n.a.), sehingga tren jangka panjang sulit dianalisis secara penuh. Meskipun demikian, penurunan drastis antara tahun 2023 dan 2024 menjadi catatan penting yang harus disoroti secara kritis.

Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Penurunan nilai IPLM ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berkurangnya program pemberdayaan literasi masyarakat, minimnya akses terhadap bahan bacaan atau fasilitas perpustakaan, lemahnya budaya membaca, atau terganggunya kegiatan pembelajaran non-formal dan informal akibat dinamika pasca-pandemi. Apabila tidak segera diatasi, rendahnya literasi masyarakat akan berdampak negatif terhadap produktivitas, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi era digital dan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah untuk merancang kembali strategi pembangunan literasi melalui berbagai pendekatan seperti revitalisasi taman baca masyarakat, pelatihan literasi digital, integrasi literasi dalam program keagamaan dan budaya lokal, serta sinergi dengan sektor pendidikan dan komunitas.

Meski indikator RLS dan HLS menunjukkan peningkatan, dan IPLM telah sempat mencatat capaian yang menggembirakan, masih terdapat

berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tantangan geografis seperti keterpencilan wilayah, keterbatasan transportasi, serta ketimpangan sarana-prasarana pendidikan antar kecamatan menjadi hambatan klasik yang masih perlu diatasi.

Di sisi lain, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tingkat pendapatan, dan latar belakang pendidikan orang tua turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak-anak. Rendahnya literasi orang tua dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor non-teknis yang perlu diintervensi dengan pendekatan kultural dan persuasif.

Strategi peningkatan kualitas pendidikan ke depan perlu mencakup perluasan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di wilayah terpencil, penyediaan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk keluarga tidak mampu, serta peningkatan kompetensi guru, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pemerintah daerah juga dapat mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, LSM, dan perguruan tinggi dalam rangka memperkuat program literasi, digitalisasi sekolah, serta pelatihan keterampilan abad ke-21.

Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya, termasuk ekonomi, kesehatan, partisipasi politik, dan penguatan kelembagaan lokal. Individu yang berpendidikan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memperoleh pekerjaan layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, serta menerapkan pola hidup sehat.

Dengan demikian, investasi dalam pendidikan merupakan bentuk pembangunan berkelanjutan yang memiliki jangkauan luas dan jangka panjang. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, dengan memanfaatkan bonus demografi serta semangat gotong royong dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakatnya.

Data RLS dan HLS menunjukkan arah yang positif dalam hal pencapaian pendidikan formal, namun tantangan di bidang literasi masyarakat masih perlu ditangani secara serius. Penurunan nilai IPLM pada tahun 2024 merupakan sinyal penting bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada angka formalitas pendidikan, tetapi juga harus

mencakup peningkatan kapasitas literasi, pembentukan karakter, dan penguatan *soft skills* masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2025–2029, dengan menetapkan target peningkatan IPLM, RLS dan HLS secara terukur. Kolaborasi antarpihak, inovasi dalam pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, bermartabat, dan berdaya saing global dapat dicapai. Pendidikan yang berkualitas dan merata bukan hanya hak, tetapi juga jalan menuju kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

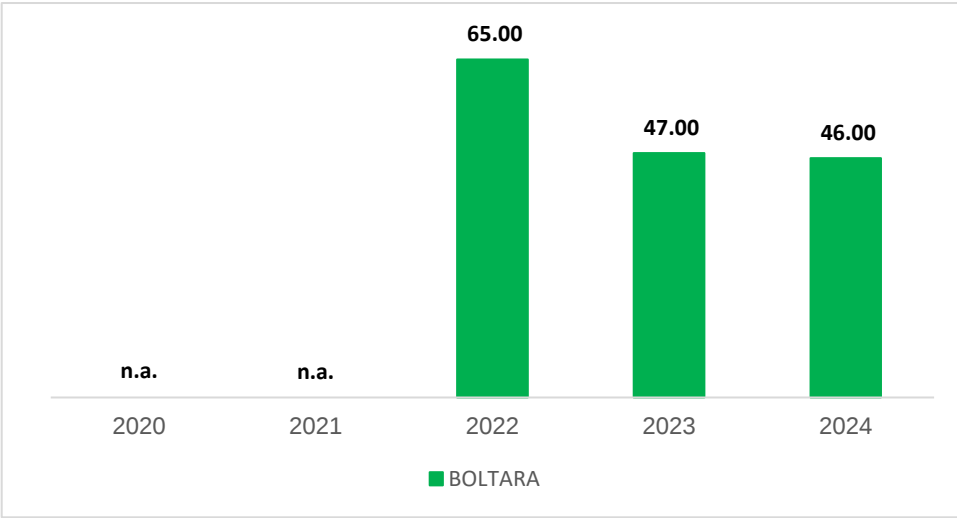
D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan komponen fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan inklusif. Program perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman saat individu menghadapi risiko sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan untuk memperluas akses terhadap kesempatan hidup yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perlindungan sosial adalah cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdapat perkembangan signifikan dalam cakupan kepesertaan selama periode 2020 hingga 2024.

Grafik 2.19 menggambarkan dinamika cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020–2024. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, belum tersedia informasi terkait cakupan kepesertaan (n.a.), yang mengindikasikan keterbatasan sistem pelaporan atau rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja pada saat itu.

Grafik 2.19 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan cakupan kepesertaan mencapai 65 persen. Angka ini menunjukkan adanya lompatan besar dan mencerminkan keberhasilan upaya sosialisasi, perluasan kepesertaan, serta penguatan kebijakan yang mendorong pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam skema jaminan sosial.

Namun, capaian tersebut tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2023, cakupan menurun menjadi 47 persen dan sedikit turun lagi menjadi 46 persen pada tahun 2024. Tren penurunan ini perlu menjadi perhatian serius, karena dapat menunjukkan tantangan dalam keberlanjutan program, seperti lemahnya kepatuhan, keterbatasan pengawasan, atau kendala administratif dan anggaran.

Fenomena ini menegaskan pentingnya strategi yang lebih sistematis dalam menjaga stabilitas dan perluasan cakupan kepesertaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi, mengintensifkan edukasi publik, serta meningkatkan efisiensi sistem pelayanan dan pelaporan. Upaya kolaboratif lintas sektor, khususnya dengan dunia usaha dan sektor informal, juga perlu dioptimalkan.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar dalam peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dibutuhkan konsistensi kebijakan dan penguatan kelembagaan agar cakupan dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan merata. Perlindungan sosial yang menyeluruh merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan produktif.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Agama memegang peranan yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan spiritual, etika, dan moral yang membentuk karakter individu maupun kolektif. Sebagai sumber nilai-nilai luhur, agama tidak hanya memberikan makna dan tujuan hidup bagi setiap insan, tetapi juga menjadi modal dasar dalam pembangunan sosial dan budaya bangsa. Dalam konteks pembangunan masyarakat, agama berfungsi sebagai pilar yang memperkuat jati diri bangsa serta memperteguh karakter nasional yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral yang universal. Peran ini sangat penting mengingat pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga dari kualitas kehidupan sosial dan budaya yang harmonis dan beretika.

Selain itu, agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang maju dan berdaya saing. Kebudayaan sebagai cerminan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa menjadi wadah ekspresi spiritual dan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan menjadi bagian integral dari penguatan karakter bangsa yang tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menginspirasi inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam dokumen ini, akan dibahas pula indikator-indikator penting yang mencerminkan kondisi penguatan peran agama dan kebudayaan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, berkarakter kuat, dan berbudaya maju.

Agama berperan sebagai landasan spiritual yang memberikan makna dan tujuan hidup bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agama membentuk kerangka etika dan moral yang menjadi pedoman perilaku sehari-hari, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan oleh agama menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan harmonis. Dengan demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai penguat spiritual, tetapi juga sebagai pengarah moral yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, agama menjadi modal dasar yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Kehadiran agama

membantu menciptakan suasana kerukunan dan kedamaian yang esensial bagi stabilitas masyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama yang diukur secara nasional menunjukkan bahwa tingkat kerukunan yang tinggi berkontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan, karena masyarakat yang rukun cenderung lebih produktif dan mampu bekerja sama dalam berbagai bidang. Contohnya, di daerah-daerah dengan tingkat kerukunan yang baik, pembangunan infrastruktur dan program sosial berjalan lebih lancar tanpa hambatan konflik sosial. Oleh karena itu, penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kokoh secara sosial dan budaya.

Pemajuan dan pelestarian kebudayaan memegang peranan yang sangat penting dalam memperkuat karakter bangsa dan memperteguh jati diri nasional. Kebudayaan merupakan cerminan identitas suatu bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui kebudayaan, masyarakat dapat mengenali akar sejarahnya, memahami nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman hidup, serta menjaga kesinambungan warisan budaya yang membentuk keunikan dan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, pelestarian kebudayaan bukan sekadar menjaga benda atau tradisi lama, melainkan juga menjaga roh dan jiwa bangsa agar tetap hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

Kebudayaan juga berfungsi sebagai perekat sosial yang membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Ketika nilai-nilai budaya dihargai dan dilestarikan bersama, hal ini menciptakan ikatan emosional dan sosial yang kuat, yang pada gilirannya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, kebudayaan menjadi alat strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Selain itu, kebudayaan yang maju dan terpelihara dengan baik akan mendorong kreativitas dan inovasi yang berakar pada nilai-nilai lokal, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Hubungan antara agama dan kebudayaan sangat erat dan saling melengkapi dalam konteks pemajuan masyarakat. Agama memberikan

landasan spiritual dan moral yang menjadi sumber inspirasi bagi berbagai ekspresi budaya, sementara kebudayaan menjadi medium bagi nilai-nilai agama untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemajuan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai agama akan memperkuat karakter bangsa secara menyeluruh, tidak hanya dari segi identitas, tetapi juga dari aspek etika dan moral. Sinergi antara agama dan kebudayaan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang beradab, harmonis, dan berkelanjutan.

Peningkatan cakupan pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Bolang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam upaya menjaga dan mengembangkan warisan budaya daerah. Berdasarkan data yang tercermin dalam grafik, cakupan pelestarian objek kebudayaan meningkat dari hanya 3,48% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2024. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk melestarikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan karakter bangsa. Peningkatan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah indikator penting yang menunjukkan kesadaran dan komitmen masyarakat serta pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang menjadi akar spiritual dan moral bangsa.

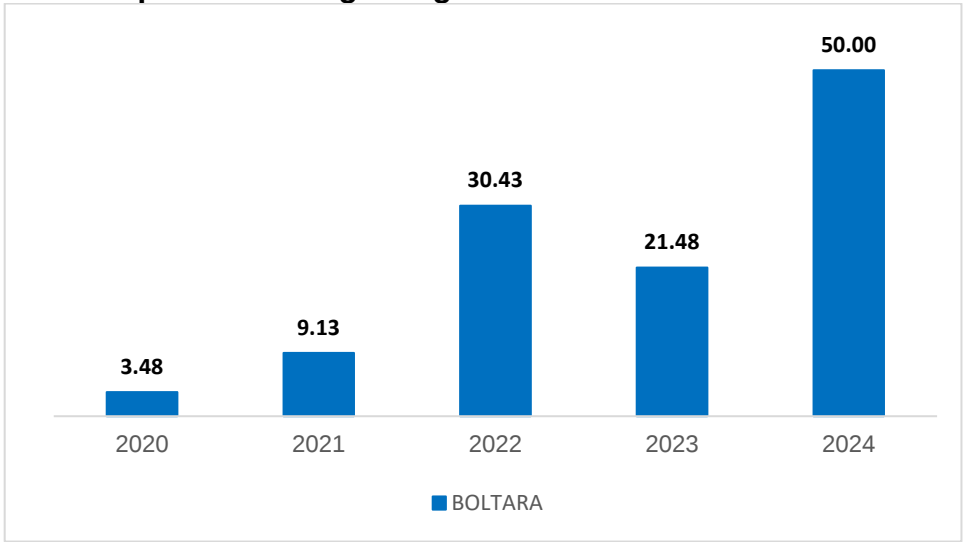
Perubahan drastis dalam cakupan pelestarian ini juga menandakan bahwa upaya pemajuan kebudayaan telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan. Pelestarian objek budaya yang meliputi situs, artefak, tradisi, dan ekspresi budaya lainnya, menjadi sarana efektif untuk memperkuat karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Dengan semakin banyaknya objek budaya yang dilindungi dan dikembangkan, masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai warisan leluhur, sehingga rasa kebanggaan dan identitas nasional semakin kuat. Hal ini juga berkontribusi pada pembentukan karakter generasi muda yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran budaya yang tinggi.

Dampak positif dari peningkatan cakupan pelestarian ini sangat luas, tidak hanya dalam aspek budaya, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pelestarian budaya yang efektif dapat mendorong pariwisata budaya, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pelestarian budaya yang terjaga dengan baik juga memperkuat kohesi sosial dan mempererat hubungan antarwarga,

karena budaya menjadi perekat yang menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, data peningkatan cakupan pelestarian objek pemajuan kebudayaan ini menjadi bukti nyata bahwa pemajuan kebudayaan merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkarakter kuat.

Secara keseluruhan, grafik peningkatan cakupan pelestarian objek kebudayaan dari 3,48% menjadi 50% dalam kurun waktu lima tahun ini menggambarkan kemajuan yang menggembirakan dalam upaya menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Keberhasilan ini harus terus didukung dengan kebijakan yang berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, lembaga budaya, dan komunitas lokal. Dengan demikian, pelestarian kebudayaan tidak hanya menjadi tugas pelestarian masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa yang berkarakter, berbudaya maju, dan sejahtera.

Grafik 2.20 Cakupan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Kerukunan Umat Beragama memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kerukunan antarumat beragama menciptakan suasana sosial yang kondusif, di mana berbagai kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kondisi ini sangat penting sebagai fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena stabilitas sosial dan keamanan menjadi prasyarat utama bagi pelestarian kebudayaan dan kemajuan masyarakat. Ketika

kerukunan terjaga, masyarakat dapat fokus pada pengembangan potensi budaya dan ekonomi tanpa terganggu oleh konflik atau ketegangan sosial.

Lebih jauh, kerukunan umat beragama memperkuat solidaritas sosial yang menjadi modal penting dalam membangun karakter bangsa yang kokoh dan berdaya saing. Lingkungan yang harmonis memungkinkan terjadinya dialog antarbudaya dan antaragama yang memperkaya pemahaman serta memperkuat nilai-nilai moral bersama. Hal ini berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan pembangunan sosial-ekonomi. Dengan demikian, Kerukunan Umat Beragama bukan hanya indikator sosial semata, tetapi juga cerminan dari kualitas kehidupan berbangsa yang mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral serta pemajuan kebudayaan memiliki implikasi yang sangat mendalam bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkarakter kuat. Agama tidak hanya menjadi sumber nilai-nilai luhur yang membimbing perilaku individu dan kolektif, tetapi juga menjadi fondasi moral yang memperkuat integritas sosial dan kohesi komunitas. Sementara itu, pelestarian kebudayaan yang terus meningkat, seperti yang terlihat dari kenaikan cakupan pelestarian objek budaya dari 3,48% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2024, menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga warisan budaya sebagai identitas bangsa yang memperkuat jati diri dan karakter nasional. Sinergi antara penguatan spiritual dan pelestarian budaya ini menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kokoh secara sosial dan beretika.

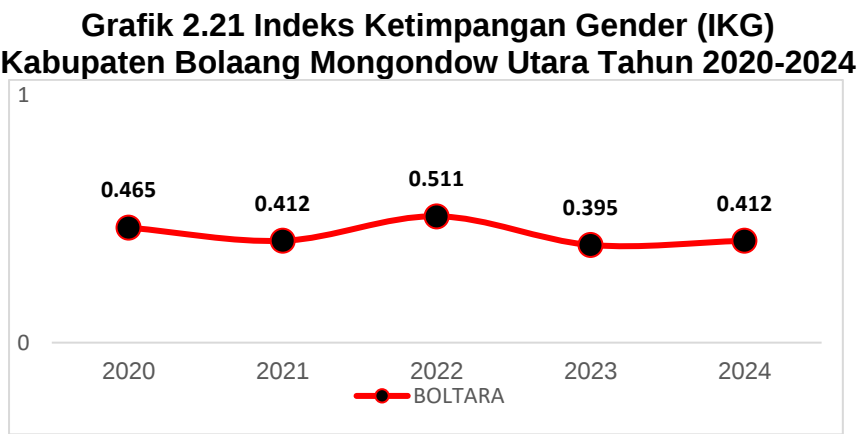
Secara praktis, penguatan peran agama dan kebudayaan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif, di mana kerukunan umat beragama menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kedamaian. Kondisi ini sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat yang rukun dan berbudaya kuat akan lebih produktif dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dengan bijak. Oleh karena itu, upaya pelestarian kebudayaan dan penguatan kerukunan umat beragama harus terus didorong melalui kebijakan yang terintegrasi, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai spiritual dan budaya, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Menghargai dan mendukung pelestarian kebudayaan serta kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi

juga kewajiban setiap warga negara. Dengan kesadaran kolektif ini, bangsa dapat memperkuat jati diri dan karakter yang menjadi modal utama dalam membangun masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan berbudaya maju. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat warisan spiritual dan budaya sebagai fondasi kokoh bagi kemajuan bangsa yang berkelanjutan dan bermartabat.

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan perkembangan yang penting dalam hal ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai motor penggerak pembangunan. Dari data yang tersedia, terlihat adanya dinamika dalam indikator-indikator kunci seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) selama periode 2020-2024. Perubahan kedua indeks ini mencerminkan tantangan dan kemajuan dalam mencapai keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif yang berkelanjutan.

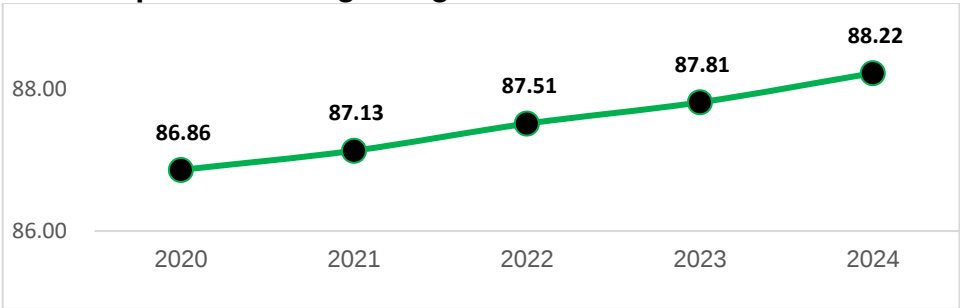


Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks Ketimpangan Gender di Bolaang Mongondow Utara pada 2020 berada pada angka 0,465, yang kemudian turun ke 0,412 pada 2021, namun kembali naik dan mencapai puncaknya di 0,511 pada 2022. Pada 2023 terjadi penurunan signifikan hingga 0,395, dan kembali naik sedikit menjadi 0,412 pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya upaya dan tantangan dalam mengurangi ketimpangan gender, di mana angka IKG yang mendekati 0,4 dapat diartikan bahwa ketimpangan gender masih cukup terasa meski ada perbaikan. Ketimpangan ini dapat terkait dengan akses perempuan kepada pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan posisi dalam pengambilan

keputusan. maka perlu adanya strategi pengarusutamaan gender yang konsisten untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

**Grafik 2.22 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender menunjukkan tren yang lebih positif dengan peningkatan konstan dari 86,86 pada 2020 menjadi 88,22 pada 2024. Kenaikan IPG ini mengindikasikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional di Bolaang Mongondow Utara. Perbaikan ini dapat dilihat dari peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang lebih merata, di mana kesetaraan gender bukan hanya sebagai tujuan sosial, tapi juga langkah strategis dalam pembangunan manusia berkualitas. Kenaikan IPG yang stabil ini memberikan gambaran bahwa berbagai kebijakan dan program pengarusutamaan gender mulai menunjukkan hasil nyata.

Lebih lanjut, upaya membangun keluarga berkualitas tidak hanya mengutamakan kesejahteraan ekonomis saja, melainkan juga peran penting keluarga dalam membentuk ketangguhan sosial dan moral anggota masyarakat. Dalam konteks Bolaang Mongondow Utara, pembangunan keluarga yang kuat melibatkan pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran serta ayah dan anggota keluarga lain dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang mendukung potensi dan kesetaraan. Keluarga yang berkualitas adalah fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan produktif.

Selain itu, masyarakat inklusif menjadi agenda utama dalam mengurangi kesenjangan dan diskriminasi berdasarkan gender maupun faktor sosial lainnya. Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti penyuluhan tentang hak-hak

perempuan, pelatihan kewirausahaan untuk perempuan dan kelompok rentan, serta perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender ini harus terus diperkuat dengan partisipasi aktif berbagai sektor, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun swasta. Masyarakat inklusif yang terbentuk akan menciptakan solidaritas sosial dan ruang partisipasi yang setara bagi semua warga.

Secara keseluruhan, data yang menunjukkan perubahan Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggarisbawahi pentingnya penguatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Walaupun ketimpangan gender masih menjadi tantangan, tren positif pada IPG memberikan harapan dan pijakan untuk terus meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata. Kehadiran keluarga berkualitas sebagai unit sosial dan masyarakat yang inklusif menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, fokus pada pengarusutamaan gender dan penguatan keluarga harus terus menjadi prioritas strategis untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di Bolaang Mongondow Utara.

2.1.3.Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah adalah konsep multifaset yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan standar hidup, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Inti dari daya saing ini terletak pada kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang berfungsi sebagai pendorong utama inovasi, produktivitas, dan dinamisme ekonomi. SDM mencakup keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan keseluruhan tenaga kerja, yang secara kolektif menentukan seberapa efektif suatu wilayah dapat memobilisasi tenaga kerjanya untuk memenuhi tantangan dan peluang ekonomi. Salah satu indikator penting yang menyoroti potensi demografis dan ekonomi sumber daya manusia suatu wilayah adalah rasio beban ketergantungan, yang mengukur proporsi tanggungan—biasanya anak-anak dan orang tua—relatif terhadap populasi usia kerja. Rasio ini sangat penting dalam memahami beban yang ditanggung oleh segmen produktif masyarakat dan kemampuannya untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Dalam konteks Bolang Mongondow Utara, sebuah wilayah yang mengalami transisi demografis dan ekonomi yang signifikan, analisis tren beban ketergantungan dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan wawasan berharga tentang evolusi struktur sumber daya manusianya. Data mengungkapkan penurunan yang signifikan dalam rasio beban ketergantungan, dari 51,93 pada tahun 2020 menjadi 42,49 pada tahun 2024, yang menunjukkan pergeseran ke arah populasi usia kerja yang relatif lebih besar yang mendukung lebih sedikit tanggungan. Pergeseran demografis ini memiliki implikasi mendalam bagi pembangunan ekonomi wilayah, dinamika pasar tenaga kerja, dan permintaan layanan sosial. Memahami tren ini, bersama dengan indikator SDM lainnya seperti tingkat pendidikan, status kesehatan, dan tingkat pekerjaan, sangat penting untuk menyusun kebijakan yang meningkatkan daya saing daerah.

Rasio beban ketergantungan adalah indikator demografis penting yang mengukur proporsi tanggungan, biasanya individu berusia di bawah 15 dan di atas 64 relatif terhadap populasi usia kerja, umumnya didefinisikan sebagai mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun. Rasio ini mencerminkan beban ekonomi yang ditempatkan pada segmen produktif populasi, karena tanggungan biasanya memerlukan dukungan tanpa berkontribusi langsung pada *output* ekonomi. Di Bolang Mongondow Utara, beban ketergantungan telah menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 51,93 pada tahun 2020 menjadi 42,49 pada tahun 2024, yang mengindikasikan pengurangan substansial dalam jumlah tanggungan per 100 individu usia kerja.

Penurunan beban ketergantungan ini menunjukkan transisi demografis di mana populasi usia kerja tumbuh secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan populasi tanggungan. Pergeseran seperti itu dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan layanan kesehatan yang menyebabkan umur yang lebih panjang, dan perubahan pola migrasi. Rasio ketergantungan yang lebih rendah umumnya menyiratkan bahwa sebagian besar populasi tersedia untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan potensi pertumbuhan.

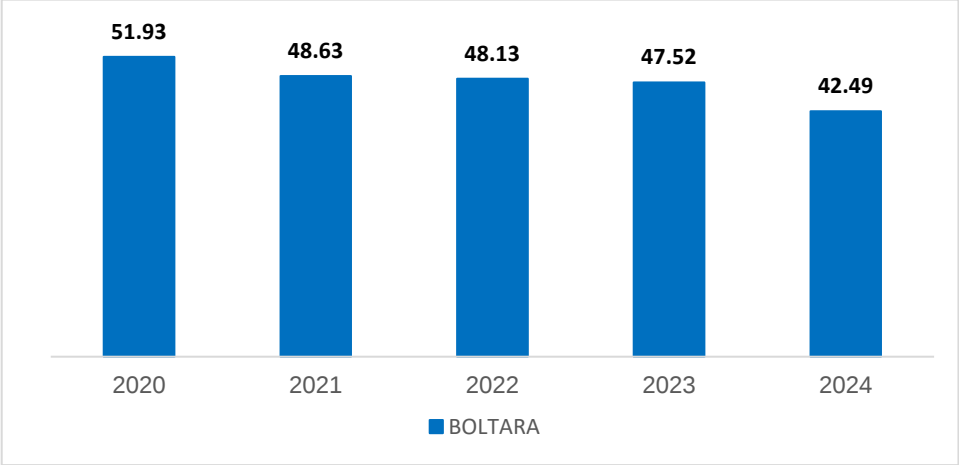
Dengan lebih sedikit tanggungan untuk didukung, rumah tangga dan pemerintah mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang selanjutnya memperkuat modal manusia dan daya saing ekonomi. Selain itu, penurunan beban ketergantungan dapat menandakan dividen demografis, suatu periode

ketika potensi pertumbuhan ekonomi meningkat karena struktur usia yang menguntungkan. Jendela demografis ini menawarkan peluang untuk peningkatan tabungan, investasi, dan pasokan tenaga kerja, yang dapat mempercepat pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara efektif.

Namun, hal ini juga memerlukan perencanaan strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang berkembang dilengkapi dengan keterampilan yang memadai dan kesempatan kerja untuk menghindari masalah seperti pengangguran atau setengah pengangguran. Data dari tahun 2020 hingga 2024 menggambarkan pergeseran demografis positif untuk Bolang Mongondow Utara, yang mencerminkan perubahan dalam struktur populasi yang dapat mendukung dinamika ekonomi yang ditingkatkan. Tren ini, ketika dikombinasikan dengan peningkatan dalam indikator sumber daya manusia lainnya, memposisikan wilayah tersebut untuk memanfaatkan modal manusianya untuk kemajuan ekonomi berkelanjutan. Memahami dan memanfaatkan evolusi demografis ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dan memastikan pertumbuhan inklusif.

Dengan lebih sedikit tanggungan untuk didukung, rumah tangga dan pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur, sehingga memperkuat kualitas modal manusia. Tenaga kerja yang tidak hanya lebih besar tetapi juga lebih terdidik dan lebih sehat lebih menarik bagi investor yang mencari wilayah dengan tenaga kerja terampil dan kondisi sosial yang stabil. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan investasi asing dan domestik, mendorong pertumbuhan industri dan diversifikasi ekonomi regional. Selain itu, profil SDM yang kompetitif mendorong kewirausahaan dan inovasi, yang penting untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan kemajuan teknologi.

**Grafik 2.23 Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Namun, manfaat dari beban ketergantungan yang menguntungkan tidak otomatis. Jika tantangan seperti sistem pendidikan yang tidak memadai, ketidaksesuaian keterampilan, atau jika peluang kerja terbatas tetap ada, potensi dividen demografis mungkin tidak terwujud sepenuhnya. Tingginya pengangguran atau setengah pengangguran di antara penduduk usia kerja dapat membebani layanan sosial dan mengurangi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan strategis diperlukan untuk memanfaatkan keuntungan demografis. Ini termasuk berinvestasi dalam pendidikan berkualitas dan pelatihan kejuruan, meningkatkan akses layanan kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.

Penurunan beban ketergantungan yang dikombinasikan dengan pengembangan sumber daya manusia yang kuat dapat secara signifikan meningkatkan daya saing regional Bolang Mongondow Utara dengan memperluas angkatan kerja produktif, menarik investasi, dan mendorong inovasi.

Bolang Mongondow Utara nantinya akan berada pada titik persimpangan yang menjanjikan di mana tren demografis dapat mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Dengan perencanaan strategis dan komitmen berkelanjutan terhadap pengembangan sumber daya manusia, wilayah ini dapat memanfaatkan dividen demografinya untuk membangun ekonomi yang tangguh, inovatif, dan inklusif yang berkembang di tengah tantangan global dan lokal yang terus berubah.

B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

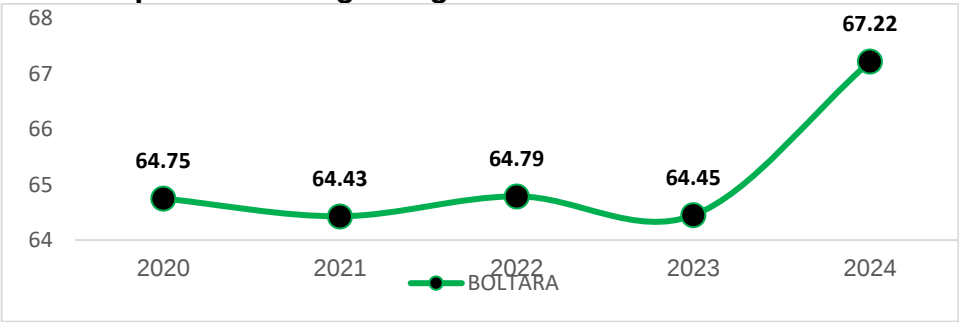
Daya saing daerah merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan suatu wilayah dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta inovasi memegang peranan sentral sebagai pendorong utama yang tidak hanya menjaga, tetapi juga mempercepat produktivitas sektor-sektor ekonomi. Keberlanjutan produktivitas ini sangat penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dalam jangka panjang, sehingga mampu menghadapi dinamika pasar dan tantangan global yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kondisi Iptek dan inovasi di daerah menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam subbab ini, beberapa indikator utama digunakan untuk menggambarkan kondisi Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi di Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk usia produktif yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator kedua adalah indeks inovasi daerah, yang mengukur kemajuan dan penerapan inovasi serta teknologi di tingkat regional. Selanjutnya, rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan menjadi indikator penting untuk menilai kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian daerah, sementara rasio PDRB akomodasi makan dan minum menggambarkan perkembangan sektor jasa, khususnya pariwisata dan perhotelan, yang juga sangat dipengaruhi oleh inovasi dan teknologi.

Dengan memahami tren dan dinamika dari indikator-indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi daerah dalam meningkatkan daya saingnya. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow Utara. Melalui pendekatan ini, diharapkan daerah dapat memanfaatkan Iptek dan inovasi secara optimal untuk memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren yang positif dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan dari 64,75% menjadi 67,22%. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia produktif yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini menjadi indikator penting karena menunjukkan potensi sumber daya manusia yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah.

Grafik 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

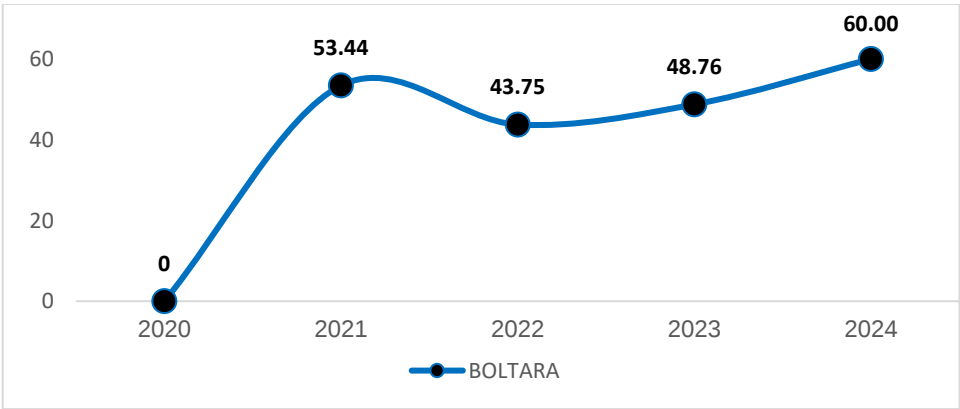


Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Semakin banyak tenaga kerja yang terlibat, semakin besar pula kapasitas daerah dalam menghasilkan *output* ekonomi yang lebih tinggi.

Peran Iptek dan inovasi dalam konteks ini sangat signifikan, karena tidak hanya meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang berpartisipasi, tetapi juga kualitasnya. Dengan kemajuan teknologi dan inovasi, tenaga kerja dapat memperoleh keterampilan baru, meningkatkan efisiensi kerja, serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar yang dinamis. Hal ini memungkinkan produktivitas tenaga kerja meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya memperkuat daya saing ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan partisipasi angkatan kerja yang didukung oleh Iptek dan inovasi juga membuka peluang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berbasis teknologi, sehingga memperluas struktur ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dan berkelanjutan. Dengan demikian, tren kenaikan partisipasi angkatan kerja ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang di Bolaang Mongondow Utara.

**Grafik 2.25 Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**

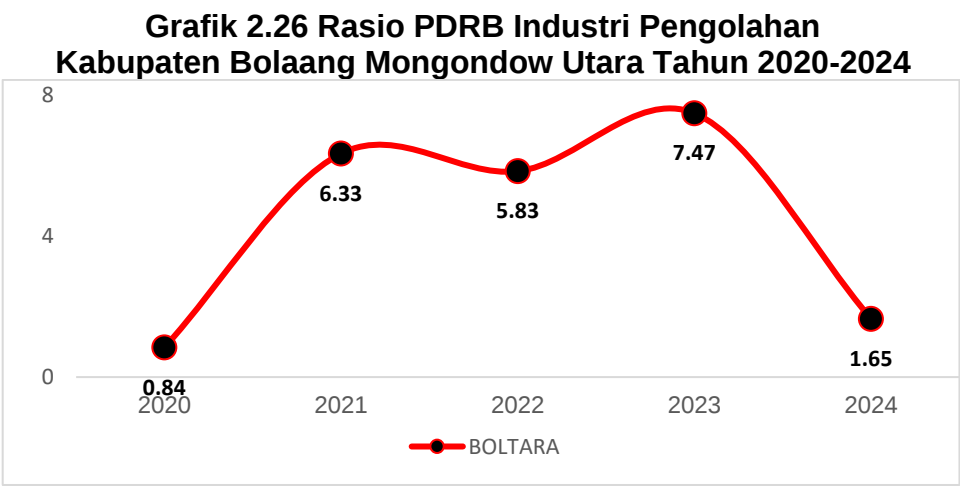


Sumber : Bapelitbangda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks Inovasi Daerah di Bolaang Mongondow Utara menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan sejak tahun 2021, dengan peningkatan yang tajam hingga mencapai angka puncak sebesar 60 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan yang pesat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi di tingkat regional. Indeks inovasi ini merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru, menciptakan produk dan proses inovatif, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Peningkatan indeks inovasi tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam aspek teknis, tetapi juga mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dan pelaku ekonomi dalam mendorong ekosistem inovasi yang kondusif. Hal ini meliputi peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah. Dengan semakin tingginya indeks inovasi, daerah mampu mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif dan berteknologi tinggi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh, peningkatan indeks inovasi berperan sebagai pendorong utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah. Inovasi memungkinkan sektor-sektor utama untuk meningkatkan produktivitas melalui penerapan teknologi baru, efisiensi proses produksi, dan pengembangan produk yang lebih bernilai tambah. Dengan demikian, daerah tidak hanya mampu mempertahankan posisinya ekonominya, tetapi juga memperluas peluang pasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, perkembangan positif indeks inovasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur ekonomi jangka panjang dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan di Bolaang Mongondow Utara.

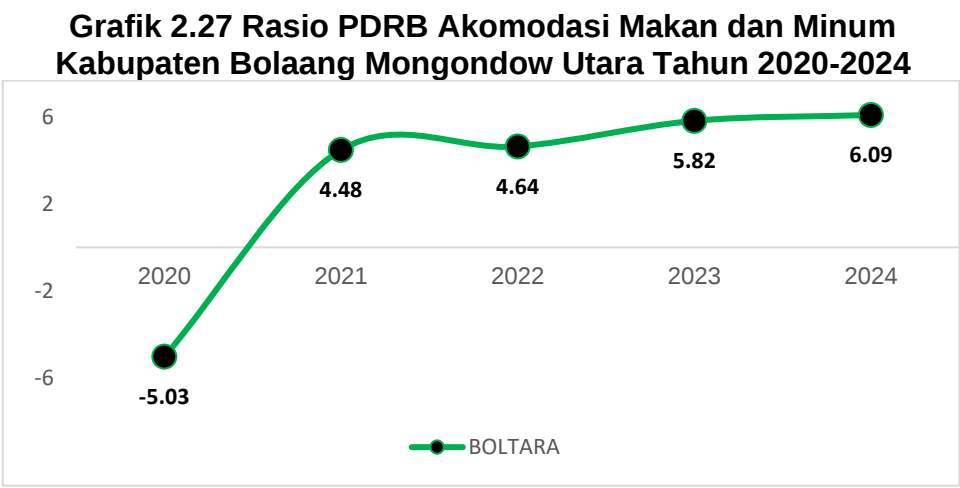


Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Rasio PDRB industri pengolahan di Bolaang Mongondow Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa sektor ini mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebelum mengalami penurunan tajam pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan permintaan pasar

baik domestik maupun internasional, dinamika harga bahan baku, serta kebijakan pemerintah daerah yang mungkin berfokus pada restrukturisasi atau pengalihan prioritas investasi. Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi juga berperan penting dalam menentukan daya saing sektor industri pengolahan, di mana adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, namun jika tidak diimbangi dengan inovasi yang berkelanjutan, sektor ini rentan terhadap penurunan produktivitas.

Sektor industri pengolahan merupakan tulang punggung dalam struktur ekonomi daerah karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor ini sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Iptek dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan yang muncul, seperti persaingan global dan perubahan preferensi konsumen. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan inovasi proses produksi, sektor industri pengolahan dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, serta menciptakan produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi industri pengolahan dalam perekonomian daerah, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum di Bolaang Mongondow Utara menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi global yang menghambat aktivitas pariwisata dan layanan publik. Namun, sejak tahun 2021, sektor ini mulai menunjukkan tren pemulihan yang stabil dan

berkelanjutan, dengan pertumbuhan yang konsisten hingga mencapai angka 6,09 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menandakan kebangkitan kembali sektor jasa pariwisata dan kuliner yang menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah.

Kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap ekonomi daerah sangat vital, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Penerapan Iptek dan inovasi dalam sektor ini menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam pemasaran, reservasi *online*, serta pengembangan produk kuliner yang inovatif mampu menarik lebih banyak wisatawan dan konsumen. Selain itu, peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan berbasis teknologi dan diversifikasi produk yang kreatif turut memperkuat posisi sektor ini di pasar regional maupun nasional.

Inovasi yang berkelanjutan dalam sektor akomodasi makan dan minum juga berperan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Dengan mengadopsi teknologi baru dan konsep layanan yang lebih modern, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan nilai tambah yang unik bagi konsumen. Hal ini tidak hanya memperkuat daya saing sektor pariwisata dan jasa, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow Utara. Dengan demikian, sektor ini menjadi salah satu motor penggerak penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui sinergi antara inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dari berbagai analisis indikator yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Iptek dan inovasi memegang peranan strategis dalam mempercepat produktivitas ekonomi sekaligus memperkuat struktur ekonomi jangka panjang di Bolaang Mongondow Utara. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja yang didukung oleh kemajuan teknologi dan inovasi menunjukkan potensi sumber daya manusia yang semakin optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Indeks inovasi daerah yang terus meningkat menandakan bahwa daerah ini semakin mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru, sehingga memperkuat daya saing sektor-sektor ekonomi utama.

Selain itu, fluktuasi rasio PDRB industri pengolahan yang mencapai puncak pada 2023 dan menurun pada 2024 mengindikasikan perlunya

penguatan inovasi dan teknologi agar sektor manufaktur dapat lebih adaptif dan produktif. Sementara itu, pertumbuhan stabil pada rasio PDRB akomodasi makan dan minum sejak 2021 menunjukkan bahwa sektor jasa juga mulai bangkit dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui inovasi layanan dan produk.

Sinergi antara peningkatan partisipasi angkatan kerja, pengembangan inovasi, dan penguatan sektor industri serta jasa menjadi kunci utama dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, investasi dalam riset dan pengembangan, serta fasilitasi adopsi teknologi harus menjadi prioritas. Dengan demikian, Bolaang Mongondow Utara dapat mempercepat keberlanjutan produktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saingnya di tingkat regional maupun nasional.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah dan masyarakat mulai menyadari pentingnya penerapan ekonomi hijau dan biru sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, sementara ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerapan kedua konsep tersebut diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terlihat dalam berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program reboisasi yang dilaksanakan di kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam penanaman pohon dan pemeliharaan hutan, termasuk pelestarian mangrove di daerah pesisir. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap karbon, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga keanekaragaman hayati.

Selain itu, sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga mulai beralih ke praktik pertanian berkelanjutan. Petani diajarkan untuk melaksanakan teknik pertanian ramah lingkungan yang dapat

meningkatkan hasil panen tanpa merusak tanah. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

Di sisi lain, penerapan ekonomi biru di daerah ini terlihat dari pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi perikanan yang besar, dan pemerintah daerah berupaya untuk mengelola sumber daya ini dengan bijaksana. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan meningkatkan populasi ikan. Masyarakat nelayan juga dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya laut, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari keberlanjutan ekosistem yang ada.

Meskipun penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan praktik-praktik tradisional yang tidak ramah lingkungan, seperti penebangan hutan secara sembarangan dan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai juga menjadi kendala dalam penerapan ekonomi hijau dan biru. Banyak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sulit dijangkau, sehingga akses terhadap teknologi dan informasi yang mendukung praktik berkelanjutan menjadi terbatas. Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung inisiatif keberlanjutan.

D. Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi salah satu isu utama dalam pengembangan daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam era yang serba digital ini, pengarusutamaan transformasi digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi,

produktivitas, dan daya saing daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Melalui percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Percepatan transformasi digital di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk mendukung percepatan ini, seperti pelatihan digital bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga swasta, untuk menghadirkan infrastruktur digital yang memadai. Pembangunan jaringan internet yang cepat dan stabil menjadi salah satu prioritas, mengingat akses internet yang baik merupakan kunci untuk mendukung berbagai aktivitas digital. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan yang dibutuhkan.

Produksi talenta digital menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi digital di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam menghadapi tantangan era digital, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama dengan lembaga pendidikan telah merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan digital.

Dengan demikian, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak hanya akan menjadi daerah yang siap menghadapi tantangan era digital, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan menjadi pilar utama perekonomian daerah ini. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.672,61 km², daerah ini memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian,

terutama untuk komoditas seperti padi, jagung, dan sayuran. Selain itu, potensi perikanan yang melimpah di perairan sekitar juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas, yang merupakan faktor penting dalam mendukung integrasi ekonomi. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi prioritas untuk mempermudah distribusi barang dan jasa. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan produk lokal dapat lebih mudah diakses oleh pasar global.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan ekonomi domestik dan global. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara memasarkan produk mereka secara internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pelaku usaha agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok global.

Integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya daya saing produk lokal. Banyak produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal belum memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh pasar global. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam hal manajemen produksi, pemasaran, dan inovasi produk.

Selain itu, akses terhadap modal juga menjadi kendala bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Banyak dari mereka yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena kurangnya jaminan dan riwayat kredit yang baik. Tanpa dukungan modal yang memadai, sulit bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan program-program yang mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memanfaatkan integrasi ekonomi global. Dengan adanya kesepakatan perdagangan global dan kemudahan akses informasi, pelaku usaha lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah

dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka dapat memahami cara memasarkan produk mereka secara efektif di pasar global. Selain itu, promosi produk lokal melalui pameran dan festival juga dapat meningkatkan visibilitas produk daerah di pasar global.

Untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan global, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan kluster industri. Dengan mengelompokkan pelaku usaha dalam satu sektor, diharapkan mereka dapat saling mendukung dan berbagi sumber daya. Misalnya, kluster pertanian dapat mencakup petani, pengolah makanan, dan distributor, sehingga seluruh rantai pasok dapat terintegrasi dengan baik.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program yang relevan bagi pelaku usaha. Pelatihan tentang teknologi pertanian modern, manajemen usaha, dan pemasaran digital dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka. Dengan demikian, produk lokal dapat lebih mudah diterima di pasar global.

Penting juga untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dalam rangka meningkatkan akses terhadap modal dan teknologi. Melalui kerja sama ini, pelaku usaha dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi akses informasi tentang pasar global dan peluang bisnis yang ada.

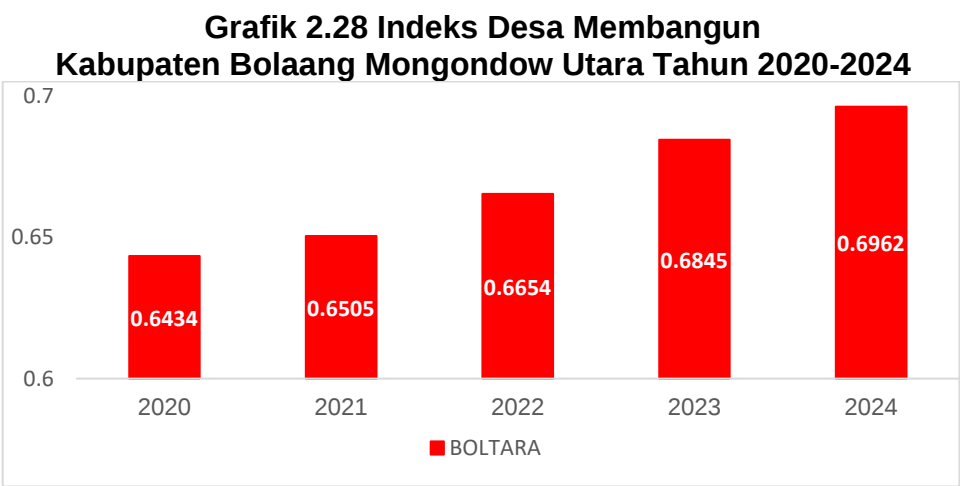
F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun saat ini belum memiliki wilayah administrasi perkotaan yang formal, pengembangan wilayah perdesaan di kabupaten ini menjadi sangat penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditandai dengan upaya untuk menciptakan desa-desa mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam pengembangan ini adalah Indeks Desa Membangun, yang menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan.

Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang lebih baik, termasuk akses jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses ke hunian yang layak. Data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses hunian layak masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.



Sumber: <http://idm.kemendes.go.id>, 2025

Selain itu, pengembangan sektor pertanian dan industri kecil di perdesaan juga perlu didorong. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Pengembangan wilayah perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sangat penting. Meskipun belum ada wilayah administrasi perkotaan, upaya untuk menciptakan desa-desa mandiri yang berkelanjutan dapat menjadi langkah awal menuju pembangunan yang inklusif. Dengan meningkatkan Indeks Desa Membangun dan memastikan akses hunian layak, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, menjaga stabilitas moneter, serta mendukung sektor keuangan.

Memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro melalui berbagai kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan pajak daerah.

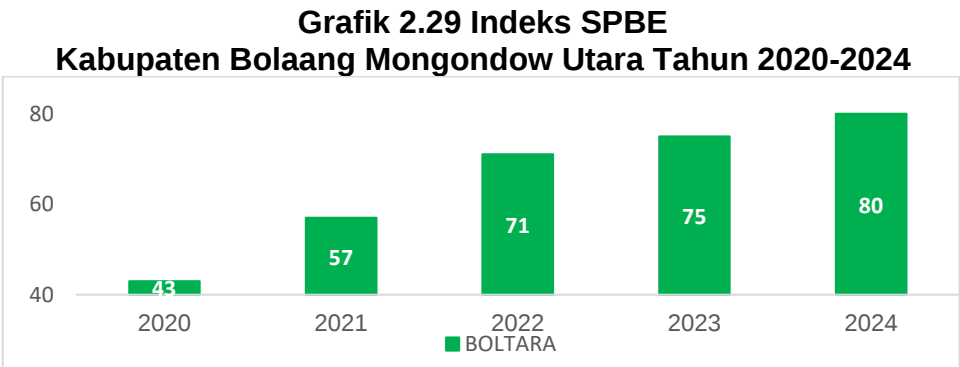
Kondisi fiskal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren yang positif. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, yang diiringi dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Hal ini tercermin dari rasio belanja daerah terhadap pendapatan yang semakin membaik. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik juga menjadi fokus utama, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Di sisi lain, stabilitas moneter juga menjadi perhatian utama. Bank Indonesia dan otoritas keuangan daerah bekerja sama untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan memastikan ketersediaan likuiditas di pasar. Kebijakan suku bunga yang bijaksana dan pengawasan terhadap sektor perbankan menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan stabilitas moneter yang terjaga, diharapkan investasi dapat meningkat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

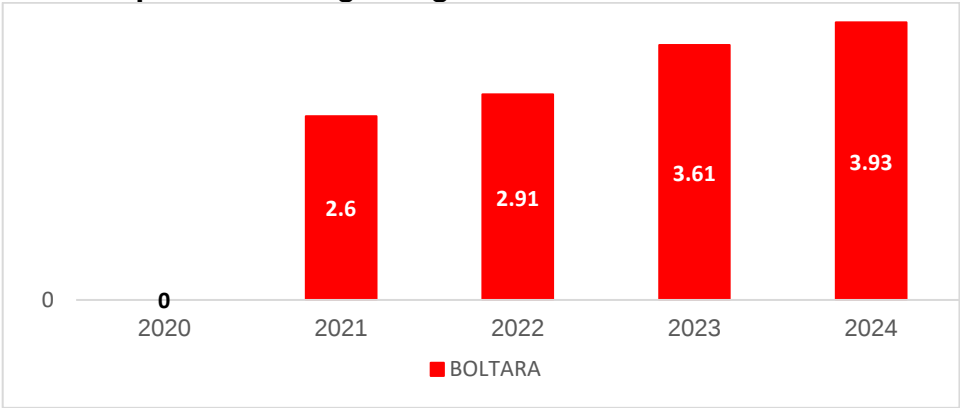
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terus mengalami kenaikan dari 43 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa pengelolaan sektor publik di Bupati Bolaang Mongondow Utara semakin berorientasi pada digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi.



Sumber: Diskominfo Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Selain itu, Indeks Pelayanan Publik juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 0 di tahun 2020 menjadi 3,93 di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik di daerah ini semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kepuasan publik. Sistem tata kelola yang adaptif ini berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap kerangka hukum serta prinsip-prinsip integritas, menjadikan pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin akuntabel dan terpercaya.

**Grafik 2.30 Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Bolaang Mongondow Utara, 2025

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak hanya mengedepankan teknologi dan layanan, tetapi juga kuat dalam aspek integritas dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah daerah secara konsisten menerapkan transparansi melalui keterbukaan informasi publik, menjamin akuntabilitas pejabat, serta meminimalisir praktik korupsi dan penyimpangan. Ini menjadikan tata kelola pemerintahan di daerah ini sebagai contoh pengelolaan sektor publik yang adaptif terhadap perubahan dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan kombinasi kemajuan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan tata kelola berintegritas, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus bertransformasi menjadi pemerintahan yang lebih responsif dan terpercaya.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini sedang menjalani proses pembangunan hukum dan demokrasi yang sangat strategis, dengan fokus utama pada terciptanya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia.

Upaya ini menjadi landasan utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan serta untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Kondisi ini sejalan dengan visi jangka panjang daerah yang menempatkan penegakan hukum dan demokrasi substansial sebagai pilar utama pembangunan daerah, yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga menyentuh pada hak dan kepentingan rakyat secara nyata.

Dalam bidang pembangunan hukum, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyiapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang menekankan perlindungan hak asasi manusia serta penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Pemerintah daerah sangat memperhatikan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna menjamin pelaksanaan hukum yang adil dan transparan. Berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas aparat telah dilakukan untuk memastikan pemahaman ASN tentang hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung penguatan sistem hukum sehingga tercipta kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Upaya ini juga didukung oleh berbagai regulasi daerah terbaru yang mengatur tata kelola pemerintahan secara lebih sistematis, transparan, dan partisipatif.

Pembangunan demokrasi di Bolaang Mongondow Utara diarahkan pada pencapaian demokrasi substansial yang membawa ke dalam ranah nyata prinsip-prinsip demokrasi yang mengemban amanat rakyat. Demokrasi substansial ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, keterbukaan, akuntabilitas, serta penegakan hak-hak warga negara secara menyeluruh. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah Bolaang Mongondow Utara berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk dalam evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi dan pelayanan publik berbasis digital turut diperkuat untuk meningkatkan keterlibatan rakyat dan transparansi pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi di Bolaang Mongondow Utara tidak hanya bersifat prosedural melalui mekanisme pemilihan secara rutin, tetapi juga berorientasi pada hasil yang nyata dalam kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal keamanan nasional, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan keamanan yang tangguh.. Kebijakan strategis pemerintah daerah yang tercantum dalam Paket Strategis Tahun Anggaran 2025 fokus pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian integral dari keamanan nasional. Program bina teknis keamanan pangan yang berjalan di Bolaang Mongondow Utara mengindikasikan perhatian serius pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keamanan pangan sebagai faktor penting yang dapat menopang ketahanan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan pembangunan hukum, demokrasi substansial, dan keamanan nasional tetap ada dan perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi harus terus didorong agar suara rakyat benar-benar menjadi pijakan dalam setiap kebijakan publik. Di bidang keamanan, sinergi antar lembaga keamanan dan pemerintah harus diperkuat untuk menjaga kestabilan wilayah secara menyeluruh, termasuk pengembangan keamanan berbasis komunitas yang mendukung keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungan secara partisipatif.

Untuk itu, rekomendasi kebijakan yang perlu diambil agar pembangunan hukum dan demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat berjalan lebih optimal adalah sebagai berikut. Pertama, penguatan kapasitas ASN tentang pemahaman hukum harus menjadi prioritas, termasuk melalui pelatihan berkelanjutan, dan penegakan aturan yang konsisten dan berkeadilan. Kedua, pemerintah daerah harus memperluas jangkauan program penyuluhan hukum agar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan semakin sadar dan taat terhadap hukum, sehingga dapat mengurangi konflik dan ketidakpastian hukum. Ketiga, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam demokrasi perlu diperkuat dengan membuka lebih banyak ruang konsultasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan kebijakan yang melibatkan masyarakat luas. Keempat, sinergi antar aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus dikembangkan untuk meningkatkan keamanan nasional dan stabilitas daerah, dengan fokus pada pengembangan sistem keamanan berbasis komunitas. Terakhir, fokus terhadap keamanan pangan dan kesejahteraan rakyat perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

C. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

• Pendidikan

Walaupun meningkat ditahun terakhir, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat masih berada di bawah angka 100,00 persen menunjukkan masih terjadinya kegagalan/putus sekolah yang menyebabkan kasus anak SD yang usianya di bawah 7 (tujuh) tahun namun telah mengikuti sekolah dasar dan/atau kasus anak usia di atas 12 (dua belas) tahun namun masih berada di bangku SD. Begitu pula yang terjadi dengan APM SMP/MTs/Sederajat, yang angkanya cenderung menurun setiap tahunnya. Kondisi kultural dan tradisi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan selain faktor ekonomi yang kerap kali menyebabkan anak usia sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikannya.

Berbanding terbalik dengan angka partisipasi pendidikan non formal, di mana terjadi kenaikan signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini menunjukkan besarnya minat masyarakat yang sudah bukan usia sekolah namun ingin bersekolah melalui program kejar paket A/B/C.

Nilai Rata-rata rapor pada tahun 2024 sudah tidaklagi dihitung sejalan dengan perubahan kebijakan “Merdeka Belajar” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan angka dalam rapor. Pemerintah kini lebih menekankan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca, numerasi, dan karakter sebagai indikator utama kualitas pendidikan.

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Lama Sekolah	8,40	8,41	8,57	8,58	8,61
Harapan Lama Sekolah	11,91	12,17	12,34	12,38	12,39
APM SD/MI/ Sederajat	96,00	92,00	93,10	93,35	90,83
APK SMP/ MTs/ Sederajat	100,00	100,00	107,40	101,83	107,35
APM SMP/ MTs/ Sederajat	85,00	84,00	73,50	67,41	69,33
Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal	58,00	90,00	90,00	88,78	92,96
Nilai Rata-rata Rapor Siswa Kelas VI SD	55,00	62,00	76,77	85,00	n.a
Nilai Rata-rata Rapor Siswa Kelas IX SMP	58,00	90,36	77,16	88,00	n.a
Penerapan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sarana, Prasarana dan SDM disetiap Jenjang Pendidikan	100,00	56,97	76,43	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

• **Kesehatan**

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Beberapa indikator pencapaian urusan Kesehatan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut :

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis (treatment coverage)	51,68	93,65	79,58	79,91	83
Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate)	99	89,92	89,69	93,45	95,35
AKI per 100.000/KH	299,80	76,30	232,70	152,00	153,8
AKB per 1.000/KH	10,00	8,42	6,98	6,00	7,6
Indeks Keluarga Sehat	0,114	0,116	0,136	0,20	0
Prevalensi Stunting	9,70	1,61	2,21	2,00	2,5
Persentase Penurunan Angka Kesakitan Akibat PM/PTM	34,9	17,94	15,38	20,00	27,6
Cakupan <i>Universal Health Coverage</i>	96,93	81,54	95,69	70,13	70,13
Rasio Tenaga Kesehatan	0,62	1,25	1,26	1,00	1,2
Persentase Fasilitas Kesehatan Bermutu dan Terstandarisasi	84,61	92,30	92,30	95,00	96,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sampai saat ini tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ada 48 (empat puluh empat) dokter, 354 (tiga ratus tiga puluh tujuh) perawat, sebagai petugas kesehatan yang professional yang siap melayani masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

AKI Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 adalah 152 Per 100.000 Kelahiran Hidup yang artinya apabila terjadi 100.000 kasus kelahiran hidup maka ada 152 kasus ibu yang meninggal, dengan menggunakan perhitungan standar Maternal Mortality Rate (MMR), di Bolaang Mongondow Utara, terjadi 2 kasus kematian dari 1.316 proses persalinan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum mencapai target Rasio AKI secara Nasional yaitu 183/100.000 kelahiran hidup, yang artinya target nasional untuk wilayah Bolaang Mongodondow Utara angka maksimal kasus kematian ibu harusnya dibawah dari 2 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 2 kasus dari total Kelahiran Hidup 1.316. AKI Tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun 2022 pada angka 232,70 (3 Kasus) dikarenakan Sudah dilakukan tindakan

pertolongan persalinan sesuai prosedur akan dengan baik. AKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai target sesuai dengan perhitungan dari rasio AKB per 1.000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan Infant Mortality Rate (IMR). Target Nasional AKB 16/1.000 dan untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target AKB adalah 17,17/1.000 KLH, yang dapat diartikan bahwa apabila di Bolaang Mongondow Utara terjadi 1.000 kasus kelahiran hidup maka jumlah kasus kematian bayi yang terjadi tidak boleh melebihi angka 17 kasus, atau apabila di Bolaang Mongondow Utara terjadi 1.316 kasus kelahiran hidup maka ambang batas maksimal kasus kematian bayi berada pada angka 22 kasus.

• **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Infrastruktur merupakan suatu fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menunjang aktifitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan keterjangkauan fasilitas. Tujuan pembangunan infrastruktur dapat merubah wajah kabupaten yang maju dan mempunyai karakter. Secara umum pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di fokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu: peningkatan layanan jalan dan jembatan, peningkatan layanan irigasi, peningkatan layanan air minum dan air limbah, dan peningkatan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Pembangunan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi dalam beberapa kewenangan yaitu kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa capaian kondisi jalan selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun pada faktanya bahwa masih ada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya melalui pengalokasian anggaran untuk perbaikan-perbaikan jalan yang mengalami kerusakan.

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024					
Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase jalan dalam keadaan mantap	75,00	74,57	74,95	88,53	64,11
Persentase Jaringan Irigasi D.I Kabupaten Berkondisi Baik	90,00	90,00	90,00	82,05	92,76
Persentase Jumlah penduduk yang yang memiiki Akses Air Minum Layak	85,00	88,00	90,00	85,05	76,56

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air limbah aman	25,00	27,00	28,00	89,58	89,34
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	89,85	80,00	81,00	88,02	89,38

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Untuk jaringan Irigasi selama 4 (empat) tahun terakhir tidak mengalami perubahan dikarenakan tidak terdapat pembangunan jaringan irigasi baru melainkan hanya difokuskan pada perbaikan-perbaikan jaringan yang telah mengalami kerusakan, namun pada tahun 2023 telah terjadi penurunan dikarenakan kurangnya sarana operasional unit pengelola Irigasi serta pola penanganan perbaikan kondisi belum dalam kesatuan sistem.

Sama halnya dengan irigasi yang terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 dikarenakan ketersediaan air baku yang secara kuantitas berkurang dan secara kualitas menurun, kecenderungan masyarakat yang enggan menggunakan sambur rumah air minum serta kapasitas kelembagaan pengelola pengembangan SPAM di masyarakat belum maksimal.

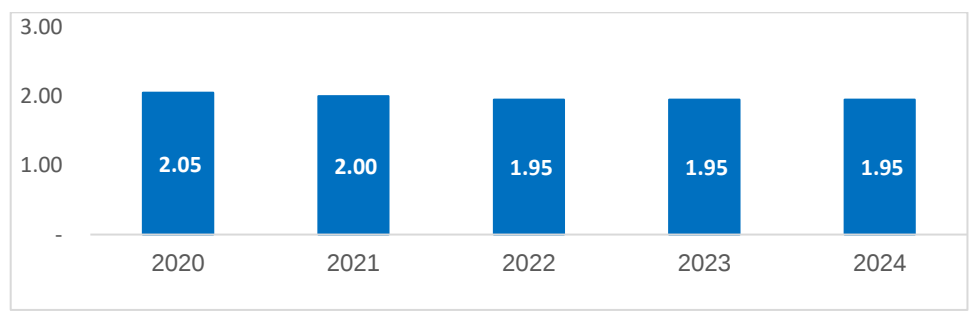
Pengelolaan air limbah merupakan bagian integral dari infrastruktur perkotaan dan perkembangan industri. Upaya yang baik dalam pengelolaan air limbah dapat membantu melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sumber daya air yang berharga bagi keberlanjutan hidup manusia. Hal ini terlihat dari capaian jumlah penduduk yang memiliki akses air limbah, yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat ini pengelolaan limbah di Kabupaten Bolaang mongondow utara sudah masuk dalam kategori layak dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memiliki jamban/septic tank dan terdapat beberapa masyarakat yang telah mendapat layanan IPAL Komunal untuk pembuangan limbah. Selain kondisi infrastruktur, proses pembangunan juga perlu memperhatikan pemanfaatan ruang juga merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Pada Tahun 2023 kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan sekitar 7,00 persen. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi penetapan zonasi dan regulasi dalam pemanfaatan ruang, sehingga pengorganisasian penggunaan ruang yang optimal.

• **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai pusat interaksi keluarga, persemaian

budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Urusan perumahan mensasar penurunan luas areal kawasan kumuh di kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Grafik 2.31 Presentase Luas Areal Kawasan Kumuh Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan SK Nomor 211 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa luasan kumuh yaitu sekitar 50,75 ha yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dan 12 (dua belas) desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya indikator perumahan dan permukiman kumuh antara lain: sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, kondisi bangunan, ketersediaan lahan dan juga aksesibilitas.

Luas Areal Kawasan Kumuh menjadi indikator atau cerminan dari tingkat kemiskinan di suatu daerah. Sehingga Pemerintah daerah melakukan upaya dengan melibatkan pembangunan permukiman yang lebih baik, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas hunian bagi masyarakat yang rentan. Dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan daerah melalui bantuan dana fiskal yang dialokasikan untuk bantuan stimulus atau insentif berupa pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Program penanggulangan kemiskinan daerah dalam bidang perumahan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak atas hunian yang layak.

- **Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini dilewati jalur utama perekonomian di Pulau Sulawesi sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan.

Kejadian kebakaran yang tertangani tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali, untuk tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali hal ini terjadi penurunan capaian karena tingkat pemahaman tentang bahaya kebakaran saat ini sangat tinggi karena adanya monitoring dan evaluasi dan sosialisasi di wilayah kecamatan se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim satuan pemadam kebakaran. Sosialisasi tersebut antara lain Penggunaan APAR tempat-tempat usaha, social-gedung pemerintah maupun swasta dan rumah-rumah penduduk.

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Bidang Trantibunlinmas Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00
Persentase Penegakkan Perkada	24,00	29,00	35,00	41,00	41,00
Persentase penegakkan Perda	33,00	50,00	58,00	66,00	66,00
Persentase Wilayah Siaga Bencana	98,22	98,29	99,84	99,69	7,34
Persentase Respon Cepat Hasil Penetapan Status Darurat Bencana dan Penetapan KLB kurang dari 24 jam	99,92	99,94	99,86	99,81	35,33

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Capaian penegakan Perkada pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, di mana pada tahun 2021 capaian penegakkan Perkada sebesar 29,00 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 35,00 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Perkada yang dilakukan penegakkan baik melalui Patroli dan Pengawasan maupun melalui operasi Non Yustisi. Pada tahun 2021 dilakukan penegakkan sejumlah 6 (enam) Perkada dan pada tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) Perkada dari total sebanyak 12 (dua belas) Perkada yang direncanakan dilakukan penegakkan melaui Patroli dan pengawasan maupun Non Yustisi. Di Tahun 2023 untuk indikator ini Kembali mengalami kenaikan dari 35 persen di tahun 2022 menjadi 41 persen di tahun 2023 dan salah satu Faktor

pendukungnya yakni penegakan Perda/Perkada dilakukan secara humanis, sehingga angka pengulangan pelanggaran yang terjadi lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan penegakan Perda pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, di mana pada tahun 2021 capaian penegakkan Perda sebesar 50,00 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 58,00 persen Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Perda yang dilakukan penegakkan baik melalui Patroli dan Pengawasan maupun melalui operasi Non Yustisi. Pada tahun 2021 Dilakukan penegakkan sejumlah 6 (enam) Perda dan pada tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) Perda yang memuat sanksi dari total sebanyak 12 (dua belas) Perda yang memuat sanksi. Dan di tahun 2023 indikator ini juga mengalami kenaikan yakni dari 58 persen di tahun 2022 menjadi 66 persen di tahun 2023, yang menjadi Faktor pendukung kenaikan ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara intens dan berkesinambungan melakukan Patroli Keamanan Wilayah di enam kecamatan dalam rangka penegakan Perda/Perkada.

- **Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase PMKS yang menerima bantuan Sosial	66,66	89,89	89,89	100,00	100,00
Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	87,50	87,50	87,50	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat kurang lebih 9 (Sembilan) kategori PMKS dan kesemuanya aktif dan diberdayakan. Bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satunya yakni Peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sebagai upaya penanganan PMKS tahun berikutnya akan dilaksanakan beberapa kegiatan bimbingan sosial pada beberapa PMKS lainnya serta akan

dilaksanakan sistem layanan rujukan dan peningkatan kapasitas dalam rangka pemberdaya aktifan PSKS baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Capaian kinerja tahun 2024 atas target ditujukan pada indikator persentase PMKS yang menerima bantuan sosial, dengan capaian kinerja 100 persen, pada indikator persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja 100 persen.

Namun disisi lain dari pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari hambatan/kendala yang menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan sosial kepada PPKS akan tetapi bagian dari kendala-kendala terselesaikan dengan baik dengan tetap melaksanakan monitoring, evaluasi serta langkah-langkah strategis berdasarkan asesmen dari unsur TKS, TKSK serta PSKS lainnya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

• **Tenaga Kerja**

Tabel 2.24 menyajikan capaian indikator strategis bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode tahun 2020 hingga 2024. Dari indikator yang ditampilkan, terlihat adanya dinamika capaian yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan efektivitas intervensi kebijakan daerah. Salah satu capaian paling signifikan adalah peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten yang pada tahun 2021 masih sebesar 1,20%, kemudian meningkat menjadi 3,59% pada 2023 dan melonjak drastis hingga 22% pada 2024. Hal ini tak lepas dari berbagai upaya kolaboratif antara Pemkab Bolaang Mongondow Utara dan BPJS Ketenagakerjaan, seperti sosialisasi program jaminan sosial bagi perangkat desa dan pekerja rentan yang secara aktif digalakkan sejak 2023.

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	n.a.	n.a.	65	47	46
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	79,10	33,70	49,72	53,14	74,83
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,75	64,43	64,79	64,45	67,22
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,48	5,23	5,10	4,48	4,10
Persentase Kasus Perselisihan Kerja Yang terselesaikan	100,00	50,00	100,00	66,67	100,00

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Selanjutnya, capaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 79,10%, namun menurun drastis menjadi 33,70% di tahun berikutnya akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas ekonomi. Seiring pemulihan, angka ini meningkat bertahap menjadi 49,72% (2022), 53,14% (2023), dan 74,83% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, kerja sama rekrutmen antar-instansi, serta revitalisasi sektor informal dan pertanian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan tren positif, dari 64,75% di tahun 2020 menjadi 67,22% pada 2024. Meskipun terdapat fluktuasi kecil di tahun-tahun sebelumnya, peningkatan ini menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar kerja, baik sebagai pencari kerja maupun pelaku usaha. Ini turut diperkuat oleh program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelatihan keterampilan yang menjangkau kelompok usia produktif di pedesaan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren menurun secara konsisten dari 5,48% pada 2020 menjadi 4,10% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar kerja yang kian membaik serta kemampuan pemerintah daerah dalam membuka lapangan kerja baru dan mendorong pemanfaatan potensi lokal. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan UMKM menjadi tumpuan utama dalam menekan angka pengangguran.

Persentase penyelesaian kasus perselisihan kerja mengalami variabilitas yang cukup signifikan. Setelah mencapai 100% di 2020, angka ini turun drastis menjadi 50% pada 2021, lalu kembali naik di 2022 (100%), turun ke 66,67% di 2023, dan kembali sempurna di 2024 (100%). Dinamika ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kapasitas lembaga penyelesaian perselisihan dan keterbatasan interaksi langsung selama masa pandemi. Namun pada 2024, capaian optimal ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik ketenagakerjaan telah berjalan secara efektif.

- **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bidang yang sangat penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada indikator berikut ini:

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,86	87,13	87,51	87,81	88,22
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,79	60,61	57,19	58,60	58,60
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,465	0,412	0,511	0,395	0,412
Persentase Capaian Kabupaten Layak Anak	25,00	70,00	70,00	75,00	75,00

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2020 memiliki capaian 86,77 dan capaiannya meningkat pada tahun 2023 menjadi 87,81. Adapun pada Indeks Pemberdayaan Gender yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka dari capaian yang ada masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 sebesar 63,79 dan memiliki pola menurun hingga tahun 2023 menjadi sebesar 58,60.

Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Adapun Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 0,395

pada tahun 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Ketimpangan Gender mengalami fluktuasi di mana angka Indeks Ketimpangan Gender sempat menurun menjadi 0,412 pada tahun 2021 namun meningkat kembali pada tahun berikutnya.

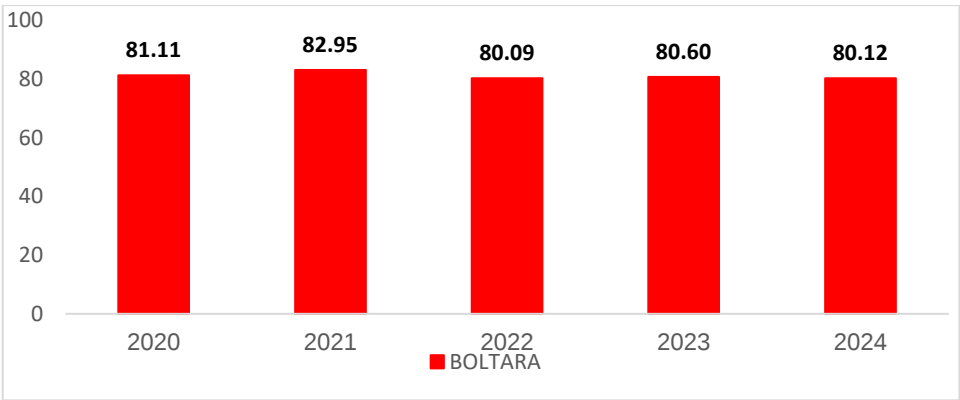
Raihan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat “Madya” tahun 2023 menggambarkan adanya tren positif kenaikan dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak anak di Bolaang Mongondow Utara, baik dari aspek hak sipil, lingkungan keluarga/pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus anak.

• **Pangan**

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Berikut merupakan gambaran kondisi indeks ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun.

Berdasarkan grafik 2.32 dapat digambarkan bahwa kondisi pangan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami penurunan di tahun 2022, meskipun mengalami penurunan sebesar 2,86 persen dari tahun sebelumnya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi pangan daerah. Ketidakseimbangan pasokan pangan, distribusi pangan, dan penurunan angka produksi pertanian merupakan faktor yang menjadi penyebab menurunnya angka indeks ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**Grafik 2.32 Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

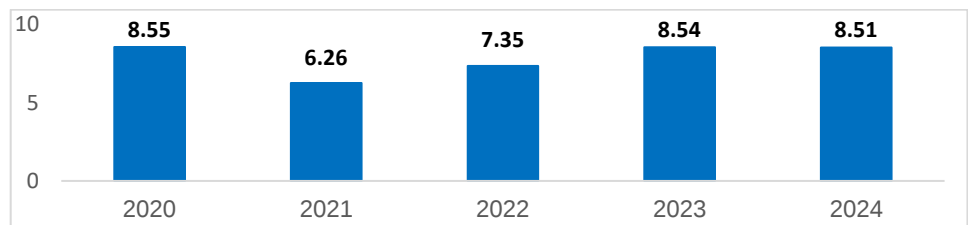
Kondisi pangan yang mengalami kenaikan di tahun 2023 pada angka 81,60 persen beberapa upaya-upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses yang memadai dan berkelanjutan ke pangan yang cukup dan bergizi.

Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan, di antaranya:

1. Peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian yang baik dan praktik pertanian yang ramah lingkungan.
2. Pembentukan sistem distribusi yang efisien untuk menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
3. Pengembangan sistem penyimpanan pangan yang baik untuk mencegah kerugian dan kerusakan pangan.
4. Pemberdayaan petani dan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pangan di daerah mereka.
5. Peningkatan investasi dalam infrastruktur logistik dan transportasi untuk mempermudah distribusi pangan.
6. Memperkuat sistem informasi pasar pangan untuk mengetahui ketersediaan dan permintaan pangan.
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi tentang pangan yang aman dan berkualitas.
8. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indeks ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi populasi dalam suatu wilayah yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Indeks ini merupakan bagian dari upaya untuk memantau keamanan pangan global dan sering digunakan oleh organisasi seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*) untuk menilai situasi pangan di berbagai negara. Perkembangan Indeks ketidakcukupan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana berikut:

Grafik 2.33 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah salah satu indikator utama dalam memantau keberhasilan upaya mengurangi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2023 berada pada angka 8,54 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 7,35 persen, peningkatan pada tahun tersebut terjadi lebih di sebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat khususnya terhadap makanan, sehingga dapat menyebabkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan.

Fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin berkaitan erat dengan akses seseorang terhadap makanan. Maka dapat diartikan bahwa kemiskinan mengakibatkan penurunan akses penduduk terhadap makanan dalam memenuhi kecukupan energi serta nutrisi untuk dapat hidup aktif dan sehat. Dampak yang begitu besar dari kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama dari kerawanan pangan.

Adapun bagi Pemerintah Daerah perlu melakukan strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan yang tentunya akan berkolerasi dengan banyak aspek lainnya seperti kemiskinan, stunting, inflasi, kesehatan dan lainnya. Adapun dalam penanganan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ada beberapa kebijakan yang dapat diefektifkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di antaranya:

1. Memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat, lebih khusus dalam produksi domestik dan distribusi yang merata di seluruh daerah. Peningkatan produksi pangan domestik diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap distribusi dan rantai pasok produk pangan serta pengendalian biaya produksi. Pengendalian biaya produksi komoditas pangan dapat difokuskan kepada pengendalian biaya perawatan (pupuk, obat-obatan, dll.) ;

2. Melakukan Optimalisasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pangan Bergizi, Makanan berkualitas dan gizi adalah landasan kesehatan dan manfaatnya dapat dirasakan seumur hidup. Kegiatan ini dapat disemarakkan untuk para siswa / pelajar, masyarakat miskin / penerima bantuan. Dengan harapan mengajarkan anak tentang kebiasaan makan yang sehat sejak dini, mereka akan memiliki hubungan yang positif dengan makanan hingga tumbuh dewasa;
3. Mengontrol harga bahan pangan di pasaran agar tidak terjadi inflasi makanan atau sejenisnya yang nanti berdampak pada tingkat konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan pengeluaran perkapita, produksi beras perkapita, dan realisasi bantuan sosial perkapita akan memberi pengaruh terhadap penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, sebaliknya, peningkatan rata-rata inflasi makanan bulanan memberi pengaruh terhadap peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan;
4. Produksi pangan secara mandiri, seperti pengoptimalan lahan-lahan produktif secara individual di pekarangan sebagai kemandirian pangan, contohnya menanam sayuran, cabai, jagung dan pangan lainnya;
5. Melakukan Kajian/Analisa lanjutan tentang hubungan kemiskinan dan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kajian/Analisa ini dapat dikhususkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
6. Strategi jangka panjang peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi secara terpadu. Perbedaan pada tingkat pendapatan akan menyebabkan variasi dalam pola distribusi pendapatan, termasuk cara rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya. Ketika pendapatan terbatas, individu atau rumah tangga cenderung memprioritaskan kebutuhan makanan, menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi makanan. Secara umum jika semakin rendah persentase pengeluaran untuk pangan, maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang termasuk kebutuhan pokok yaitu makanan dan minuman. Artinya peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Namun fakta yang terjadi, Meskipun pendapatan yang tercermin dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita menunjukkan peningkatan, namun tingkat konsumsi mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan terkikis oleh kenaikan harga barang yang dibutuhkan yang tercermin dalam tingkat inflasi. Maka dari itu potensi kecukupan gizi akan diabaikan, khususnya pada masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan;

7. Pengembangan inovasi-inovasi pertanian modern seperti *smart greenhouse* yang disertai pemberian fasilitas akses teknologi kepada masyarakat akan mendorong terjadinya transformasi pertanian dan perikanan guna mendorong produktivitas dan menghadapi perubahan iklim. Di samping upaya-upaya intensifikasi pertanian, pemerintah perlu mendorong program diversifikasi pangan dengan mengedepankan komoditas-komoditas pangan lokal yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat menjadi substitusi komoditas pangan yang masih dominan impor.

- **Pertanahan**

Dukungan pemerintah daerah terhadap Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sangat penting untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam urusan pertanahan. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi masalah yang berimplikasi terhadap capaian target yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program PTSL secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan sumber daya yang memadai, meningkatkan kapasitas administratif dan teknis, serta memperkuat kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, diharapkan target-target dalam urusan pertanahan, terutama terkait dengan Program PTSL, dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

- **Lingkungan Hidup**

Seiring dengan peningkatan investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, potensi permasalahan terkait isu lingkungan juga semakin meningkat.

Mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Binjeita dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Menurunnya angka indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan perlu diantisipasi melalui tindakan yang proaktif dan komprehensif untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendasarinya. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi penurunan angka indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan:

- 1) Pemerintah perlu memperkuat penegakan peraturan lingkungan yang ada dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan pengelolaan udara bersih dan konservasi lahan. Ini bisa termasuk regulasi emisi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah terbuka.
- 2) Meningkatkan tutupan lahan hijau di perkotaan dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan mengurangi efek urbanisasi. Pemerintah dapat mendorong penanaman pohon, pembuatan taman kota, dan penciptaan ruang terbuka hijau lainnya.
- 3) Memperbaiki sistem pengelolaan sampah, termasuk daur ulang dan pengelolaan limbah yang efisien, dapat mengurangi polusi udara dan tanah yang berasal dari pembakaran dan pembuangan sampah.
- 4) Kampanye pendidikan lingkungan yang ditujukan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara dan lahan yang bersih. Masyarakat juga perlu diberikan informasi tentang cara mengurangi jejak lingkungan mereka secara individu.
- 5) Kolaborasi Antar-sektor: Penting untuk ada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah lingkungan ini. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan program-program bersama, sumber daya yang saling berbagi, dan upaya bersama untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik.

- **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan (Adminduk). Persentase kepemilikan dokumen Adminduk yang belum mencapai 100,00 persen bisa mengindikasikan keterbatasan akses, kesadaran/edukasi, dan tantangan administratif lainnya. Untuk meningkatkan persentase kepemilikan dokumen Adminduk, diperlukan langkah-langkah seperti

peningkatan aksesibilitas layanan, kampanye edukasi yang lebih luas, penyederhanaan proses administratif, pemangkasan birokrasi, serta upaya untuk mengatasi masalah sosial dan budaya yang mungkin menjadi hambatan. Dengan demikian, diharapkan semua warga dapat memiliki akses yang setara terhadap dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan.

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

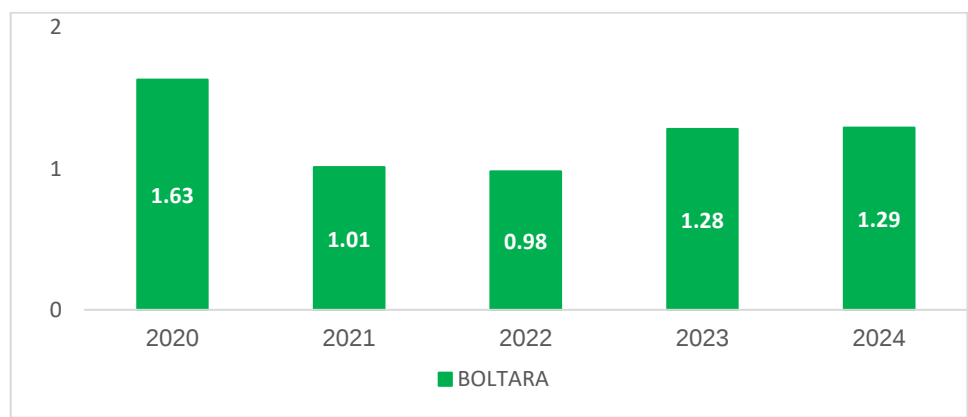
Koordinasi antara Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Perencanaan desa RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kabupaten perlu diperkuat. Ketidaksinkronan antara dokumen RPJMDes dan RPJMD kabupaten bisa mengindikasikan beberapa hal:

- 1) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam proses perencanaan pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, prioritas dan program pembangunan antara tingkat desa dan kabupaten bisa menjadi tidak sejalan.
- 2) Desa memiliki keterbatasan sumber daya dalam menyusun RPJMDes yang memadai dan selaras dengan RPJMD kabupaten. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis, keuangan, atau sumber daya manusia.
- 3) Perbedaan prioritas pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan dalam kebutuhan dan kondisi lokal, serta persepsi yang berbeda terkait dengan pembangunan.
- 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes dan RPJMD kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan yang efektif.

- **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana dengan indikator laju pertumbuhan penduduk dengan capaian sebagai berikut:

**Grafik 2.34 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2025

Grafik laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting mengenai dinamika demografi lima tahun terakhir. Data dari BPS Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi angka pertumbuhan penduduk yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, serta kebijakan nasional dan lokal yang berpengaruh terhadap dinamika kependudukan.

Tahun 2020 mencatat laju pertumbuhan tertinggi, yaitu 1,63%. Angka ini menunjukkan bahwa sebelum adanya pandemi COVID-19, pertumbuhan penduduk di Bolaang Mongondow Utara berada dalam tren positif. Faktor seperti tingginya angka kelahiran, rendahnya angka kematian, dan kemungkinan adanya migrasi masuk menjadi penyebab utama. Namun, meskipun pandemi mulai muncul di tahun ini, dampak besarnya terhadap demografi belum sepenuhnya terasa.

Pada 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 1,01%. Penurunan ini terkait erat dengan dampak pandemi, termasuk meningkatnya angka kematian, pembatasan mobilitas, ketidakpastian ekonomi, dan penurunan migrasi masuk. Pandemi menyebabkan banyak pasangan menunda pernikahan dan kehamilan, sementara penerapan PPKM membatasi perpindahan penduduk.

Penurunan berlanjut pada 2022 menjadi 0,98%, meskipun lebih ringan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih dalam masa adaptasi dan pemulihan ekonomi. Ketidakpastian masih tinggi, dan sistem kesehatan belum sepenuhnya pulih. Namun, penurunan ini bisa juga dianggap sebagai penyesuaian alami akibat gangguan besar seperti pandemi.

Tahun 2023 menunjukkan perubahan arah tren dengan meningkatnya laju pertumbuhan menjadi 1,28%. Ini menandai awal pemulihan demografi di Bolaang Mongondow Utara. Pemulihan ekonomi, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan, serta kembalinya aktivitas sosial seperti pernikahan dan kelahiran turut berperan dalam peningkatan ini. Program vaksinasi dan penurunan kasus COVID-19 juga mengurangi ketidakpastian sosial, sementara pemerintah mulai mengaktifkan kembali program sosial dan keluarga berencana.

Selain itu, meningkatnya mobilitas penduduk dan potensi migrasi masuk turut mendorong angka pertumbuhan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menawarkan peluang kerja dan lingkungan yang stabil menjadi daya tarik bagi pendatang. Namun, hal ini juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pada 2024, laju pertumbuhan naik tipis menjadi 1,29%. Meskipun kenaikannya kecil, hal ini menunjukkan tren stabilisasi pasca-pandemi. Kondisi ini mencerminkan kembalinya masyarakat pada pola kehidupan yang lebih normal dan stabil. Pemerintah daerah kini memiliki ruang untuk fokus pada penguatan perencanaan pembangunan dan sistem sosial ekonomi.

Angka pertumbuhan yang stabil pada 2023 dan 2024 memiliki arti strategis bagi perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus bersiap menghadapi peningkatan kebutuhan layanan dasar akibat potensi tekanan demografi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan yang memadai.

Meski ada pemulihan, angka pertumbuhan belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Hal ini bisa mencerminkan transformasi sosial, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga, pentingnya stabilitas ekonomi rumah tangga, dan kesehatan. Ini menjadi peluang untuk memperkuat program pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari sisi kebijakan, fluktuasi laju pertumbuhan ini harus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Peningkatan angka kelahiran dalam dua tahun terakhir perlu diantisipasi dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan ibu dan anak serta fasilitas pendidikan dasar.

Stabilitas pertumbuhan penduduk juga menjadi indikator positif bagi dunia usaha dan investasi. Pertumbuhan yang konsisten mencerminkan potensi pasar dan membuka peluang pengembangan usaha lokal. Ini mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika didukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, pertumbuhan penduduk juga membawa tantangan terhadap lingkungan dan tata ruang. Tanpa pengelolaan yang baik, peningkatan jumlah penduduk bisa menekan ketersediaan lahan, air bersih, dan fasilitas publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan demografi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2020–2024 mencerminkan ketahanan sosial dan adaptabilitas masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menghadapi krisis global. Pemulihan yang terjadi pasca-pandemi merupakan modal sosial penting untuk mendorong pembangunan. Dengan perencanaan berbasis data dan penguatan koordinasi antar sektor, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kesimpulannya, dinamika laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir menunjukkan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan tepat. Fluktuasi akibat pandemi menjadi pelajaran berharga dalam membangun sistem sosial dan ekonomi yang tangguh. Pemerintah daerah perlu terus memantau tren ini dan memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan mampu menjawab tantangan demografi secara berkelanjutan dan merata.

- **Perhubungan**

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari beberapa sektor salah satunya yaitu transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal. Selain itu kelengkapan sarana prasarana dan menjadi hal penting dalam mendukung perhubungan terutama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	77,00	80,00	85,00	86,00	86,00
Persentase Meningkatnya Keselamatan Berlalu lintas	66,00	65,00	70,00	70,00	70,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Ada beberapa kegiatan yang mendukung indikator tersebut di antaranya yaitu faktor ketersediaan kelengkapan atribut jalan dan ketersediaan transportasi yang memadai.

Indikator peningkatan keselamatan berlalu lintas tidak mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tidak tersedia balai pengujian kendaraan bermotor sehingga kewenangan pemerintah daerah terbatas dalam pemberian surat rekomendasi bagi masyarakat yang akan melakukan Uji KIR. Kemudian terbatasnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Unsur terkait juga dikarenakan keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar Instansi, serta kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

• **Komunikasi dan Informatika**

Kinerja makro urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari 2 (dua) indikator antara lain Indeks Komunikasi Informasi publik yang selalu tercapai targetnya pada setiap tahun karena sejak terbentuknya domain Pemda, maka seluruh informasi terkait pemerintah daerah di muat dalam *website* artinya hampir setiap agenda pemerintah sudah terpublikasi dengan baik. dan untuk Indeks SPBE terkait dengan pelayanan telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Walaupun semua perangkat daerah sudah mendapatkan pelayanan internet namun, masih ada yang belum memadai untuk menunjang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. e-

Government ini merupakan sebuah cara untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan, *e-Government* juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi, di bawah ini adalah gambaran capaian dari kinerja urusan Komunikasi dan Informatika:

**Tabel 2.27 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Komunikasi Informasi publik	60,00	86,00	100,00	100,00	100,00
Indeks SPBE	43,00	57,00	71,00	75,00	80,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks komunikasi informasi publik menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi/data yang disampaikan oleh media melalui Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian, di mana dalam proses kurasi informasi yang akan disajikan oleh media telah sesuai dengan standar yang objektif dalam memonitor dan mengevaluasi informasi yang disampaikan ke masyarakat, indeks ini juga digunakan sebagai *early warning system* membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pengelolaan informasi publik yang memerlukan perhatian dan langkah- langkah konkret lebih lanjut. Sebagaimana digambarkan pada tabel bahwa informasi yang sampai ke masyarakat sering direspon sangat cepat oleh masyarakat, artinya informasi yang disampaikan dipercaya oleh masyarakat.

• **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.28 Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase koperasi aktif/ sehat	17,39	13,04	8,07	8,70	8,00
Persentase UMKM naik kelas	1,74	2,03	2.32	1,74	1,74
Persentase IKM yang berstandarisasi	0,00	24,49	4,08	26,74	26,86

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Definisi koperasi aktif dan sehat pada tahun 2020 telah terjadi reformasi total koperasi, di mana koperasi yang telah lama tidak memiliki kegiatan perkoperasian, sehingga dari Kementerian Koperasi membekukan sejumlah 16 Koperasi, namun yang terjadi hanyalah pembekuan sementara oleh Kementerian Koperasi RI. di Tahun 2021 telah diaktifkan kembali Koperasi yang telah melakukan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat pada jumlah koperasi aktif dan sehat, maka terjadi kenaikan angka capaian dari 17,39 persen di tahun 2020 menjadi 13,04 persen pada tahun 2021 dan terus berlanjut sampai pada tahun 2022 turun menjadi 8,7 persen, Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 kondisi koperasi aktif/sehat mengalami penurunan menjadi 6,67 persen. Hal tersebut dikarenakan banyak pengurus koperasi yang telah menjadi pegawai negeri setelah mengikuti seleksi, sehingga banyak koperasi yang statusnya sudah tidak aktif lagi karena keterbatasan pengurus dalam mengelola koperasi.

- **Penanaman Modal**

Kondisi penanaman modal daerah dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi dan banyaknya izin investasi yang diterbitkan.

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,11	85,26	81,12	81,00	81,00
Jumlah Investor Meningkat	47,00	31,00	271,00	1044,00	1044,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan data tabel di atas bahwa untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, namun Kembali mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu pada angka 81,12 persen. Kemudian indeks stabil di angka 81,00 persen selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, stabilitas ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan besar yang mempengaruhi Tingkat kepuasan Masyarakat.

Jumlah investor pada dua tahun berturut -turut terjadi peningkatan investor, peningkatan drastis terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Ini dikarenakan tidak lepas dari adanya dukungan pemerintah melalui anggaran DAK Non Fisik fasilitasi penanaman modal tahun 2023 yang tentunya dengan

dilaksanakan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP capaian kinerja 1.495 terdiri dari Nilai Izin Berusaha (NIB) : 1044 dan Izin Non Berusaha (INB) : 451 hasil dari sosialisasi yang dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun perbedaan survei kepuasan masyarakat tidak mencapai target dan jumlah izin yang diterbitkan melebihi target karena pengurusan izin sudah melalui *online* sedangkan perhitungan SKM dilakukan secara manual dengan membagikan kuisioner.

- **Kepemudaan dan Olah Raga**

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Kondisi urusan kepemudaan dan Olah Raga dari tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.30 Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2022-2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	15,00	16,00	17,00	20,00	21,00
Persentase atlet berprestasi	12,13	12,27	16,87	27,87	27,87

Sumber : Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Pencapaian indikator jumlah organisasi pemuda yang aktif dikarenakan peran aktif seluruh organisasi kepemudaan yang terdiri dari 21 organisasi kepemudaan dengan jumlah pemuda aktif pada organisasi berjumlah 874 anggota.

Capaian kinerja indikator persentase atlet berprestasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022. Dari target 16,87 persen untuk tahun 2023 yang terealisasi sebesar 27,87 persen atau capaian sebesar 157,00 persen. Dengan jumlah atlet yang mendapatkan medali sebanyak 141 dari 506 atlet yang ikut pertandingan.

- **Statistik**

Statistik memiliki peran penting dalam mendukung kinerja dan pembangunan daerah dengan memberikan data yang akurat, informasi, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang

efektif dan tepat adapun beberapa keterlibatan dari statistik adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan data yang akurat dan relevan, Statistik daerah dapat menyediakan data yang akurat dan relevan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah tersebut, yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja daerah dan mengambil keputusan yang tepat
2. Monitoring dan evaluasi statistik daerah dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Perencanaan statistik daerah dapat digunakan dalam proses perencanaan, seperti dalam pengembangan rencana pembangunan daerah dan menentukan prioritas pembangunan daerah.
4. Penyusunan kebijakan statistik daerah dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah, seperti dalam pengembangan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
5. Penyediaan informasi statistik daerah dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan kondisi di daerah tersebut.

- **Persandian**

Persandian adalah Kegiatan di bidang Pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh. Untuk kabupaten Bolaang Mongondow Utara persandian belum dapat diukur dikarenakan belum ada pencapaian kinerja karena keterbatasan sumber daya manusia dan penganggaran.

- **Kebudayaan**

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai sebuah Daerah pesisir pantai dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor

budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Daerah ini. Perkembangan kelompok kesenian di Kabupaten Bolaang Mongondow utara menunjukkan belum terjadi perkembangan yang optimal disebabkan karena beberapa faktor di antaranya dokumen dan data sejarah masih dalam proses pengkajian, di samping itu terkendala dengan regulasi pengelolaan cagar budaya yang harus memiliki izin karena pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang memuat identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan prasarana Kebudayaan, Potensi Masalah Pemajuan Kebudayaan dan Analisis serta rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2021 peneliti dari Universitas Hasanuddin telah melakukan penelitian peninggalan sejarah/purbakala yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Ekosistem Kebudayaan	30,00	30,00	53,67	59,50	81,60
Jumlah Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan	35,00	35,00	49,00	62,00	102,00
Jumlah dokumen dan data sejarah daerah	1,00	1,00	2,00	6,00	17,00
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	n.a	1,00	8,00	4,00	15,00
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	30,00	57,33	57,33	59,50	68,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang memuat identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan prasarana Kebudayaan, Potensi Masalah Pemajuan Kebudayaan dan Analisis serta rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2021 peneliti dari

Universitas Hasanuddin telah melakukan penelitian peninggalan sejarah/purbakala yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

• **Perpustakaan**

Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi antara lain, (1) menyimpan koleksi (informasi), (2) menyediakan informasi bagi masyarakat, (3) sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non formal, (4) mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan (5) menjadi tempat untuk rekreasi. Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan, dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan ponsel maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet Kondisi urusan Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2020 s/d 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pengunjung ke Perpustakaan per tahun	1.126	1.130	1.070	1.193	1.218

Sumber : Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat terjadinya peningkatan pengunjung perpustakaan setiap tahunnya meskipun masih jauh dari yang di targetkan. Pejabat Fungsional Pustakawan yang masih sangat kurang di

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi salah satu faktor utama kendala dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sarana dan Prasarana dalam pelayanan perpustakaan juga masih sangat terbatas, terutama letak gedung perpustakaan daerah yang masih jauh dari sekolah-sekolah dan kawasan pemukiman masyarakat sehingga menyulitkan bagi pengelola perpustakaan daerah untuk menarik pengunjung masyarakat dan pelajar untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. Meskipun begitu terdapat strategi pemecahan masalah yang kami hadapi tersebut antara lain Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah dalam pelayanan perpustakaan, serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelayanan perpustakaan. Kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lainnya juga diharapkan bisa menciptakan sinergi dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan literasi informasi terutama masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pengusulan penerimaan CPNS yang berlatar belakang Perpustakaan atau Pustakawan juga menjadi salah satu strategi pemecahan masalah agar dalam pelayanan perpustakaan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih optimal lagi.

Capaian indikator kinerja didukung oleh program pembinaan perpustakaan dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

- **Kearsipan**

Urusan kearsipan merujuk pada segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan arsip. Hal ini mencakup semua proses mulai dari penciptaan, penyimpanan, pengelolaan, pengamanan, hingga penghancuran arsip yang tidak diperlukan lagi. Kearsipan penting untuk memastikan bahwa informasi yang ada dapat diakses dengan mudah dan aman sesuai kebutuhan.

Secara umum, urusan kearsipan melibatkan beberapa kegiatan utama, antara lain:

1. **Penciptaan Arsip:** Proses pembuatan atau pengumpulan dokumen yang akan menjadi arsip, baik itu dalam bentuk fisik (seperti surat, laporan, dan catatan) maupun digital.

- 2. **Pengelolaan Arsip:** Pengaturan arsip agar tetap terstruktur dengan baik dan mudah diakses. Ini bisa mencakup pemberian kode, kategori, atau sistem penyimpanan lainnya.
- 3. **Penyimpanan Arsip:** Menyimpan arsip dengan cara yang aman dan terorganisir, baik dalam ruang penyimpanan fisik maupun sistem elektronik (digital).
- 4. **Pemeliharaan Arsip:** Menjaga kondisi arsip tetap baik dan dapat diakses dalam jangka waktu yang lama.
- 5. **Pemusnahan Arsip:** Penghancuran arsip yang sudah tidak relevan atau tidak dibutuhkan lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. **Pengamanan Arsip:** Melakukan upaya perlindungan terhadap arsip agar tetap aman dari kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah.

Urusan kearsipan sangat penting dalam organisasi, lembaga, dan pemerintahan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi. Selain itu, kearsipan juga memastikan bahwa informasi yang diperlukan di masa depan tetap dapat diakses dengan mudah.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Presentase OPD yang Menerapkan Pengolaan Arsip dengan Baik	50	71	90	90	90

Sumber : Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja persentase OPD yang Menerapkan Tata Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan terlihat dari tahun 2022-2024 tingkat capaian sebesar 90% dengan target sebesar 100%. Hasil pencapaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 50% dan pada Tahun 2021 sebesar 71%. Peningkatan SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan Kearsipan di masing-masing OPD, Penyediaan prasarana penyimpanan kearsipan yang sebagian sudah memadai menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan capaian indikator.

Pejabat Fungsional Arsiparis yang sampai dengan sekarang belum ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi salah satu faktor utama kendala dalam pengelolaan arsip daerah. Meskipun begitu terdapat strategi pemecahan masalah yang kami hadapi tersebut antara lain Memanfaatkan Sumber Daya Manusia di masing-masing OPD dalam pengelolaan arsip,

Memanfaatkan sarana dan prasarana penyimpanan Arsip Daerah yang ada di masing-masing OPD serta mengusulkan penerimaan CPNS yang berlatar belakang kearsipan atau Arsiparis agar dalam pengelolaan Arsip baik ditingkat OPD sampai Arsip Tingkat Daerah bisa terlaksana sesuai standar kearsipan.

Capaian Indikator Sasaran Persentase OPD yang Menerapkan Tata Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan didukung oleh Program Pengelolaan Arsip Daerah, dengan kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

- **Kelautan dan Perikanan**

Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan konsep yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah diciptakan dengan basis ekonomi sektor pertanian sub sektor perikanan, yang direncanakan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan komoditas unggulan dan usaha agribisnis yang dikembangkan. Pengembangan Kawasan Minapolitan (PKM) dipusatkan di Kecamatan Pinogaluman yang merupakan kecamatan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Tetapi bukan berarti di wilayah sekitarnya tidak berpotensi di sub sektor perikanan ini, sehingga wilayah sekitarnya merupakan wilayah penyangga.

Kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Bolang Mongondow Utara dilakukan secara terintegrasi baik dengan pengembangan wilayah secara fisik maupun dengan koordinasi antar stakeholder yang dituangkan dalam program kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah terkait. Peran sektor kelautan dan Perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinilai sangat strategis karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat serta mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut di atas.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.139	4.065	5.055	4.687	5.806
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	24,00	39,00	87,00	115,18	122

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

• **Pariwisata**

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah, meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawan seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah kunjungan wisata	22.042	60.657	62.980	65.525	66.242
Jumlah Event Wisata	1,00	9,00	9,00	4,00	1,00

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan even wisata relatif belum banyak berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Hal ini dapat dimaklumi mengingat metodologi yang digunakan untuk mengukur kunjungan wisata dengan menghitung jumlah orang yang berkunjung ke Bolaang Mongondow Utara secara kumulatif tanpa melihat tujuan kunjungannya. Disisi lain Bolaang Mongondow Utara merupakan jalur utama trans Sulawesi sehingga banyak dilalui/dikunjungi oleh pengguna jalan walaupun mereka tidak berwisata, namun dengan pendekatan ini dianggap melakukan kunjungan wisata.

• **Pertanian**

Potensi Pertanian di kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diukur melalui beberapa variabel di antaranya Produksi Pertanian Pangan, Produksi Perkebunan dan Produksi Peternakan. Ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan capaian kinerja Urusan Pertanian.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Produksi Padi	54.548	42.083	43.387	31.218	32.629
Produksi Jagung	50.337	51.654	53.160	26.844	26.398
Produksi Tomat	2,50	6,40	8,20	0,8	4,78
Produksi Cabai	12,23	24,50	71,8	3,4	24,07
Produksi Kelapa	15.551	15.210	15.300	15.280	15.280
Produksi Kakao	424,36	424,00	324,00	275,00	275,00
Populasi Sapi	16.558	16.982	17.232	17.574	8.467
Populasi Kambing	8.572	8.798	8.924	6.014	1.502

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, sementara yang lain menunjukkan tren penurunan atau kenaikan yang lebih konsisten. Misalnya, produksi tomat dan populasi kambing mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, sementara untuk produksi jagung dan populasi sapi menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten dari tahun ke tahun.

Berikut merupakan penjelasan masing-masing indikator pada capaian kinerja bidang pertanian.

1. Produksi Pertanian Padi sempat mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Pengolahan padi dari sebelum proses penanaman sampai pada waktu panen dan pasca panen memakan biaya yang cukup tinggi
 - b. Ketersediaan Teknologi pendukung yang terbatas.
 - c. Benih, Pupuk dan Obat yang cukup mahal, sehingga petani merasa rugi jika harus menanam padi dan memilih untuk beralih ke pertanian lain.
 - d. Faktor cuaca atau banjir bandang yang terjadi pada tahun 2019 di Kec. Sangkub dan Bintauna juga membuat lahan pertanian padi menjadi rusak. Sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali.

2. Produksi pertanian jagung mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi mencapai puncak pada tahun 2019 dikarenakan adanya intervensi program di mana terdapat bantuan bibit jagung dari APBN sebesar 150 Ton selama 2 kali dalam setahun serta mendapat bantuan pupuk dari Dana Alokasi Umum. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 mulai mengalami penurunan diakibatkan oleh faktor cuaca/kemarau Panjang.
3. Produksi tanaman tomat mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 karena adanya pandemi *covid-19* sehingga masyarakat atau petani tomat lebih memilih untuk menanam tanaman lain atau beralih pekerjaan lain. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sempat mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 produksi tanaman tomat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada angka 0,80 ton. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor cuaca dan kerentanan tanaman tomat terhadap serangan hama yang relatif lebih tinggi dibandingkan tanaman lain
4. Produksi cabai mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2022 yakni mencapai 71,8 ton. Namun pada tahun 2023, produksi cabai Kembali mengalami penurunan dikarenakan terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman cabai. Selanjutnya, keterbatasan produksi tanaman cabai berdampak juga pada harga jual yang menjadi lebih tinggi.
5. Produksi Kelapa terbilang relatif stabil dari tahun ke tahun dengan fluktuasi yang kecil. Namun, terjadi penurunan kecil produksi kelapa pada tahun 2021 dan 2023. Meskipun secara keseluruhan, produksi relatif lebih stabil dalam rentang yang hampir sama. Penurunan angka produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Adanya pengurangan lahan yang ditanami kelapa di desa Binjeita untuk pembangunan PLTU sekitar 30 hektar
 - b. Adanya serangan hama kelapa (Brontispa, kumbang api).
 - c. Umur kelapa yang sudah kurang berproduksi.
 - d. Fluktuasi harga yang tidak menentu menyebabkan harga produksi lebih tinggi dari nilai jual.

6. Produksi tanaman kakao mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya dikarenakan adanya peralihan tanaman dari tanaman kakao ke tanaman pangan karena dianggap lebih menguntungkan. Di sisi lain intervensi dari pemerintah masih terkendala terkait alokasi dan kebijakan khususnya pengadaan pupuk bersubsidi.
7. Populasi ternak sapi mengalami peningkatan di tahun 2022, Keberhasilan sasaran ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah:
 - a. adanya bantuan sapi sebesar 20 ekor yang berasal dari dana APBD
 - b. adanya bantuan sapi sebesar 100 ekor dari APBD Provinsi
 - c. adanya Program IB (Inseminasi Buatan) mendukung program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri)
8. Sama halnya dengan populasi ternak sapi, produksi kambing juga mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini, yaitu:
 - a. adanya bantuan kambing sebesar 11 ekor (APBD)
 - b. peningkatan kelahiran ternak kambing
 - c. pelayanan kesehatan hewan yang rutin dilakukan.

- **Kehutanan**

Keterbatasan kewenangan kabupaten dalam urusan kehutanan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Pembagian Administratif: Kebijakan dan regulasi terkait hutan sering kali diatur oleh pemerintah pusat atau provinsi. Kabupaten mungkin memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan tentang pemanfaatan dan perlindungan hutan karena kewenangan yang terbatas dalam hal ini.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Kabupaten mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup baik dalam hal keuangan, personel, atau infrastruktur untuk mengelola hutan secara efektif. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas terkait pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum.
3. Konsistensi Kebijakan: Ketika kebijakan kehutanan ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi, terkadang sulit untuk mencapai konsistensi antara kebijakan tingkat nasional atau provinsi dengan kebutuhan dan kondisi lokal di tingkat kabupaten.

4. **Pembangunan dan Ekonomi Lokal:** Sering kali, kepentingan ekonomi dan pembangunan di tingkat kabupaten dapat bertentangan dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hutan. Keterbatasan kewenangan dalam hal ini dapat mengakibatkan konflik antara pembangunan lokal dan konservasi hutan.
5. **Kerusakan Lingkungan:** Tanpa kewenangan yang memadai untuk mengelola hutan secara efektif, risiko kerusakan lingkungan seperti deforestasi, degradasi hutan, dan kerusakan habitat meningkat. Ini bisa berdampak negatif pada ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peningkatan koordinasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dalam hal pengelolaan hutan dapat membantu mengatasi beberapa masalah ini. Ini dapat melibatkan pengembangan kerangka kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif serta pemberdayaan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait hutan.

- **Energi dan Sumber Daya Mineral**

Keterbatasan kewenangan dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tingkat kabupaten dapat memiliki berbagai dampak yang signifikan. Berikut beberapa masalah yang mungkin timbul akibat keterbatasan tersebut:

1. **Pengelolaan Sumber Daya:** Keterbatasan kewenangan dapat menghambat kemampuan kabupaten untuk mengelola sumber daya energi dan mineral yang ada di wilayah mereka dengan efisien dan efektif. Hal ini bisa membatasi potensi pengembangan sektor energi dan mineral secara berkelanjutan dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat setempat.
2. **Pendapatan dan Pengembangan Lokal:** Keterbatasan dalam mengelola sumber daya energi dan mineral juga dapat berdampak pada pendapatan dan pembangunan di tingkat kabupaten. Jika kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengatur eksploitasi dan pengelolaan sumber daya tersebut, mereka mungkin kehilangan potensi pendapatan yang signifikan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

- 3. Konservasi dan Lingkungan: Tanpa kewenangan yang memadai, risiko kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali dari sumber daya energi dan mineral dapat meningkat. Ini termasuk risiko pencemaran air dan udara, kerusakan habitat, serta dampak negatif lainnya pada ekosistem lokal dan keanekaragaman hayati.
- 4. Ketidaksetaraan Regional: Keterbatasan kewenangan dalam urusan ESDM juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan antardaerah. Kabupaten-kabupaten yang memiliki sumber daya energi dan mineral yang kaya mungkin merasa dirugikan jika tidak memiliki kontrol penuh atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut, sementara daerah lain mungkin lebih diuntungkan.
- 5. Konflik Sosial: Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam regulasi dan pengelolaan sumber daya energi dan mineral dapat memicu konflik sosial antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat setempat yang mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan.

Peningkatan kewenangan dan kapasitas kabupaten dalam mengelola sumber daya energi dan mineral secara bertanggung jawab dapat membantu mengatasi beberapa masalah ini. Ini termasuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah, memperkuat kerangka regulasi yang memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mempromosikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya mereka.

• **Perdagangan**

Kondisi capaian kinerja sektor perdagangan rentang 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Bidang Perdagangan Tahun 2020 - 2024					
Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	20,00	10,00	20,00	00,00	10,00
Persentase alat ukur,takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera	2,71	11,22	20,04	30,36	34.7
Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	4,00	0,15	0,15	1,36	0,47

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Distribusi Sarana Perdagangan Tahun 2023 pada dasarnya belum mencapai target yang ditetapkan yakni dari target yang ditetapkan 40,00 persen. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan anggaran yang masih rendah dan masih bergantung pada DAK dan dana bantuan lainnya. Capaian kinerja tersebut dari meningkatnya usaha perdagangan yang tercatat dari jumlah perijinan dan data dalam angka pedagang pasar, dan jumlah pasar dalam kondisi baik. Namun indikator tersebut belum bisa menggambarkan keberhasilan Sarana Perdagangan karena masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi seperti Bangunan belum tertata dengan baik, memiliki tempat parkir/bongkar muat.

Pencapaian Indikator Alat Ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera didukung oleh pelaksanaan program standarisasi dan perlindungan konsumen serta telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UTP) Meterologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah merupakan indikator utama sejak tahun 2019-2023. Berdasarkan Persentase target kinerja tahun 2023 telah mencapai 30,26 persen.

Selanjutnya perkembangan harga berbagai komoditas pada Triwulan IV Tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS yang mengacu pada Kota Kotamobagu bahwa telah mengalami Inflasi sebesar 3,40 persen karena adanya Indeks Kenaikan Harga (IHK) dari 116, 11 pada Desember tahun 2022 menjadi 120,06 persen pada Desember 2023. Hal ini sejalan dengan rendahnya hasil produksi tomat dan cabai di tahun yang sama.

- **Perindustrian**

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi industri cukup banyak antara lain kopi, gula aren dan limbah organik. Dengan banyaknya unit usaha/pengrajin tersebut maka diperlukan hilirisasi industri dari atas sampai bawah dengan berbagai inovasi. Secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu produk industri kecil menengah (IKM) yang telah ada belum di Standarisasi dapat di lihat dari data berikut:

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase IKM yang berstandarisasi	n.a	24,49	28,57	26,74	27,12

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Kurun waktu 2019-2020 pendampingan terhadap IKM belum terdokumentasi dengan baik, sehingga program intervensinya juga masih sangat minim. Berbeda halnya sejak tahun 2021 intervensi terhadap IKM oleh pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan tren positif walaupun masih banyak didapati kekurangan misalnya keterbatasan IKM yang didampingi dan sumber daya manusia pendamping yang masih minim. Upaya ini menunjukkan hasil pada tahun 2022 di mana jumlah IKM yang telah berstandarisasi meningkat menjadi 28,57 persen yang pada tahun sebelumnya hanya sebesar 24,49 persen. Namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,83 persen dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut hanya difokuskan pada pendataan industri.

• **Transmigrasi**

Berdasarkan SK Bupati Nomor 60 Tahun 2009 Luas Lahan Transmigrasi di Kabupaten Bolaang mongondow Utara sebesar 800 Hektar. sesuai dengan pengukuran dan pemasangan tanda batas dari BPKH tahun 2015 perlu ada perubahan dan penyesuaian lokasi dari 800 Hektar menjadi 586 Hektar. Selanjutnya terbit SK Bupati Nomor 218 pada tahun 2021 menjadi 474,49 Hektar.

Sampai dengan tahun 2009 tercatat bahwa jumlah penduduk yang menempati daerah transmigrasi sebanyak 200 KK. Setiap tahun jumlah penduduk mengalami penurunan dikarenakan banyak yang sudah kembali ke daerah asal dan beberapa warga telah menjual lahan transmigrasi ke pihak luar pada tahun 2013. Pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 sudah ada upaya penyelesaian dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Boroko terkait permasalahan lahan Transmigrasi khususnya lahan 2 lewat pendampingan hukum dari kejaksaan Boroko, namun belum terselesaikan. Sehingga pada Tahun 2025 dialokasikan lagi anggaran untuk pengurusan serta pendampingan dalam penyelesaian kasus lahan tersebut.

• **Sekretariat Daerah**

Capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini:

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	92,00	79,00	78,00	77,00	69,00
Capaian Target Kinerja Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesra	77,00	78,00	77,00	77,00	89,00
Capaian Target Kinerja Bidang perekonomian dan Pembangunan	95,00	95,00	95,00	90,00	100,00
Nilai LPPD	3,040	3,050	3,3274	3,3270	3.3341
Meningkatnya LAKIP	B	B	B	B	B

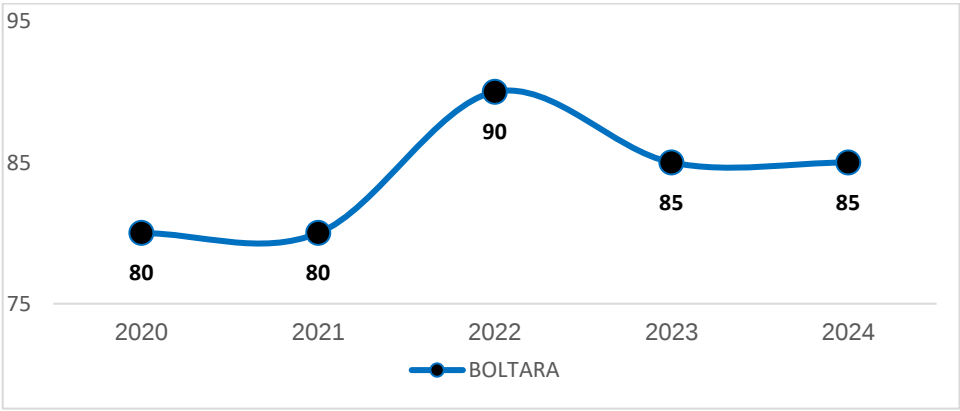
Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Walaupun belum 100,00 persen, namun secara umum kinerja Sekretariat Daerah sudah tercapai. Adapun beberapa indikator yang belum maksimal sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah menghadapi Pemilu 2024 dan transisi politik KDH/WKDH periode 2018-2023 ke pejabat KDH hingga Pilkada serentak selesai dilaksanakan.

• **Sekretariat DPRD**

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada indikator berikut ini:

Grafik 2.35 Presentase Agenda DPRD Yang Terlaksana Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Target kinerja Sekretariat DPRD di tahun 2021 termasuk dalam kategori kurang berhasil hal ini dikarenakan terdapat 3 dokumen Naskah akademik yang tidak menunjukkan adanya realisasi perda inisiatif DPRD dengan kata lain masih dalam proses pembahasan. Selain itu terdapat beberapa masalah yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama ini yakni:

1. Adanya perbedaan persepsi antar Anggota DPRD terhadap kebijakan politik;
2. Lemahnya koordinasi lintas instansi untuk menyiapkan draf produk hukum dan sekaligus meyakinkan pihak legislatif terhadap pentingnya kebijakan tertentu sehingga mempengaruhi lahirnya produk hukum daerah;
3. Keterbatasan sumber daya yang dapat menopang pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Belum adanya standar pelayanan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

Berbeda dengan tahun 2021, persentase agenda DPRD ditahun 2022 mengalami kenaikan capaian sebesar 10,00 persen dari tahun 2021 hal ini didukung oleh tersusunnya kajian naskah akademik sebanyak 3 Ranperda Inisiatif Anggota DPRD yang akan dijadikan Produk Hukum Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ranperda	34,00	33,00	26,00	21,00	21,00
Perda	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Di tahun 2023 terdapat 21 Propemperda yang di usulkan untuk di bahas dan tetapkan yakni 17 Rancangan Perda yang merupakan usulan dari Eksekutif dan 4 Rancangan merupakan inisiatif DPRD, namun yang berhasil di tetapkan hanya 8 Perda. Secara umum terdapat beberapa kendala dalam penetapan Ranperda yaitu:

1. Ranperda yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2. Terkait kelengkapan administrasi, biasanya Ranperda sudah diusulkan tetapi Naskah Akademiknya belum siap;
3. Urgensi dari Ranperda, yaitu Ranperda yang prioritas atau tuntutan masyarakat yang sangat kompleks dan segera harus dibahas;
4. Waktu Pembahasan yang tidak cukup karena banyaknya Ranperda yang diusulkan.

- **Perencanaan**

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bapelitbangda maka fungsi dan tugas Bapelitbangda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*). Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) tujuan yang mendukung pencapaian misi daerah yang diturunkan secara lebih operasional dari misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan tupoksi perangkat daerah, kemudian memiliki 3 (tiga) sasaran untuk mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Bapelitbangda, serta 6 (enam) indikator sasaran sebagai ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perencanaan Kinerja (Maks. 30,00 persen)	21,74	21,95	23,13	23,46	23,59
Pengukuran Kinerja (Maks. 25,00 persen)	13,12	13,35	14,53	16,56	17,15
Pencapaian Kinerja (Maks. 20,00 persen)	10,02	9,77	13,75	14,53	12,74

Sumber : Bapelitbangda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2024, indikator Perencanaan Kinerja ditargetkan sebesar 22,24 persen dengan realisasi 23,59 persen atau dengan persentase capaian sebesar 106 persen (sangat tinggi). Hal ini mengindikasikan implementasi *e-Planning* terintegrasi *e-Budgeting* berhasil dalam perencanaan/penganggaran, di mana capaian kinerjanya mampu melampaui target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk Pengukuran Kinerja dari target yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebesar 17,27 persen dengan realisasi capaian adalah sebesar 17,15 persen atau dengan persentase capaian mencapai 99 persen dengan kata lain bahwa pencapaian terhadap indikator ini dicapai dengan predikat Tinggi. Faktor yang berpengaruh pada indikator ini adalah maksimalnya peran Tim Penyelia Bapelitbang dalam memastikan target kinerja SKP dapat tercapai dengan baik. Disisi lain, belum tersedianya *tools* yang memadai untuk melakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap kinerja SKPD sehingga pengendalian dan evaluasi masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.

• **Keuangan**

Pajak daerah pada tahun 2022 naik disebabkan oleh peningkatan realisasi/pembayaran atas target pajak yang juga naik dari tahun 2021 ke tahun 2022. Di tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator yang meskipun pada tabel di bawah terlihat salah satunya yakni indikator Persentase Peningkatan PAD mengalami penurunan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun sebenarnya jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melampaui target yakni:

1. Indikator *Persentase Peningkatan PAD* pada tahun 2023 di targetkan sebesar 10 persen, terealisasi sebesar 18,45 persen. Indikator ini dapat melampaui target dikarenakan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pajak-pajak daerah yang dimaksimalkan pengelolaannya.
2. Indikator *Persentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD* ditargetkan sebesar 12,00 persen terealisasi sebesar 12,50 persen. Keberhasilan capaian atas indikator ini merupakan bagian dari penatausahaan dan pengelolaan BMD yang baik.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Bidang Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD	9,50	11,00	11,50	12,50	12,50

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kontribusi PAD terhadap APBD makin meningkat	17,20	73,00	17,30	18,25	18,25
Persentase Peningkatan PAD	37,00	17,29	38,50	18,45	18,45
Nilai pencapaian kinerja	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

• **Kepegawaian**

Indikator kinerja Kebutuhan Pegawai jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 57 persen, pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase karena sesuai dengan ABK yang diusulkan pada tahun 2023 jumlahnya bertambah dari kebutuhan yang tertata pada tahun 2022, sehingga target yang ditetapkan belum tercapai, selain itu penerimaan pegawai yang di laksanakan yakni PPPK sebanyak 178 orang belum memenuhi kebutuhan pegawai, dan beberapa hal yang mempengaruhi juga yakni terdapat pegawai mutasi/pindah ke luar daerah, meninggal dunia dan pensiun. Disisi lain, pengangkatan ASN dan Non ASN (PPPK) tidak sesuai dengan kuota yang tersedia.

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024

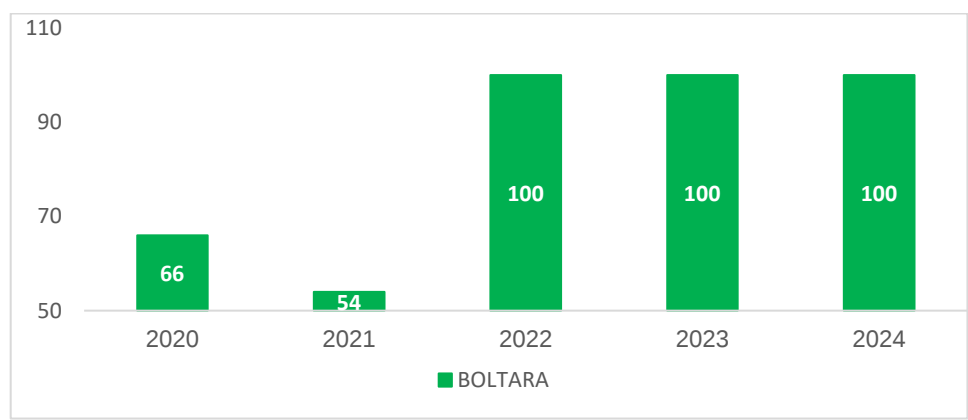
Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebutuhan Pegawai (%)	53,00	52,00	57,00	54,00	54,00
Pengembangan Karir Pegawai (%)	90,00	91,00	92,00	100,00	100,00

Sumber : BKPSDM Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

• **Pendidikan dan Pelatihan**

Beberapa kegiatan pada indikator Persentase ASN Yang Berkompeten tidak terealisasi di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan *refocusing* anggaran ke penanganan Covid-19 sehingga realisasi mengalami penurunan pada angka 54,00 persen, untuk CPNS yang lulus Pelatihan Dasar pada 5 (lima) tahun terakhir hanya 1 (satu) tahun yang tidak terealisasi dikarenakan tidak ada Prajabatan pada tahun 2019 seperti tergambar dalam ilustrasi di bawah ini:

**Grafik 2.36 Persentase ASN yang Berkompeten
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024**



Sumber : BKPSDM Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

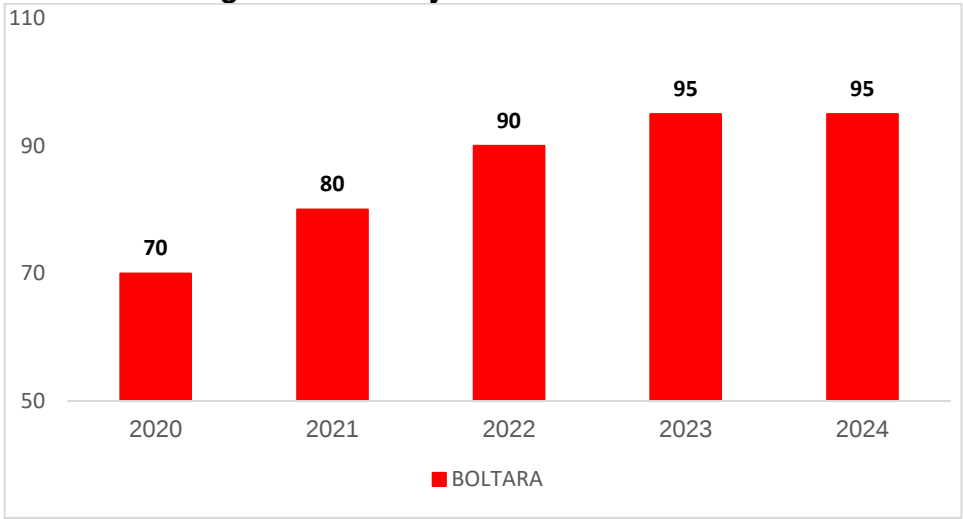
• **Penelitian dan Pengembangan**

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sehingga, urusan perencanaan dan urusan Penelitian dan pengembangan senganat berkaitan erat, baik dalam pelaksanaan maupun pencapaian indikator yang bersifat general.

Secara umum, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mengalami perbaikan kinerja dibanding tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 ini capaian kinerja mencapai angka 100,00 persen. Hal ini mengindikasikan mulai produktifnya kegiatan-kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh Bapelitbangda pada tahun 2023 kemarin.

Walaupun cenderung mengalami kenaikan, namun hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, belum ada sumber daya manusia ASN fungsional peneliti yang secara khusus melakukan kajian-kajian untuk menjawab permasalahan daerah dari sudut pandang kepakaran.

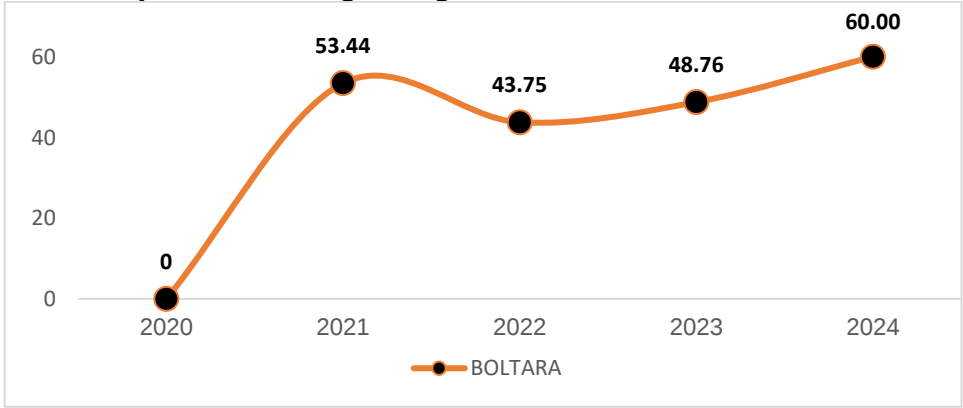
Grafik 2.37 Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dapat Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Tahun 2020-2024



Sumber : Bapelitbangda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan inovasi, baik dari segi jumlah inovasi yang dikembangkan, kualitas riset, atau penerapan teknologi baru.

Grafik 2.38 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024



Sumber : Bapelitbangda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

• **Pengawasan**

Di tahun 2023 terdapat satu indikator yang capaian realisasinya melompat jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu indikator Persentase Pemenuhan Komponen RB. Ditahun 2022 capaian indikator ini ada pada angka 18,38 persen namun di tahun 2023 ada pada angka 80,00 persen hal ini dikarenakan adanya perubahan penilaian Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 penilaian mandiriya dinilai per SKPD, untuk tahun 2023 penilaiannya berdasarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

dan Tematik di mana terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga penilaian terhadap komponen Reformasi Birokrasi untuk Inspektorat di tahun 2023 formulasinya dihitung berdasarkan indikator kinerja yang terdapat di Inspektorat Daerah.

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase OPD dengan nilai AKIP terbaik	13,33	56,66	72,00	74,00	74,00
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Persentase temuan yang di tindaklanjuti	52,58	60,80	74,00	66,71	66,71
Tingkat Kepatuhan Pencapaian MCP	51,04	51,42	74,00	87,29	87,29
Persentase pemenuhan komponen RB	n/a	16,87	18,38	80,00	80,00

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah suatu indeks yang mengukur sejauh mana suatu negara atau daerah memiliki sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. IIN mengukur kualitas integritas publik dengan melihat berbagai aspek dari sistem pemerintahan dan tata kelola publik yang ada. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinilai berhasil melakukan upaya pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan perangkat daerah dengan skor SPI 71,53. Sementara Survei Kepuasan atas Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapat skor 87,29. Penilaian MCP terhadap Tata Kelola Pemda, meliputi upaya perbaikan sistem dan regulasi, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap Perilaku Aparatur, KPK RI memotret keseriusan pelaksana pemerintahan dalam melakukan perbaikan dan komitmen pejabat daerah dalam mencegah korupsi.

• **Kecamatan**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dipimpin oleh camat atau

sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten.

Capaian kinerja Kecamatan dapat dilihat pada indikator berikut ini:

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai AKIP Kecamatan Pinogaluman	CC	CC	CC	CC	B
IKM Kecamatan Pinogaluman	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00
Nilai AKIP Kecamatan Kaidipang	B	B	B	B	CC
IKM Kecamatan Kaidipang	93,00	95,00	95,00	79,00	80,00
Nilai AKIP Kecamatan Bol. Barat	B	B	B	BB	BB
IKM Kecamatan Bol. Barat	76,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Nilai AKIP Kecamatan Bol. Timur	B	B	B	BB	CC
IKM Kecamatan Bol. Timur	75,00	77,00	77,00	77,00	93,11
Nilai AKIP Kecamatan Bintauna	B	B	B	B	B
IKM Kecamatan Bintauna	75,00	85,00	85,00	87,31	85,00
Nilai AKIP Kecamatan Sangkub	B	B	B	B	CC
IKM Kecamatan Sangkub	75,00	75,00	78,00	75,00	80,00

Sumber : Kantor Camat se-Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan di beberapa kecamatan mengalami peningkatan dari CC ke B meskipun terdapat beberapa kecamatan yang menurun dari B ke CC dan di beberapa kecamatan yang lain masih bertahan di B namun hal ini tidak lepas dari peran Bapelitbangda yang melakukan pendampingan sejak perumusan indikator kinerja sampai dengan pelaporan evaluasi kinerja.

Begitu juga dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2024 di beberapa kecamatan capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun di beberapa kecamatan lainnya mengalami penurunan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan, yang salah satunya adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat yang tersebar di masing-masing desa di kecamatan. Dan dari hasil survei tersebut akan diketahui seberapa besar pelayanan pemerintah kecamatan terhadap masyarakat di masing-masing desa.

• **Kesatuan Bangsa dan Politik**

Untuk target kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah jumlah konflik keagamaan dan politik yang terjadi.

Hingga tahun terakhir, tidak ditemukan adanya konflik yang terkait dengan keduanya. Tidak adanya konflik agama dan politik dapat mengindikasikan beberapa hal positif dalam suatu masyarakat:

1. Stabilitas Sosial: Kehidupan sehari-hari dalam masyarakat menjadi lebih stabil ketika tidak ada konflik agama atau politik. Ini memungkinkan individu dan kelompok untuk fokus pada kegiatan sehari-hari mereka tanpa gangguan atau ketakutan akan kekerasan atau ketegangan.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Lingkungan yang stabil cenderung menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Investor dan pengusaha lebih cenderung berinvestasi dalam pasar yang stabil, yang dapat menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Perkembangan Sosial: Tanpa gangguan dari konflik agama atau politik, masyarakat dapat lebih mudah berkembang secara sosial. Ini termasuk peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum. Masyarakat dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan dukungan sosial.
4. Kerukunan dan Toleransi: Ketika tidak ada konflik agama, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperkuat hubungan antaragama dan meningkatkan toleransi. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di mana individu dari latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai.
5. Pertumbuhan Demokrasi: Kehidupan politik yang bebas dari konflik dapat memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Partisipasi politik dapat meningkat, memperkuat kepercayaan pada sistem politik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap warga negara.

Dalam keseluruhan, ketiadaan konflik agama dan politik menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang dan berinovasi tanpa terhalang oleh ketegangan atau kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan agama atau pandangan politik.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

A. SPM Bidang Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kinerja pelayanan dasar pendidikan menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada masing-masing indikator. Data tersebut mencakup tiga

jenis layanan pendidikan dasar, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator utama berupa persentase warga negara pada kelompok usia tertentu yang berpartisipasi dalam layanan pendidikan tersebut.

Untuk indikator partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (usia 4–6 tahun), capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 94,99%, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 menjadi 71,30%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural, baik dari sisi ketersediaan lembaga PAUD, tenaga pendidik, maupun aksesibilitas masyarakat terhadap layanan tersebut. Namun demikian, pada tahun 2024 terdapat pemulihan capaian sebesar 90,71%, yang dapat diasumsikan sebagai hasil dari intervensi kebijakan percepatan layanan PAUD.

Pada indikator Pendidikan Dasar (usia 7–15 tahun), capaian tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 100%, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau seluruh kelompok usia wajib belajar. Meskipun demikian, terjadi penurunan menjadi 80,33% pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat ke 98,39% pada tahun 2024. Variasi ini mengindikasikan potensi tantangan dalam keberlanjutan program wajib belajar, termasuk faktor putus sekolah dan perpindahan penduduk yang belum teradministrasi secara optimal.

Tabel 2.46 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	88,9	94,99	87	71,3	90,71
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	92	90,79	100	80,33	98,39
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	91,2	77,11	100	88,15	83,88

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, untuk indikator Pendidikan Kesetaraan (usia 7–18 tahun), capaian juga menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 91,2%, menurun drastis menjadi 77,11% di tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 100% pada 2022. Namun, capaian kembali menurun menjadi 83,88% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pada pendidikan non-formal dan program kejar paket masih menghadapi tantangan partisipatif, terutama pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang mungkin telah memasuki dunia kerja atau memiliki keterbatasan waktu.

Dinamika capaian SPM ini mencerminkan perlunya penguatan tata kelola layanan pendidikan berbasis data spasial dan sosial, penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung pendidikan dasar, serta konsistensi pembiayaan daerah yang berpihak pada penyediaan layanan dasar yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak, terutama antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi seluruh warga negara di Bolaang Mongondow Utara.

B. SPM Bidang Kesehatan

Berdasarkan data capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 hingga 2024, secara umum menunjukkan dinamika yang mencerminkan keberhasilan parsial sekaligus tantangan struktural dalam penyediaan layanan kesehatan dasar yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Analisis terhadap dua belas jenis pelayanan dasar yang termuat dalam standar pelayanan kesehatan memberikan gambaran tentang efektivitas program intervensi serta kapasitas sistem pelayanan publik daerah.

Tabel 2.47 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93	100	90	87,14	98,08

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	90	83,97	97,54
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	89,96	92	87,14	93,82
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	79	80,01	80	84,26	79,73
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	50	89,41	87	88,85	86,39
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	34	49,36	52	80,66	49,61
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	82,47	90	77,46	72,48
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	51	72,42	78	87,04	75,85
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	98,04	95

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	84	100	100	95,48	78,25
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	52	88,71	100	67,25	61,81
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	75	63,71	61	55,57	76,75

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin cenderung menunjukkan capaian yang tinggi, di mana angka capaian mendekati atau menyentuh 100% pada beberapa tahun. Namun, fluktuasi terlihat pada tahun 2022–2023, yang menurun signifikan sebelum kembali meningkat pada 2024. Penurunan tersebut berpotensi dipengaruhi oleh terbatasnya mobilitas masyarakat, tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, capaian tahun 2024 yang kembali meningkat hingga 98,08% untuk pelayanan ibu hamil dan 97,54% untuk ibu bersalin mengindikasikan adanya pemulihan kinerja pelayanan.

Pelayanan kepada bayi baru lahir dan balita juga menunjukkan tren yang serupa, namun dengan capaian yang relatif lebih rendah dan fluktuatif, khususnya pada pelayanan balita yang hanya mencapai 79,73% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan cakupan layanan imunisasi, gizi balita, dan kunjungan rumah yang terintegrasi melalui puskesmas pembantu maupun posyandu.

Untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar dan usia produktif, terlihat bahwa partisipasi masih rendah. Capaian untuk usia produktif bahkan cenderung stagnan di kisaran 49–52% sejak 2020. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjangkau kelompok usia kerja yang memiliki waktu terbatas serta rendahnya kesadaran preventif terhadap pemeriksaan kesehatan rutin. Capaian pelayanan usia lanjut pun mengalami penurunan, dari 100% di tahun 2020 menjadi hanya 72,48% pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya peningkatan intervensi berbasis komunitas seperti pelayanan *home care* atau posyandu lansia.

Capaian pelayanan pada penderita hipertensi dan diabetes melitus menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, terutama pada penderita diabetes yang mencapai angka 98–100% pada tahun 2022–2024. Hal ini dapat menunjukkan keberhasilan program deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular (PTM). Namun, pelayanan untuk penderita hipertensi belum mencapai kondisi ideal dengan angka fluktuatif dan menurun menjadi 75,85% pada 2024.

Adapun pelayanan terhadap kelompok rentan seperti orang dengan gangguan jiwa berat, penderita tuberkulosis (TBC), dan yang berisiko HIV/AIDS menunjukkan fluktuasi signifikan. Misalnya, pelayanan bagi ODGJ mengalami penurunan dari 100% di tahun 2021 menjadi 78,25% pada 2024. Sementara pelayanan bagi penderita TBC mengalami penurunan drastis menjadi 61,81% di tahun 2024. Penurunan ini berpotensi disebabkan oleh keterbatasan pelacakan kasus aktif, stigma sosial, dan kurangnya tenaga kesehatan spesialis.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memperkuat sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah kerja puskesmas, memperluas jangkauan pelayanan berbasis komunitas, serta memperkuat integrasi lintas sektor, khususnya dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penambahan anggaran berbasis kinerja untuk pelayanan kesehatan dasar juga menjadi krusial dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas layanan kesehatan yang bermutu.

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, khususnya pada dua jenis layanan dasar, yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sektor infrastruktur dasar.

Tabel 2.48 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	17,7	59,01	90	94,83	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,2	6,02	95	83,95	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Pada layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, capaian meningkat drastis dari hanya 17,7% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Peningkatan ini berlangsung secara bertahap dengan lompatan signifikan pada tahun 2021 (59,01%) dan 2022 (90%). Hal ini mencerminkan adanya program prioritas yang secara progresif memperluas cakupan layanan air bersih, baik melalui jaringan perpipaan UPTD SPAM, pembangunan sarana air bersih perdesaan, maupun optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan dan air tanah. Capaian 100% pada tahun 2024 menandakan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dalam menjamin akses universal terhadap air minum layak sebagai bagian dari hak dasar masyarakat.

Demikian pula pada penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik, terjadi lonjakan signifikan dari 6,2% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada 2021 (6,02%) dan 2023 (83,95%), secara umum terdapat peningkatan luar biasa, khususnya pada tahun 2022 yang mencapai 95%. Capaian ini dipengaruhi oleh pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal maupun individual, serta integrasi program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dalam skema perencanaan infrastruktur daerah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap menjaga keberlanjutan layanan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun, memperkuat kapasitas teknis kelembagaan pengelola layanan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pemanfaatan infrastruktur. Selain itu, dibutuhkan integrasi lintas sektor dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga donor untuk menjaga standar pelayanan dan memperkuat aspek ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang dapat mengganggu pasokan air bersih dan sistem sanitasi.

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang sangat spesifik dan kontekstual terhadap kondisi sosial dan kebencanaan daerah. Terdapat dua indikator utama dalam pelayanan dasar perumahan rakyat, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah. Dari data capaian yang tersedia, terlihat bahwa indikator pertama mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2022, setelah sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat capaian (0%). Capaian sebesar 100% pada tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh warga korban bencana yang terdampak pada tahun tersebut telah memperoleh hunian layak. Angka ini sedikit menurun menjadi 90% pada tahun 2023 dan kembali mencapai angka maksimal 100% pada tahun 2024. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh kejadian bencana alam yang bersifat insidental dan kapasitas respons cepat pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan hunian pascabencana.

Tabel 2.49 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator / Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	100	90	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, untuk indikator fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, capaian tetap 0% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tidak adanya program relokasi permanen yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tersebut, baik karena tidak terdapat proyek pembangunan strategis yang memerlukan relokasi warga secara besar-besaran.

Untuk memastikan keberlanjutan penyediaan hunian layak, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menetapkan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis permukiman, mengembangkan sistem informasi hunian terdampak bencana secara *real time*, serta menyiapkan skema anggaran siaga bencana yang dialokasikan secara fleksibel untuk pemulihan permukiman. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kawasan rawan bencana dan kawasan strategis pembangunan yang berpotensi menimbulkan kebutuhan relokasi, sehingga kebijakan perumahan rakyat dapat bersifat antisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan spasial serta ketahanan sosial masyarakat. Kolaborasi dengan kementerian teknis, dunia usaha, dan lembaga donor juga perlu diperkuat dalam rangka mobilisasi sumber daya perumahan yang berkelanjutan.

E. SPM Bidang Trantibumlinmas

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, kebencanaan, serta kebakaran. Dinamika capaian ini mencerminkan hasil implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta respons adaptif terhadap tantangan lokal dalam menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi warga negara.

Pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), indikator pelayanan berupa jumlah warga yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara menunjukkan peningkatan signifikan dari 16,7% di tahun 2020 menjadi capaian penuh 100% pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 (90,00%), capaian kembali naik menjadi 96,67% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya pembinaan ketertiban umum melalui penegakan regulasi daerah mulai terinstitusionalisasi dengan baik. Penurunan capaian pada tahun 2023 dapat dikaitkan dengan kendala operasional lapangan seperti terbatasnya personel Satpol PP, keterbatasan anggaran operasional, atau kendala dalam penjangkauan wilayah-wilayah perdesaan terpencil.

Pada sub urusan Kebencanaan, kinerja pelayanan relatif konsisten dan menunjukkan tren positif. Layanan informasi rawan bencana telah mencapai 100% sejak 2020 hingga 2022, dengan sedikit penurunan menjadi 95,00% pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 99,57% di tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem informasi kebencanaan berbasis masyarakat atau melalui kanal komunikasi resmi seperti media radio dan sosial media telah berjalan efektif. Adanya penurunan ringan pada 2023 menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan sistem informasi, terutama pada masa transisi atau ketika terjadi bencana berskala besar yang mengganggu distribusi informasi.

Tabel 2.50 Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020-2024

No.	Sub Urusan	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
	Jenis Pelayanan Dasar		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)						
	a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	16,7	100	100	90	96,67
2	Sub Urusan Kebencanaan						
	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	95	99,57
	b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	100	100
	c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	0	100	100	100
3	Sub Urusan Kebakaran						
	a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	50	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Sementara itu, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menunjukkan capaian 0% dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian melonjak menjadi 100% pada 2023 dan dipertahankan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa sebelum 2023, belum tersedia mekanisme preventif dan kesiapsiagaan yang terstruktur, seperti pelatihan tanggap darurat, simulasi evakuasi, maupun penyusunan rencana kontingensi daerah. Kenaikan capaian mulai tahun 2023 dapat ditafsirkan sebagai hasil dari peningkatan kebijakan penanggulangan bencana berbasis komunitas serta sinergi lintas sektor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, dan relawan lokal.

Selanjutnya, pada indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, kinerja capaian relatif konsisten dan optimal. Dimulai dari 100% pada 2020, kemudian 0% pada 2021, dan kembali stabil di angka 100% pada 2022 hingga 2024. Penurunan drastis pada tahun 2021 disebabkan oleh tidak adanya kejadian bencana signifikan yang memerlukan evakuasi atau ketidaksiapan logistik dan personel pada saat insiden terjadi. Namun demikian, pencapaian 100% dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan respons bencana secara terkoordinasi dan cepat.

Adapun pada sub urusan kebakaran, indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan capaian 0% pada tahun 2020, meningkat menjadi 50% pada 2021, dan mencapai 100% mulai 2022 hingga 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam penyediaan sarana pemadam kebakaran dan pelatihan personel Damkar. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mulai memperhatikan aspek preventif dan responsif terhadap kejadian kebakaran, termasuk pada kawasan padat penduduk dan pasar tradisional yang rawan risiko kebakaran.

Berdasarkan capaian di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk tindak lanjut pemerintah daerah. Pertama, perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan sumber daya aparatur Trantibumlinmas, termasuk peningkatan kapasitas teknis, anggaran operasional, dan distribusi personel secara merata hingga ke kecamatan dan desa. Kedua, integrasi sistem informasi kebencanaan dan penegakan ketertiban umum harus diperluas dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi laporan warga dan *dashboard* monitoring *real-time* yang terhubung dengan pusat komando daerah. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengendalian kebakaran harus terus digalakkan melalui edukasi publik, pembentukan kader siaga bencana dan pemadam kebakaran sukarela di tingkat desa. Keempat, pemerintah daerah perlu membangun kemitraan yang lebih erat dengan TNI/Polri, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Terakhir, penganggaran berbasis kinerja yang terfokus pada pencapaian SPM Trantibumlinmas harus menjadi prioritas dalam dokumen RKPD dan APBD agar kesinambungan program dapat dijamin. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pelaksanaan SPM Trantibumlinmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin efektif, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan perlindungan dan ketahanan masyarakat.

Berdasarkan capaian yang telah diraih, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan sejumlah langkah strategis dalam rangka optimalisasi penerapan SPM Trantibumlinmas. Penguatan kelembagaan dan sumber daya aparatur Trantibumlinmas telah dilakukan secara bertahap, mencakup peningkatan kapasitas teknis, alokasi anggaran operasional yang memadai. Selain itu, integrasi sistem informasi kebencanaan dan ketertiban umum telah diperluas melalui pemanfaatan teknologi digital, antara lain melalui pengembangan aplikasi SIAP GO DAMKAR, aplikasi pelaporan warga dan dashboard pemantauan real-time yang terhubung langsung dengan Posko Damkar.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan bencana dan pengendalian kebakaran juga telah digalakkan secara masif melalui program edukasi publik, pelatihan komunitas, serta pembentukan kader siaga bencana dan tim pemadam kebakaran sukarela di tingkat desa. Pemerintah daerah juga telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti TNI/Polri, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat kesiapsiagaan wilayah dan penegakan hukum yang berbasis komunitas.

Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian indikator SPM telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam RKPD maupun APBD. Kebijakan ini memastikan bahwa program Trantibumlinmas dilaksanakan secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan rasa aman, perlindungan sosial, dan ketahanan masyarakat terhadap risiko kebencanaan dan gangguan ketertiban. Dengan serangkaian langkah tersebut, pelaksanaan SPM Trantibumlinmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berjalan secara efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

F. SPM Bidang Sosial

Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi kelompok rentan dan pemberian perlindungan sosial bagi korban bencana. Berdasarkan data, lima indikator layanan dasar sosial yang diukur mencerminkan adanya transformasi kebijakan,

peningkatan respons institusional, serta perbaikan mekanisme intervensi lapangan oleh Dinas Sosial.

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar mengalami fluktuasi, dari capaian awal 100% pada tahun 2020, turun drastis ke 15,55% pada 2021, kemudian kembali mencapai 100% pada 2022 dan 2024. Penurunan tajam pada 2021 dapat diasosiasikan dengan terbatasnya mobilitas layanan akibat pandemi serta penyesuaian data dan sasaran. Selanjutnya, indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar menunjukkan kemajuan pesat, dari capaian 0% selama 2020–2022 menjadi 85% di tahun 2023 dan 100% pada 2024, yang menunjukkan bahwa program perlindungan anak di luar panti mulai terimplementasi secara terstruktur.

Tabel 2.51 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	15,55	100	84,62	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0	0	0	85	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0	3,96	100	83,08	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0	0	100	83,33	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator /Mutu Pelayanan Dasar	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban Bencana bencana bagi Korban bencana Kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	80	91,67

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Rehabilitasi sosial untuk lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) juga memperlihatkan progresifitas signifikan. Setelah capaian awal yang sangat rendah (0% dan 3,96% pada 2020–2021), capaian melonjak menjadi 100% pada tahun 2022 dan kembali tercapai pada 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas integrasi program rehabilitasi berbasis komunitas dengan pendampingan sosial serta penyediaan layanan rujukan.

Sementara itu, pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana yang semula konsisten di angka 100% pada 2020–2022, mengalami penurunan pada 2023 menjadi 80%, sebelum kembali meningkat ke 91,67% pada 2024. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan kapasitas tanggap darurat sosial yang belum sepenuhnya adaptif dalam menghadapi intensitas bencana yang meningkat.

Pemerintah Daerah telah menguatkan sistem pendataan terpadu berbasis DTKS, memperluas cakupan layanan rehabilitasi berbasis keluarga dan komunitas, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penanganan pascabencana. Alokasi anggaran afirmatif, pelibatan pekerja sosial profesional, dan pelatihan relawan sosial di tingkat desa juga penting untuk dilaksanakan supaya menjamin kesinambungan dan efektivitas layanan sosial dasar secara berkelanjutan.

2.1.6.Kerja Sama Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah secara konsisten melaksanakan berbagai kerja sama daerah dengan berbagai mitra strategis sepanjang periode 2020 hingga 2025, dengan total mencapai 30

kerja sama. Meskipun kuantitas kerja sama ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pola kerja sama ini menunjukkan intensitas yang relatif stabil dan mencerminkan komitmen daerah dalam membangun sinergi lintas wilayah guna memperkuat pembangunan daerah.

Sepanjang tahun-tahun tersebut, intensitas kerja sama berada pada kisaran 4 sampai 6 kerja sama per tahun. Pada tahun 2023 tercatat puncak aktivitas kerja sama dengan 6 kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi 4 kerja sama. Penurunan ini dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi pemerintah daerah terhadap kondisi internal dan kebutuhan strategis yang dinamis. Secara umum, pola ini mencerminkan strategi yang terukur dan responsif dalam pemanfaatan sumber daya dan prioritas pembangunan daerah.

Jenis kerja sama yang dilaksanakan terbagi menjadi dua kategori utama: kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib adalah bentuk kolaborasi yang bersifat regulatif dan diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, seperti pelayanan dasar dan pelaksanaan tugas pemerintah. Sementara itu, kerja sama sukarela bersifat lebih fleksibel dan inovatif, diarahkan untuk pengembangan kapasitas, perluasan jaringan kemitraan, dan penciptaan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Pendalaman pada kedua jenis kerja sama ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program kerja sama yang dilaksanakan, serta keselarasan dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi sektor, meskipun data rinci belum lengkap, sektor-sektor yang menjadi fokus utama kerja sama daerah biasanya mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, sektor pertanian dan perikanan, pariwisata, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerja sama yang dilakukan di sektor-sektor ini memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun nonfisik. Misalnya, pembangunan infrastruktur menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi, sedangkan pengembangan sumber daya manusia berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Mitra kerja sama merupakan elemen penting yang memperkuat jejaring dan kapasitas daerah dalam melaksanakan program-programnya. Dalam praktiknya, mitra kerja sama dapat berupa pemerintah daerah lain, lembaga pemerintah pusat, institusi swasta, lembaga donor, maupun komunitas

internasional. Pemilihan mitra strategis dan pengelolaan hubungan yang efektif menjadi kunci keberhasilan kerja sama. Kerja sama yang merujuk pada kepentingan bersama dan tujuan yang jelas akan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat luas.

Pelaksanaan kerja sama daerah ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik administratif maupun teknis. Pemerintah daerah perlu meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan kerja sama agar capaian yang diinginkan dapat diraih secara optimal. Fokus utama capaian yang diharapkan meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Deteksi dini terhadap kendala dan penanganan strategis merupakan bagian penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan kerja sama daerah di masa mendatang. Pertama, dokumentasi kerja sama harus ditingkatkan dengan data yang lengkap dan terstruktur, meliputi jenis kerja sama, sektor, mitra, tujuan, capaian, serta nilai kerja sama. Informasi yang baik akan sangat berguna untuk evaluasi dan perencanaan ke depan. Kedua, perluasan jejaring kemitraan dengan melibatkan sektor swasta, lembaga donor, dan komunitas internasional dapat membuka peluang sumber daya dan inovasi baru. Ketiga, penetapan fokus sektoral yang strategis berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan riil akan memastikan kerja sama memberikan dampak maksimal. Keempat, penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara rutin akan meningkatkan kualitas dan konsistensi implementasi. Terakhir, pemanfaatan sumber dana kerja sama secara efektif dan efisien, baik dari anggaran daerah maupun tambahan pembiayaan eksternal, sangat penting untuk keberlanjutan program.

Keseluruhan kerja sama daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2020-2025 menunjukkan bagaimana pemerintah daerah aktif membangun kemitraan strategis demi mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan pendalaman aspek jenis kerja sama, sektor, mitra, capaian, dan rekomendasi strategis seperti yang telah diuraikan, diharapkan kerja sama daerah ke depan dapat lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta kemajuan daerah secara menyeluruh.

Tabel 2.52 Daftar Kerja Sama Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2025

NO.	MITRA	JUDUL KERJA SAMA/ KESEPAKATAN BERSAMA	TAHUN
1	Universitas Negeri Gorontalo	Memorandum of Understanding antara pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Universitas Negeri Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan Kelembagaan	2020
2	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nota Kesepahaman antara Kementerian kesehatan Indonesia dengan Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pendayaagunaan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis	2020
3	Universitas Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Universitas Gorontalo tentang Kerja sama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2021
4	"- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia - Kementerian Pertanian Republik Indonesia - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Universitas Sam Ratulangi - Central Queensland University - Trade and Investment Queensland, Goverment of Queensland"	Kemitraan Triple Helix untuk Pengembangan Pertanian/Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara	2021

NO.	MITRA	JUDUL KERJA SAMA/ KESEPAKATAN BERSAMA	TAHUN
5	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara tentang Kerja Sama di bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah	2022
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengendalian Inflasi Daerah	2023
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah	2023
8	Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Universitas Ichsan Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2023
9	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Ichsan Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Ichsan Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
10	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2023
11	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
12	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
13	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023

NO.	MITRA	JUDUL KERJA SAMA/ KESEPAKATAN BERSAMA	TAHUN
14	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
15	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
16	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
17	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
18	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
19	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
20	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
21	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023

NO.	MITRA	JUDUL KERJA SAMA/ KESEPAKATAN BERSAMA	TAHUN
22	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
23	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
24	Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara	2023
25	PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana	Nota Kesepahaman antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Kerja sama Pelaksanaan/Pembiayaan Perjalanan Wisata dan Wisata Rohani	2023
26	Dharma Wanita Persatuan kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Nota Kesepahaman antara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penanganan dan Pengendalian Inflasi Daerah	2023
27	Manado Quality Hotel	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Manado Quality Hotel tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Hotel	2023
28	Ketua Utama Al- Khairaat	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Ketua Utama Al-Khairaat tentang Pendirian Kampus Terpadu Al-Khairaat Bolaang Mongondow Utara	2023
29	Universitas Bina Mandiri Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Universitas Bina Mandiri Gorontalo tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat	2023
30	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Nota Kesepahaman antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pelaksanaan Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2023
31	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tondano	Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tondano dan Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	2023
32	Kodim 1303/Bolmong	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kodim 1303/Bolmong tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Derah Tahun 2024 Pembangunan Baru/Rehab Berat Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2023

NO.	MITRA	JUDUL KERJA SAMA/ KESEPAKATAN BERSAMA	TAHUN
33	Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Replikasi Inovasi-Inovasi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah	2023
34	Universitas Terbuka	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Universitas Terbuka tentang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2024
35	Institut Pertanian Bogor	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Institut Pertanian Bogor tentang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah	2024
36	Universitas Muhammadiyah Manado	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Universitas Muhammadiyah Manado tentang Kerja sama Dalam Bidang Pendidikan, pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Implementasi Program Merdeka Belajar dan kampus Merdeka (MBKM)	2024
37	Universita Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow Utara dan Universitas Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Kelembagaan	2024
38	Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Gorontalo tentang Pendirian Politeknik Binadou Bolaang Mongondow Utara	2024
39	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur, dan Pemerintah Kota Kotamobagu	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kota Kotamobagu tentang Kerja Sama Antar Daerah	2025
40	Bank Sulut Gorontalo	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo tentang Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan	2025
41	Universitas Ichsan Gorontalo Utara	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Universitas Ichsan Gorontalo Utara tentang Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Praktisi Mengajar Kampus Merdeka (Merdeka Belajar)	2025
42	Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2025

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah dalam kerangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mengingat posisi Bolaang Mongondow Utara yang strategis sebagai daerah perbatasan, baik dalam konteks wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara maupun dalam hubungannya dengan Provinsi Gorontalo, maka dukungan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi menjadi krusial. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan layanan dasar, meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menstimulasi pengembangan sektor unggulan daerah.

Secara geografis, Bolaang Mongondow Utara memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh perbukitan, pesisir pantai, serta lahan pertanian yang cukup luas. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penyediaan infrastruktur. Pada satu sisi, potensi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dasar, seperti sarana permukiman, akses energi, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas transportasi, masih menjadi kendala dalam optimalisasi potensi tersebut. Oleh sebab itu, arah pembangunan infrastruktur yang didukung oleh APBN maupun APBD Provinsi harus diarahkan untuk menjawab permasalahan mendasar sekaligus mengantisipasi kebutuhan jangka panjang pembangunan daerah.

- **Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)**

Salah satu program prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diusulkan untuk memperoleh pembiayaan dari APBN adalah pengembangan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Pembangunan kawasan ini memiliki arti penting karena Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah yang berfungsi sebagai pintu gerbang di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Utara. Dengan posisi tersebut, Bolaang Mongondow Utara tidak

hanya berperan dalam mendukung konektivitas antarwilayah dalam provinsi, tetapi juga dalam memperkuat integrasi ekonomi dengan provinsi tetangga.

Fokus utama pembangunan infrastruktur di kawasan PKSN mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan, dan energi. Ketersediaan sarana permukiman yang layak akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, akses listrik dan energi yang memadai menjadi syarat mutlak bagi berkembangnya aktivitas ekonomi, terutama dalam menunjang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri rumah tangga, serta fasilitas pelayanan publik. Saat ini, masih terdapat beberapa desa di wilayah Bolaang Mongondow Utara yang menghadapi keterbatasan pasokan listrik, baik dari sisi kapasitas maupun kontinuitas, sehingga pembangunan infrastruktur energi menjadi prioritas penting.

Kedua, pembangunan sarana pendidikan. Pemerataan akses pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, masih menjadi isu strategis di Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu, pembangunan sarana pendidikan diarahkan untuk memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, baik dari segi gedung, peralatan, maupun teknologi pendukung, agar mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama.

Ketiga, penyediaan pelayanan kesehatan. Kesehatan masyarakat menjadi faktor esensial dalam mendukung produktivitas dan pembangunan daerah. Kondisi geografis Bolaang Mongondow Utara yang memiliki wilayah pesisir dan perbukitan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata. Dengan adanya intervensi melalui APBN, diharapkan dapat dibangun dan ditingkatkan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas kesehatan pendukung yang berlokasi dekat dengan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ini juga mencakup penguatan tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan medis, serta sistem rujukan yang efektif.

Keempat, penyediaan layanan konektivitas. Konektivitas antarwilayah, baik dalam lingkup internal Bolaang Mongondow Utara maupun hubungan dengan daerah sekitar, merupakan kunci percepatan pembangunan. Infrastruktur jalan, jembatan, serta akses transportasi laut dan darat harus

terus diperkuat agar mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, baik lokal maupun regional. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dan ekonomi, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pembangunan kawasan PKSN di Bolaang Mongondow Utara bukan hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik semata, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **Kawasan Berbasis Pertanian**

Selain kawasan PKSN, prioritas pembangunan infrastruktur di Bolaang Mongondow Utara juga diarahkan pada pengembangan kawasan berbasis pertanian. Hal ini sejalan dengan potensi besar Bolaang Mongondow Utara yang memiliki lahan pertanian produktif dan mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun demikian, laju alih fungsi lahan, keterbatasan sarana irigasi, serta rendahnya nilai tambah hasil pertanian menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani melalui intervensi kebijakan dan pembangunan infrastruktur.

Program pembangunan kawasan berbasis pertanian mencakup beberapa agenda penting. Pertama, rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Keberadaan LP2B di Bolaang Mongondow Utara menjadi instrumen penting untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian yang berkesinambungan, mengingat tekanan konversi lahan ke nonpertanian semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur dalam konteks ini meliputi penyediaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, serta fasilitas penunjang lainnya yang mendukung produktivitas pertanian.

Kedua, pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat pengelolaan tata ruang yang berbasis pada potensi lokal dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun provinsi dapat mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang mendorong peningkatan produktivitas pertanian, sehingga petani tidak terdorong untuk mengalihkan lahan mereka ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi jangka pendek. Misalnya, penyediaan infrastruktur penyimpanan hasil panen, akses jalan produksi, serta sarana pasca panen yang memadai.

Ketiga, pengembangan model *Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment* (ICARE). Model ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong hilirisasi hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur yang terkait dengan model ini mencakup gudang penyimpanan modern, fasilitas pengolahan hasil pertanian, hingga penyediaan akses terhadap teknologi pertanian berbasis digital. Dengan dukungan APBN maupun APBD Provinsi, diharapkan sektor pertanian di Bolaang Mongondow Utara dapat berkembang lebih maju, berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Pembangunan kawasan berbasis pertanian juga berimplikasi pada upaya pengendalian inflasi di daerah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, distribusi hasil pertanian dapat berjalan lancar, sehingga harga kebutuhan pokok lebih stabil. Di sisi lain, hal ini juga mendukung program nasional dalam mewujudkan swasembada pangan.

- **Sinergi APBN dan APBD Provinsi dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur di Bolaang Mongondow Utara tidak dapat hanya mengandalkan APBD kabupaten yang relatif terbatas. Oleh karena itu, sinergi antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten menjadi hal yang sangat penting. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, maupun program strategis kementerian, dukungan pembangunan dari APBN dapat diarahkan ke sektor-sektor prioritas. Sementara itu, APBD Provinsi diharapkan berperan dalam memperkuat pembangunan infrastruktur lintas wilayah, seperti jalan provinsi, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi.

Sinergi ini harus dirancang secara terpadu dalam dokumen perencanaan, baik di tingkat nasional (RPJMN dan RKP), provinsi (RPJMD Provinsi Sulawesi Utara), maupun kabupaten (RPJMD Bolaang Mongondow Utara). Dengan demikian, program pembangunan infrastruktur dapat berjalan harmonis, saling melengkapi, serta menghindari duplikasi kegiatan.

- **Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**

Dukungan pembangunan infrastruktur melalui APBN dan APBD Provinsi diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian daerah. Pembangunan sarana permukiman, energi, pendidikan, kesehatan,

dan konektivitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan investasi serta pengembangan sektor unggulan daerah. Pada saat yang sama, pengembangan kawasan berbasis pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Selain dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses pendidikan yang merata akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang lebih baik akan mendukung produktivitas masyarakat. Sementara itu, konektivitas antarwilayah yang memadai akan mempercepat mobilitas orang, barang, dan jasa, serta memperkuat integrasi sosial dan budaya.

Rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang didukung oleh APBN dan APBD Provinsi merupakan strategi fundamental dalam menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus memanfaatkan peluang strategis yang dimiliki. Melalui pembangunan kawasan perbatasan (PKSN) dan pengembangan kawasan berbasis pertanian, Bolaang Mongondow Utara diharapkan mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sinergi antarlevel pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat, serta keterlibatan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

• Kinerja Pelaksanaan APBD

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan dinamika yang cukup signifikan baik dari sisi komposisi, realisasi, maupun arah pertumbuhannya. Total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp653,36 miliar pada tahun 2020, kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai Rp631,26 miliar pada tahun 2024. Jika ditinjau dari metode pertumbuhan tahunan majemuk atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR), maka total pendapatan daerah mengalami penurunan rata-rata sebesar -0,86% per tahun, mencerminkan tekanan terhadap stabilitas fiskal yang perlu direspon secara strategis oleh pemerintah daerah.

Sumber utama pendapatan daerah Bolaang Mongondow Utara masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, khususnya dari pemerintah pusat

dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, dan Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2020, pendapatan transfer mencapai Rp615,42 miliar atau sekitar 94% dari total pendapatan. Hingga 2024, angkanya berada di kisaran Rp604,2 miliar, yang secara perhitungan CAGR mengalami penurunan tipis sebesar -0,46% per tahun. Meskipun angka ini masih relatif stabil, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana pusat belum berkurang secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Dalam konteks kemandirian fiskal, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan kerentanan fiskal daerah jika sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan alokasi dana pusat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren penurunan yang lebih signifikan. Dari nilai Rp26,59 miliar pada tahun 2020, PAD turun menjadi Rp23,04 miliar pada tahun 2024. Hal ini berarti pertumbuhan untuk PAD berada di angka negatif yaitu -3,52% per tahun. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan. Penyumbang terbesar PAD seperti Lain-lain PAD yang Sah bahkan mengalami penurunan sebesar -38,68% per tahun, yang menjadi indikasi bahwa pos ini kurang stabil dan tidak layak dijadikan solusi jangka panjang.

Namun demikian, terdapat catatan positif pada komponen Pajak Daerah yang mengalami peningkatan dari Rp4,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp6,81 miliar pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 12,90% per tahun. Kinerja ini cukup menggembirakan karena mencerminkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kapasitas pemungutan pajak lokal, baik dari sektor perizinan, hiburan, reklame, maupun pajak-pajak lainnya. Pertumbuhan ini bisa menjadi modal penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pusat, asalkan diiringi dengan upaya perluasan basis pajak dan pembenahan sistem pemungutan yang lebih efisien dan akuntabel.

Di sisi lain, komponen Retribusi Daerah juga menunjukkan pertumbuhan positif yaitu 12,50% per tahun, dengan nilai pada 2024 mencapai Rp12,35 miliar. Hal ini menjadi sinyal baik bahwa pelayanan publik yang berbayar seperti pelayanan pasar, terminal, pelayanan kesehatan, dan sebagainya, semakin berkontribusi terhadap PAD. Namun, perhatian perlu diberikan pada keberlanjutan penerimaan ini agar tidak semata

mengandalkan peningkatan tarif, melainkan juga peningkatan volume layanan dan kualitas pelayanan.

Dalam kelompok transfer pusat, DAK Non Fisik justru mencatat pertumbuhan negatif ekstrem yaitu -100%, karena pada tahun 2024 tidak lagi dialokasikan. Hal ini bisa terjadi karena perubahan dalam mekanisme alokasi dana pusat atau karena penurunan kinerja indikator yang menjadi syarat menerima DAK Non Fisik, seperti mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Dampaknya bisa cukup signifikan bagi pelayanan publik yang selama ini bergantung pada dana ini, terutama bidang pendidikan dasar, layanan keagamaan, dan penyuluhan.

Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah, khususnya Pendapatan Bagi Hasil, mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,21%, mencerminkan adanya peningkatan kerja sama atau redistribusi keuangan antar daerah. Ini menunjukkan bahwa interkoneksi fiskal regional di Sulawesi Utara mulai berjalan dengan baik. Namun, pos Bantuan Keuangan Antar Daerah mengalami stagnasi karena tidak ada alokasi lagi pada 2023 dan 2024.

Komponen terakhir, yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami penurunan cukup tajam yaitu -22,83%, meskipun pada tahun 2024 rekening baru ditambahkan sebesar Rp4,02 miliar dari “Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas peraturan untuk membuka ruang-ruang penerimaan baru yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam struktur APBD.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara total pendapatan daerah mengalami penurunan yang moderat, terdapat beberapa sektor yang tumbuh cukup signifikan seperti pajak dan retribusi daerah. Potensi inilah yang akan menjadi fokus strategi ke depan bagi pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dalam konteks fiskal nasional, APBD yang sehat dan tumbuh positif secara organik melalui PAD akan lebih tahan terhadap fluktuasi kebijakan pusat. Mengingat arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan RPJMN 2025–2029 mendorong penguatan fiskal daerah melalui peningkatan kemandirian, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus memanfaatkan peluang ini untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transformasi fiskal Bolaang Mongondow Utara memerlukan sinergi

lintas sektor: peningkatan kapasitas SDM aparatur, kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas, serta dukungan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih inklusif, pendapatan daerah lebih berkelanjutan, dan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Itulah inti dari reformasi keuangan daerah yang tidak hanya mengejar angka nominal APBD, tetapi juga mencerminkan keberdayaan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.53 Realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN					PERTUMBUHAN
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH	653.355.625.235,69	698.921.949.054,03	676.157.375.981,09	622.648.112.139,84	631.265.363.110,37	-0,86%
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.590.701.906,69	20.667.540.301,03	21.962.093.623,09	16.405.421.188,84	23.038.994.661,94	-3,52%
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	4.191.329.217	4.801.906.043	5.864.133.632,75	5.947.174.351,83	6.810.046.439,04	12,90%
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.161.526.756,70	1.981.920.493,93	1.488.351.309	1.386.108.412	12.350.200.683	80,58%
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	596.478.408	826.924.358	717.084.719	1.062.169.111	960.030.536	12,63%
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	20.641.367.524,99	13.056.789.406,10	13.892.523.962,34	8.009.969.314,01	2.918.717.003,90	-38,68%
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	615.424.803.329	667.092.740.753	654.195.282.358	592.765.296.792	604.204.176.347	-0,46%
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	485.682.851.419	524.699.469.018	556.416.366.492	488.240.522.436	481.468.750.040	-0,22%
	Dana Perimbangan	485.682.851.419	524.699.469.018	556.416.366.492	488.240.522.436	481.468.750.040	-0,22%
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.891.784.346	27.668.782.825	30.929.011.166	14.464.430.202	15.190.104.000	6,31%
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	353.070.985.000	348.446.042.000	348.218.889.034	365.750.838.000	388.482.366.694	2,42%
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.540.078.929	111.494.496.377	134.705.440.990	61.946.075.435	77.796.279.346	-1,77%
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	37.180.003.144	37.090.147.816	42.563.025.302	46.079.178.799	-	-100,00%
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	119.703.378.000	120.159.047.000	77.755.122.000	84.816.754.000	104.429.079.000	-3,36%
	Dana Insentif Daerah (DID)	33.341.265.000	33.796.934.000	3.281.264.000	5.890.177.000	25.172.059.000	-6,79%
	Dana Desa	86.362.113.000	86.362.113.000	74.473.858.000	78.926.577.000	79.257.020.000	-2,12%
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.038.573.910	22.234.224.735	20.023.793.866	19.708.020.356	18.306.347.334	16,21%
	Pendapatan Bagi Hasil	9.238.573.910	13.304.772.284	20.023.793.866	19.708.020.356	18.306.347.334	18,64%
	Bantuan Keuangan	800.000.000	8.929.452.451	-	-	-	-100,00%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.340.120.000	11.161.668.000	-	13.477.394.159	4.022.192.074,43	-22,83%
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	11.340.120.000	11.161.668.000	-	-	-	-100,00%
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	13.477.394.159	4.022.192.074,43	n.a.
5	BELANJA DAERAH	677.066.181.015	688.095.381.432	651.752.673.475,65	635.667.560.517	644.094.084.705	-1,24%
5 . 1	BELANJA OPERASI	375.784.458.971	388.396.266.714	385.607.365.398,20	412.089.997.916	460.322.868.962	5,20%
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	196.513.995.704	203.513.991.120	213.501.889.839	220.054.148.469	250.105.297.072	6,21%
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.842.400.253	168.048.913.493	161.691.063.199,20	175.366.868.266	171.691.605.100	0%
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	-	-	-	70.000.000	40.000.000	n.a.
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	6.640.563.014	9.747.714.528	6.091.660.528	12.991.445.181	34.650.411.320	51,14%
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	787.500.000	7.085.647.573	4.322.751.832	3.607.536.000	3.835.555.470	48,56%
5 . 2	BELANJA MODAL	168.409.239.894	175.738.816.183	153.663.525.497,45	106.508.493.131	63.593.755.435	-21,61%
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.420.126.700	-	-	-	-	n.a.
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.029.048.909	45.208.771.544	42.133.717.363	14.970.075.158	10.561.192.320	-35,76%
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.121.828.322	61.940.130.931	46.686.878.023,45	40.198.872.110	21.444.550.538	-22,72%
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.290.752.989	62.933.455.108	60.424.763.037	48.314.091.184	29.514.039.337	-6,90%

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN					PERTUMBUHAN
		2020	2021	2022	2023	2024	(%)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.547.482.974	5.656.458.600	4.418.167.074	3.025.454.679	1.550.663.740	-24%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	523.309.500	n.a.
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.338.279.500	116.622.000	794.456.785	162.587.100	149.592.000	-64,42%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.338.279.500	116.622.000	794.456.785	162.587.100	149.592.000	-64,42%
5.4	BELANJA TRANSFER	123.534.202.650	123.843.676.535	111.687.325.795	116.906.482.370	120.027.868.308	-0,72%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	536.935.050	541.848.335	722.022.195	470.988.670	524.640.008	-0,58%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	122.997.267.600	123.301.828.200	110.965.303.600	116.435.493.700	119.503.228.300	-0,72%
	SURPLUS / DEFISIT	(23.710.555.779,31)	10.826.567.622,03	24.404.702.505,44	(13.019.448.377,16)	(12.828.721.594,63)	-14,23%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.756.093.826,66	47.998.387.005,10	35.127.283.530,94	-1,66%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.756.093.826,66	49.160.796.332,10	34.978.938.627	-1,77%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.563.584.967,95	13.851.804.752,07	24.738.612.917,66	49.160.796.332,10	34.978.938.627	-1,77%
6.1.2	Koreksi SILPA	(1.224.436,57)	60.240.543,56	17.480.909	(1.162.409.327)	148.344.903	
	PEMBIAYAAN NETTO	37.562.360.531,38	13.912.045.295,63	24.756.093.826,66	47.998.387.005,10	35.127.283.530,94	-1,66%
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	13.851.804.752,07	24.738.612.917,66	49.160.796.332,10	34.978.938.627,94	22.298.561.396,31	12,64%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan dinamika fiskal yang signifikan, mencerminkan perubahan prioritas pembangunan dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi makro maupun lokal. Total belanja daerah tahun 2020 tercatat sebesar Rp677,07 miliar, dan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp644,09 miliar. Terjadi penurunan rata-rata sebesar –1,24% per tahun. Penurunan ini secara umum menunjukkan pengetatan anggaran, baik karena rasionalisasi fiskal atau perubahan pola alokasi belanja yang lebih selektif.

Dari sisi struktur, belanja daerah terdiri atas empat komponen utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Komponen belanja operasi justru mengalami pertumbuhan yang cukup positif, dari Rp375,78 miliar pada 2020 menjadi Rp460,32 miliar pada 2024, meningkat sebesar +5,20% per tahun. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam belanja operasi, belanja pegawai menjadi porsi terbesar dan mencatat kenaikan dari Rp196,51 miliar menjadi Rp250,11 miliar dengan pertumbuhan +6,21% per tahun. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah pegawai atau penyesuaian tunjangan dan gaji. Selain itu, belanja hibah dan bantuan sosial juga mengalami lonjakan yang signifikan, masing-masing sebesar 51,14% dan 48,56%. Hal ini menandakan adanya penekanan pada pendekatan partisipatif dan keberpihakan sosial, khususnya pasca pandemi dan dalam upaya pemulihan ekonomi daerah.

Namun di sisi lain, komponen belanja modal yang berfungsi sebagai investasi infrastruktur dan pembangunan jangka panjang justru mengalami penurunan sangat tajam. Dari Rp168,41 miliar pada tahun 2020, belanja modal turun drastis menjadi hanya Rp63,59 miliar pada 2024, terjadi penurunan sebesar -21,61%. Penurunan ini mencakup hampir seluruh sub-pos, seperti belanja modal peralatan dan mesin (-35,76%), gedung dan bangunan (-22,72%), hingga aset tetap lainnya (-24%). Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik daerah sedang mengalami kontraksi, yang bisa berdampak pada keterbatasan layanan publik dan melambatnya pertumbuhan infrastruktur baru, terutama di sektor jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun beberapa proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur gedung dan jalan tetap berlangsung, namun proporsinya menjadi lebih selektif.

Komponen belanja tidak terduga juga menyusut signifikan, dari Rp9,33 miliar menjadi hanya Rp149 juta pada 2024 (-64,42%), mengindikasikan ruang fiskal yang sempit dalam penanganan kondisi darurat. Sementara itu, belanja transfer relatif stabil dengan penurunan minor -0,72% per tahun, menunjukkan konsistensi dalam dukungan fiskal kepada pemerintah desa dan antar wilayah.

Struktur belanja daerah Bolaang Mongondow Utara memperlihatkan dominasi belanja operasional dengan kecenderungan melemahkan belanja modal. Ini menandakan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menata ulang strategi belanja agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan.

Pos Pembiayaan Daerah Bolaang Mongondow Utara mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan anggaran dalam rentang lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan mencapai Rp37,56 miliar, kemudian turun drastis menjadi Rp13,91 miliar pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat menjadi Rp24,76 miliar pada 2022. Puncaknya sempat terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar Rp47,99 miliar, namun pada tahun 2024 kembali turun menjadi Rp35,13 miliar. Berdasarkan perhitungan CAGR, rata-rata pertumbuhan tahunan pos ini adalah -1,66% per tahun, menunjukkan adanya penurunan moderat selama lima tahun terakhir.

Dalam struktur pembiayaan daerah, komponen utama adalah penerimaan pembiayaan, yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan pengeluaran pembiayaan untuk menutupi kebutuhan anggaran. Periode 2020–2024 menunjukkan bahwa komponen penerimaan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh besarnya sisa lebih tahun sebelumnya. Di tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp37,56 miliar, kemudian turun sampai Rp13,91 miliar pada 2021, dan naik kembali mencapai hampir Rp35 miliar pada 2024. Tren ini merefleksikan fluktuasi dari perencanaan dan realisasi SiLPA serta kebijakan koreksi anggaran (Koreksi SiLPA).

Perubahan yang terjadi mencerminkan penyesuaian fiskal daerah. Penurunan drastis pembiayaan pada 2021 kemungkinan terkait dengan berkurangnya sisa anggaran tahun sebelumnya serta koreksi saldo yang cukup besar. Namun, pada 2022–2023, terdapat peningkatan signifikan yang menunjukkan bahwa daerah berhasil menghimpun pembiayaan dari sisa lebih serta optimalisasi pendanaan pihak ketiga atau pinjaman daerah. Pada 2024, realisasi pembiayaan kembali turun namun masih berada pada level yang relatif tinggi dibanding awal periode.

Secara analitis, pembiayaan daerah mencerminkan kesehatan fiskal jangka menengah: meski mengalami variasi, nilai pembiayaan tetap cukup substansial untuk menutup defisit dan menjaga kesinambungan program kegiatan. Jika merujuk data SIKD Kemenkeu, realisasi pendapatan daerah 2024 mencapai 98,67%, sementara belanja daerah mencapai 92,19%, menghasilkan efisiensi anggaran yang tercermin dalam pembiayaan negatif neto sebesar sekitar Rp12,83 miliar, mengindikasikan bahwa daerah sempat menggunakan sebagian SiLPA untuk menutup defisit realisasi belanja dan pendapatan.

Pembiayaan Netto mengalami penurunan sebesar -1,66%, ini menunjukkan pembiayaan cenderung menurun tetapi tetap tinggi, mencerminkan stabilitas fiskal. Adanya Koreksi SiLPA dalam beberapa tahun juga menunjukkan bahwa daerah cukup disiplin dalam mengelola neraca anggaran, namun tetap fleksibel dalam menyesuaikan penggunaan sisa anggaran. Penurunan moderate tersebut tidak menunjukkan krisis, namun menunjukkan arah perbaikan dalam pencapaian pendapatan dan pengendalian belanja, sehingga kebutuhan pembiayaan semakin kecil seiring membaiknya efektivitas APBD.

• **Neraca Daerah**

Realisasi neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024 menggambarkan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan upaya penyeimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan. Neraca daerah mencerminkan posisi keuangan yang meliputi total aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah pada setiap akhir tahun anggaran, yang secara strategis dapat dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan fiskal berkelanjutan.

Tabel 2.54 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020-2024

KODE REK.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET	1.241.140.675.674	1.318.604.955.486	1.378.123.017.351	1.336.824.711.871	1.209.575.453.636
01.01	ASET LANCAR	25.832.212.619	50.615.001.076	71.347.585.723	55.424.145.785	46.321.186.239
01.01.01	Kas di Kas Daerah	13.266.626.201	24.592.916.196	49.076.114.766	32.780.463.007	20.156.065.612
	Kas di Bendahara Penerimaan	3.222.626	356.556	-	57.616.419	1.537.678
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
	Kas Dana BOS	487.241.276	124.828.695	34.333.331	107.620.127	2.060.483.208
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	258.080.549	20.511.470	50.348.235	2.033.239.075	80.347.748
	Kas Lainnya	-	2.387.523	-	1.028.609.006	965.038
	Setara Kas	-	-	-	-	-
01.01.02	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-
01.01.03	Piutang Pajak Daerah	1.011.218.574	1.697.196.710	1.613.551.407	1.189.266.999	1.535.655.547
01.01.04	Piutang Retribusi Daerah	-	35.520.000	46.546.000	42.180.000	54.780.000
01.01.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	717.084.719	-	-	-
01.01.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	214.243.600	2.084.839.000	495.838.182	261.975.844	28.119.292
01.01.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	7.975.640.000
01.01.08	Piutang Transfer Antar Daerah	-	10.644.483.104	9.390.994.514	9.421.120.444	-
01.01.09	Piutang Lainnya	244.200.000	-	-	10.000.000	1.332.500
01.01.10	Penyisihan Piutang	(838.083.926)	(710.057.900)	(785.006.899)	(349.449.905)	(571.500.446)
01.01.11	Beban Dibayar Dimuka	95.289.440	72.488.877	181.117.611	218.136.825	170.918.274
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	93.899.650	-	-
01.01.12	Persediaan	11.090.174.278	11.332.446.126	11.149.848.926	8.623.367.945	14.826.841.789

KODE REK.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
01.01.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan		-	-	-	
01.02	INVESTASI JANGKA PANJANG	6.023.400.000	6.023.400.000	6.023.400.000	6.023.400.000	6.023.400.000
01.02.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	
01.02.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	6.023.400.000	6.023.400.000	6.023.400.000	6.023.400.000	6.023.400.000
01.03	ASET TETAP	1.201.030.757.391	1.254.321.902.425	1.287.348.219.415	1.261.492.506.552	1.145.384.064.154
01.03.01	Tanah	59.472.206.472	60.089.836.662	58.214.598.662	58.590.349.096	58.590.349.096
01.03.02	Peralatan dan Mesin	287.859.943.563	326.845.130.565	359.300.911.088	354.068.538.092	354.448.650.176
01.03.03	Gedung dan Bangunan	511.109.157.247	559.032.195.234	584.961.231.011	656.079.266.930	679.852.559.530
01.03.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	976.785.738.103	1.037.004.746.532	1.082.618.843.070	1.150.645.490.896	1.182.029.765.892
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	42.219.543.636	44.688.076.054	46.602.234.612	47.509.914.976	48.345.700.776
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.896.415.619	28.779.196.666	63.619.444.625	6.224.901.577	3.969.951.949
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	(682.312.247.248)	(802.117.279.287)	(907.969.043.652)	(1.011.625.955.014)	(1.181.852.913.265)
01.04	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
01.04.01	Dana Cadangan	-	-	-	-	
01.05	ASET LAINNYA	8.254.305.663	7.644.651.985	13.403.812.213	13.884.659.534	11.846.803.243
01.05.01	Tagihan Jangka Panjang	2.460.326.881	2.438.426.881	2.731.399.131	2.825.298.780	2.813.898.780
01.05.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	
01.05.03	Aset Tidak Berwujud	3.569.729.914	4.203.911.614	4.469.527.014	6.669.507.964	7.850.370.364
01.05.04	Aset Lain-lain	4.262.637.019	3.540.224.827	6.808.881.986	5.917.537.899	5.779.140.590
01.05.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.038.388.150)	(2.537.911.337)	(3.072.635.670)	(4.421.424.109)	(5.208.781.492)
01.05.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	2.466.639.752	2.893.739.000	612.175.000
2	KEWAJIBAN	559.717.326	2.194.008.363	9.019.367.802	2.688.980.351	24.299.344.686
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	559.717.326	2.194.008.363	9.019.367.802	2.688.980.351	24.299.344.686
02.01.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	163.365.901	2.387.523	-	-	675.038
02.01.05	Pendapatan Diterima Di muka	-	-	2.079.500	12.465.605	22.152.219
02.01.06	Utang Belanja	-	-	3.457.780	2.676.514.745	13.436.116.429
02.01.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	396.351.426	2.191.620.840	9.013.830.522	-	10.840.401.000
02.01.08	R/K PPKD			-	-	
02.02	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
02.02.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
02.02.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-	-
02.02.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
02.02.04	Utang kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
3	EKUITAS	1.240.580.958.348	1.316.410.947.123	1.369.103.649.550	1.334.135.731.520	1.185.276.108.950
03.01	EKUITAS	1.240.580.958.348	1.316.410.947.123	1.369.103.649.550	1.334.135.731.520	1.185.276.108.950

KODE REK.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
03.01.01	Ekuitas	1.240.580.958.348	1.316.410.947.123	1.369.103.649.550	1.334.135.731.520	1.185.276.108.950
03.01.02	Ekuitas SAL	-	-	-	-	-
03.01.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-
	KEWAJIBAN+ EKUITAS	1.241.140.675.674	1.318.604.955.486	1.378.123.017.351	1.336.824.711.871	1.209.575.453.636

Sumber: BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas, total aset daerah menunjukkan tren yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada awal tahun anggaran 2020, total aset daerah tercatat dalam kisaran Rp1,24 triliun, yang kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya sekitar Rp1,38 triliun pada tahun 2022. Namun, dua tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dengan total aset menurun hingga ke kisaran Rp1,21 triliun pada akhir tahun 2024. Fenomena ini secara indikatif dapat diinterpretasikan sebagai bentuk optimalisasi penggunaan aset lancar atau akibat dari berkurangnya nilai aset tetap akibat depresiasi maupun realisasi belanja modal yang cenderung menurun dalam periode bersangkutan.

Komponen aset lancar, yang mencakup kas dan setara kas, piutang jangka pendek, serta aset lainnya yang dapat segera digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, mengalami tekanan pada dua tahun terakhir. Penurunan tajam pada pos kas di kas daerah, yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp49 miliar dan menurun drastis menjadi hanya sekitar Rp20 miliar pada tahun 2024, menggambarkan penurunan kemampuan likuiditas daerah. Hal ini sejalan dengan data realisasi belanja dan pembiayaan, di mana Pemerintah Daerah menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) secara masif untuk menutup defisit anggaran maupun mempertahankan kelangsungan program prioritas, terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi dan adaptasi fiskal terhadap penurunan transfer pusat.

Pada sisi aset tetap, tidak terdapat kenaikan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan dan mengalami penurunan nilai. Hal ini selaras dengan menurunnya realisasi belanja modal pada APBD selama dua tahun terakhir, yang turut berdampak pada terbatasnya penambahan aset strategis baru, baik berupa infrastruktur jalan, bangunan gedung, maupun peralatan. Hal ini berimplikasi terhadap perlambatan pertumbuhan aset jangka panjang

daerah dan berpotensi memengaruhi daya dukung aset terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, neraca keuangan Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa kendati struktur fiskal daerah relatif masih terkendali, terdapat tantangan nyata dalam menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal melalui penguatan aset dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mendorong strategi penguatan nilai aset produktif, efisiensi belanja operasional, serta reformasi manajemen aset berbasis teknologi informasi agar seluruh kekayaan daerah dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdaya guna maksimal bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah perlu melakukan konsolidasi aset secara menyeluruh, termasuk validasi dan pemutakhiran data neraca, pengamanan aset tetap, serta pengembangan skema pemanfaatan aset *idle* yang selama ini belum optimal. Di sisi lain, integrasi pengelolaan neraca dengan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi keniscayaan untuk memastikan bahwa seluruh belanja daerah berdampak pada peningkatan nilai tambah aset serta penguatan posisi keuangan daerah secara berkelanjutan.

• **Proyeksi Keuangan Daerah**

Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2026–2030 disusun sebagai instrumen perencanaan fiskal jangka menengah yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Penyusunan proyeksi ini mempertimbangkan tren realisasi APBD tahun 2020–2024, dinamika transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, serta orientasi kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tabel 2.55 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2026-2030

KD REK	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2026-2030					
		APBD 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	631.268.612.148	595.944.042.099	596.143.557.305	596.346.920.137	596.554.205.980	596.765.491.707
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.998.550.000	14.194.291.500	14.393.806.706	14.597.169.538	14.804.455.381	15.015.741.108
4.1.1	Pajak Daerah	9.003.050.000	9.183.111.000	9.366.773.220	9.554.108.684	9.745.190.858	9.940.094.675
4.1.2	Retribusi Daerah	1.425.500.000	1.441.180.500	1.457.033.486	1.473.060.854	1.489.264.523	1.505.646.433
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.770.000.000	2.770.000.000	2.770.000.000	2.770.000.000	2.770.000.000	2.770.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	600.520.470.549	565.000.159.000	565.000.159.000	565.000.159.000	565.000.159.000	565.000.159.000

4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	584.588.921.000	551.771.615.000	551.771.615.000	551.771.615.000	551.771.615.000	551.771.615.000
	Dana Perimbangan	508.401.903.000	475.584.597.000	475.584.597.000	475.584.597.000	475.584.597.000	475.584.597.000
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.767.520.000	21.767.520.000	21.767.520.000	21.767.520.000	21.767.520.000	21.767.520.000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	402.431.395.000	392.298.055.000	392.298.055.000	392.298.055.000	392.298.055.000	392.298.055.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.737.579.000	10.053.613.000	10.053.613.000	10.053.613.000	10.053.613.000	10.053.613.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.465.409.000	51.465.409.000	51.465.409.000	51.465.409.000	51.465.409.000	51.465.409.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	-
	Dana Desa	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000
	Insentif Fiskal	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.931.549.549	13.228.544.000	13.228.544.000	13.228.544.000	13.228.544.000	13.228.544.000
	Pendapatan Bagi Hasil	15.931.549.549	13.228.544.000	13.228.544.000	13.228.544.000	13.228.544.000	13.228.544.000
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599	16.749.591.599
5	BELANJA DAERAH	648.482.726.200	603.235.770.416	604.485.721.937	606.386.058.220	607.516.786.804	608.447.915.377
5.1	BELANJA OPERASI	464.725.240.506	458.085.875.893	457.215.875.893	459.085.875.893	460.185.875.893	461.085.875.893
5.1.1	Belanja Pegawai	296.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	153.201.007.988	115.874.671.199	115.004.671.199	116.874.671.199	117.974.671.199	118.874.671.199
5.1.4	Belanja Subsidi	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	13.949.477.824	6.596.450.000	6.596.450.000	6.596.450.000	6.596.450.000	6.596.450.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800
5.2	BELANJA MODAL	62.152.469.707	25.493.889.873	27.493.889.873	27.493.889.873	27.493.889.873	27.493.889.873
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.594.994.526	5.778.124.146	6.778.124.146	6.778.124.146	6.778.124.146	6.778.124.146
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.567.907.127	8.567.907.127	9.567.907.127	9.567.907.127	9.567.907.127	9.567.907.127
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.895.322.454	10.053.613.000	10.053.613.000	10.053.613.000	10.053.613.000	10.053.613.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	919.245.600	919.245.600	919.245.600	919.245.600	919.245.600	919.245.600
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.009.681.487	1.000.000.000	1.100.000.000	1.110.000.000	1.120.000.000	1.130.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.009.681.487	1.000.000.000	1.100.000.000	1.110.000.000	1.120.000.000	1.130.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	119.595.334.500	118.656.004.650	118.675.956.171	118.696.292.454	118.717.021.038	118.738.149.611
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	988.425.000	1.062.429.150	1.082.380.671	1.102.716.954	1.123.445.538	1.144.574.111
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	118.606.909.500	117.593.575.500	117.593.575.500	117.593.575.500	117.593.575.500	117.593.575.500
	- Dana Desa	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000	76.187.018.000
	- Alokasi Dana Desa	42.419.891.500	41.406.557.500	41.406.557.500	41.406.557.500	41.406.557.500	41.406.557.500
	SURPLUS / DEFISIT	(17.214.114.052)	(7.291.728.317)	(8.342.164.632)	(10.039.138.083)	(10.962.580.824)	(11.682.423.670)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	17.214.114.052	7.291.728.317	8.342.164.632	10.039.138.083	10.962.580.824	11.682.423.670
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.214.114.052	7.291.728.317	8.342.164.632	10.039.138.083	10.962.580.824	11.682.423.670
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.214.114.052	7.291.728.317	8.342.164.632	10.039.138.083	10.962.580.824	11.682.423.670
6.1.2	Koreksi SILPA	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	17.214.114.052	7.291.728.317	8.342.164.632	10.039.138.083	10.962.580.824	11.682.423.670
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Secara agregat, proyeksi total pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, dengan angka proyeksi sebesar Rp595,94 miliar pada tahun 2026 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp596,77 miliar pada tahun 2030. Meskipun peningkatan tersebut terlihat moderat, namun hal ini mencerminkan pendekatan konservatif yang mempertimbangkan kemampuan riil daerah dan tren stagnasi pertumbuhan ekonomi global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh positif dari Rp13,99 miliar pada 2025 menjadi Rp15,02 miliar pada 2030, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar ±1,42%. Pertumbuhan ini

terutama ditopang oleh peningkatan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang masing-masing menunjukkan tren kenaikan konsisten. Peningkatan ini didorong oleh perluasan basis pajak, intensifikasi pemungutan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan dan retribusi.

Sementara itu, pendapatan transfer tetap menjadi kontributor dominan dalam struktur pendapatan daerah, dengan nilai proyeksi sebesar Rp565 miliar per tahun selama periode 2026–2030. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap alokasi dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, terutama dari pos Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil. Meskipun transfer ini memberikan kepastian fiskal, namun juga menimbulkan tantangan dalam upaya kemandirian fiskal daerah yang menjadi salah satu agenda utama reformasi keuangan daerah.

Di sisi belanja daerah, proyeksi belanja disusun seimbang dengan estimasi pendapatan, mengikuti prinsip anggaran berimbang dan defisit terukur. Fokus utama diarahkan pada belanja operasional dan belanja modal yang mendukung percepatan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Belanja modal diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui proyek strategis di sektor jalan, irigasi, dan sarana pelayanan publik lainnya.

Strategi pembiayaan daerah dalam periode proyeksi juga dirancang untuk meminimalkan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek, serta mengoptimalkan potensi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan internal. Pengelolaan neraca daerah, khususnya dalam aspek penguatan aset produktif dan efisiensi kas daerah, akan menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan daya tahan keuangan daerah terhadap *shock* eksternal.

Dalam konteks kebijakan nasional, proyeksi ini selaras dengan arah kebijakan fiskal RKP 2026 yang menekankan pada akselerasi transformasi ekonomi hijau, penguatan SDM, dan pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan prioritas nasional, serta memperkuat sinergi antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam kerangka kebijakan fiskal yang responsif, kredibel, dan inklusif.

• **Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan sebagaimana yang dihitung dan disajikan pada bagian awal sub bab ini. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2025-2029 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	PENERIMAAN DAERAH	648.482.726.200	603.235.770.416	604.485.721.937	606.386.058.220	607.516.786.804	608.447.915.377
1	Pendapatan	631.268.612.148	595.944.042.099	596.143.557.305	596.346.920.137	596.554.205.980	596.765.491.707
2	Penerimaan Pembiayaan (SiLPA)	17.214.114.052	7.291.728.317	8.342.164.632	10.039.138.083	10.962.580.824	11.682.423.670
Dikurangi :							
B	PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT	296.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894
1	Belanja Pegawai	296.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894	334.422.089.894
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	352.060.636.306	268.813.680.522	270.063.632.043	271.963.968.326	273.094.696.910	274.025.825.483

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.57 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	352.060.636.306	268.813.680.522	270.063.632.043	271.963.968.326	273.094.696.910	274.025.825.483
B	Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Program Straegis	351.012.211.306	267.651.251.372	268.881.251.372	270.761.251.372	271.871.251.372	272.781.251.372

Nasional dan Prioritas Utama Kepala Daerah)						
1	Belanja Hibah	13.949.477.824	6.596.450.000	6.596.450.000	6.596.450.000	6.596.450.000
2	Belanja Bantuan Sosial	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800	1.092.664.800
3	Belanja Barang dan Jasa	153.201.007.988	115.874.671.199	115.004.671.199	116.874.671.199	118.874.671.199
4	Belanja Modal	62.152.469.707	25.493.889.873	27.493.889.873	27.493.889.873	27.493.889.873
5	Belanja Bantuan Keuangan	118.606.909.500	117.593.575.500	117.593.575.500	117.593.575.500	117.593.575.500
6	Belanja Tidak Terduga	2.009.681.487	1.000.000.000	1.100.000.000	1.110.000.000	1.120.000.000
C	Prioritas II (Belanja untuk Program Prioritas di luar Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama)	1.048.425.000	1.162.429.150	1.182.380.671	1.202.716.954	1.223.445.538
1	Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya	1.048.425.000	1.162.429.150	1.182.380.671	1.202.716.954	1.223.445.538
	Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B-C)	0	0	0	0	0
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan sejumlah capaian, namun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Permasalahan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur dasar. Permasalahan-permasalahan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan isu-isu strategis nasional dan provinsi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan terintegrasi dan sinergis.

Permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain:

- Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat keterbatasan lapangan kerja, rendahnya produktivitas, serta akses pendidikan dan layanan dasar yang belum merata.
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, serta masih tingginya angka putus sekolah dan stunting.
- Keterbatasan layanan kesehatan dasar terutama di wilayah terpencil, yang berdampak pada tingginya angka stunting, kematian ibu dan bayi, serta penyakit menular.
- Ketergantungan ekonomi pada sektor primer (pertanian, perikanan, dan pariwisata) yang belum diimbangi dengan pengembangan sektor industri pengolahan dan perdagangan/UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan rentan terhadap fluktuasi eksternal.

- Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan, yang meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor.
- Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik, yang menghambat konektivitas wilayah dan pelayanan publik.
- Rendahnya tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan kapasitas aparatur yang belum optimal, sistem pengawasan yang lemah, dan layanan publik yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Permasalahan-permasalahan ini saling terkait dan berpotensi memperlambat laju pembangunan daerah jika tidak segera diatasi secara komprehensif dan terintegrasi.

Identifikasi isu strategis lingkungan hidup merupakan langkah pertama dalam merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sebagai bagian dari proses ini, konsultasi publik dilaksanakan pada 12 Desember 2024 di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, yayasan nir laba, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam forum ini, peserta memberikan masukan dan membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan konteks lokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil dari konsultasi publik tersebut mengidentifikasi beberapa isu strategis lingkungan hidup, antara lain:

- Pengelolaan sampah
- Sanitasi lingkungan
- Penurunan kualitas lahan
- Pembakaran lahan untuk pembukaan lahan pertanian
- Pencemaran air
- Pencemaran tanah
- Pembukaan lahan yang masif
- Kerusakan lahan akibat pertambangan dan penggalian ilegal
- Pengolahan limbah B3 yang belum optimal
- Pengembangan perikanan budidaya (perubahan tata guna lahan)
- Pengeboman ikan yang merusak terumbu karang
- Pengelolaan sampah yang tidak maksimal
- Distribusi air yang belum maksimal ke lahan-lahan pertanian

- Ketersediaan air bersih
- Kurangnya tempat sampah pada fasilitas umum
- Pengangguran terbuka
- Stunting
- permukiman kumuh

Identifikasi isu strategis berdasarkan kebijakan strategis dilakukan dengan meninjau kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang telah atau sedang diterapkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara kebijakan yang ada dengan isu strategis yang dirumuskan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan secara efektif.

Telaah dilakukan terhadap beberapa kebijakan utama, antara lain:

1. KLHS RPJPN Tahun 2025–2045

KLHS RPJPN Tahun 2025–2045 adalah kajian lingkungan hidup strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

2. KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045

KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Utara merupakan kajian lingkungan hidup strategis yang mendukung rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. KLHS RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2045

KLHS RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan kajian lingkungan hidup strategis yang mendukung rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hasil telaah KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, isu strategis yaitu:

- (1) Keterbatasan Sumber Daya Alam;
- (2) Pencemaran Lingkungan;
- (3) Energi;
- (4) Kebencanaan; dan
- (5) Sosial-Ekonomi.

Hasil telaah KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2045, isu strategis yaitu:

- (1) Pengentasan kemiskinan
- (2) Peningkatan kesehatan masyarakat

- (3) Peningkatan kualitas pendidikan
- (4) Pengelolaan limbah dan sampah
- (5) Terancamnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem
- (6) Ketersediaan air bersih
- (7) Dampak perubahan iklim
- (8) Mitigasi bencana
- (9) Komitmen kepatuhan tata ruang
- (10) Pemerataan pembangunan infrastruktur

Hasil telaah KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025–2045, isu strategis yaitu

A. Isu Lingkungan

- (1) Degradasi lahan akibat kegiatan budidaya
- (2) Kurang optimalnya program adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim dan penanganan kebencanaan
- (3) Kurangnya Ruang Terbuka Hijau
- (4) Penurunan kualitas air
- (5) Penurunan kuantitas/debit air baku
- (6) Pengelolaan persampahan dan limbah B3 belum optimal
- (7) Pelayanan air minum dan sanitasi belum optimal

B. Isu Sosial

- (1) Adanya konflik masyarakat

C. Isu Ekonomi

- (1) Terdapat angka kemiskinan dan permukiman kumuh
- (2) Adanya kesenjangan
- (3) Permasalahan ketenagakerjaan
- (4) Kerentanan ketahanan pangan

• Isu Internasional

Dalam era globalisasi yang semakin maju, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai isu global yang mempengaruhi dinamika pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Isu-isu seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, serta tantangan ekonomi global menjadi perhatian utama yang tidak dapat diabaikan, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global ini sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan

yang efektif dan inklusif dalam RPJMD, sehingga dapat menciptakan sinergi antara kebijakan lokal dan agenda global yang lebih luas.

1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, merupakan agenda global yang diadopsi oleh PBB dan menjadi kerangka pembangunan hingga 2030, menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam pencapaiannya. Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan pembangunan, memiliki tanggung jawab krusial dalam mengimplementasikan target-target SDGs di tingkat lokal, mengingat banyak tujuan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga penyediaan infrastruktur, memerlukan aksi nyata di level daerah. Integrasi SDGs ke dalam RPJMD menjadi esensial, memastikan selarasnya program daerah dengan tujuan global, yang juga harus sejalan dengan kebijakan nasional terkait SDGs. Meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi mungkin muncul, kolaborasi antar sektor dan inovasi menjadi kunci, didukung oleh pengukuran kemajuan menggunakan indikator SDGs yang dikembangkan BPS, sehingga pemerintah daerah tidak hanya berkontribusi pada agenda global, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2. Ancaman krisis ekonomi global

Ancaman krisis ekonomi global merupakan isu yang sangat relevan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian pasca-pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik global, perubahan siklus ekonomi, dan kebijakan proteksionisme perdagangan yang diterapkan oleh beberapa negara besar. Pasca-pandemi, banyak negara masih berjuang untuk memulihkan perekonomian mereka, sementara inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga global menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina telah mengganggu rantai pasok global dan memperburuk krisis energi serta pangan, yang berdampak pada lonjakan harga komoditas. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan proteksionisme perdagangan yang membatasi akses pasar internasional, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks ini, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar

karena penurunan aktivitas ekonomi dapat langsung memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan industri lokal. Penurunan daya beli masyarakat juga dapat mengurangi penerimaan pajak daerah, sementara kebutuhan akan program perlindungan sosial justru meningkat untuk membantu kelompok rentan menghadapi dampak krisis.

Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terencana dan adaptif. Salah satu langkah penting adalah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta merelokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus fokus pada penguatan sektor-sektor lokal yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif. Dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk lokal dapat membantu sektor-sektor ini bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian global. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan kerja menjadi prioritas untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Program perlindungan sosial juga harus diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan akibat krisis. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dalam proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah tidak hanya dapat meminimalkan dampak negatif dari krisis ekonomi global tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Penerapan *Green Economic Global*, atau ekonomi ramah lingkungan, memiliki keterkaitan erat dan implikasi signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam konteks mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan merespons tantangan perubahan iklim. Ekonomi

hijau menekankan pada peningkatan kesejahteraan manusia dan pengurangan risiko sosial serta ketidakseimbangan ekologis, melalui praktik-praktik yang mempromosikan penggunaan sumber daya secara efisien, investasi dalam teknologi bersih, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dorongan global menuju ekonomi hijau didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim akibat aktivitas ekonomi konvensional telah mendorong pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Laporan-laporan ilmiah yang semakin mengkhawatirkan mengenai pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem telah meningkatkan urgensi untuk bertindak. Kedua, kerusakan lingkungan yang semakin parah, seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta degradasi lahan, telah memicu kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem untuk keberlangsungan hidup manusia. Ketiga, keterbatasan sumber daya alam, seperti air bersih, energi fosil, dan mineral, telah mendorong inovasi dalam penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan daur ulang. Keempat, tekanan internasional dari perjanjian lingkungan global, investor yang semakin peduli terhadap isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*), serta konsumen yang mencari produk dan layanan yang ramah lingkungan, telah mendorong adopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, yang tercermin dalam peningkatan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui *National Determined Contributions* (NDC), pengembangan energi terbarukan, dan implementasi sistem perdagangan karbon. Selain itu, berbagai regulasi dan insentif juga telah dikeluarkan untuk mendorong investasi dalam proyek-proyek hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mewujudkan ekonomi hijau di tingkat lokal melalui berbagai cara. Pertama, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti insentif untuk pengembangan energi terbarukan (misalnya: tenaga surya, tenaga angin, dan biogas), pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur hijau. Kebijakan ini harus selaras dengan RPJMD dan diimplementasikan secara konsisten. Kedua, pemerintah

daerah dapat mengembangkan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada prinsip ekonomi hijau, seperti ekowisata yang bertanggung jawab, pertanian organik, dan industri pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, pelatihan keterampilan, dan pemberian insentif kepada masyarakat yang mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan. Keempat, pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi yang kuat dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau. Kemitraan ini dapat melibatkan pengembangan proyek-proyek inovatif, transfer teknologi, dan penyediaan pendanaan untuk inisiatif-inisiatif hijau. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas teknis, dan resistensi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan status quo. Namun, dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, pemerintah daerah dapat mengatasi tantangan ini dan menjadi motor penggerak ekonomi hijau di tingkat nasional.

4. Perubahan iklim global (*Global Warming/ Climate Change*)

Perubahan iklim global merupakan isu yang sangat mendesak dan memiliki keterkaitan yang erat dengan pemerintah daerah, mengingat dampaknya yang nyata dan langsung dirasakan di tingkat lokal. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan temperatur global, kenaikan permukaan air laut, kerusakan lahan, kekeringan, banjir, dan penyebaran penyakit. Curah hujan yang tidak menentu, seperti yang diprediksi oleh BMKG dengan potensi peningkatan hingga 20% akibat La Nina lemah, meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, kekeringan dan kebakaran hutan

menjadi ancaman serius, merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat⁴. Kenaikan suhu udara juga berdampak signifikan; Indonesia mengalami kenaikan suhu udara +0,7°C dibandingkan periode rata-rata kurun 1991-2020. Perubahan iklim ini mengancam pembangunan infrastruktur, memicu degradasi wilayah pantai dan bukit, mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam dan pangan, serta memicu konflik sosial dan kerusakan infrastruktur. Faktor-faktor penyebab perubahan iklim global mencakup emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, dan hilangnya serapan karbondioksida juga memperparah situasi.

Menyadari ancaman ini, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, sementara adaptasi berfokus meningkatkan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan. Penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis juga menjadi langkah penting, termasuk konservasi sumber air dan perbaikan jaringan irigasi, sangat penting untuk mengatasi kekeringan dan banjir. Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan TNI-AD, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Upaya penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga krusial. Dengan tindakan mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan membangun wilayah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

5. Tantangan *Blue Economy* (Ekonomi Biru Berkelanjutan)

Ekonomi Biru merujuk pada model pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang besar, ekonomi biru bukan hanya mencakup perikanan

dan pariwisata laut, tetapi juga energi laut, bioteknologi, dan perlindungan ekosistem pesisir. Implementasi konsep ini di tingkat daerah memerlukan perhatian khusus terhadap beberapa faktor. Pertama, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan menjadi krusial. Praktik *overfishing* atau penangkapan ikan berlebihan, masih menjadi ancaman utama, dapat merusak ekosistem laut dan mengurangi keberlanjutan sektor perikanan. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan, serta mendorong praktik-praktik perikanan yang bertanggung jawab, seperti penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan penerapan sistem kuota yang adil. Kedua, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir, termasuk terumbu karang dan mangrove, sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan menyediakan layanan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah dapat menginisiasi program-program konservasi dan restorasi ekosistem pesisir, serta melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian lingkungan. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata bahari yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan destinasi wisata yang ramah lingkungan, mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat dalam industri pariwisata.

Faktor-faktor penyebab munculnya isu ini meliputi peningkatan kesadaran akan potensi ekonomi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, adanya komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut juga mendorong adopsi konsep ekonomi biru. Namun, implementasi ekonomi biru di tingkat daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha mengenai konsep ekonomi biru dan manfaatnya. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai ekonomi biru, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan ekonomi biru yang belum optimal, terbatas pada sektor-sektor tradisional seperti perikanan dan pariwisata. Pemerintah

daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi biru dengan mengembangkan sektor-sektor baru seperti bioteknologi kelautan dan energi laut. Selain itu, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di wilayah pesisir juga menjadi tantangan serius. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi biru didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang rentan. Terakhir, koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan yang lemah dapat menghambat implementasi ekonomi biru. Pemerintah daerah perlu membangun forum kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan masyarakat lokal untuk menyusun strategi dan program yang terpadu dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan.

6. Inovasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan

Inovasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi kekuatan transformatif yang tak terhindarkan, membawa dampak signifikan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah kini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan AI dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari digitalisasi pelayanan publik hingga tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, e-BUMD, e-BLUD, dan e-BMD adalah contoh nyata inovasi digital yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan *e-government* dengan berbagai aplikasi dan platform digital memungkinkan pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat. Lebih jauh lagi, AI dapat menganalisis data secara mendalam dan memberikan *insight* berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Inovasi teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan sektor-sektor unggulan daerah. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga memacu daerah untuk mengembangkan inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.

Faktor-faktor yang mendorong adopsi inovasi teknologi dan AI di pemerintah daerah sangat beragam. Perkembangan teknologi yang pesat menciptakan peluang baru untuk inovasi di berbagai bidang. Tuntutan

masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan memaksa pemerintah daerah untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing juga menjadi pendorong utama. Dukungan pemerintah pusat melalui regulasi dan program-program inovasi daerah memberikan landasan yang kuat bagi implementasi teknologi. Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya menjadi motivasi penting. Namun, pemerintah daerah juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengadopsi inovasi teknologi dan AI. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, masalah keamanan data dan privasi, serta resistensi dari sebagian masyarakat terhadap perubahan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang melindungi data pribadi dan mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Di beberapa daerah telah memanfaatkan AI dalam pembuatan video pimpinan dengan menggunakan teknologi deepfake dan text-to-speech, tetapi juga mengembangkan Sistem Informasi Validasi AI untuk mencegah penyalahgunaan dan disinformasi. Dengan mengelola implementasi AI secara bijak dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dapat membuka potensi penuh teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya.

- Isu Nasional

Analisis isu strategis nasional dalam RPJMD memiliki peran penting sebagai dasar dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan utama, peluang, serta isu-isu prioritas yang berdampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu, analisis ini membantu menentukan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus memastikan kontribusi daerah terhadap visi pembangunan jangka menengah

nasional. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, seperti masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, analisis isu strategis juga menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Asta Cita RPJMN 2025-2029

Asta Cita RPJMN 2025-2029 merupakan panduan strategis pembangunan nasional yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi *Indonesia Emas 2045*. Terdiri dari delapan prioritas utama, Asta Cita menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Asta Cita RPJMN mencakup delapan prioritas nasional, yaitu:

- (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
- (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- (3) meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif, Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah program strategis yang menjadi perhatian utama dalam periode mendatang. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab tantangan fundamental bangsa, mulai dari pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.

Fokus pembangunan diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan pangan melalui swasembada, memastikan gizi generasi muda lewat program makan bergizi gratis, memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat melalui pembangunan 3 juta rumah, serta memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Di bidang pendidikan, hadirnya program Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas kebutuhan akses pendidikan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

Selain itu, pengendalian inflasi di daerah menjadi prioritas penting guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sementara itu, pencegahan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem ditempatkan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus pembangunan.

Keseluruhan program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera melalui sinergi antara pusat dan daerah, dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Penyelarasan program-program prioritas dalam Asta Cita RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi dan efektif. Dengan integrasi program-program Asta Cita RPJMN ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045* melalui pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Hilirisasi dan Industrialisasi

Hilirisasi dan industrialisasi menjadi isu strategis yang sangat penting bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengingat daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan. Dengan tanah subur yang mendukung produksi pertanian, seperti padi dan jagung, serta kekayaan sumber daya laut yang melimpah, kabupaten ini memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis

sumber daya alam. Hilirisasi bertujuan untuk mengolah produk pertanian dan perikanan menjadi barang bernilai tambah, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

Program hilirisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern dalam pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Misalnya, pengembangan industri pengolahan ikan dapat membantu nelayan menjual produk mereka dalam bentuk olahan yang lebih bernilai, seperti ikan asin atau ikan kaleng, yang memiliki pasar lebih luas. Selain itu, dengan adanya hilirisasi, petani tidak hanya bergantung pada penjualan hasil panen mentah tetapi juga dapat berinovasi dengan menciptakan produk turunan yang menarik bagi konsumen.

Namun, untuk mewujudkan potensi ini, pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap modal serta teknologi. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan distribusi hasil pertanian serta perikanan akan sangat penting untuk memastikan produk sampai ke pasar dengan baik. Selain itu, pelatihan bagi petani dan nelayan dalam penggunaan teknologi modern serta manajemen usaha juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka.

Dengan mengintegrasikan hilirisasi dan industrialisasi ke dalam Rencana RPJMD, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak hanya akan memperkuat perekonomian lokal tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan daerah ini sebagai wilayah terdepan berbasis hilirisasi pertanian yang maju dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpotensi menjadi salah satu contoh sukses dalam pengembangan sektor pertanian dan kelautan.

3. Transformasi Sosial dan Ekonomi

Transformasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi sangat penting, terutama mengingat potensi besar yang dimiliki daerah ini di sektor pertanian dan kelautan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal. Program-program yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan melalui intervensi serentak kemiskinan ekstrem melalui platform SERDADU (Sistem Kesejahteraan Daerah Terpadu) menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hilirisasi produk pertanian dan perikanan menjadi salah satu strategi kunci dalam transformasi ekonomi Bolaang Mongondow Utara. Dengan mengolah hasil pertanian dan kelautan menjadi produk bernilai tambah, seperti olahan makanan atau produk pertanian terintegrasi, tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan sangat penting untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar.

Transformasi sosial juga terlihat dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami kenaikan. Program-program peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi bagian integral dari upaya ini, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan produktif. Dengan demikian, transformasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, menjadikan daerah ini lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

4. Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, memiliki dampak signifikan terhadap pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dengan mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, efisiensi anggaran menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program-program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan anggaran mereka sesuai dengan kebijakan efisiensi ini, yang mencakup pengurangan belanja pada pos-pos tertentu hingga 90% dalam beberapa kasus. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam pengeluaran, terutama pada kegiatan yang tidak langsung berkontribusi

terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial, yang sering kali dianggap kurang prioritas.

Namun, tantangan muncul ketika efisiensi anggaran dapat berpotensi mengganggu pelayanan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap program-program yang ada untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola keuangan tetapi juga sebagai tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga kualitas layanan publik sambil tetap memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

- Isu Regional

Visi pembangunan Sulawesi Utara 2025–2029 adalah mewujudkan daerah yang “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan dalam delapan misi utama, antara lain: Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Membangun Perekonomian Daerah, Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional, Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan, Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Nyaman dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya yang Berkearifan Lokal, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Utara merumuskan 17 program unggulan, yang mencakup :

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba;
- 2) Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;
- 3) Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi;
- 4) Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial;

- 5) Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase;
- 6) Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;
- 7) Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
- 8) Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;
- 9) Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;
- 10) Pengembangan Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan *MICE*;
- 11) Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;
- 12) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan;
- 13) Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumber Daya Energi Terbarukan;
- 14) Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial;
- 15) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 16) Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan *Logistics Hub* sebagai *supporting unit* untuk IKN;
- 17) Pembinaan Pertambangan Rakyat.

Program-program tersebut memiliki relevansi strategis dengan dinamika regional di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR), khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang tengah menghadapi sejumlah isu penting.

Analisis isu regional, khususnya di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR) sangat penting untuk dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengingat kompleksitas dan dinamika yang terjadi di wilayah ini. kawasan ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian dan kelautan, yang harus dikelola secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami isu-isu regional, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan yang ada.

1. Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi isu strategis di Bolaang Mongondow Raya, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, karena dampak luas yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Aktivitas PETI yang marak dilakukan tanpa regulasi yang jelas telah mengakibatkan kerusakan ekosistem

yang signifikan, seperti pencemaran air dan tanah, hilangnya habitat satwa liar, serta meningkatnya risiko kesehatan akibat penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri. Pencemaran bahan kimia tersebut berdampak langsung pada kualitas air sungai dan sumber air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup mereka.

Di sisi lain, praktik PETI juga menimbulkan permasalahan sosial, mulai dari konflik antarwarga lokal dan pendatang hingga ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Banyak penambang ilegal beroperasi tanpa izin resmi, sehingga negara dan daerah kehilangan potensi penerimaan pajak serta royalti yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan. Lebih jauh, kegiatan PETI sering kali melibatkan kelompok tertentu yang memanfaatkan celah hukum untuk memperoleh keuntungan besar tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% aktivitas tambang emas di Sulawesi Utara masih dilakukan tanpa izin resmi, yang mempertegas urgensi penanganan masalah ini.

Maraknya aktivitas PETI juga tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan lapangan kerja dan peluang ekonomi masyarakat setempat. Bagi sebagian warga, PETI menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, penanganan PETI tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata, melainkan juga harus disertai dengan penyediaan alternatif ekonomi yang layak dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perhatian pemerintah provinsi melalui program pembinaan pertambangan rakyat dan rencana aksi perubahan iklim, integrasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi sangat penting. Penanganan PETI harus diarahkan pada dua pendekatan sekaligus: penguatan penegakan hukum untuk menghentikan praktik ilegal dan pengembangan solusi alternatif berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan misi pembangunan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air, serta pemberdayaan UMKM dan pembangunan desa.

Dengan demikian, masyarakat yang selama ini bergantung pada PETI dapat dialihkan pada sektor produktif lain yang lebih aman dan berkelanjutan, seperti agro-industri, perikanan, dan pariwisata lokal. Pemerintah daerah juga dapat memperkuat program pemberdayaan

berbasis pertanian dan perikanan sebagai alternatif mata pencaharian, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang layak. Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menekan laju kerusakan lingkungan akibat PETI, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Bolaang Mongondow Utara.

2. Kejadian Gempa Bumi dan Mitigasi Bencana

Kejadian gempa bumi di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR), khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi geografis wilayah ini yang berada di dekat sumber gempa *megathrust* Sulawesi Utara serta sesar daratan aktif menjadikannya sangat rentan terhadap guncangan seismik. Peristiwa gempa berkekuatan 4,1 SR pada Oktober 2024 dan 6,1 SR di Bolaang Mongondow Timur pada Februari 2025 menjadi bukti nyata tingginya ancaman gempa di kawasan ini. Meskipun tidak berpotensi tsunami, peristiwa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada rumah, fasilitas ibadah, dan berdampak pada puluhan jiwa masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa mitigasi bencana menjadi kebutuhan mendesak di Bolaang Mongondow Utara.

Saat ini, penanggulangan bencana masih cenderung bersifat reaktif, belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan preventif dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran strategi menuju mitigasi yang lebih komprehensif. Langkah-langkah penting meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko gempa serta tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Edukasi kebencanaan melalui pelatihan dan simulasi evakuasi yang melibatkan masyarakat perlu diperkuat, disertai dengan penerapan sistem peringatan dini yang efektif. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik dan permukiman harus mengacu pada standar ketahanan gempa agar mampu meminimalkan dampak bencana di kemudian hari.

Upaya mitigasi gempa bumi juga harus selaras dengan visi pembangunan pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang menekankan masyarakat tertib, aman, dan nyaman, serta program penguatan kualitas lingkungan hidup dan permukiman. Dukungan provinsi dalam penguatan sistem peringatan dini, perbaikan tata ruang, pembangunan infrastruktur tahan gempa, serta integrasi dengan agenda adaptasi

perubahan iklim menjadi landasan penting bagi ketahanan wilayah. Hal ini sekaligus relevan dengan pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan memahami risiko yang ada serta menerapkan langkah mitigasi yang tepat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap gempa bumi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk memastikan keselamatan, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan di wilayah yang rawan bencana ini.

3. Wacana Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya

Wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) semakin mengemuka dengan rencana penggabungan 39 kecamatan dari empat kabupaten, yakni Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Timur. Gagasan ini memiliki dasar historis yang kuat, karena wilayah BMR pernah menjadi bagian dari Kerajaan Bolaang Mongondow yang berpengaruh sejak abad ke-13. Identitas sejarah dan budaya tersebut menumbuhkan rasa kebanggaan masyarakat yang menjadi salah satu pendorong utama aspirasi untuk memiliki provinsi sendiri.

Secara geografis, wilayah BMR memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain di Sulawesi Utara. Dataran tinggi yang subur, garis pantai yang indah, serta kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan pertambangan menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan daya saing regional maupun internasional, serta dukungan terhadap agenda pembangunan strategis seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), *logistics hub*, pariwisata cerdas, hingga energi terbarukan dan bioteknologi kelautan.

Hasil evaluasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada Forum Koordinasi Nasional (Forkornas) 20 Februari 2025 di Gedung Nusantara V DPR RI menyatakan bahwa Provinsi BMR telah memenuhi syarat sebagai Calon Daerah Otonomi Baru. Jika terwujud, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan memperoleh peluang strategis untuk mengelola sumber daya daerah secara lebih efektif, meningkatkan pelayanan publik, memperluas akses anggaran pembangunan, serta memperkuat posisi dalam pembangunan regional. Sektor-sektor

unggulan seperti pertanian modern, perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari berbasis kearifan lokal, serta UMKM berbasis agro-industri dapat menjadi pilar diversifikasi ekonomi daerah.

Namun demikian, wacana pemekaran ini juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah pemenuhan persyaratan administratif dan prosedural sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pengajuan usulan ke DPR serta persetujuan dari pemerintah pusat dan provinsi induk. Selain itu, dinamika politik dan perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat yang mendukung maupun menolak pemekaran harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik horizontal.

Dalam konteks ini, pemerintah provinsi memegang peran strategis untuk memfasilitasi dialog, mengharmonisasikan kebijakan, serta memastikan bahwa pemekaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pembentukan Provinsi BMR diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan Bolaang Mongondow Raya.

- Isu Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, serta memperhatikan arah kebijakan nasional (RPJMN 2025-2029), provinsi (RPJMD Sulawesi Utara), dan dokumen perencanaan daerah lainnya, berikut isu-isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ke depan.

- Isu penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial di kabupaten tidak hanya menekankan aspek pengentasan kemiskinan, tetapi juga mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan akses pendidikan—dua akar permasalahan utama yang diidentifikasi secara spesifik dalam analisis daerah.
- Isu peningkatan kualitas SDM tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pada pemerataan layanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting, sehingga sejalan dengan agenda nasional dan provinsi, serta relevan untuk wilayah pesisir dan terpencil yang menjadi perhatian regional.

- Pada aspek ekonomi, isu strategis kabupaten menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi, hilirisasi sektor unggulan, dan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, yang merupakan penajaman dari isu transformasi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi.
- Isu lingkungan hidup dan mitigasi bencana diintegrasikan dengan penguatan kelembagaan lokal dan adaptasi perubahan iklim, serta dikaitkan dengan pengelolaan DAS dan kawasan pesisir yang merupakan isu regional lintas kabupaten/provinsi.
- Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah dirumuskan sebagai upaya mempercepat pengembangan ekonomi dan pelayanan publik, sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah dan kawasan perbatasan.
- Reformasi tata kelola pemerintahan di kabupaten juga diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur dan digitalisasi pelayanan publik, agar selaras dengan agenda nasional dan provinsi dalam reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan lintas wilayah.

Tabel 2.58 Perumusan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			INTERNASIONAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi pertanian dan perkebunan, dengan 788 poktan dan lahan seluas 5.279 hektar.	1. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan	1. Tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Pengentasan kemiskinan di kawasan perbatasan dan pesisir	1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial
2. Potensi perikanan dan kelautan, dengan panjang garis pantai ±174 Km dengan perairan teritorial 7.733.952 km².	2. Rendahnya kualitas dan akses layanan pendidikan	2. Ketahanan sosial ekonomi masyarakat	2. Ancaman krisis ekonomi global	2. Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Stunting	2. Penurunan stunting di wilayah pesisir dan terpencil	2. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan serta percepatan penurunan stunting
3. Potensi energi terbarukan, seperti energi laut atau biomassa dari limbah pertanian dan peternakan.	3. Keterbatasan layanan kesehatan dasar	3. Adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	3. Penerapan Green Economy (Ekonomi Ramah Lingkungan)	3. Transformasi Ekonomi Berbasis Nilai Tambah	3. Pengembangan potensi ekonomi pesisir dan pertanian lintas kabupaten	3. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim
4. Prinsip "Mototompiaan, Mototabian, Bo Mototanoban" sebagai falsafah hidup masyarakat.	4. Potensi Kerusakan lingkungan dan bencana	4. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar	4. Tantangan <i>Blue Economy</i> (Ekonomi Biru Berkelanjutan)	4. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berkelanjutan	4. Pengelolaan DAS Sangkub Langi, kawasan pesisir Laut Sulawesi	4. Penguatan ketahanan ekonomi daerah melalui diversifikasi ekonomi, dan hilirisasi sektor unggulan
	5. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif	5. Kualitas tata kelola pemerintahan dan kelembagaan	5. Inovasi Teknologi dan Kecerdasan Buatan	5. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	5. Peningkatan konektivitas antar kabupaten dan kawasan perbatasan	5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas wilayah
	6. Keterbatasan infrastruktur dasar			6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	6. Inovasi pelayanan publik lintas kabupaten/ perbatasan	6. Reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur, dan digitalisasi pelayanan publik
	7. Rendahnya tata kelola pemerintahan					

Sumber : Analisis data, 2025

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pernyataan strategis jangka menengah yang mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah, tantangan eksternal, dinamika global, dan harapan masyarakat lokal terhadap peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk lima tahun ke depan dengan pernyataan:

- MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW UTARA YANG BERDAYA SAING -

Frasa berdaya saing dalam visi ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Daya saing tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, tata kelola pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Visi ini juga selaras dengan semangat pembangunan nasional untuk menuju *Indonesia Emas 2045*, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan, transformasi ekonomi, dan penguatan ketahanan nasional serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tiga misi strategis yang bersifat komplementer dan saling menopang, yaitu:

1. *Menciptakan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing Tinggi*
Fokus utama misi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prasyarat utama dalam membangun daya saing daerah. Kebijakan diarahkan pada penguatan sistem pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif.

2. *Membangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup*

Misi ini menitikberatkan pada pengembangan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian ekosistem.

3. *Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas Berdasarkan Semangat Kebersamaan dan Gotong Royong*

Misi ini berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan partisipatif, dengan nilai dasar integritas dan kolaborasi sosial. Reformasi birokrasi didorong untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Untuk memastikan terwujudnya visi dan terlaksananya misi secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengadopsi prinsip pembangunan **SIAP SEJALAN** sebagai panduan normatif sekaligus operasional dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Prinsip ini bukan sekadar jargon, melainkan kerangka nilai yang digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dan program prioritas dengan arah pembangunan jangka menengah.

1. **SIAP** (*Smart, Integritas, Adaptif, Produktif*)

SIAP merupakan prinsip tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang mengedepankan karakteristik berikut:

- *Smart*: Pengambilan keputusan berbasis data, *evidence-based policy*, dan pemanfaatan teknologi digital.
- *Integritas*: Peneguhan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan etika publik dalam setiap lini pelayanan.
- *Adaptif*: Kemampuan responsif dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- *Produktif*: Fokus pada hasil (*outcome-based approach*), efisiensi, dan efektivitas kebijakan publik.

Prinsip ini menjadi instrumen internal reformasi birokrasi dan inovasi kebijakan yang mendorong akselerasi pembangunan secara sistematis.

2. **SEJALAN** (*Sejahtera dan Berkelanjutan*)

SEJALAN merupakan prinsip eksternal pembangunan yang berorientasi pada tujuan makro pembangunan daerah:

- *Sejahtera*: Menekankan pencapaian kesejahteraan sosial secara inklusif melalui peningkatan pendapatan, akses layanan dasar, dan perlindungan sosial.
- *Berkelanjutan*: Menjamin keberlanjutan pembangunan antar generasi dengan menjaga daya dukung lingkungan, inklusi sosial, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Prinsip ini mendasari pendekatan *balanced development* antara pertumbuhan dan pelestarian, antara efisiensi dan keadilan sosial.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Untuk menggambarkan ketercapaian visi dan misi secara sistematis dan terukur selama lima tahun ke depan, maka dirumuskan 4 (empat) tujuan RPJMD Tahun 2025-2029, yang kemudian diturunkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran pembangunan daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang sekaligus menjadi indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama kepala daerah dan wakil kepala daerah, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VISI : MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW UTARA YANG BERDAYA SAING								
Misi 1 : Menciptakan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing Tinggi								
Tujuan 1:	Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	71,80	72,30	72,85	73,30	73,75	74,20
		Indeks Modal Manusia (Prov. Sulut)	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
Sasaran 1.1:	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,81	8,92	9,03	9,13	9,24	9,35
		Harapan Lama Sekolah	12,52	12,61	12,70	12,79	12,89	12,98
Sasaran 1.2:	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	73,80	74,00	74,35	74,54	74,73	74,93
Sasaran 1.3:	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Gini Ratio	0,365	0,358	0,352	0,347	0,342	0,338
		Tingkat Kemiskinan	7,65 - 7,00	7,40 - 7,00	7,10 – 6,50	6,90 – 6,50	6,70 – 6,00	6,50 – 6,00
Misi 2 : Membangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup								
Tujuan 2:	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,53 – 6,00	5,70 – 6,80	6,01 – 7,00	6,45 – 7,50	6,57 – 7,50	6,61 – 7,60
		PDRB ADHB per Kapita (juta rupiah)	41,58	43,43	45,24	46,99	49,03	51,07
		Indeks Daya Saing Daerah	2,61	2,66	2,71	2,76	2,80	2,80
		PDRB ADHK per Kapita (juta rupiah)	24,33	25,39	26,55	27,90	29,54	31,31
Sasaran 2.1:	Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Dalam Perekonomian	Rasio Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	12,61	12,62	12,62	12,63	12,63
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	3,46	3,50	3,53	3,56	3,58	3,60
Sasaran 2.2:	Optimalnya Potensi Ekonomi Unggulan	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	1,90	1,91	1,92	1,92	1,93	1,93
		Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,11	43,13	43,15	43,19	43,21	43,22

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Nilai Tukas Petani (NTP)	110,00	111,00	111,00	112,00	113,00	113,00
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30
Tujuan 3:	Mewujudkan Pembangunan Yang Nyaman dan Ramah Lingkungan	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di areal tempat tinggalnya (Prov. Sulut)	63,50	68,00	68,00	68,00	72,50	72,50
		Penurunan intensitas emisi GRK (Prov. Sulut)	35,82	31,42	28,00	24,50	22,00	22,00
Sasaran 3.1:	Meningkatnya Keamanan	Tingkat Kriminalitas	224,82	224,82	204,27	183,73	183,73	159,77
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	86,40	86,80	87,10	87,45	87,80	88,21
		Indeks Demokrasi Indonesia (Sulut)	78,22	80,41	82,84	85,51	88,42	91,57
Sasaran 3.2:	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Wilayah	56,15	58,17	62,02	63,77	67,61	69,63
Sasaran 3.3:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,39	80,56	80,73	80,90	81,07	81,24
Sasaran 3.4:	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	144	142	140	138	137	135
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas Berlandaskan Semangat Kebersamaan Gotong Royong								
Tujuan 4:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	75,76	78,61	81,46	84,31	87,15	90,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	90,01	93,00	95,00	97,00	98,00
Sasaran 4.1:	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,45	4,73	4,95	5,00	5,00
Sasaran 4.2:	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	75,00	77,50	79,00	81,00	81,20	81,20
Sasaran 4.3:	Meningkatnya Partisipasi Publik	Indeks Partisipasi Publik	83	85	87	88	89	90
		Indeks Desa Membangun	0,7132	0,7288	0,7444	0,7601	0,7757	0,7913

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 4.4:	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Nilai Survei Penilaian Integritas	77,72	80,21	82,68	85,16	87,64	90,12

Untuk mencapai target-target indikator kinerja tujuan dan sasaran, diperlukan rencana aksi yang terintegrasi. Setiap rencana aksi harus diiringi mitigasi risiko melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Aksi Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

MISI 1 : MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING TINGGI	MISI : 2 MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI YANG KUAT BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		MISI : 3 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS BERLANDASKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN GOTONG ROYONG
TUJUAN 1: MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	TUJUAN 2: MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH	TUJUAN 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN	TUJUAN 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI
<u>RENCANA AKSI:</u> 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan - Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, termasuk pembangunan dan renovasi sekolah. - Pelatihan guru dan peningkatan kurikulum berbasis kompetensi. - Pengembangan program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu. 2. Peningkatan Layanan Kesehatan	<u>RENCANA AKSI:</u> 1. Pengembangan UMKM dan Industri Lokal - Fasilitasi akses pasar dan pembiayaan untuk UMKM. - Pelatihan teknologi tepat guna dan inovasi produk. 2. Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan	<u>RENCANA AKSI:</u> 1. Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan - Pembangunan infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. - Peningkatan sistem keamanan dan penegakan hukum. 2. Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	<u>RENCANA AKSI:</u> 1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Profesionalisme ASN - Pelatihan dan sertifikasi kompetensi ASN secara berkala. - Digitalisasi layanan publik untuk transparansi dan efisiensi. 2. Peningkatan Pelayanan Publik - Pembentukan unit layanan terpadu dan sistem pengaduan masyarakat. - Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara rutin.

- Peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis - Program stunting, imunisasi, PMT dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. - Penyediaan layanan kesehatan preventif dan promotif. 3. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan - Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemenuhan hak dasar, keterampilan dan ketahanan keluarga. - Penerapan program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. <u>ANALISIS RISIKO:</u> 1. Keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dapat menghambat program. 2. Resistensi sosial terhadap perubahan kurikulum/program baru. 3. Ketimpangan distribusi fasilitas antara wilayah pusat dan daerah terpencil. 4. Pandemi atau bencana alam yang dapat mengganggu layanan kesehatan dan pendidikan.	- Modernisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan teknologi ramah lingkungan. - Pengembangan agroindustri dan pariwisata berbasis alam. <u>ANALISIS RISIKO:</u> 1. Ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap perubahan iklim. 2. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. 3. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia untuk inovasi.	- Program penurunan emisi gas rumah kaca melalui energi terbarukan dan konservasi hutan. - Sistem peringatan dini dan mitigasi bencana berbasis komunitas. <u>ANALISIS RISIKO:</u> 1. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. 2. Ancaman keamanan dan kriminalitas yang dapat menurunkan daya saing. 3. Bencana alam yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi	3. Penguatan Partisipasi Publik dan Transparansi - Forum konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan. - Pengembangan partisipasi masyarakat dan olahraga. 4. Pengembangan Desa Membangun - Peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi dana desa. - Program inovasi desa berbasis potensi lokal. <u>ANALISIS RISIKO:</u> 1. Resistensi internal birokrasi terhadap perubahan. 2. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menurunkan kepercayaan publik. 3. Keterbatasan akses teknologi di wilayah terpencil. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat akibat apatisisme atau kurangnya informasi. 5. Ketimpangan pembangunan antar desa yang dapat menimbulkan konflik.
--	--	---	---

Selanjutnya, untuk memastikan keselarasan dan sinergi pembangunan, indikator kinerja dan sasaran disinkronkan secara sistematis dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi Sulawesi Utara). Sinkronisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dengan agenda strategis nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan selaras, efektif, dan berdampak luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3.3 Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

ASTA CITA RPJMN	TUJUAN RPJMD BOLTARA	TUJUAN RPJMD SULUT
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (AC.4)	Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Tujuan 1)	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing secara merata di seluruh wilayah (Tujuan 2)
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (AC.6)		Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Tujuan 3)
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (AC.2)	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah (Tujuan 2)	Terwujudnya ketahanan pangan yang stabil, energi terbarukan, air bersih, serta air minum layak yang merata dan berkelanjutan (Tujuan 5)
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur (AC.3)		Terwujudnya konektivitas antar wilayah dan kualitas infrastruktur dasar yang ramah lingkungan (Tujuan 4)
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (AC.5)		
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (AC.8)	Mewujudkan pembangunan yang nyaman dan ramah lingkungan (Tujuan 3)	Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, nyaman, harmonis, dan berbudaya (Tujuan 6)
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (AC.7)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani (Tujuan 4)	Terwujudnya pemerintahan bebas korupsi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba (Tuj. 1)
Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM (AC.1)		Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih & baik (Tujuan 7)
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel (Tuj. 8)

Dalam proses penyelarasan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah, titik temu yang digunakan bukan pada level visi atau misi, melainkan pada tujuan pembangunan. Hal ini dikarenakan makna visi dan misi kepala daerah merupakan janji politik yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, sebagaimana telah disampaikan dalam proses kampanye dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sebaliknya, tujuan pembangunan lebih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan lintas level pemerintahan.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan dokumen RPJMN maupun RPJMD Provinsi, jumlah tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memang terlihat lebih sedikit. Hal ini bukan disebabkan oleh minimnya perhatian terhadap pembangunan, melainkan merupakan konsekuensi dari perbedaan lingkup urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal juga menjadi pertimbangan penting dalam merancang tujuan yang lebih terfokus. Strategi ini dipilih sebagai bentuk perencanaan yang adaptif dan realistis, agar program-program yang dirancang benar-benar efektif, efisien, serta mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) yang lebih luas terhadap pembangunan daerah.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1.Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang berfungsi sebagai penjabaran dari misi yang selaras dengan strategi dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas dan tahapan pelaksanaan program-program pembangunan selama periode lima tahun. Dengan mengidentifikasi isu-isu kritis dan merumuskan langkah-langkah konkret, arah kebijakan memastikan bahwa setiap strategi yang dipilih dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Selain itu, arah kebijakan juga berperan dalam menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, sehingga seluruh upaya pembangunan dapat berjalan secara harmonis dan terarah.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029
(1)	(2)	(3)
Menciptakan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing Tinggi	Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. - Pengurangan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
Membangun Ekosistem Ekonomi yang Kuat Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	- Penguatan daya saing ekonomi daerah dan potensi ekonomi unggulan. - Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi.
	Mewujudkan Pembangunan Yang Nyaman dan Ramah Lingkungan	- Penguatan ketahanan lingkungan hidup dan pengurangan Risiko bencana.
Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas Berlandaskan Semangat Kebersamaan dan Gotong Royong	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani	- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. - Peningkatan profesionalitas ASN dan partisipasi publik. - Penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, berisikan langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan pelaksanaan, serta penentuan program-program prioritas. Dalam menghadapi lingkungan yang dinamis, strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.5 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI RPJMD 2025-2029
(1)	(2)	(3)
Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1. Meningkatnya Derajat Pendidikan 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan 3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	- Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. - Mendorong program perlindungan sosial untuk pengurangan kemiskinan.
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	4. Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Dalam Perekonomian 5. Optimalnya Potensi Ekonomi Unggulan	- Mendorong UMKM dan koperasi agar naik kelas dan memperluas akses pasar. - Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan: pertanian, perikanan, industri pengolahan.
Mewujudkan Pembangunan Yang Nyaman dan Ramah Lingkungan	6. Meningkatnya Keamanan 7. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 9. Menurunnya Risiko Bencana	- Memperkuat mitigasi perubahan iklim, pengurangan emisi GRK, dan kesiapsiagaan bencana.

TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI RPJMD 2025-2029
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani	10. Meningkatnya Pelayanan Publik 11. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 12. Meningkatnya Partisipasi Publik 13. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	- Modernisasi sistem tata kelola pemerintahan. - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik. - Penguatan mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja aparatur.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan *outcome* RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat dilihat pada ilustrasi berikut

Gambar 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan dan Outcome RPJMD Tahun 2025-2029

VISI : MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW UTARA YANG BERDAYA SAING			
MISI 1 : MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING TINGGI	Arah Kebijakan 1: Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.		Strategi 1: Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan
	Arah Kebijakan 2: Penguatan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan		Strategi 2: Mendorong program perlindungan sosial untuk pengurangan kemiskinan
	TUJUAN 1: MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	Sasaran 1.1: Meningkatnya Derajat Pendidikan	Outcome: Meningkatnya literasi, pelestarian sejarah, budaya, dan cagar budaya daerah, serta terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beridentitas lokal.
		Sasaran 1.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan	Outcome: Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan yang menghasilkan lulusan berdaya saing dan berkarakter.
		Sasaran 1.3: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi masyarakat.
MISI 2 : MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI YANG KUAT BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Arah Kebijakan 3: Penguatan daya saing ekonomi daerah dan potensi ekonomi unggulan.		Strategi 3: Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan: pertanian, perikanan, industri pengolahan
	Arah Kebijakan 4: Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi.		Strategi 4: Mendorong UMKM dan koperasi agar naik kelas dan memperluas akses pasar
	TUJUAN 2: MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Sasaran 2.1: Meningkatkan Kontribusi UMKM dan Koperasi Dalam Perekonomian	Outcome: Terjaganya stabilitas harga, kelancaran distribusi barang, dan perlindungan konsumen yang mendukung perdagangan lokal
		Sasaran 2.2: Optimalnya Potensi Ekonomi Unggulan	Outcome: Meningkatnya pertumbuhan industri daerah, kemudahan berusaha, dan daya saing produk lokal di pasar nasional dan regional.
			Outcome: Meningkatkan kapasitas, akses pasar, dan kontribusi UMKM serta koperasi dalam perekonomian daerah.
MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS BERLANDASKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN GOTONG ROYONG	Arah Kebijakan 5: Penguatan ketahanan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.		Strategi 5: Memperkuat mitigasi perubahan iklim, pengurangan emisi GRK, dan kesiapsiagaan bencana.
	TUJUAN 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG NYAMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN	Sasaran 3.1: Meningkatkan Keamanan	Outcome: Terwujudnya masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis dengan ketahanan sosial dan ideologi yang kuat.
		Sasaran 3.2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Outcome: Tersedianya infrastruktur dasar dan penunjang yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup dan daya saing daerah.
		Sasaran 3.3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Outcome: Terjaganya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.
		Sasaran 3.4: Menurunnya Resiko Bencana	Outcome: Meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat serta pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, sehingga menurunkan dampak dan risiko bencana.

Pentahapan pembangunan dalam RPJMD adalah penentuan prioritas pembangunan tahunan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah secara bertahap selama periode lima tahun. Pentahapan ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan tantangan yang dihadapi. Tahap awal berorientasi pada penguatan dasar-dasar pembangunan seperti infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sementara tahap berikutnya mengarah pada pengembangan sektor ekonomi unggulan, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahap memiliki fokus tertentu yang selaras dengan visi, misi, serta strategi pembangunan daerah. Dengan pentahapan yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan hingga tercapainya target akhir RPJMD.

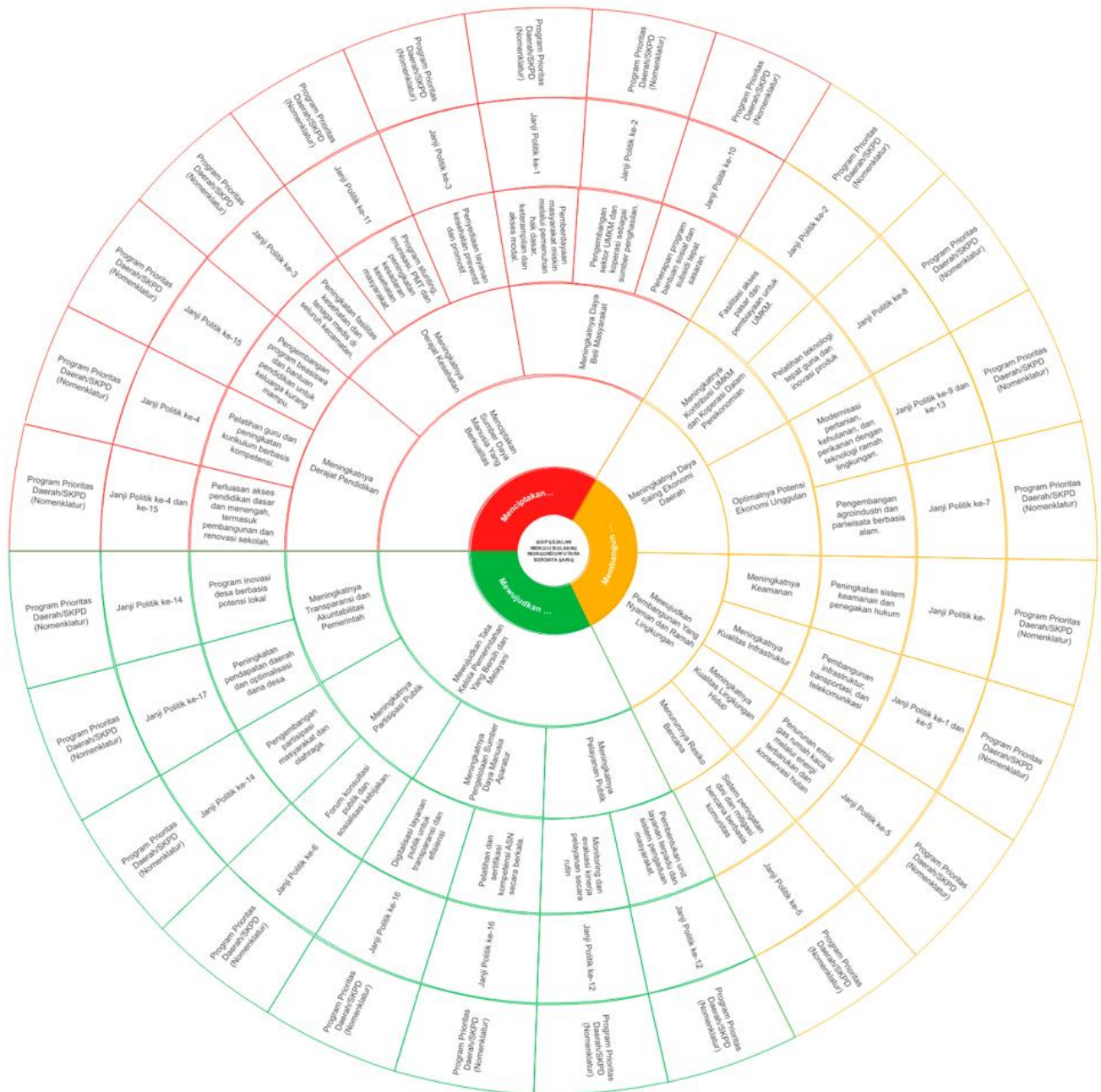
Gambar 3.2 Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029



3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Program-program ini merupakan manifestasi 17 (tujuh belas) janji politik KDH/WKDH terpilih yang telah disesuaikan dengan kewenangan urusan dan nomenklatur SKPD. Setiap program prioritas diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah, dengan fokus pada aspek-aspek strategis. Dengan mengidentifikasi dan menetapkan program-program ini secara jelas, Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan secara terencana dan terukur.

Gambar 3.3 Rantai Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Rencana Aksi dan Program



Tabel 3.6 Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI : MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW UTARA YANG BERDAYA SAING		
MISI 1: MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING TINGGI		
Menciptakan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia(poin) Indeks Modal Manusia(poin)	
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Meningkatkan Kunjungan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola (Cagar Budaya)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Kebudayaan Yang Dikelola (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Pengelolaan Kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Peningkatan Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Persentase SMP/MTs Terakreditasi A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Persentase SD/ MI Terakreditasi A (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD Terakreditasi (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Terwujudnya Pembinaan Sejarah	Persentase Data Sejarah Yang Ditata (%)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (Tahun)	
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

	Operasional dan Sesuai Standar (%)	
Meningkatnya Pembudayaan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan UKBM (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Dasar (Indeks)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (Treatment Success Rate) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis (Treatment Coverage) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Rasio Gini (Indeks)	
	Tingkat Kemiskinan ((%))	
Meningkatkan Pelayanan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Graduasi Mandiri KPM PKH (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Meningkatkan Pelayanan Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dan Urusan Wajib Bidang Sosial (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Meningkatkan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Meningkatnya Kualitas SDM Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya (%)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	Persentase Pekerja Informal (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Perempuan	Jumlah Pembinaan KIE (Kali)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Lansia Berdaya (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Indeks Ketahanan Keluarga (Prov. Sulut) (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Peningkatan Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Peningkatan Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Yang Dilayani (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Peningkatan Partisipasi dan Potensi Anak Melalui Forum Anak Daerah	Persentase Pembentukan Forum Anak Daerah (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Indeks Perlindungan Anak (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	<i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Persentase KB Aktif (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase ARG (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MISI 2 : MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI YANG KUAT BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	PDRB per Kapita (ADHK)(Rp. Juta Per Tahun)	
	LPE(%)	
	Indeks Daya Saing Daerah(poin)	
Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Dalam Perekonomian	PDRB per Kapita (ADHB)(Rp. Juta Per Tahun)	
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	

Meningkatkan Jumlah Subsektor Ekraf yang Dikembangkan		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Perikanan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Jumlah Proyek Penanaman Modal yang Merealisasikan Investasinya (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri	Jumlah Kawasan Industri yang ditetapkan melalui Dokumen RPIK (Kawasan)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Rasio subsektor Ekraf yang Dikembangkan (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang di Kembangkan (Objek Wisata)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Meningkatnya Komoditas Ekspor Daerah	Persentase Komoditas Ekspor Daerah (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dikelola Secara Elektronik (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Melalui Promosi	Jumlah Event Promosi Pariwisata (Event)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Meningkatnya Pengelolaan Sinas	Persentase IKM yang Terdaftar Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Kepatuhan Tertib Ukur (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Meningkatnya Perusahaan yang Memiliki Izin	Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Meningkatnya Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Meningkatnya Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting	Persentase Stabilitas Harga Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
UMKM Naik Kelas	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM yang Difasilitasi (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Optimalnya Potensi Ekonomi Unggulan	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	
	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	
	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Keamanan Pangan Segar	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak Terkena Penyakit (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Persentase Ternak Terkena Penyakit Yang Tertangani (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit) (Kuintal/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura (Tomat) (Kuintal/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) (Kuintal/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Perkebunan (Kelapa) (Kuintal/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Perkebunan (Kakao) (Kuintal/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung) (Kuintal/Ha)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Persentase Alat Mesin Pertanian Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penguatan Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Mewujudkan Pembangunan Yang Nyaman dan Ramah Lingkungan	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya((%))	
	Penurunan intensitas emisi GRK((%))	
Meningkatnya Keamanan	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	
	Tingkat Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap <i>Respon Time</i> 15 Menit Penanggulangan Kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Menjamin Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Forum Kerja Sama Antar Lembaga yang Dibina (Forum)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Penguatan Peran Parpol Melalui Edukasi Politik ke Masyarakat	Persentase Parpol yang Dibina (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Wilayah (poin)	
Mengembangkan Jasa Konstruksi Ramah Lingkungan	Tingkat Kepatuhan Jasa Konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Mengendalikan Daya Rusak Air	Persentase Penurunan Areal Genangan Banjir (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Wilayah yang Memadai	Persentase Wilayah yang Memiliki Akses Terhadap Tempat Pengolahan Sampah (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Meningkatkan Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Persyaratan Standar (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Kawasan yang Tersedia Bangunan Ruang Publik dan RTH Sesuai RTR (Kawasan)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Pengolahan Air Limbah (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Meningkatnya Kepemilikan Akta Tanah	Persentase Jumlah Tanah yang Bersertifikat (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Meningkatnya Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kualitas Prasarana Perhubungan Meningkat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

	Ratio Konektivitas Kab/Kota (Rasio)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Jumlah Titik Parkir yang Berfungsi Baik (Titik)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh	Persentase Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh	Persentase Permukiman Kumuh yang Tertangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penetapan Rencana Tata Ruang	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Layak	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Layak (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Area Konservasi dan RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil B3 dan LB3 (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Menindaklanjuti Arahan dan atau Teguran Hasil Pengawasan (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Optimalisasi Penanganan Pengaduan LH	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang Terkait Dugaan Kasus Lingkungan (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Optimalisasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan yang Diraih di Tkt. Provinsi atau Nasional (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Tersusunnya Dokumen Rencana Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Terwujudnya Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Terwujudnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Proses Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (poin)	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS BERLANDASKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN GOTONG ROYONG		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat(poin)	
	Indeks Reformasi Birokrasi(poin)	
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (poin)	
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	Rate Nett Recent Migration (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Meningkatkan Kualitas Penyajian Informasi Data Adminduk yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Integrasi Data yang Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Meningkatnya Dukungan Terhadap Kinerja DPRD sesuai Aturan dan Tepat Waktu	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap tugas dan Fungsi Anggota DPRD (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Meningkatnya Layanan Persandian dalam rangka Pengamanan Informasi Daerah	Pemenuhan Dokumen yang di Sandikan untuk Keamanan Informasi (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Meningkatnya Layanan TIK dan Integrasi layanan Secara Elektronik	Persentase Layanan TIK dan Integrasi Layanan Secara Elektronik (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik untuk Pembangunan Daerah	Persentase Data Sektorial yang Dipublikasi (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Kompetensi ASN Melalui Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	Persentase Pemenuhan Penataan ASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Meningkatnya Partisipasi Publik	Indeks Desa Membangun (poin)	
	Indeks Partisipasi Publik (poin)	
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Desa	Rasio Partisipasi Lembaga Desa dalam Pembangunan, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif dalam Pembangunan (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Persentase Desa yang Melakukan Pelaporan Profil Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Sumber Daya Keolahragaan (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Orang)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan (Orang)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (poin)	
Meningkatkan Capaian Kinerja Daerah	Rata-rata Kinerja IKU Daerah/RPJMD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja OPD dengan Predikat Sangat Tinggi (91% - 100%) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatkan Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang Diikutkan dalam IGA (Inovasi)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Akuntabel (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Agenda Resmi yang Difasilitasi Dalam Setahun (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase OPD yang Menyampaikan LKjIP Tepat Waktu (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ratio Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (Rasio)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Ratio Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat Waktu (Rasio)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Persentase Realisasi Belanja dan Pendapatan sesuai dengan APBD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Persentase Penurunan Temuan Terhadap LKPD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Ratio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Optimalisasi Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Program Pembangunan Daerah yang Dilaporkan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Indeks Tingkat Kematangan UKPBJ (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB IV

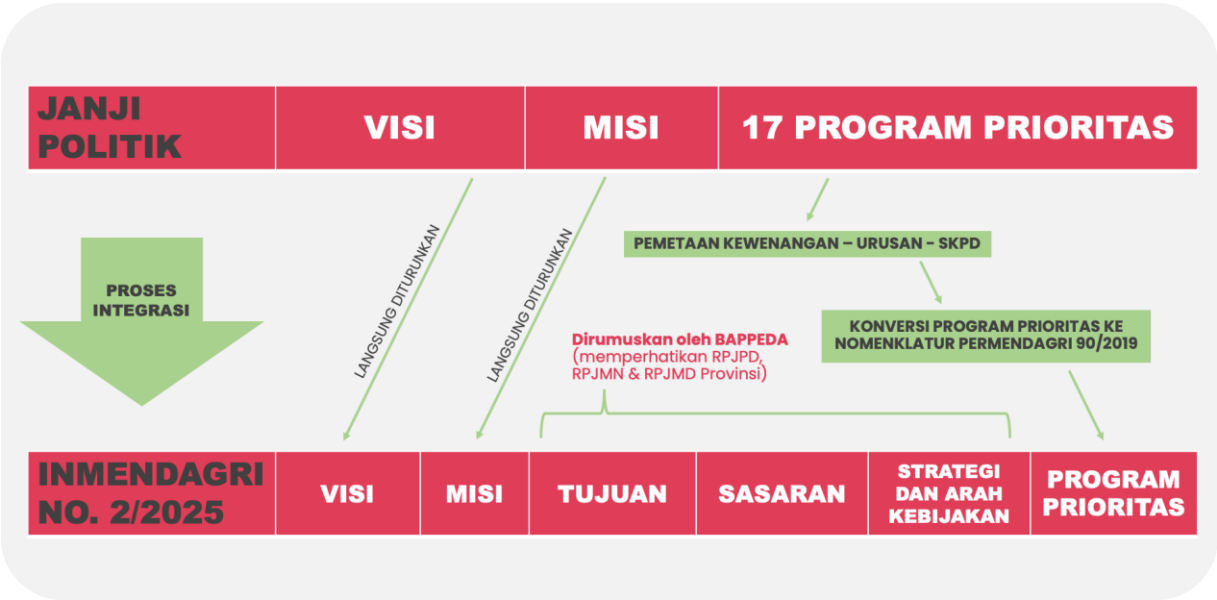
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam perumusan program pembangunan. Kebijakan umum tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai aspek strategis, antara lain potensi dan permasalahan daerah, aspirasi masyarakat, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah, sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1 Integrasi Janji Politik ke dalam RPJMD 2025-2029



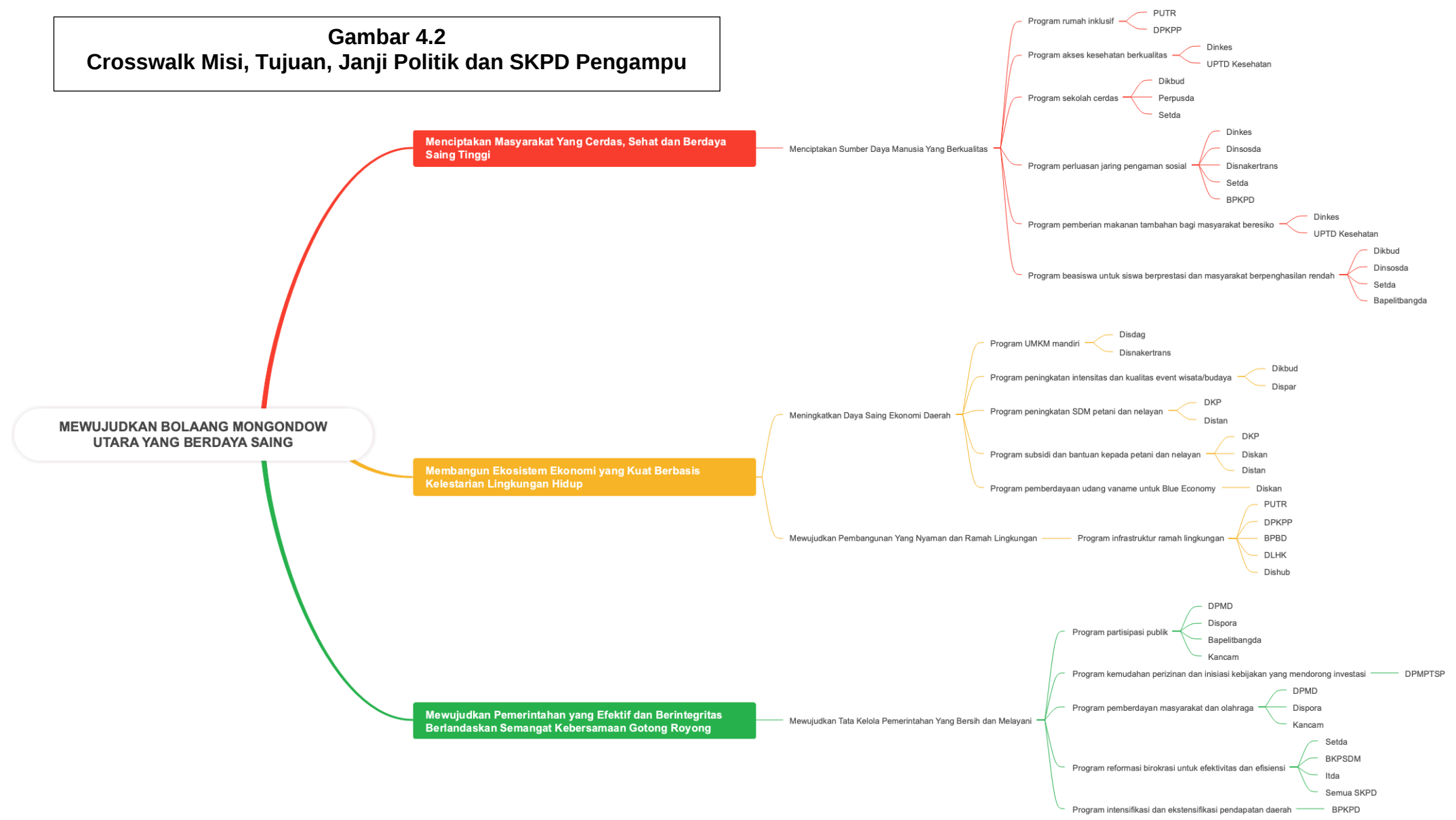
Selain merujuk pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, program-program yang disusun oleh Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran nyata dari 17 (tujuh belas) program yang dijanjikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komitmen dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat dapat diimplementasikan secara terukur dan akuntabel melalui program-program

pembangunan daerah yang bersinergi dengan dokumen perencanaan daerah. Berikut adalah tujuh belas program yang menjadi janji politik;

1. *Program rumah inklusif;*
Pembangunan Hunian layak bagi kelompok rentan.
2. *Program UMKM mandiri;*
Pendanaan dan Pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. *Program akses kesehatan berkualitas;*
Penyediaan akses Kesehatan yang merata.
4. *Program sekolah cerdas;*
Peningkatan kualitas Pendidikan yang focus kepada tenaga pendidik dan kepedidikan.
5. *Program infrastruktur ramah lingkungan;*
Infrastruktur yang mengutamakan pelastarian lingkungan dan ketahan bencana.
6. *Program partisipasi publik;*
Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan daerah.
7. *Program peningkatan intensitas dan kualitas event wisata/budaya;*
Meningkatakan kualitas evan wisata/budaya untuk menarik kunjungan wisatawan dalam atau luar negeri
8. *Program peningkatan SDM petani dan nelayan;*
Pengembangan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan petani serta nelayan agar lebih produktif, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan sektor pertanian dan perikanan
9. *Program subsidi dan bantuan kepada petani dan nelayan;*
Bentuk dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk finansial, barang, atau layanan guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha di sektor pertanian dan perikanan
10. *Program perluasan jaring pengaman sosial;*
Kebijakan dan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok masyarakat rentan, seperti keluarga miskin, pekerja informal, petani, nelayan, dan kelompok marjinal lainnya, guna mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat kemiskinan, krisis, atau bencana

11. *Program pemberian makanan tambahan bagi masyarakat beresiko;*
Meningkatkan status gizi kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu yang berisiko mengalami kekurangan gizi
12. *Program kemudahan perizinan dan inisiasi kebijakan yang mendorong investasi;*
Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan proses perizinan, regulasi yang lebih fleksibel, serta insentif bagi investor guna meningkatkan investasi.
13. *Program pemberdayaan udang vaname untuk Blue Economy;*
Mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan tanpa merusak ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
14. *Program pemberdayaan masyarakat dan olahraga;*
Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui penguatan sosial, ekonomi dan Kesehatan dengan memanfaatkan olahraga sebagai sarana utama.
15. *Program beasiswa untuk siswa berprestasi dan masyarakat berpenghasilan rendah;*
Memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi individu yang memiliki potensi akademik tinggi atau keterbatasan ekonomi, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
16. *Program reformasi birokrasi untuk efektivitas dan efisiensi;*
Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan mengurangi kompleksitas prosedur, mempercepat layanan publik, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
17. *Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;*
Meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan berbagai sektor ekonomi.

Gambar 4.2
Crosswalk Misi, Tujuan, Janji Politik dan SKPD Pengampu



Ke-17 program tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana program Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan nomenklatur perundangan yang berlaku, sebagaimana *tabel 4.4*.

Tabel 4.1 Sinkronisasi Program Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

17 PROGRAM PRIORITAS RPJMN	17 PROGRAM PRIORITAS RPJM SULUT	17 PROGRAM PRIORITAS RPJM BOLMUT
• HUNIAN BERKUALITAS , TERJANGKAU DAN BERSANITASI BAIK	• Penguatan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase	• PROGRAM RUMAH INKLUSIF
• PEMERTAAAN EKONOMI DAN Penguatan UMKM	• PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN UMKM	• UMKM MANDIRI
• PENINGKATAN BPJS DAN KETERSEDIAAN OBAT	• Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar	• AKSES KESEHATAN BERKUALITAS
• PENDIDIKAN, SAINS, TEKNOLOGI SERTA DIGITALISASI	• WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DAN INTRODUKSI MAKAN SIANG BERGIZI	• PERLUASAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL
• PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	• PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	• SEKOLAH CERDAS
	• RENCANA AKSI PERUBAHAN IKLIM DAN ENERGI TERBARUKAN	• INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN
	• PEMBINAAN PERTAMBANGAN RAKYAT	
• PELESTARIAN SENI BUDAYA, EKRAF DAN PRESTASI OLAHRAGA	• SMART TOURISM DAN MICE	• PENINGKATAN INTENSITAS/KUALITAS EVEN WISATA/ BUDAYA
	• PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA MILLENIAL	• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OLAHRAGA
• SWASEMBADA PANGAN DAN ENERGI	• PENINGKATAN SAPRAS PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	• PENINGKATAN SDM PETANI DAN NELAYAN
• KETERSEDIAAN PUPUK, BENIH DAN PESTISIDA UNTUK PETANI	• AGROPRODUKSI, AGROINDUSTRI, DAN AGROMARKETING	• SUBSIDI DAN BANTUAN KEPADA PETANI DAN NELAYAN
• HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM	• PENINGKATAN KEK DAN LOGISTICS HUB	• PEMBERDAYAAN UDANG VANAME UNTUK BLUE ECONOMY
• PEMBERANTASAN KEMISKINAN	• PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	• PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI MASYARAKAT BERISIKO
• REFORMASI POLITIK, HUKUM DAN BIROKRASI	• SENTRA PELAYANAN PUBLIK PRIMA	• BEASISWA UNTUK SISWA BERPRESTASI UNTUK MBR
• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSIKERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN KEBEBASAN BERIBADAH	• PENINGKATAN RB MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM MERITOKRASI	• PERIZINAN DAN INISIASI KEBIJAKAN YANG MENDORONG INVESTASI
• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA	• PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KKN SERTA NARKOBA	• EFISIENSI BIROKRASI UNTUK EFEKTIFITAS
• PENYEMPURNAAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA		• PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK
• KESETARAAN GENDER, PP DAN PA SERTA DISABILITAS	• PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	• INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH
• PERTAHANAN NEGARA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL		• PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK

Rencana program Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah dirancang untuk dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program yang direncanakan pada tahun 2030 merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, yang sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030. RKPD Tahun 2030 tersebut selanjutnya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030–2034, sehingga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjaga secara optimal.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial budaya.

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik.

Berikut dapat kami sampaikan Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Pembangunan daerah yang telah direncanakan. untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan atau pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh Masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah. Adapun detail indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator kinerja utama dan Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 :

**Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74	74,35	74,54	74,73	74,93
2.	Rasio Gini	Indeks	0,358	0,352	0,347	0,342	0,338
3.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	80,41	82,84	85,51	88,42	91,57
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	80,56	80,73	80,9	81,07	81,24
5.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3,5	3,53	3,56	3,58	3,6
6.	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,45	4,73	4,95	5	5
7.	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%	1,91	1,92	1,92	1,93	1,93
8.	Indeks Desa Membangun	poin	0,7288	0,7444	0,7601	0,7757	0,7913
9.	Indeks Resiko Bencana	poin	142	140	138	137	135
10.	Indeks Infratraktur Wilayah	poin	58,17	62,02	63,77	67,61	69,63
11.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,5	79	81	81,2	81,2
12.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	poin	80,21	82,68	85,16	87,64	90,12
13.	Indeks Partisipasi Publik	poin	85	87	88	89	90
14.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,7	12,79	12,89	12,98
15.	Tingkat Kriminalitas	per 100.000 penduduk	224,82	204,27	183,73	183,73	159,77
16.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,28	0,28	0,29	0,3	0,3
17.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	12,61	12,62	12,62	12,63	12,63
18.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	111	111	112	113	113
19.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,92	9,03	9,13	9,24	9,35
20.	Tingkat Kemiskinan	%	7,40-7,00	7,10-6,50	6,90-6,50	6,70-6,00	6,50-6,00
21.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	86,80	87,10	87,45	87,8	88,21
22.	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	43,13	43,15	43,19	43,21	43,22

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)
RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	63.50	63.50	68.00	68.00	68.00	72.50	72.50
2	Indeks Daya Saing Daerah	poin	2.56	2.61	2.66	2.71	2.76	2.80	2.80
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	39.82	35.82	31.42	28.00	24.50	22.00	22.00
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	71.66	71.80	72.30	72.85	73.30	73.75	74.20
2	LPE	%	5.12	5.53-6.00	5.70-6.80	6.01-7.00	6.45-7.50	6.57-7.50	6.61-7.60
3	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp. Juta Per Tahun	40.27	41.58	43.43	45.24	46.99	49.03	51.07
4	Indeks Modal Manusia	poin	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp. Juta Per Tahun	23.25	24.33	25.39.00	26.55	27.90	29.54	31.31
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	72.91	75.76	78.61	81.46	84.31	87.15	90.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	82.88	88.31	90.01	93.00	95.00	97.00	98.00

Tabel 4.4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					154.718.332.808,00		154.913.824.566,00		155.235.181.734,00		155.425.705.593,00		155.582.297.452,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					131.201.930.821,00		131.201.930.821,00		131.201.930.821,00		131.201.930.821,00		131.201.930.822,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	131.201.930.821,00	100	131.201.930.821,00	100	131.201.930.821,00	100	131.201.930.821,00	100	131.201.930.822,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					23.441.401.987,00		23.636.893.745,00		23.958.250.913,00		24.148.774.772,00		24.305.366.630,00	
Peningkatan Pengelolaan Pendidikan	Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan (%)	100	100	100	23.441.401.987,00	100	23.636.893.745,00	100	23.958.250.913,00	100	24.148.774.772,00	100	24.305.366.630,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase PNF terakreditasi dan PAUD Terakreditasi (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Persentase SD/ MI Terakreditasi A (%)	21.51	25.81	17.20		2.15		18.28		0		5.38		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter (%)	100	100	100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Persentase SMP/MTs Terakreditasi A (%)	20	15	30		0		5		0		10		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Peningkatan Pengelolaan Kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal/Prakarya pada Setiap Jenjang Satuan Pendidikan (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					88.320.079.903,00		88.550.070.208,00		88.928.137.464,00		89.152.283.181,00		89.336.508.896,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.600.079.903,00		64.846.058.899,00		65.042.037.895,00		65.238.016.891,00		65.408.995.887,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	64.600.079.903,00	100	64.846.058.899,00	100	65.042.037.895,00	100	65.238.016.891,00	100	65.408.995.887,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					17.525.000.000,00		17.509.011.309,00		17.691.099.569,00		17.719.266.290,00		17.732.513.009,00	
Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (Treatment Success Rate) (%)	90	90	90	17.525.000.000,00	90	17.509.011.309,00	90	17.691.099.569,00	90	17.719.266.290,00	90	17.732.513.009,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkolosis (Treatment Coverage) (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Dasar (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	80	80	80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					6.060.000.000,00		6.060.000.000,00		6.060.000.000,00		6.060.000.000,00		6.060.000.000,00	
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes Dengan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (%)	97	97	97.5	6.060.000.000,00	98	6.060.000.000,00	98	6.060.000.000,00	98.5	6.060.000.000,00	98.5	6.060.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yg memiliki Izin Operasional dan Sesuai Standar (%)	57	57	58	25.000.000,00	59	25.000.000,00	60	25.000.000,00	61	25.000.000,00	62	25.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembudayaan Masyarakat Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan UKBM (%)	91	91	92	110.000.000,00	93	110.000.000,00	94	110.000.000,00	95	110.000.000,00	96	110.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					21.620.437.517,00		21.753.831.893,00		21.973.110.902,00		22.103.115.418,00		22.209.966.333,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.200.437.517,00		5.173.831.893,00		5.218.110.902,00		5.173.115.418,00		5.124.966.333,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.200.437.517,00	100	5.173.831.893,00	100	5.218.110.902,00	100	5.173.115.418,00	100	5.124.966.333,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.900.000.000,00		2.850.000.000,00		3.875.000.000,00		2.875.000.000,00		3.650.000.000,00	
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (%)	50.02	50.52	51.5	3.900.000.000,00	52.25	2.850.000.000,00	53	3.875.000.000,00	53.75	2.875.000.000,00	54.5	3.650.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.270.000.000,00		2.220.000.000,00		2.220.000.000,00		2.370.000.000,00		2.270.000.000,00	
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)	76.56	78	80	2.270.000.000,00	82	2.220.000.000,00	85	2.220.000.000,00	87	2.370.000.000,00	90	2.270.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					725.000.000,00		1.275.000.000,00		1.275.000.000,00		1.275.000.000,00		1.170.000.000,00	
Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Wilayah yang Memadai	Persentase Wilayah yang Memiliki Akses Terhadap Tempat Pengolahan Sampah (%)	15.09	15.09	18.87	725.000.000,00	23.58	1.275.000.000,00	28.3	1.275.000.000,00	33.02	1.275.000.000,00	37.74	1.170.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					545.000.000,00		1.995.000.000,00		1.245.000.000,00		1.045.000.000,00		1.295.000.000,00	
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Pengolahan Air Limbah (%)	7	8	9	545.000.000,00	10	1.995.000.000,00	11	1.245.000.000,00	12	1.045.000.000,00	15	1.295.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.000.000.000,00		1.150.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.050.000.000,00	
Mengendalikan Daya Rusak Air	Persentase Penurunan Areal Genangan Banjir (%)	20	20	19	1.000.000.000,00	18	1.150.000.000,00	17	1.200.000.000,00	16	1.400.000.000,00	15	1.050.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					725.000.000,00		1.075.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Persyaratan Standar (%)	9	9.5	10	725.000.000,00	10.5	1.075.000.000,00	11	1.125.000.000,00	11.5	1.125.000.000,00	12	1.125.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					550.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Kawasan yang Tersedia Bangunan Ruang Publik dan RTH Sesuai RTR (Kawasan)	9	10	11	550.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	14	550.000.000,00	15	550.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					5.700.000.000,00		4.550.000.000,00		4.550.000.000,00		5.550.000.000,00		5.025.000.000,00	
Meningkatkan Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	64.11	70	75	5.700.000.000,00	80	4.550.000.000,00	85	4.550.000.000,00	90	5.550.000.000,00	95	5.025.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					365.000.000,00		325.000.000,00		340.000.000,00		325.000.000,00		335.000.000,00	
Mengembangkan Jasa Konstruksi Ramah Lingkungan	Tingkat Kepatuhan Jasa Konstruksi (%)	50	60	75	365.000.000,00	80	325.000.000,00	85	340.000.000,00	90	325.000.000,00	95	335.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					640.000.000,00		840.000.000,00		625.000.000,00		415.000.000,00		615.000.000,00	
Penetapan Rencana Tata Ruang	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100	100	100	640.000.000,00	100	840.000.000,00	100	625.000.000,00	100	415.000.000,00	100	615.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					3.852.199.729,00		3.867.149.099,00		3.866.723.470,00		3.856.292.942,00		3.868.267.613,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.269.104.479,00		3.067.149.099,00		3.037.489.099,00		2.873.797.323,00		2.884.267.613,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.269.104.479,00	100	3.067.149.099,00	100	3.037.489.099,00	100	2.873.797.323,00	100	2.884.267.613,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					233.095.250,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh	Persentase Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (%)	8	20	20	233.095.250,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	350.000.000,00	100	350.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					150.000.000,00		200.000.000,00		229.234.371,00		282.495.619,00		284.000.000,00	
Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh	Persentase Permukiman Kumuh yang Tertangani (%)	0.00	20.00	20.00	150.000.000,00	20.00	200.000.000,00	20.00	229.234.371,00	20.00	282.495.619,00	100	284.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Layak	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Layak (%)	10	100	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6.682.027.640,00		6.698.356.951,00		6.725.199.726,00		6.741.114.072,00		6.754.194.097,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.465.212.050,00		5.548.757.224,00		5.676.124.328,00		5.683.969.428,00		5.897.224.389,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100.00	100.00	100.00	2.633.844.224,00	100.00	2.641.844.224,00	100.00	2.653.844.224,00	100.00	2.653.844.224,00	100.00	2.899.110.474,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.831.367.826,00	100	2.906.913.000,00	100	3.022.280.104,00	100	3.030.125.204,00	100	2.998.113.915,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					253.228.550,00		253.228.550,00		253.228.550,00		253.228.550,00		163.228.550,00	
Menjamin Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Persentase Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	100.00	100.00	100.00	253.228.550,00	100.00	253.228.550,00	100.00	253.228.550,00	100.00	253.228.550,00	100.00	163.228.550,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					644.204.464,00		576.708.950,00		474.574.200,00		474.574.200,00		513.033.389,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana (%)	100	100	100	644.204.464,00	100	576.708.950,00	100	474.574.200,00	100	474.574.200,00	100	513.033.389,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					319.382.576,00		319.662.227,00		321.272.648,00		329.341.894,00		180.707.769,00	
Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit Penanggulangan Kebakaran (Menit)	15	15	15	319.382.576,00	15	319.662.227,00	15	321.272.648,00	15	329.341.894,00	15	180.707.769,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.546.328.723,00		4.563.577.996,00		4.591.933.040,00		4.608.743.969,00		4.622.560.897,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.217.041.868,00		3.134.891.141,00		3.068.146.185,00		2.915.541.868,00		2.995.541.868,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.217.041.868,00	100	3.134.891.141,00	100	3.068.146.185,00	100	2.915.541.868,00	100	2.995.541.868,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					215.934.800,00		185.934.800,00		185.934.800,00		185.934.800,00		185.934.800,00	
Meningkatkan Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Sosial (%)	100	100	100	215.934.800,00	100	185.934.800,00	100	185.934.800,00	100	185.934.800,00	100	185.934.800,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					531.005.000,00		496.005.000,00		494.005.000,00		663.420.246,00		597.237.174,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pelayanan Cakupan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dan Urusan Wajib Bidang Sosial (%)	100	100	100	531.005.000,00	100	496.005.000,00	100	494.005.000,00	100	663.420.246,00	100	597.237.174,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					507.347.055,00		671.747.055,00		773.847.055,00		773.847.055,00		773.847.055,00	
Meningkatkan Pelayanan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Graduasi Mandiri KPM PKH (%)	0.49	1	1	507.347.055,00	1	671.747.055,00	1	773.847.055,00	1	773.847.055,00	1	773.847.055,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					75.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatkan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Penanganan Bencana (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL DAERAH
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.070.362.794,00		3.074.873.184,00		3.086.590.229,00		3.093.171.693,00		3.096.824.440,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.344.387.066,00		2.331.687.066,00		2.355.517.066,00		2.367.562.166,00		2.393.337.066,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.344.387.066,00	100	2.331.687.066,00	100	2.355.517.066,00	100	2.367.562.166,00	100	2.393.337.066,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					35.700.125,00		37.135.100,00		39.140.250,00		40.100.300,00		43.185.100,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Informal (%)	72.15	72.15	72.18	35.700.125,00	72.22	37.135.100,00	72.26	39.140.250,00	72.34	40.100.300,00	72.41	43.185.100,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	1,5	1,5	2		2,5		3		3,5		4		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	100	100	100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					664.905.603,00		675.925.518,00		656.732.713,00		646.769.127,00		615.202.174,00	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)	1.09	1.09	1.50	664.905.603,00	1.97	675.925.518,00	2.32	656.732.713,00	3.00	646.769.127,00	4.25	615.202.174,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	100	100	100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					25.370.000,00		30.125.500,00		35.200.200,00		38.740.100,00		45.100.100,00	
Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak (%)	50	58.33	66.67	25.370.000,00	75	30.125.500,00	83.33	35.200.200,00	91.67	38.740.100,00	100	45.100.100,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.738.376.570,00		4.759.075.697,00		4.773.101.750,00		4.793.274.865,00		4.809.855.179,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.938.380.970,00		3.959.080.097,00		3.973.106.150,00		3.993.279.265,00		4.009.859.579,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.938.380.970,00	100	3.959.080.097,00	100	3.973.106.150,00	100	3.993.279.265,00	100	4.009.859.579,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					513.754.300,00		513.754.300,00		513.754.300,00		513.754.300,00		513.754.300,00	
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase ARG (%)	35	35	40	513.754.300,00	45	513.754.300,00	50	513.754.300,00	55	513.754.300,00	60	513.754.300,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					210.241.300,00		210.241.300,00		210.241.300,00		210.241.300,00		210.241.300,00	
Peningkatan Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Yang Dilayani (%)	100	100	100	210.241.300,00	100	210.241.300,00	100	210.241.300,00	100	210.241.300,00	100	210.241.300,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Partisipasi dan Potensi Anak Melalui Forum Anak Daerah	Indeks Perlindungan Anak (%)	65.00	65.40	65.50	58.000.000,00	65.60	58.000.000,00	65.70	58.000.000,00	65.80	58.000.000,00	65.90	58.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pembentukan Forum Anak Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Peningkatan Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.431.005.657,00		2.437.675.375,00		2.448.639.326,00		2.455.139.552,00		2.460.482.097,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.089.112.693,00		2.095.782.411,00		2.096.746.362,00		2.103.246.588,00		2.108.589.133,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.089.112.693,00	100	2.095.782.411,00	100	2.096.746.362,00	100	2.103.246.588,00	100	2.108.589.133,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					222.440.564,00		222.440.564,00		232.440.564,00		232.440.564,00		232.440.564,00	
Penguatan Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) (Skor)	77	79.8	82.5	222.440.564,00	85.2	222.440.564,00	87.9	232.440.564,00	90.5	232.440.564,00	93.5	232.440.564,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					83.509.400,00		83.509.400,00		83.509.400,00		83.509.400,00		83.509.400,00	
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	13.08	9.35	7.48	83.509.400,00	5.61	83.509.400,00	3.74	83.509.400,00	0	83.509.400,00	0	83.509.400,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					35.943.000,00		35.943.000,00		35.943.000,00		35.943.000,00		35.943.000,00	
Meningkatnya Keamanan Pangan Segar	Persentase Peningkatan Keamanan Pangan (%)	100	100	100	35.943.000,00	100	35.943.000,00	100	35.943.000,00	100	35.943.000,00	100	35.943.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Kepemilikan Akta Tanah	Persentase Jumlah Tanah yang Bersertifikat (%)	0.00	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.457.546.555,00		4.475.945.779,00		4.506.191.160,00		4.524.122.817,00		4.538.860.874,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.984.368.125,00		3.048.290.629,00		2.941.012.730,00		3.075.343.367,00		2.953.664.744,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	97	100	100	2.984.368.125,00	100	3.048.290.629,00	100	2.941.012.730,00	100	3.075.343.367,00	100	2.953.664.744,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					145.875.700,00		145.875.700,00		145.875.700,00		165.000.000,00		85.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Rencana Penataan, Perlindungan dan Pengelolaang Lingkungan Hidup/Terwujudnya Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Penataan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	0	12.55	25.16	145.875.700,00	37.76	145.875.700,00	50.34	145.875.700,00	84	165.000.000,00	100	85.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					93.153.500,00		93.153.500,00		93.153.500,00		93.153.500,00		103.153.500,00	
Optimalisasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	50	55	55	93.153.500,00	55	93.153.500,00	63	93.153.500,00	75	93.153.500,00	87.5	103.153.500,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					44.950.000,00		44.950.000,00		44.950.000,00		44.950.000,00		64.950.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Area Konservasi dan RTH (%)	29.93	30.43	30.93	44.950.000,00	31.43	44.950.000,00	31.93	44.950.000,00	32.43	44.950.000,00	32.93	64.950.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					10.150.000,00		10.150.000,00		10.150.000,00		10.150.000,00		10.150.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil B3 dan LB3 (%)	6.25	10.02	15.63	10.150.000,00	18.23	10.150.000,00	20.83	10.150.000,00	23.44	10.150.000,00	26.04	10.150.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Menindaklanjuti Arahan dan atau Teguran Hasil Pengawasan (%)	23	25	28	21.000.000,00	30	22.000.000,00	33	23.000.000,00	35	24.000.000,00	40	25.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terwujudnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait denfan PPLH	Persentase Proses Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	0	0	0	10.000.000,00	25	10.000.000,00	50	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					70.000.000,00		70.000.000,00		160.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	0	0	14.29	70.000.000,00	35.71	70.000.000,00	57.14	160.000.000,00	78.57	70.000.000,00	100	70.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					41.416.000,00		41.416.000,00		41.416.000,00		41.416.000,00		41.416.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan yang Diraih di Tkt. Provinsi atau Nasional (%)	50	50	50	41.416.000,00	50	41.416.000,00	50	41.416.000,00	50	41.416.000,00	50	41.416.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					5.075.000,00		5.075.000,00		5.075.000,00		5.075.000,00		5.075.000,00	
Optimalisasi Penanganan Pengaduan LH	Persentase Penurunan Pengaduan Masyarakat yang Terkait Dugaan Kasus Lingkungan (%)	13	15	17	5.075.000,00	20	5.075.000,00	23	5.075.000,00	25	5.075.000,00	30	5.075.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.031.558.230,00		985.034.950,00		1.031.558.230,00		985.034.950,00		1.170.451.630,00	
Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola (%)	57.15	57.29	57.61	1.031.558.230,00	57.84	985.034.950,00	58.21	1.031.558.230,00	58.45	985.034.950,00	58.64	1.170.451.630,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.070.828.366,00		3.078.878.027,00		3.122.110.381,00		3.099.955.481,00		3.106.403.381,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.830.828.366,00		2.733.878.027,00		2.782.110.381,00		2.764.955.481,00		2.776.403.381,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.830.828.366,00	100	2.733.878.027,00	100	2.782.110.381,00	100	2.764.955.481,00	100	2.776.403.381,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					185.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		240.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	90	95	95	185.000.000,00	95	255.000.000,00	95	255.000.000,00	95	240.000.000,00	95	200.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIIL
	Rate Nett Recent Migration (%)	2.58	2.60	2.62		2.64		2.66		2.68		2.70		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					30.000.000,00		45.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil (%)	90	95	95	30.000.000,00	95	45.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	75.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					25.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Meningkatkan Kualitas Penyajian Informasi Data Adminduk yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Integrasi Data yang Sesuai Regulasi dan Tepat Waktu (%)	90	95	95	25.000.000,00	95	45.000.000,00	95	45.000.000,00	95	55.000.000,00	95	55.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDCATATAN SIPIIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.761.102.125,00		2.768.001.834,00		2.779.343.852,00		2.786.068.223,00		2.791.594.995,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.433.815.175,00		2.470.388.734,00		2.453.309.752,00		2.439.821.023,00		2.462.317.995,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.433.815.175,00	100	2.470.388.734,00	100	2.453.309.752,00	100	2.439.821.023,00	100	2.462.317.995,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					231.686.950,00		206.482.100,00		227.724.100,00		240.931.200,00		234.872.000,00	
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintah Desa	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Persentase Desa yang Melakukan Pelaporan Profil Desa (%)	100	100	100	231.686.950,00	100	206.482.100,00	100	227.724.100,00	100	240.931.200,00	100	234.872.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					95.600.000,00		91.131.000,00		98.310.000,00		105.316.000,00		94.405.000,00	
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Desa	Rasio Partisipasi Lembaga Desa dalam Pembangunan, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif dalam Pembangunan (%)	100	100	100	95.600.000,00	100	91.131.000,00	100	98.310.000,00	100	105.316.000,00	100	94.405.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	10	10	10		10		10		10		10		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase KB Aktif (%)	0	100	100		100		100		100		100		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					36.545.500,00		36.545.500,00		36.545.500,00		36.545.500,00		36.545.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Ketahanan Keluarga (Prov. Sulut) (%)	0	62	63	36.545.500,00	64	36.545.500,00	65	36.545.500,00	66	36.545.500,00	67	36.545.500,00	2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Lansia Berdaya (%)	50	50	60		70		80		90		100		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja (%)	50	50	60		70		80		90		100		2.14.2.08.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.312.397.691,00		2.318.722.424,00		2.329.119.274,00		2.335.283.281,00		2.340.349.488,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.144.397.691,00		2.094.722.424,00		2.173.719.274,00		2.112.783.281,00		2.150.349.488,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,00	99,00	99,00	2.144.397.691,00	99,00	2.094.722.424,00	99,00	2.173.719.274,00	99,00	2.112.783.281,00	99,00	2.150.349.488,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					168.000.000,00		224.000.000,00		155.400.000,00		222.500.000,00		190.000.000,00	
Meningkatnya Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan (%)	65,00	60,00	50,00	168.000.000,00	40,00	224.000.000,00	30,00	155.400.000,00	20,00	222.500.000,00	10,00	190.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Ratio Konektivitas Kab/Kota (Rasio)	0,59	0,59	0,59		0,59		0,59		0,59		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN		
	Jumlah Titik Parkir yang Berfungsi Baik (Titik)	5,00	5,00	5,00		6,00		6,00		7,00		7,00		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Kualitas Prasarana Perhubungan Meningkat (%)	55,00	58,00	63,00		69,00		75,00		77,00		80,00		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.058.185.186,00		4.071.984.036,00		4.094.668.639,00		4.108.117.382,00		4.119.170.925,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.688.298.808,00		2.688.298.808,00		2.688.298.808,00		2.688.298.808,00		2.688.298.808,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.688.298.808,00	100	2.688.298.808,00	100	2.688.298.808,00	100	2.688.298.808,00	100	2.688.298.808,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					569.886.378,00		583.685.796,00		606.369.831,00		619.818.574,00		630.872.117,00	
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Daerah (%)	95	100	100	569.886.378,00	100	583.685.796,00	100	606.369.831,00	100	619.818.574,00	100	630.872.117,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					800.000.000,00		799.999.432,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya Layanan TIK dan Integrasi layanan Secara Elektronik	Persentase Layanan TIK dan Integrasi Layanan Secara Elektronik (%)	100	100	100	800.000.000,00	100	799.999.432,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					425.000.000,00		331.600.000,00		292.500.000,00		491.833.607,00		449.590.535,00	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					12.000.000,00		12.800.000,00		12.800.000,00		7.800.000,00		9.190.535,00	
Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (%)	40	40	50	12.000.000,00	80	12.800.000,00	85	12.800.000,00	85	7.800.000,00	90	9.190.535,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					112.000.000,00		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi (%)	0	0.3	0.5	112.000.000,00	0.7	-	1.2	-	1.5	-	1.7	-	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					24.000.000,00		58.800.000,00		-		146.700.000,00		-	
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	0	0	25	24.000.000,00	35	58.800.000,00	50	-	70	146.700.000,00	75	-	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					199.000.000,00		194.000.000,00		223.700.000,00		291.333.607,00		375.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	0	0	5	199.000.000,00	6.5	194.000.000,00	6.7	223.700.000,00	7	291.333.607,00	7.2	375.000.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					78.000.000,00		66.000.000,00		56.000.000,00		46.000.000,00		65.400.000,00	
UMKM Naik Kelas	Persentase Pertumbuhan Omzet UMKM yang Difasilitasi (%)	0.29	0.29	0.30	78.000.000,00	0.32	66.000.000,00	0.35	56.000.000,00	0.40	46.000.000,00	0.45	65.400.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.510.318.188,00		4.525.842.534,00		4.551.362.074,00		4.566.491.910,00		4.578.927.145,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.565.318.188,00		3.505.842.534,00		3.391.362.074,00		3.366.491.910,00		3.668.927.145,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.565.318.188,00	100	3.505.842.534,00	100	3.391.362.074,00	100	3.366.491.910,00	100	3.668.927.145,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					535.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	25	25	25	535.000.000,00	25	260.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	25	250.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		210.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	210.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	200.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					160.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan (%)	100	100	100	160.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	450.000.000,00	100	300.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					140.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase Jumlah Proyek Penanaman Modal yang Merealisasikan Investasinya (%)	24	25	30	140.000.000,00	35	250.000.000,00	40	300.000.000,00	45	250.000.000,00	50	150.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000,00		-		10.000.000,00		-		10.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dikelola Secara Elektronik (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	-	100	10.000.000,00	100	-	100	10.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3.208.651.062,00		3.220.150.577,00		3.239.053.940,00		3.250.261.226,00		3.259.473.511,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.046.345.170,00		2.062.845.170,00		2.057.845.170,00		2.069.052.456,00		2.078.264.741,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.046.345.170,00	100	2.062.845.170,00	100	2.057.845.170,00	100	2.069.052.456,00	100	2.078.264.741,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					293.911.524,00		293.911.524,00		300.779.600,00		300.779.600,00		300.779.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Orang)	107	127	142	293.911.524,00	147	293.911.524,00	152	300.779.600,00	157	300.779.600,00	157	300.779.600,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					718.262.968,00		713.262.483,00		730.297.770,00		730.297.770,00		730.297.770,00	
Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Sumber Daya Keolahragaan (%)	18	18	18	718.262.968,00	18	713.262.483,00	18	730.297.770,00	18	730.297.770,00	18	730.297.770,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.131.400,00		150.131.400,00		150.131.400,00		150.131.400,00		150.131.400,00	
Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan (Orang)	52	54	56	150.131.400,00	58	150.131.400,00	60	150.131.400,00	62	150.131.400,00	64	150.131.400,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik untuk Pembangunan Daerah	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi (%)	100	35	45	11.200.000,00	55	11.200.000,00	65	11.200.000,00	85	11.200.000,00	100	11.200.000,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Persandian dalam rangka Pengamanan Informasi Daerah	Pemenuhan Dokumen yang di Sandikan untuk Keamanan Informansi (%)	100	100	100	78.000,00	100	78.000,00	100	78.000,00	100	78.000,00	100	78.000,00	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					702.704.050,00		702.704.050,00		702.704.050,00		702.704.050,00		702.704.050,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					224.507.800,00		224.507.800,00		224.507.800,00		224.507.800,00		224.507.800,00	
Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Kebudayaan Yang Dikelola (%)	65.14	66.90	68.66	224.507.800,00	70.42	224.507.800,00	72.18	224.507.800,00	73.94	224.507.800,00	75.70	224.507.800,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		-		-		-		-	
Terwujudnya Pembinaan Sejarah	Persentase Data Sejarah Yang Ditata (%)	0	66.67	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					478.196.250,00		478.196.250,00		478.196.250,00		478.196.250,00		478.196.250,00	
Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola (Cagar Budaya)	4	4	4	478.196.250,00	4	478.196.250,00	4	478.196.250,00	4	478.196.250,00	4	478.196.250,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.896.485.090,00		2.909.134.557,00		2.929.928.256,00		2.942.256.271,00		2.952.388.685,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.371.485.090,00		2.384.134.557,00		2.404.928.256,00		2.417.256.271,00		2.427.388.685,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.371.485.090,00	100	2.384.134.557,00	100	2.404.928.256,00	100	2.417.256.271,00	100	2.427.388.685,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00	
Meningkatkan Kunjungan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	1218,00	1800,00	1800,00	525.000.000,00	1800,00	525.000.000,00	1800,00	525.000.000,00	1800,00	525.000.000,00	1800,00	525.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar (%)	68	70	72	230.000.000,00	74	230.000.000,00	76	230.000.000,00	78	230.000.000,00	80	230.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.316.181.868,00		5.339.410.889,00		5.377.595.682,00		5.500.234.399,00		5.418.841.196,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.916.181.868,00		3.039.410.889,00		2.977.595.682,00		3.100.234.399,00		3.218.841.196,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.916.181.868,00	100	3.039.410.889,00	100	2.977.595.682,00	100	3.100.234.399,00	100	3.218.841.196,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Meningkatnya Sarana Prasarana Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5870	5870	5871	1.100.000.000,00	5872	1.100.000.000,00	5873	1.100.000.000,00	5874	1.100.000.000,00	5875	1.100.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.200.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	130	130	140	1.200.000.000,00	150	1.100.000.000,00	155	1.200.000.000,00	160	1.200.000.000,00	162	1.000.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Layanan Perikanan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (%)	0	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.096.979.579,00		3.106.064.196,00		3.120.997.853,00		3.129.851.608,00		3.137.128.524,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.246.979.579,00		2.256.064.196,00		2.270.997.853,00		2.279.851.608,00		2.287.128.524,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.246.979.579,00	100	2.256.064.196,00	100	2.270.997.853,00	100	2.279.851.608,00	100	2.287.128.524,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					60.050.411,00		60.050.411,00		60.050.411,00		60.050.411,00		60.050.411,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang di Kembangkan (Objek Wisata)	2	2	2	60.050.411,00	2	60.050.411,00	2	60.050.411,00	2	60.050.411,00	2	60.050.411,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					539.949.589,00		539.949.589,00		539.949.589,00		539.949.589,00		539.949.589,00	
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Melalui Promosi	Jumlah Event Promosi Pariwisata (Event)	2	2	2	539.949.589,00	2	539.949.589,00	2	539.949.589,00	2	539.949.589,00	2	539.949.589,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Rasio subsektor Ekraf yang Dikembangkan (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					-		-		-		-		-	
Meningkatkan Jumlah Subsector Ekraf yang Dikembangkan					-		-		-		-		-	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					15.231.904.320,00		15.258.698.190,00		15.302.743.026,00		15.328.856.002,00		15.350.318.298,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.574.943.229,00		12.596.100.829,00		12.662.121.229,00		12.622.121.229,00		12.633.782.411,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	12.574.943.229,00	100	12.596.100.829,00	100	12.662.121.229,00	100	12.622.121.229,00	100	12.633.782.411,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.546.078.864,00		1.558.229.504,00		1.617.945.880,00		1.633.845.000,00		1.633.845.000,00	
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produktivitas Perkebunan (Kakao) (Kuintal/Ha)	4.4	4.4	4.4	1.546.078.864,00	4.8	1.558.229.504,00	5.2	1.617.945.880,00	5.6	1.633.845.000,00	6.34	1.633.845.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Perkebunan (Kelapa) (Kuintal/Ha)	1207.36	1207.59	1207.75		1207.98		1208.21		1208.44		1208.67		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabe Rawit) (Kuintal/Ha)	5.61	5.61	5.70		5.72		5.75		5.77		5.80		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura (Tomat) (Kuintal/Ha)	0	3.85	3.96		3.98		3.99		4.00		4.01		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung) (Kuintal/Ha)	0	55.01	55,15		55,17		55,20		55,25		55,30		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) (Kuintal/Ha)	55	55.15	55.20		55.23		55.25		55.27		55.30		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Alat Mesin Pertanian Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	76	78	79		80		81		82		83		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					348.643.000,00		307.128.630,00		168.643.000,00		175.000.000,00		170.000.000,00	
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan	72	73	75	348.643.000,00	76	307.128.630,00	77	168.643.000,00	78	175.000.000,00	79	170.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prasarana Pertanian (%)													
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					348.333.427,00		348.333.427,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak Terkena Penyakit (%)	9	8	7	348.333.427,00	6.2	348.333.427,00	6	370.000.000,00	5.9	370.000.000,00	5	370.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Ternak Terkena Penyakit Yang Tertangani (%)	12	11.85	11.5		11.1		10.75		10.3		9.5		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					103.905.800,00		113.905.800,00		134.032.917,00		162.889.773,00		162.889.773,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan Serangan OPT Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (%)	30	28	26	103.905.800,00	25	113.905.800,00	24	134.032.917,00	22	162.889.773,00	20	162.889.773,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					310.000.000,00		335.000.000,00		350.000.000,00		365.000.000,00		379.801.114,00	
Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyuluhan Pertanian (%)	83	84	85	310.000.000,00	86	335.000.000,00	87	350.000.000,00	88	365.000.000,00	89	379.801.114,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.393.821.230,00		4.679.061.503,00		4.662.516.547,00		4.393.993.869,00		4.437.253.869,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.254.173.919,00		3.558.351.169,00		3.167.711.169,00		3.395.683.869,00		3.170.053.869,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.254.173.919,00	100	3.558.351.169,00	100	3.167.711.169,00	100	3.395.683.869,00	100	3.170.053.869,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					39.800.000,00		54.200.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya Perusahaan yang Memiliki Izin	Persentase Perusahaan yang Memiliki Izin (%)	0	0	2	39.800.000,00	2	54.200.000,00	3	65.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					765.772.461,00		674.509.734,00		1.015.654.678,00		461.230.000,00		872.200.000,00	
Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	30	30	30	765.772.461,00	40	674.509.734,00	45	1.015.654.678,00	50	461.230.000,00	50	872.200.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					176.634.650,00		175.500.000,00		196.800.700,00		262.280.000,00		130.800.000,00	
Meningkatnya Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting	Persentase Stabilitas Harga Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	20	20	20	176.634.650,00	20	175.500.000,00	20	196.800.700,00	20	262.280.000,00	20	130.800.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					89.140.200,00		134.500.000,00		145.800.000,00		145.800.000,00		143.800.000,00	
Meningkatnya Komoditas Ekspor Daerah	Persentase Komoditas Ekspor Daerah (%)	0	0	0.1	89.140.200,00	1	134.500.000,00	1.2	145.800.000,00	1.5	145.800.000,00	2	143.800.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					68.300.000,00		82.000.600,00		71.550.000,00		64.000.000,00		55.400.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Kepatuhan Tertib Ukur (%)	33	33	36	68.300.000,00	38	82.000.600,00	40	71.550.000,00	50	64.000.000,00	50	55.400.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					182.400.000,00		7.800.000,00		91.800.000,00		177.800.000,00		190.600.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					177.400.000,00		-		86.000.000,00		172.000.000,00		184.800.000,00	
Meningkatkan Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri	Jumlah Kawasan Industri yang ditetapkan melalui Dokumen RPIK (Kawasan)	0	1	1	177.400.000,00	1	-	1	86.000.000,00	1	172.000.000,00	1	184.800.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					5.000.000,00		7.800.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00		5.800.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sinas	Persentase IKM yang Terdaftar Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINas) (%)	0	6	8.18	5.000.000,00	10	7.800.000,00	11.54	5.800.000,00	17.14	5.800.000,00	18	5.800.000,00	3.30.3.31.2.17.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					131.913.800,00		137.132.000,00		141.407.200,00		144.307.100,00		148.447.100,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					131.913.800,00		137.132.000,00		141.407.200,00		144.307.100,00		148.447.100,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang Ditingkatkan	0	0	25	131.913.800,00	50	137.132.000,00	75	141.407.200,00	100	144.307.100,00	100	148.447.100,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Kualitas SDMnya (%)															
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					23.914.148.195,00		24.016.608.876,00		24.185.037.839,00		24.284.894.756,00		24.366.967.311,00			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.860.988.729,00		20.900.790.047,00		20.998.124.657,00		21.155.463.033,00		21.168.759.535,00			
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Agenda Resmi yang Difasilitasi Dalam Setahun (%)	100	100	100	20.860.988.729,00	100	20.900.790.047,00	100	20.998.124.657,00	100	21.155.463.033,00	100	21.168.759.535,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
	Persentase OPD yang Menyampaikan LKJIP Tepat Waktu (%)	100	100	100				100				100			100	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.627.232.193,00		2.652.532.013,00		2.684.467.392,00		2.631.930.905,00		2.659.834.628,00			
Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Difasilitasi (%)	100	100	100	2.627.232.193,00	100	2.652.532.013,00	100	2.684.467.392,00	100	2.631.930.905,00	100	2.659.834.628,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu (%)	100	100	100				100				100			100	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Produk Hukum yan Ditetapkan (%)	100	100	100				100				100			100	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					425.927.273,00		463.286.816,00		502.445.790,00		497.500.818,00		538.373.148,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Optimalisasi Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tingkat Kematangan UKPBJ (Indeks)	40	40	40	425.927.273,00	40	463.286.816,00	40	502.445.790,00	40	497.500.818,00	40	538.373.148,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Program Pembangunan Daerah yang Dilaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					16.466.108.824,00		16.518.431.618,00		16.604.441.919,00		16.655.435.070,00		16.697.346.420,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.735.108.824,00		12.835.431.618,00		13.022.441.919,00		13.128.435.069,00		13.070.346.420,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	13.735.108.824,00	100	12.835.431.618,00	100	13.022.441.919,00	100	13.128.435.069,00	100	13.070.346.420,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					2.731.000.000,00		3.683.000.000,00		3.582.000.000,00		3.527.000.001,00		3.627.000.000,00	
Meningkatnya Dukungan Terhadap Kinerja DPRD sesuai Aturan dan Tepat Waktu	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap tugas dan Fungsi Anggota DPRD (%)	100	100	100	2.731.000.000,00	100	3.683.000.000,00	100	3.582.000.000,00	100	3.527.000.001,00	100	3.627.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					5.395.980.346,00		5.398.547.328,00		5.459.814.174,00		5.472.654.238,00		5.511.414.016,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.807.830.346,00		3.819.927.836,00		3.839.814.174,00		3.851.604.238,00		3.861.294.511,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.807.830.346,00	100	3.819.927.836,00	100	3.839.814.174,00	100	3.851.604.238,00	100	3.861.294.511,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					788.000.000,00		788.619.492,00		820.000.000,00		800.550.000,00		832.000.000,00	
Meningkatkan Capaian Kinerja Daerah	Rata-rata Kinerja IKU Daerah/RPJMD (%)	78	80	85	788.000.000,00	87	788.619.492,00	89	820.000.000,00	90	800.550.000,00	95	832.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					800.150.000,00		790.000.000,00		800.000.000,00		820.500.000,00		818.119.505,00	
Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja OPD dengan Predikat Sangat Tinggi (91% - 100%) (%)	94.58	94.90	95.22	800.150.000,00	95.53	790.000.000,00	95.85	800.000.000,00	96.17	820.500.000,00	96.48	818.119.505,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					179.037.173.312,00		179.206.264.968,00		179.299.843.610,00		179.306.229.397,00		179.471.588.230,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					176.810.220.595,00		176.954.312.251,00		177.004.890.893,00		176.986.801.518,00		177.131.934.669,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	176.810.220.595,00	100	176.954.312.251,00	100	177.004.890.893,00	100	176.986.801.518,00	100	177.131.934.669,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.242.345.817,00		1.257.345.817,00		1.284.345.817,00		1.303.820.979,00		1.318.820.980,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penurunan Temuan Terhadap LKPD (%)	0	0	0	1.242.345.817,00	0	1.257.345.817,00	0	1.284.345.817,00	0	1.303.820.979,00	0	1.318.820.980,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Realisasi Belanja dan Pendapatan sesuai dengan APBD (%)	100	100	100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	Ratio Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat Waktu (Rasio)	1	1	1		1		1		1		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ratio Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (Rasio)	1	1	1		1		1		1		1		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					475.324.950,00		480.324.950,00		489.324.950,00		494.324.950,00		494.550.631,00	
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Optimal	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	100	475.324.950,00	100	480.324.950,00	100	489.324.950,00	100	494.324.950,00	100	494.550.631,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					509.281.950,00		514.281.950,00		521.281.950,00		521.281.950,00		526.281.950,00	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Ratio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	509.281.950,00	100	514.281.950,00	100	521.281.950,00	100	521.281.950,00	100	526.281.950,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.458.033.163,00		6.486.781.951,00		6.404.914.717,00		6.432.932.932,00		6.455.961.146,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.365.252.063,00		5.388.267.543,00		4.899.914.717,00		4.924.914.717,00		4.934.914.717,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	98	100	100	5.365.252.063,00	100	5.388.267.543,00	100	4.899.914.717,00	100	4.924.914.717,00	100	4.934.914.717,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.092.781.100,00		1.098.514.408,00		1.505.000.000,00		1.508.018.215,00		1.521.046.429,00	
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Kepegawaian dan Layanan Kepagawaaian	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	100	100	100	1.092.781.100,00	100	1.098.514.408,00	100	1.505.000.000,00	100	1.508.018.215,00	100	1.521.046.429,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Pemenuhan Penataan ASN (%)	51	55	60		63		65		68		70		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					480.000.000,00		480.000.000,00		609.125.641,00		609.125.641,00		609.125.641,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					480.000.000,00		480.000.000,00		609.125.641,00		609.125.641,00		609.125.641,00	
Meningkatnya Kompetensi ASN Melalui Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	100	100	100	480.000.000,00	100	480.000.000,00	100	609.125.641,00	100	609.125.641,00	100	609.125.641,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					782.323.257,00		810.000.000,00		798.448.998,00		815.084.096,00		800.550.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					782.323.257,00		810.000.000,00		798.448.998,00		815.084.096,00		800.550.000,00	
Meningkatkan Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang Diikutkan dalam IGA (Inovasi)	34	37	41	782.323.257,00	46	810.000.000,00	50	798.448.998,00	55	815.084.096,00	55	800.550.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.005.744.552,00		8.031.533.466,00		8.073.876.999,00		8.098.981.319,00		8.119.614.599,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.327.719.567,00		6.197.719.567,00		6.267.719.567,00		6.297.719.567,00		6.067.719.567,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	95	95	6.327.719.567,00	95	6.197.719.567,00	96	6.267.719.567,00	96	6.297.719.567,00	96	6.067.719.567,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.125.610.685,00		1.231.399.599,00		1.206.678.670,00		1.201.782.990,00		1.452.416.270,00	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Akuntabel (%)	256.50	90	91	1.125.610.685,00	92	1.231.399.599,00	93	1.206.678.670,00	94	1.201.782.990,00	94	1.452.416.270,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					552.414.300,00		602.414.300,00		599.478.762,00		599.478.762,00		599.478.762,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi (%)	96.66	90	91	552.414.300,00	92	602.414.300,00	93	599.478.762,00	94	599.478.762,00	94	599.478.762,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
7.01 - KECAMATAN					11.766.585.898,00		11.778.016.416,00		11.796.836.358,00		11.808.946.400,00		11.818.102.416,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.681.085.898,00		11.689.516.416,00		11.710.336.358,00		11.711.446.400,00		11.716.602.416,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	95	96	2.145.744.472,00	97	2.147.239.409,00	97	2.149.696.846,00	98	2.148.153.793,00	98	2.149.351.260,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SANGKUB
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	98	98	98	3.127.497.198,00	98	3.129.912.096,00	98	3.133.881.802,00	98	3.136.235.332,00	98	3.138.169.702,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BINTAUNA
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	98	97	97	1.981.196.961,00	97	1.983.036.883,00	97	1.986.061.421,00	97	1.987.854.587,00	98	1.989.328.392,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	97.00	95.00	96.00	1.395.675.305,00	97.00	1.397.400.232,00	97.00	1.400.265.737,00	98.00	1.401.916.830,00	98.00	1.403.298.522,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan	95	95	96	1.024.468.845,00	97	1.026.239.771,00	97	1.032.150.888,00	98	1.031.876.810,00	98	1.033.295.348,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAIDIPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Daerah (%)													
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	95	96	2.006.503.117,00	97	2.005.688.025,00	97	2.008.279.664,00	98	2.005.409.048,00	98	2.003.159.192,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PINOGALUMAN
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.000.000,00		42.000.000,00		39.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00	
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	95	95	96	5.000.000,00	96	5.000.000,00	98	5.000.000,00	98	5.000.000,00	98	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BINTAUNA
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	95	97	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	0	0	78	6.000.000,00	80	6.000.000,00	83	6.000.000,00	85	8.000.000,00	87	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PINOGALUMAN
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	0	0	69	18.000.000,00	69	18.000.000,00	70	15.000.000,00	75	18.000.000,00	75	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAUDIPANG
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	60	60	60	3.000.000,00	65	3.000.000,00	65	3.000.000,00	65	4.000.000,00	70	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SANGKUB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Forum Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat (%)	97	97	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.250.000,00		20.250.000,00		21.250.000,00		23.250.000,00		23.250.000,00	
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	80	80	80	3.000.000,00	80	3.000.000,00	80	3.000.000,00	85	4.000.000,00	85	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SANGKUB
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	90	92	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	90	90	90	3.250.000,00	92	3.250.000,00	92	3.250.000,00	92	3.250.000,00	95	3.250.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BINTAUNA
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	0	0	75	3.000.000,00	77	3.000.000,00	79	3.000.000,00	80	3.000.000,00	85	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAIDIPANG
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	70	70	75	-	77	1.000.000,00	79	2.000.000,00	80	3.000.000,00	85	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PINOGALUMAN
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Menjaga Trantibum	Rasio Forum Trantibum yang Melibatkan Masyarakat (%)	92	92	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	92	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.250.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		29.250.000,00		31.250.000,00	
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	90	90	90	3.000.000,00	90	3.000.000,00	90	3.000.000,00	95	4.000.000,00	95	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SANGKUB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	95	97	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	75	75	77	2.000.000,00	78	4.000.000,00	80	4.000.000,00	85	6.000.000,00	87	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN PINOGALUMAN
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	0	0	80	6.000.000,00	80	6.000.000,00	83	6.000.000,00	85	6.000.000,00	85	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAIDIPANG
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	97	97	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	97	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR
Meningkatkan Bimbingan Pengawasan Pemerintah Desa	Rasio Pemerintah Desa di Wilayahnya yang Dibina (%)	90	90	90	3.250.000,00	92	3.250.000,00	92	3.250.000,00	92	3.250.000,00	95	3.250.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN BINTAUNA
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.886.659.568,00		2.902.528.899,00		2.928.615.540,00		2.944.081.594,00		2.956.793.168,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					955.400.436,00		971.269.767,00		997.356.408,00		1.012.822.462,00		997.203.066,00	
Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	955.400.436,00	100	971.269.767,00	100	997.356.408,00	100	1.012.822.462,00	100	997.203.066,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					838.045.600,00		838.045.600,00		838.045.600,00		838.045.600,00		846.376.570,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	3.89	4.00	4.04	838.045.600,00	4.10	838.045.600,00	4.16	838.045.600,00	4.22	838.045.600,00	4.28	846.376.570,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					607.813.632,00		607.813.632,00		607.813.632,00		607.813.632,00		607.813.632,00	
Penguatan Peran Parpol Melalui Edukasi Politik ke Masyarakat	Persentase Parpol yang Dibina (%)	100	100	100	607.813.632,00	100	607.813.632,00	100	607.813.632,00	100	607.813.632,00	100	607.813.632,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					485.399.900,00		485.399.900,00		485.399.900,00		485.399.900,00		505.399.900,00	
Penguatan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Forum Kerja Sama Antar Lembaga yang Dibina (Forum)	2	2	2	485.399.900,00	2	485.399.900,00	2	485.399.900,00	2	485.399.900,00	2	505.399.900,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					603.235.770.416,00		604.485.721.937,00		606.386.058.220,00		607.516.786.804,00		608.447.915.377,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan memperhatikan juga dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 menjadi periode pertama pentahapan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengimplementasikan Visi “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Berdaya Saing”. Bagian penutup ini hendak mendeskripsikan pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2025-2029, maka dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada pemerintahan Kepala Daerah yang baru. Untuk target tahun

pertama masa pembangunan yang telah tercapai pada periode sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD periode selanjutnya

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2025-2029 serta masa transisi tahun 2030;
2. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara;
4. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dengan Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis PD, dan melakukan harmonisasi program

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;

6. Dalam hal pelaksanaan RPJMD tersebut, apabila target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen ini, pelaksanaan pembangunan akan disertai dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan, serta sebagai alat koreksi terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi di lapangan. Pengendalian yang berkelanjutan dan tersistem akan menghadirkan jaminan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berkelanjutan berhubungan dengan cakupan linieritas waktu dalam implementasi strategi pengendalian; sedangkan sistem pengendalian terbuka pada segala inovasi yang memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan integratif/terpadu.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perlu menjadi tuan rumah yang mengatur tata kelola data terutama yang berhubungan dengan jenis indikator dan pengukuran target capaiannya sesuai dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sisi lain, bantuan generasi dan produksi data, identifikasi data, bahkan pengukuran dan penghitungan capaian target sebaiknya dibantu oleh instansi yang bertanggung jawab atas urusan tata kelola data. Detail kerangka pengendalian RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Mengacu pada ruang lingkup pengendalian nasional dan provinsi, strategi pengendalian RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 mencakup dua bagian:

- a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap ini bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang mencakup:
- 1) Penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dan RPJMD ke dokumen rencana jangka menengah PD, melalui renstra;
 - 2) Kesiapan desain proyek prioritas penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
 - 3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 - 4) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
- Pengendalian jangka pendek mencakup :
- 1) Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek PD melalui renja;
 - 2) Kesiapan desain proyek prioritas, penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
 - 3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 - 4) Identifikasi risiko perencanaan mitigasinya.
- b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:
- 1) Pemantauan pelaksanaan proyek prioritas;
 - 2) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
 - 3) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
 - 4) Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tataran regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Strategi pengendalian ini perlu dilaksanakan secara spesifik oleh unit kerja tertentu dalam sebuah tim kerja pelaksanaan dokumen perencanaan daerah tersebut. Demikian, kerangka kelembagaan pengendalian yang integratif perlu dikembangkan. Karakter dasar dari pelembagaan pelaksanaan pengendalian ini tak lain adalah sinergis integratif yang menata pengendalian lintas dan internal PD.

- a) Sasaran dan indikator strategis/program Renstra PD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja kementerian/lembaga (Renja PD). Sedangkan, tujuan dan sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD;
- b) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja dan sasaran program RKPD. Indikator prioritas pembangunan Daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja PD;
- c) Dokumen RPJMD dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, Rencana Aksi atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir pada tahun 2029, langkah yang dilakukan adalah :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru;

3. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama (tahun 2030) dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilu pada periode berikutnya.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA